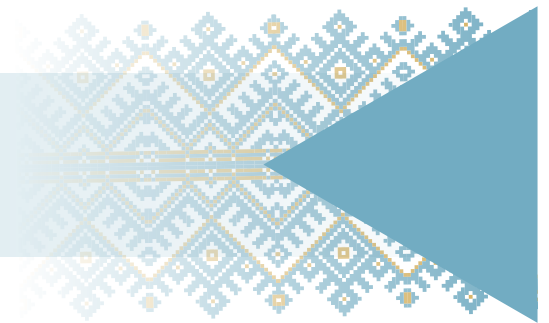
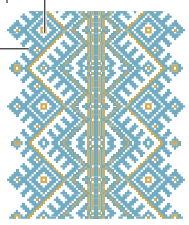


LAPORAN TRIWULANAN
TRIWULAN I - 2017



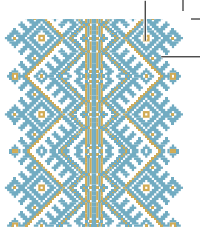


ii

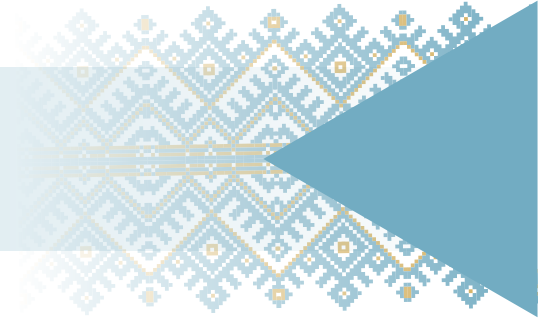
Laporan Triwulanan
Otoritas Jasa Keuangan

Laporan Triwulanan ini diterbitkan oleh
Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia.
Versi digital (PDF) dapat diunduh melalui
www.ojk.go.id

Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Soemitro Djohadikusumo Lantai 4
Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4 Jakarta 10710
Phone. (021) 29600000
fax. (021) 386 6032
email: konsumen@ojk.go.id



Kata Pengantar



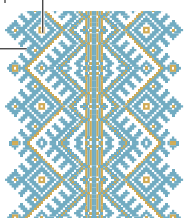
Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa bahwa atas perkenan dan bimbingan-Nya kita dapat melewati tahun 2016 dengan cukup baik dan menyambut tahun 2017 dengan penuh rasa optimis, bahwa perekonomian akan terus bergerak positif dan OJK dapat senantiasa meningkatkan kinerjanya dalam mengemban tanggung jawab sebagai regulator dan pengawas sektor jasa keuangan di Indonesia.

Selama triwulan I-2017, perekonomian global mengalami perbaikan didukung oleh semakin menguatnya perekonomian AS serta prospek perekonomian Eropa dan Jepang yang terus membaik. Sebaliknya, perekonomian *Emerging Markets* (EM) belum menunjukkan tren perbaikan yang solid dan dibayangi risiko penurunan harga komoditas. Ke depan, beberapa risiko global perlu terus diwaspadai, di antaranya tekanan inflasi negara maju yang mulai meningkat, kelanjutan kenaikan *Fed Funds Rate*, dan risiko geopolitik kawasan, yang dapat mempengaruhi tren pertumbuhan positif perekonomian global.

Pertumbuhan ekonomi domestik triwulan I-2017 tumbuh sebesar 5,01% yoy, meningkat

dari pertumbuhan triwulan sebelumnya sebesar 4,94% yoy. Pertumbuhan tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yaitu sebesar 4,92% yoy. Perbaikan tersebut ditopang oleh pertumbuhan sebagian besar lapangan usaha kecuali pertambangan dan penggalian. Perbaikan pertumbuhan ekonomi juga didorong oleh perbaikan kinerja eksternal di mana ekspor tumbuh lebih tinggi dibandingkan impor. Perbaikan kinerja ekspor terutama dipengaruhi membaiknya harga komoditas, seperti batubara dan minyak kelapa sawit, serta meningkatnya pertumbuhan ekonomi global.

Tingkat inflasi berada pada level 3,61% yoy, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya. Tingkat inflasi cenderung berada pada level rendah, didorong oleh penurunan dari sisi *volatile food* akibat panen raya dan tingkat inflasi inti (*core inflation*) yang masih melanjutkan tren melambat. Kinerja perdagangan eksternal terpantau meningkat, sehingga neraca perdagangan Indonesia membukukan surplus sebesar USD1,23 miliar. Persepsi risiko dan prospek perekonomian domestik cenderung membaik, seiring dengan mulai membaiknya perekonomian global.



Kata Pengantar

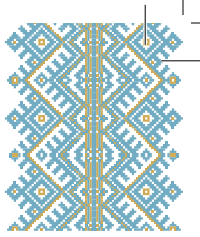
Sejalan dengan berkurangnya risiko ketidakpastian global serta persepsi positif investor terhadap perekonomian domestik, pasar keuangan domestik sepanjang triwulan I-2017 juga bergerak menguat. Hal ini ditandai dengan berlanjutnya aliran masuk modal investor nonresiden yang berdampak positif bagi perkembangan pasar saham, pasar Surat Berharga Negara (SBN), dan nilai tukar Rupiah. Selama triwulan I-2017, IHSG mencatat pertumbuhan sebesar 5,12% *qtq* yang disertai oleh *net buy* investor nonresiden baik pada pasar saham maupun SBN.

Pada triwulan I-2017, secara umum kondisi Bank Umum Konvensional (BUK) masih terjaga baik, di mana aset dan DPK tumbuh masing-masing 0,28% dan 0,16%. Di sisi lain, fungsi intermediasi mengalami perlambatan dengan pertumbuhan kredit turun sebesar 1,58% (*qtq*). Namun demikian, ketahanan BUK masih cukup solid ditopang permodalan yang kuat dengan CAR mencapai 23,47%. Sementara itu, profitabilitas BUK cukup stabil dengan ROA sebesar 2,35% dan BOPO yang turun menjadi 81,69%.

Perkembangan industri Pasar Modal Indonesia pada triwulan I-2017 menunjukkan peningkatan

dipengaruhi oleh optimisme pertumbuhan ekonomi global serta kenaikan harga komoditas dunia. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada penutupan akhir triwulan I-2017 berada pada posisi 5.568,11 atau mengalami kenaikan sebesar 5,12% jika dibandingkan triwulan sebelumnya. Nilai kapitalisasi pasar saham juga mengalami kenaikan sebesar 5,24% dibandingkan posisi triwulan sebelumnya. Membaiknya kondisi ekonomi makro serta IHSG memberi dampak positif bagi kinerja Reksa Dana. Hal ini terlihat dari Pertumbuhan Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana pada triwulan I-2017 meningkat sebesar 7,58% menjadi Rp364,42 triliun. Seiring dengan hal tersebut, kinerja IKNB juga mengalami pertumbuhan positif. Hal ini tercermin dari total aset IKNB yang naik 4,50% menjadi Rp1.945,40 triliun.

Pada bidang pengaturan, OJK menerbitkan 12 peraturan OJK (POJK) untuk memperkuat sektor jasa keuangan di mana satu POJK mengatur sektor Perbankan, tujuh POJK mengatur sektor Pasar Modal, dan empat POJK mengatur sektor IKNB. Pada bidang pengawasan, beberapa kegiatan strategis dilakukan dalam rangka pengembangan sektor jasa keuangan antara lain peluncuran Program AKSI Pangan untuk



mendukung pembiayaan pada sektor pertanian, pengembangan Program 1000 Aktuaris dalam rangka mempercepat jumlah aktuaris sehingga perkiraan kebutuhan profesional aktuaris dapat terpenuhi serta pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) untuk mendukung pembiayaan Ekonomi Kreatif.

Pada bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, OJK berupaya meningkatkan inklusi keuangan melalui program-program strategis antara lain peresmian Pusat Edukasi, Layanan Konsumen dan Akses Keuangan UMKM (PELAKU) di enam Kantor Regional (KR) dan Kantor OJK (KOJK), pelaksanaan *coaching clinic* TPAKD di tiga lokasi Kantor Regional dan Kantor OJK dan *OJK Goes To School* dalam rangka meningkatkan literasi keuangan untuk kelompok pelajar/siswa tingkat SD, SMP, SMA dan SMK.

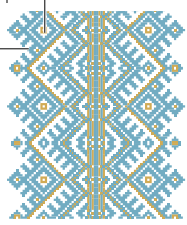
Dalam rangka pengembangan kapasitas manajemen internal, OJK berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai pengembangan kompetensi, penyempurnaan *Standard Operating Procedure* (SOP) dan pemenuhan kebutuhan infrastruktur penunjang operasional. Terkait hal tersebut, OJK melaksanakan pengembangan infrastruktur

untuk mendukung pengawasan sektor jasa keuangan melalui pengembangan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), Sistem Perizinan Terintegrasi dan Sistem Aplikasi Pengawasan dan *Monitoring*.

Selanjutnya, dengan segenap sumber daya yang dimiliki, OJK akan selalu berupaya untuk menyempurnakan proses dan meningkatkan kinerja dalam rangka mewujudkan industri keuangan nasional yang kontributif, stabil dan inklusif. OJK juga senantiasa bekerja sama dan berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan seperti Pemerintah, DPR dan lembaga terkait lainnya untuk menciptakan industri jasa keuangan nasional yang kompetitif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Apresiasi setinggi-tingginya kami berikan bagi para pegawai yang telah menjalankan tugas dengan baik dan selalu menjunjung tinggi nilai-nilai strategis institusi.

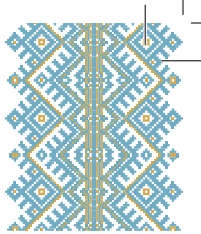
**Ketua Dewan Komisiner
Otoritas Jasa Keuangan**

Muliaman D. Hadad, Ph.D

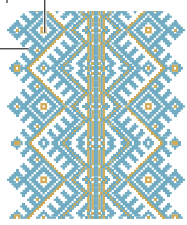


DAFTAR ISI

iii	KATA PENGANTAR
vi	DAFTAR ISI
viii	DAFTAR TABEL
x	DAFTAR GRAFIK
xi	DAFTAR GAMBAR
xiii	RINGKASAN EKSEKUTIF
1	BAB I. TINJAUAN INDUSTRI SEKTOR JASA KEUANGAN
3	1.1 PERKEMBANGAN EKONOMI INDONESIA DAN DUNIA
3	1.1.1 Perkembangan Ekonomi Global
5	1.1.2 Perkembangan Ekonomi Domestik
6	1.1.3 Perkembangan Pasar Keuangan
7	1.2 PERKEMBANGAN INDUSTRI PERBANKAN
7	1.2.1 Perkembangan Bank Umum Konvensional
10	1.2.2 Perkembangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR)
12	1.2.3 Perkembangan Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
13	1.2.4 Penguatan Sektor Riil Melalui Penyaluran Kredit Produktif
16	1.3 PERKEMBANGAN INDUSTRI PASAR MODAL
16	1.3.1 Perkembangan Perdagangan Efek
19	1.3.2 Perkembangan Pengelolaan Investasi
21	1.3.3 Perkembangan Emiten dan Perusahaan Publik
24	1.3.4 Perkembangan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal
26	1.4 PERKEMBANGAN INDUSTRI KEUANGAN NON BANK
27	1.4.1 Perkembangan Perasuransian Konvensional dan BPJS
28	1.4.2 Perkembangan Industri Dana Pensiun
30	1.4.3 Perkembangan Industri Perusahaan Pembiayaan
32	1.4.4 Perkembangan Industri Perusahaan Modal Ventura
33	1.4.5 Perkembangan Industri Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur
34	1.4.6 Perkembangan Industri Jasa Keuangan Khusus
37	1.4.7 Perkembangan Industri Jasa Penunjang IKNB
38	1.4.8 Perkembangan Industri Lembaga Keuangan Mikro
38	1.5 PERKEMBANGAN PROGRAM <i>FLAGSHIP</i> OJK
38	1.5.1 Layanan Keuangan Tanpa Kantor (LAKU PANDAI)
39	1.5.2 Jangkau, Sinergi, dan <i>Guideline</i> (JARING)
40	1.5.3 Simpanan Pelajar (SIMPEL)
40	1.5.4 Efek Beragun Aset - Surat Partisipasi (EBA SP)
40	1.5.5 Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)
40	1.5.6 Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS)
41	1.5.7 Asuransi Nelayan
41	1.5.8 Asuransi Kerangka Kapal
43	BAB II. TINJAUAN OPERASIONAL SEKTOR JASA KEUANGAN
45	2.1 AKTIVITAS PENGATURAN
45	2.1.1 Pengaturan Bank
46	2.1.2 Pengaturan Pasar Modal
48	2.1.3 Pengaturan IKNB
49	2.2 AKTIVITAS PENGAWASAN
49	2.2.1 Pengawasan Perbankan
53	2.2.2 Pengawasan Pasar Modal
58	2.2.3 Pengawasan IKNB
67	2.3 AKTIFITAS PENGEMBANGAN
67	2.3.1 Pengembangan Industri Perbankan
67	2.3.2 Pengembangan Industri Pasar Modal
68	2.3.3 Pengembangan IKNB
69	2.4 STABILITAS SISTEM KEUANGAN



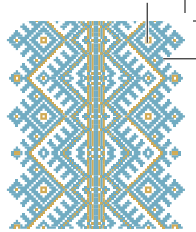
2.4.1	Pasar Keuangan dan Lembaga Jasa Keuangan	69
2.4.2	Respons Kebijakan	71
2.5	EDUKASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	71
2.5.1	Inklusi Keuangan	71
2.5.2	Literasi dan Edukasi Keuangan	74
2.5.3	Perlindungan Konsumen	76
2.6	PENYIDIKAN SEKTOR JASA KEUANGAN	80
2.6.1	Koordinasi dengan Instansi Terkait	80
2.6.2	Penanganan Perkara	80
2.6.3	Sosialisasi Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan	80
2.6.4	Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi (Satgas Waspada Investasi)	80
2.7	HUBUNGAN KELEMBAGAAN	81
2.7.1	Kerjasama Domestik	82
2.7.2	Kerjasama Internasional	82
2.8	HUBUNGAN KOORDINASI KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER	84
BAB III.	TINJAUAN INDUSTRI DAN OPERASIONAL SEKTOR JASA KEUANGAN SYARIAH	85
3.1	TINJAUAN INDUSTRI KEUANGAN SYARIAH	87
3.1.1	Perkembangan Perbankan Syariah	87
3.1.2	Perkembangan Pasar Modal Syariah	89
3.1.3	Perkembangan IKNB Syariah	92
3.2	PENGATURAN SEKTOR JASA KEUANGAN SYARIAH	93
3.2.1	Pengaturan Perbankan Syariah	93
3.2.2	Pengaturan Pasar Modal Syariah	94
3.2.3	Pengaturan IKNB Syariah	94
3.3	PENGAWASAN SEKTOR JASA KEUANGAN SYARIAH	94
3.3.1	Pengawasan Perbankan Syariah	94
3.3.2	Pengawasan Pasar Modal Syariah	95
3.3.3	Pengawasan IKNB Syariah	96
3.4	PENGEMBANGAN SEKTOR JASA KEUANGAN SYARIAH	96
3.4.1	Pengembangan Perbankan Syariah	96
3.4.2	Pengembangan Pasar Modal Syariah	98
3.4.3	Pengembangan IKNB Syariah	99
BAB IV.	MANAJEMEN STRATEGIS DAN TATA KELOLA ORGANISASI	101
4.1	MANAJEMEN STRATEGI DAN KINERJA OJK	103
4.1.1	Pelaksanaan Siklus Manajemen Strategi dan Kinerja	103
4.1.2	Pelaksanaan Sasaran Strategis OJK	104
4.2	AUDIT INTERNAL, MANAJEMEN RISIKO, DAN PENGENDALIAN KUALITAS	104
4.2.1	Penguatan Pengendalian Kualitas Tata Kelola OJK	104
4.2.2	<i>Monitoring</i> Implementasi Tindak Lanjut <i>Grand Design</i> AIMRPK	105
4.2.3	Mitigasi Risiko	105
4.2.4	Program Pengendalian Gratifikasi dan <i>Whistle Blowing System</i>	105
4.3	RAPAT DEWAN KOMISIONER	106
4.4	KOMUNIKASI	107
4.4.1	Komunikasi Informasi OJK	107
4.4.2	Kunjungan Instansi	108
4.4.3	OJK TV	109
4.5	KEUANGAN	109
4.5.1	Realisasi Anggaran dan Penggunaan	109
4.5.2	Penyempurnaan Pengelolaan Keuangan	109
4.6	SISTEM INFORMASI	110
4.6.1	Penguatan Sistem Informasi untuk Mendukung Pelaksanaan Tugas Pokok	110
4.6.2	Penguatan Sistem Informasi untuk Meningkatkan Kapasitas Organisasi	110
4.7	LOGISTIK	111
4.7.1	Penyiapan Gedung Kantor Pusat	111
4.7.2	Penyiapan Gedung Kantor Regional/OJK	111



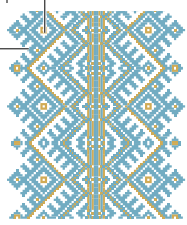
111		4.7.3	Pengembangan Sistem Logistik dan Pengaturan
111	4.8	SUMBER DAYA MANUSIA DAN TATA KELOLA ORGANISASI	
111		4.8.1	Pengelolaan Sumber Daya Manusia
112		4.8.2	Pengembangan Organisasi
113		4.8.3	Pengembangan Kebijakan Sumber Daya Manusia
113	4.9	OJK INSTITUTE	
113		4.9.1	Program Pengembangan Kompetensi
114		4.9.2	Program Pendidikan Formal
114		4.9.3	Program Program Pengenalan Calon Pegawai
115		4.9.4	Program Penugasan
115		4.9.5	Program Pelatihan Persiapan Masa Purnabakti
115		4.9.6	Program Peningkatan Kompetensi SDM Sektor Jasa Keuangan
115		4.9.7	Program Asesmen
115		4.9.8	Program Kaji Ulang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)
115		4.9.9	Praktek Kerja Lapangan dan Penelitian di OJK
116	4.10	MANAJEMEN PERUBAHAN	
116		4.10.1	Program Budaya
117		4.10.2	<i>Monitoring</i> Program Budaya
117		4.10.3	Media Komunikasi Budaya dan Perubahan
119			AKRONIM

DAFTAR TABEL

8	Tabel I.1	Kondisi Umum Perbankan Konvensional
10	Tabel I.2	Kondisi Umum BPR
11	Tabel I.3	Porsi Kredit BPR
12	Tabel I.4	Konsentrasi Penyaluran UMKM
13	Tabel I.5	Porsi UMKM berdasarkan Kelompok Bank
14	Tabel I.6	PDB per Sektor Ekonomi
14	Tabel I.7	Konsentrasi Kredit Perbankan Menurut Sektor Ekonomi (%)
17	Tabel I.8	Perkembangan Transaksi Perdagangan Saham
18	Tabel I.9	Perkembangan Transaksi Perdagangan Surat Hutang (laporan CTP PLTE)
18	Tabel I.10	Jumlah Perusahaan Efek
18	Tabel I.11	Jumlah Lokasi Kegiatan PE Selain Kantor Pusat
19	Tabel I.12	Proses Izin Wakil Perantara Pedagang Efek dan Wakil Penjamin Emisi Efek
19	Tabel I.13	Proses Perpanjangan Izin Wakil Perantara Pedagang Efek dan Wakil Penjamin Emisi Efek
19	Tabel I.14	Proses Perizinan Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran dan Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran Terbatas
20	Tabel I.15	Perkembangan NAB per Jenis Reksa Dana
20	Tabel I.16	Perkembangan Reksa Dana dan Produk Investasi Lainnya
20	Tabel I.17	Jenis Reksa Dana Yang Mendapat Surat Efektif
21	Tabel I.18	Perkembangan Pelaku di Industri Pengelolaan Investasi yang Memperoleh Izin
21	Tabel I.19	Perkembangan Penawaran Umum (Emisi)
22	Tabel I.20	Tabel Perkembangan Nilai Emisi Berdasarkan Sektor Industri pada Triwulan I-2017
22	Tabel I.21	Perusahaan Yang Melakukan Penawaran Umum Perdana Saham
22	Tabel I.22	Perusahaan Yang Melakukan Penawaran Umum Terbatas
23	Tabel I.23	Perusahaan yang telah Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Utang
23	Tabel I.24	Perusahaan yang telah melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Utang
24	Tabel I.25	Rencana Penggunaan Dana Atas Aksi Korporasi Pada Triwulan I-2017 Berdasarkan Sektor Industri
24	Tabel I.26	Jumlah Lembaga Penunjang Pasar Modal
25	Tabel I.27	Data Lengkap Komposisi Peringkat Perusahaan yang Masuk Kategori <i>Investment Grade</i> Dan <i>Non Investment Grade</i>
26	Tabel I.28	Perkembangan Profesi Penunjang Pasar Modal
26	Tabel I.29	Total Aset IKNB
27	Tabel I.30	Indikator Perusahaan Perasuransian Konvensional dan BPJS



Tabel I.31	Jumlah Industri Perusahaan Perasuransian Konvensional dan BPJS	28
Tabel I.32	Densitas dan Penetrasi Industri Perasuransian Konvensional dan BPJS	28
Tabel I.33	<i>Risk Based Capital (RBC)</i> Industri Asuransi	28
Tabel I.34	Distribusi Aset Industri Dana Pensiun	29
Tabel I.35	Distribusi Investasi Industri Dana Pensiun	29
Tabel I.36	Portofolio Investasi Dana Pensiun	29
Tabel I.37	Jumlah Dana Pensiun	30
Tabel I.38	Piutang Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan sektor Ekonomi	31
Tabel I.39	Indikator Kesehatan Keuangan Perusahaan Pembiayaan	31
Tabel I.40	NPF Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Sektor Ekonomi	31
Tabel I.41	Pembiayaan/Penyertaan Berdasarkan sektor Ekonomi	33
Tabel I.42	Pembiayaan Berdasarkan Jenis Infrastruktur	34
Tabel I.43	Indikator Keuangan Industri Jasa Penunjang IKNB	37
Tabel I.44	Jumlah Perusahaan Jasa Penunjang IKNB	38
Tabel I.45	Jumlah Lembaga Keuangan Mikro	38
Tabel I.46	Indikator Keuangan Lembaga Keuangan Mikro	38
Tabel I.47	Realisasi Laku Pandai Triwulan I-2017	38
Tabel I.48	NPL Kegiatan Usaha Kredit Maritim (%)	40
Tabel II.1	Pemeriksaan Khusus Bank	49
Tabel II.2	Produk dan Aktivitas Baru Perbankan Triwulan I-2017	50
Tabel II.3	<i>Track Record</i> Tindak Tipibank Triwulan I-2017	50
Tabel II.4	Statistik Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan	50
Tabel II.5	Pemberian Keterangan Ahli/Saksi Januari-Maret 2017	51
Tabel II.6	Perizinan Perubahan Jaringan Kantor BUK	51
Tabel II.7	Jaringan Kantor Bank Umum Konvensional	52
Tabel II.8	FPT Calon Pengurus dan PSP Bank Umum Selama Triwulan I-2017	52
Tabel II.9	Perizinan BPR	53
Tabel II.10	Daftar Hasil <i>Fit and Proper Test New Entry</i> BPR	53
Tabel II.11	Pengawasan Emiten dan Perusahaan Publik	55
Tabel II.12	Penyampaian Laporan Bulanan Perusahaan Asuransi dan Reasuransi	58
Tabel II.13	Penyampaian Laporan Bulanan Dana Pensiun	59
Tabel II.14	Pemeriksaan Lapangan Lembaga Pembiayaan	59
Tabel II.15	Hasil Pemeriksaan Langsung	59
Tabel II.16	LKM yang Mendapatkan Izin Usaha Penuh	60
Tabel II.17	LKM yang Mendapatkan Izin Usaha Bersyarat	60
Tabel II.18	<i>Progress</i> Pelayanan Kelembagaan dan Produk IKNB	61
Tabel II.19	Permohonan Izin Usaha IKNB	61
Tabel II.20	Rincian Pemberian Izin Usaha Bidang IKNB	61
Tabel II.21	Permohonan Pencabutan Izin Usaha	62
Tabel II.22	Penyelesaian Pencabutan Izin Usaha	62
Tabel II.23	Permohonan Rencana Kerja Likuidasi Dana Pensiun	62
Tabel II.24	Daftar Dana Pensiun yang telah Mendapat Persetujuan	62
Tabel II.25	Permohonan terkait Perubahan Kepemilikan, Anggaran Dasar, Pemegang Saham dan PDP	62
Tabel II.26	Permohonan Proses Merger dan Akuisisi	63
Tabel II.27	Daftar Perusahaan dengan Perubahan Nama	63
Tabel II.28	Permohonan terkait Kantor Cabang Perusahaan Asuransi, Pembiayaan, Modal Ventura dan Penjaminan	63
Tabel II.29	Pembukaan Kantor Pemasaran Selain Kantor Cabang	64
Tabel II.30	Permohonan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Pihak Utama IKNB	64
Tabel II.31	Permohonan Perubahan Pengurus IKNB	65
Tabel II.32	Pelaporan Syarat Keberlanjutan Pengurus IKNB	65
Tabel II.33	Pelaporan Tenaga Ahli IKNB	65
Tabel II.34	Pelaporan Penggunaan Tenaga Kerja Asing	65
Tabel II.35	Perizinan Produk Asuransi	66
Tabel II.36	Rekapitulasi Kegiatan Pelayanan Kelembagaan Jasa Penunjang IKNB selama Triwulan I 2017	66
Tabel II.37	Pendaftaran Profesi selama Triwulan I 2017	66
Tabel II.38	Jumlah Penetapan Hasil Pengujian Kemampuan dan Kepatutan (PKK) selama Triwulan I 2017	66



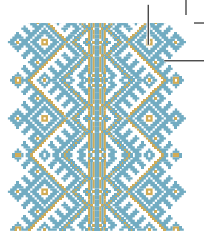
x

Laporan Triwulanan Otoritas Jasa Keuangan

66	Tabel II.39	Jumlah Perusahaan Penunjang Berdasarkan Jenis Usaha
76	Tabel II.40	Pelayanan Konsumen
77	Tabel II.41	Penerimaan Layanan per <i>Business Unit</i>
78	Tabel II.42	Materi FGD Strategi Perlindungan Konsumen Keuangan (SPKK)
88	Tabel III.1	Indikator Perbankan Syariah
89	Tabel III.2	Perkembangan Kapitalisasi Saham Syariah
90	Tabel III.3	Perkembangan Indeks Saham Syariah
90	Tabel III.4	Perkembangan Emisi Sukuk Korporasi
90	Tabel III.5	Perkembangan Reksa Dana Syariah
91	Tabel III.6	Perkembangan Surat Berharga Syariah Negara <i>Outstanding</i>
92	Tabel III.7	Aset IKNB Syariah
92	Tabel III.8	Indikator Perusahaan Perasuransian Syariah
93	Tabel III.9	Komponen Aset Perusahaan Pembiayaan Syariah

DAFTAR GRAFIK

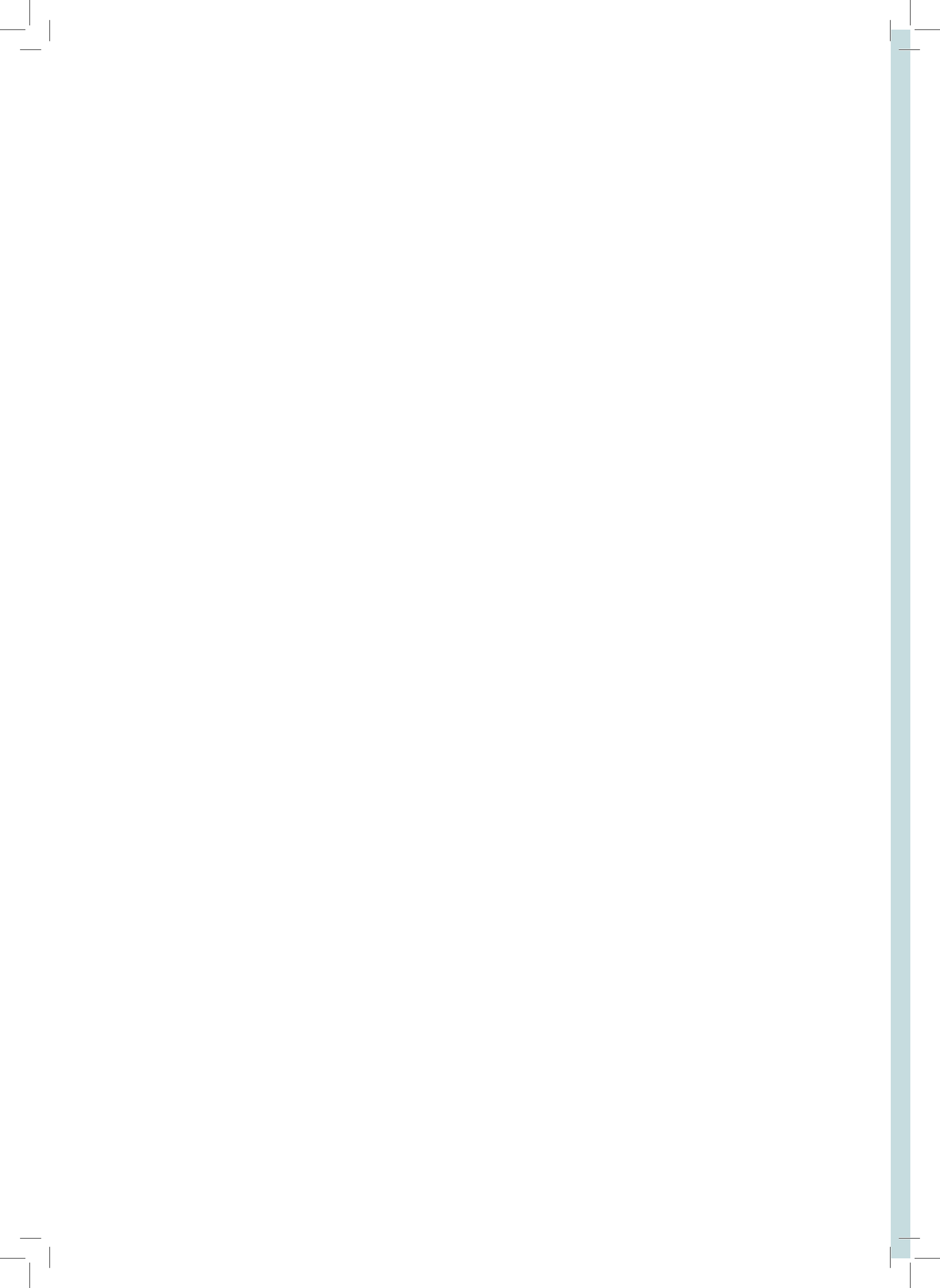
3	Grafik I.1	Tingkat PCE Amerika Serikat
3	Grafik I.2	<i>Net buy/sell</i> di Pasar Obligasi EM
4	Grafik I.3	<i>Net buy/sell</i> di Pasar Saham EM
4	Grafik I.4	Inflasi Zona Euro
4	Grafik I.5	Kinerja Eksternal Tiongkok
4	Grafik I.6	Perkembangan Harga Komoditas
5	Grafik I.7	Pertumbuhan Ekonomi
5	Grafik I.8	Tingkat Inflasi Indonesia
5	Grafik I.9	Neraca Perdagangan Indonesia
6	Grafik I.10	Perkembangan Cadangan Devisa Indonesia
7	Grafik I.11	Perkembangan Indeks Saham Global dan Regional
7	Grafik I.12	Perkembangan Nilai Tukar Global dan Regional
7	Grafik I.13	Perkembangan <i>Yield</i> SBN
8	Grafik I.14	Perkembangan Aset BUK
9	Grafik I.15	Tren Pertumbuhan DPK
9	Grafik I.16	Tren Pertumbuhan Kredit
11	Grafik I.17	Tren Aset BPR
11	Grafik I.18	Tren Pertumbuhan DPK
11	Grafik I.19	Pertumbuhan Kredit BPR
12	Grafik I.20	ROA dan BOPO BPR
13	Grafik I.21	Penyebaran UMKM Berdasarkan Wilayah
15	Grafik I.22	Pertumbuhan Kredit Perbankan (<i>qtq</i>)
15	Grafik I.23	NPL Gross Sektor Ekonomi
16	Grafik I.24	Kinerja Indeks di Beberapa Bursa Utama (<i>qtd</i>)
17	Grafik I.25	Perkembangan Indeks Industri (<i>ytd</i>)
17	Grafik I.26	Perkembangan IHSG dan Nilai Rata-rata Perdagangan Saham Harian
17	Grafik I.27	Perkembangan IHSG dan Net Asing
17	Grafik I.28	Indonesia Government Securities Yield Curve (IBPA-IGSYC)
24	Grafik I.29	Rencana Penggunaan Dana
25	Grafik I.30	<i>Market Share</i> BAE Berdasarkan Jumlah Klien Sampai Triwulan I-2017 (per Maret 2017)
25	Grafik I.31	<i>Market Share Company Rating</i> Triwulan I 2017
26	Grafik I.32	Komposisi Jumlah Pelaku IKNB Triwulan I-2017
29	Grafik I.33	Distribusi Investasi Industri Dana Pensiun
30	Grafik I.34	Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas Perusahaan Pembiayaan
30	Grafik I.35	Piutang Perusahaan Pembiayaan
32	Grafik I.36	Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas
33	Grafik I.37	Pertumbuhan Pembiayaan/Penyertaan Modal
33	Grafik I.38	Sumber Pendanaan Perusahaan Modal Ventura
34	Grafik I.39	Tren Aset, Liabilitas dan Ekuitas

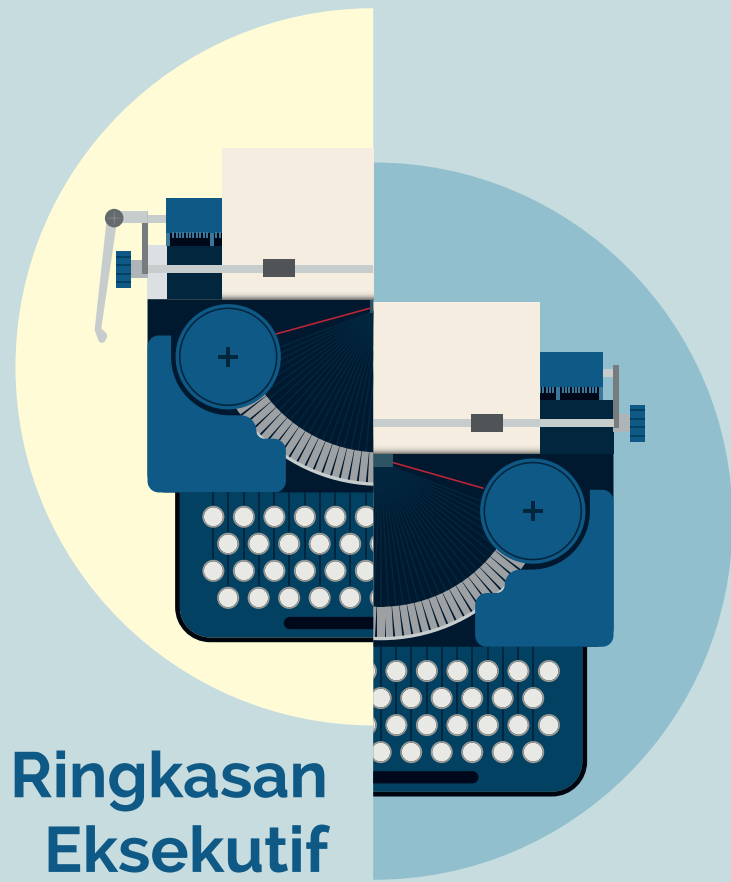


Grafik I.40	Pertumbuhan Aset LJK	34
Grafik I.41	Pertumbuhan Aset Perusahaan Penjaminan	34
Grafik I.42	<i>Outstanding</i> Penjaminan	35
Grafik I.43	Pertumbuhan Aset Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	35
Grafik I.44	Pertumbuhan Nilai Pembiayaan Ekspor Indonesia	35
Grafik I.45	Aset dan <i>Outstanding</i> Penyaluran Pinjaman PT SMF (Persero)	35
Grafik I.46	Pertumbuhan Aset PT Pegadaian	36
Grafik I.47	<i>Outstanding</i> Pinjaman PT Pegadaian (Persero)	36
Grafik I.48	Pertumbuhan Aset PT PNM (Persero)	36
Grafik I.49	Pertumbuhan Pemberian Pinjaman dan Pembiayaan Modal PT PNM (Persero)	36
Grafik I.50	Pertumbuhan Aset PT Danareksa (Persero)	37
Grafik I.51	Pertumbuhan Portofolio PT Danareksa (Persero)	37
Grafik I.52	Pertumbuhan Piutang Usaha PT Danareksa	37
Grafik I.53	Wilayah Penyebaran Agen Laku Pandai Triwulan I-2017	39
Grafik I.54	Kredit & NPL Sektor Maritim terkait JARING	39
Grafik II.1	Sebaran Jenis Dugaan Tipibank Pada Triwulan I-2017	51
Grafik II.2	Pelaku <i>Fraud</i> yang diduga Tipibank Pada Triwulan I-2017	51
Grafik II.3	Penyebaran Jaringan Kantor BUK Pada Triwulan I-2017	52
Grafik II.4	Penyebaran Jaringan Kantor BPR Triwulan I-2017	53
Grafik II.5	Penyampaian Laporan Keuangan Tengah Tahunan (LKTT) 2016	56
Grafik II.6	Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan (LKT) 2016	56
Grafik II.7	Penyampaian Laporan Tahunan (LT) 2016	56
Grafik II.8	Jumlah Penetapan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan per Triwulan I-2017 Berdasarkan Jenis Industri	64
Grafik II.9	Jumlah Penetapan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan per Triwulan I-2017 Berdasarkan Jabatan	64
Grafik II.10	Tingkat Kelulusan Pihak Utama IKNB pada Penilaian Kemampuan dan Kepatutan per Triwulan I-2017	64
Grafik II.11	IHSG dan Arus Modal Nonresiden di Pasar Saham	69
Grafik II.12	Rincian Layanan Informasi	76
Grafik II.13	Rincian Layanan Pertanyaan	77
Grafik II.14	Rincian Layanan Pengaduan	77
Grafik II.15	Tingkat Penyelesaian Layanan	77
Grafik II.16	Kanal Layanan	77
Grafik II.17	Perbandingan Penerimaan Layanan Berdasarkan Satuan Kerja	78
Grafik II.18	Jumlah Pelanggaran Iklan Berdasarkan Kategori	79
Grafik III.1	Sektor Industri Saham Syariah di Indonesia	89
Grafik III.2	Perkembangan Jumlah dan NAB Reksa Dana Syariah	91
Grafik III.3	Perkembangan Sukuk Negara <i>Outstanding</i>	91
Grafik III.4	Jumlah Pelaku IKNB Syariah Triwulan I-2017	92
Grafik IV.1	Siklus Manajemen Strategi, Anggaran dan Kinerja (MSAK)	103
Grafik IV.2	Gambaran Topik yang Dibahas dalam Rapat Dewan Komisiner	106
Grafik IV.3	Statistik Pengunjung <i>Website</i> OJK	108
Grafik IV.4	<i>Tone</i> Pemberitaan Triwulan I-2017	108
Grafik IV.5	Realisasi Anggaran	109

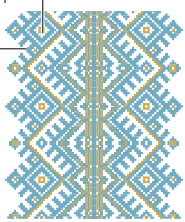
DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1	Layanan Keuangan Mikro	71
-------------	------------------------	----





**Ringkasan
Eksekutif**

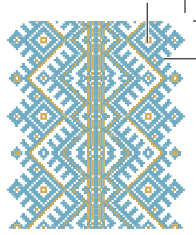


Ringkasan Eksekutif

TINJAUAN PEREKONOMIAN DUNIA DAN INDONESIA

Perekonomian global pada triwulan I-2017 menunjukkan sinyal perbaikan didukung semakin menguatnya ekonomi AS serta prospek perekonomian Eropa dan Jepang yang membaik. Kondisi ekonomi AS yang membaik mendorong The Fed menaikkan FFR 0,75% - 1,00%. Risiko guncangan di Eropa terkait *Euro-scepticism* juga menurun seiring menurunnya peluang kemenangan kandidat ultra kanan. Bank of Japan juga mempertahankan suku bunga acuan pada level -0,1% dan tidak mengubah pembelian obligasi per tahun sebesar JPY80 triliun. Sementara itu, perekonomian negara berkembang belum menunjukkan tren perbaikan yang solid dan masih dibayangi risiko penurunan harga komoditas. Selanjutnya, beberapa risiko global juga perlu diperhatikan, di antaranya tekanan inflasi negara maju yang mulai meningkat, kelanjutan kenaikan *Fed Funds Rate*, dan risiko geopolitik kawasan.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan I-2017 tumbuh sebesar 5,01% yoy, meningkat dari pertumbuhan triwulan sebelumnya sebesar 4,94% yoy. Pertumbuhan tersebut didukung sebagian besar lapangan usaha kecuali sektor pertambangan dan penggalian serta perbaikan kinerja eksternal dengan ekspor tumbuh lebih tinggi dibandingkan import. Perbaikan kinerja ekspor terutama dipengaruhi membaiknya harga komoditas, seperti batubara dan minyak kelapa sawit, serta meningkatnya pertumbuhan ekonomi global. Tingkat inflasi pada level 3,61% yoy cenderung berada pada level rendah disebabkan oleh penurunan dari sisi *volatile food* akibat panen raya serta tingkat inflasi inti (*core inflation*) yang juga melanjutkan tren melambat. Sementara itu, kinerja eksternal terpantau berada dalam tren meningkat dengan perbaikan sektor riil yang belum solid. Di tengah perkembangan tersebut, persepsi risiko dan prospek perekonomian domestik cenderung membaik seiring dengan mulai membaiknya perekonomian global.

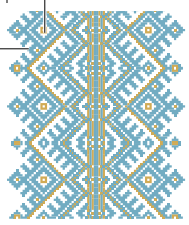


TINJAUAN OPERASIONAL SEKTOR JASA KEUANGAN

Sejalan dengan berkurangnya risiko ketidakpastian global serta persepsi positif investor terhadap perekonomian domestik, pasar keuangan domestik sepanjang triwulan I-2017 bergerak menguat. Hal ini turut ditandai dengan berlanjutnya aliran masuk modal investor nonresiden yang berdampak positif bagi perkembangan pasar saham, pasar Surat Berharga Negara (SBN), dan nilai tukar Rupiah. IHSG mencatat pertumbuhan sebesar 5,12% *qta* yang disertai oleh *net buy investor* nonresiden sebesar Rp8,3 triliun. Sejalan dengan penguatan mayoritas mata uang global, penguatan nilai tukar Rupiah terhadap US dolar sebesar 0.61% pada triwulan I-2017 ditopang oleh depresiasi USD. Perbaikan kinerja eksternal juga mempengaruhi posisi cadangan devisa Indonesia yang tercatat pada akhir periode pelaporan kembali meningkat menjadi USD123,2 miliar. Posisi cadangan devisa Indonesia tersebut cukup untuk membiayai 8,9 kali bulan impor.

Untuk mendukung terciptanya sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel; mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; serta melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, selama periode laporan OJK melakukan beberapa inisiatif antara lain:

1. Peluncuran Program AKSI Pangan
Program AKSI Pangan merupakan upaya nyata OJK bersama Kementerian terkait serta pelaku industri jasa keuangan untuk mempercepat dan meningkatkan pembiayaan sektor pangan khususnya pada sebelas komoditi utama pangan. Aksi ini diharapkan dapat menjawab masalah terbatasnya akses pembiayaan khususnya di sektor ketahanan pangan yakni pertanian, kehutanan, perkebunan, dan perikanan. OJK mengharapkan agar Program AKSI Pangan menjadi gerakan



nasional dalam memperkenalkan dan mengimplementasikan skema pembiayaan secara rantai nilai (*value chain financing*) dan menjadi momentum percepatan akses keuangan di sektor pangan.

2. *OJK Goes To School*

Dalam rangka meningkatkan literasi keuangan untuk kelompok pelajar/siswa tingkat SD-SMK, OJK melaksanakan *OJK Goes To School* di empat sekolah. Materi yang disampaikan antara lain tentang Pengenalan OJK dan IJK, menabung sejak dini, pengelolaan dan perencanaan Keuangan, pengenalan ciri-ciri investasi ilegal dan khusus untuk siswa SMK diberikan materi kewirausahaan.

3. Sosialisasi dan Edukasi Pasar Modal Terpadu (SEPMT)

Sosialisasi dan Edukasi Pasar Modal Terpadu bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat akan industri Pasar Modal antara lain dengan melakukan *workshop* pendalaman materi Pasar Modal, sosialisasi peraturan terbaru terkait Pasar Modal dan Penilaian *ASEAN Corporate Governance Scorecard 2017* kepada Pelaku Industri Pasar Modal.

4. Pembentukan Pokja Program Pembiayaan Ekonomi Kreatif

Dalam rangka meningkatkan penyaluran pembiayaan pada sektor produktif khususnya di sektor industri kreatif serta mendukung program pemerintah untuk meningkatkan pembiayaan ekspor pada ekonomi kreatif dan UMKM, OJK membentuk Pokja Program Pembiayaan Ekonomi Kreatif.

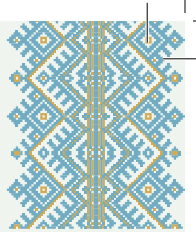
Dalam menjalankan fungsi dan tugas pengaturan, pengawasan, edukasi dan perlindungan konsumen, OJK senantiasa menjalin kerja sama dan koordinasi dengan berbagai lembaga, antara lain MOU OJK bersama Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan tentang Kerja Sama dalam Bidang Pengaturan, Pengawasan dan Penegakan

Hukum serta Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan, *Focus Group Discussion* (FGD) mengenai Pelaksanaan UU PPKSK, serta pelaksanaan *Financial Executive Gathering* mengenai "Menjaga Stabilitas Sektor Jasa Keuangan dan Membangun Optimisme Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat", Pada bidang komunikasi, OJK memperoleh penghargaan *Public Relation Indonesia Awards* (PRIA) 2017 untuk kategori *Media Relations* Sub kategori Lembaga Negara.

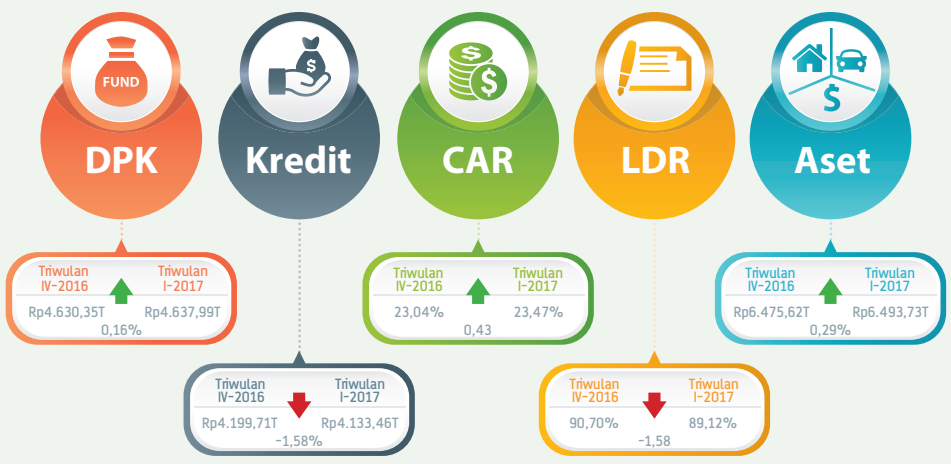
Terkait penguatan kapasitas organisasi dalam rangka implementasi manajemen strategi, OJK melakukan operasionalisasi strategi, penyusunan dan penetapan RKA, serta penandatanganan kesepakatan kinerja 2017. Dalam rangka meningkatkan kualitas penganggaran dan pengelolaan keuangan, OJK melakukan persiapan implementasi *Performance Based Budgeting* (PBB) dalam bentuk kajian tentang efisiensi anggaran di lingkungan OJK dan bimbingan teknis pengelolaan keuangan kepada satuan kerja. Untuk mendukung proses internal maupun meningkatkan *service excellence* kepada pemangku kepentingan, OJK mengembangkan sistem aplikasi pengawasan dan *monitoring*, di antaranya Sistem Informasi *Risk Based Supervision* (SIRIBAS), Sistem Informasi Penetapan Tarif Premi Asuransi (SIPETIR), Sistem Monitoring Data Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi (SIKARIN) dan Sistem Informasi Pasar Modal Terpadu (SIPM).

Dalam rangka memberikan edukasi kepada media terhadap perkembangan sektor keuangan dan berbagai aspek kebijakan di sektor keuangan, OJK menyelenggarakan 29 siaran pers dan melakukan 11 jumpa pers serta menyelenggarakan satu pelatihan dan satu FGD untuk wartawan. OJK juga menerima 12 kunjungan instansi dengan total 855 peserta.

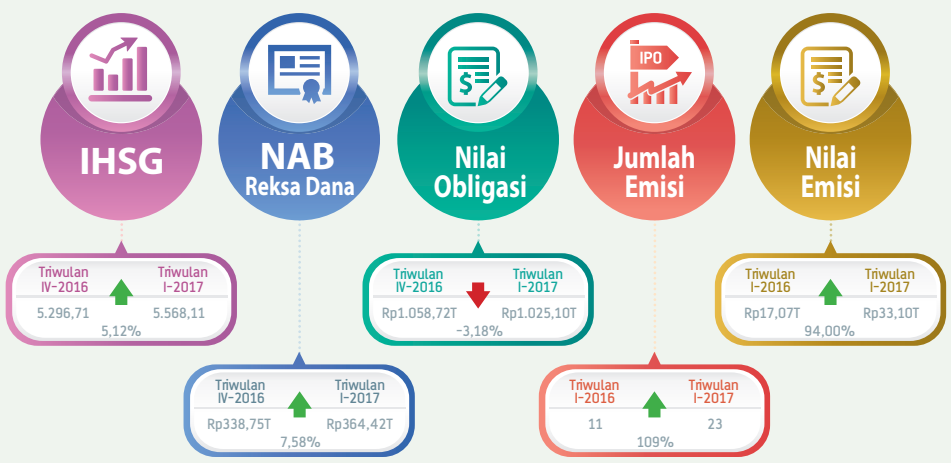
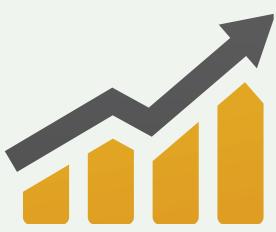
Ulasan lengkap mengenai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OJK dalam mewujudkan visi OJK selama triwulan I-2017 dijabarkan dalam buku Laporan Triwulanan I-2017.



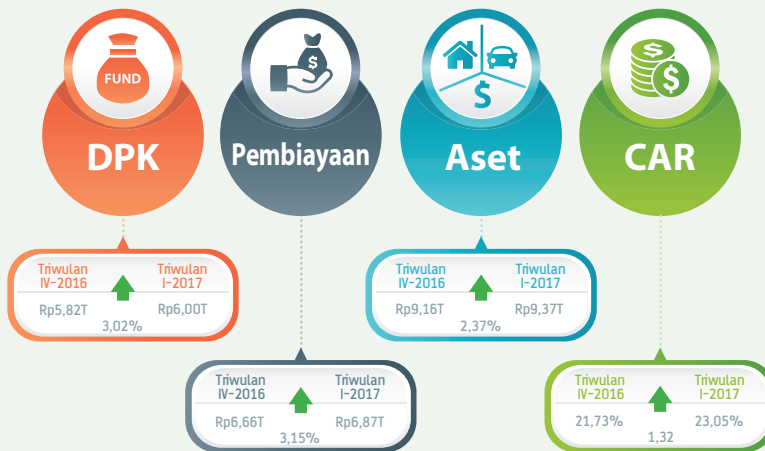
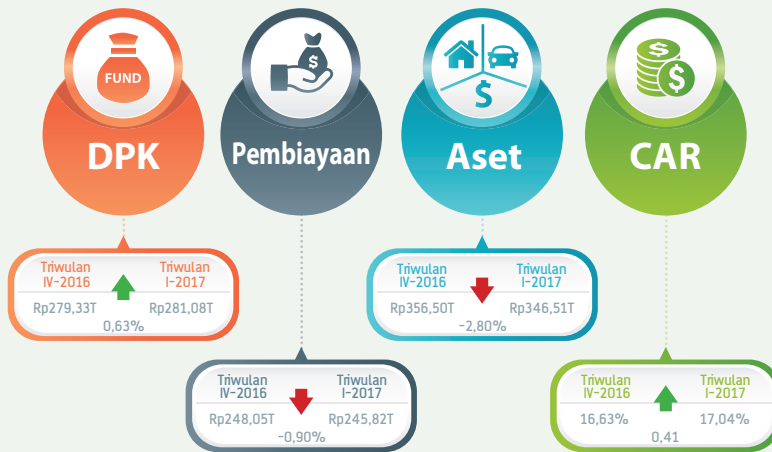
Bank Umum Konvensional



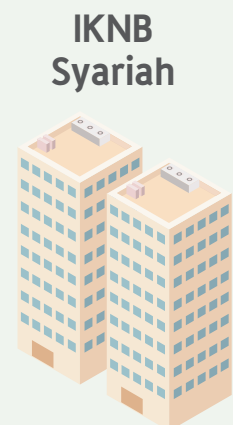
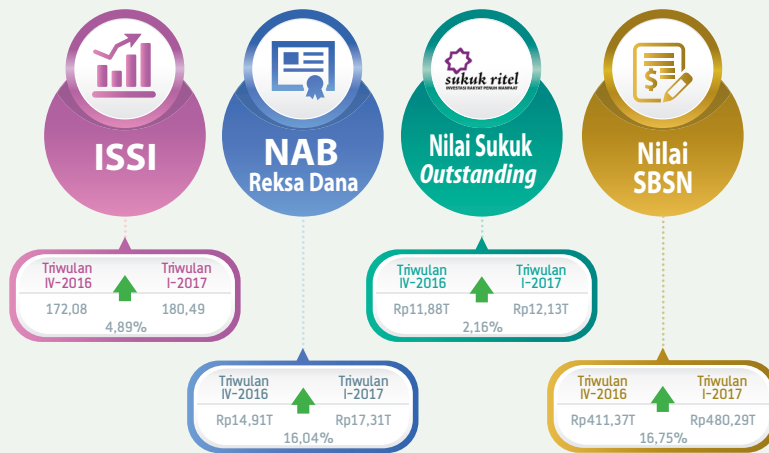
Pasar Modal



Bank Umum Syariah
iB
Perbankan Syariah



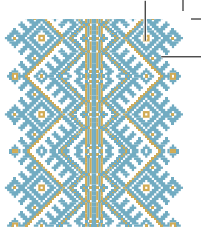
Pasar Modal Syariah



Tinjauan Industri Sektor Jasa Keuangan







Tinjauan Industri Sektor Jasa Keuangan

I

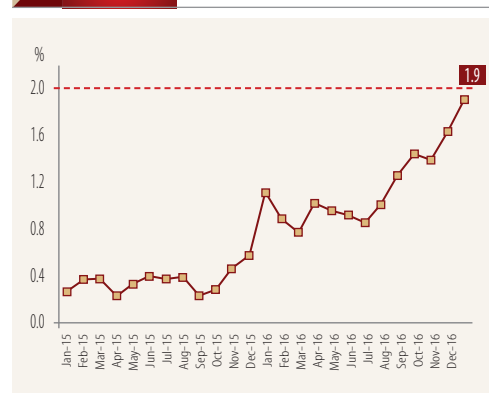
1.1 PERKEMBANGAN EKONOMI INDONESIA DAN DUNIA

1.1.1 Perkembangan Ekonomi Global

Sepanjang triwulan I-2017, perekonomian global mengalami perbaikan disertai berkurangnya risiko ketidakpastian. Perbaikan global turut didukung semakin menguatnya ekonomi Amerika Serikat (AS) serta prospek perekonomian Eropa dan Jepang yang membaik. Sementara itu, perekonomian Emerging Markets (EM) terpantau belum menunjukkan tren perbaikan yang solid dan masih dibayangi risiko penurunan harga komoditas. Selanjutnya, perlu terus diwaspadai beberapa risiko global di antaranya tekanan inflasi negara maju yang mulai meningkat, kelanjutan kenaikan Fed Funds Rate, dan risiko geopolitik kawasan.

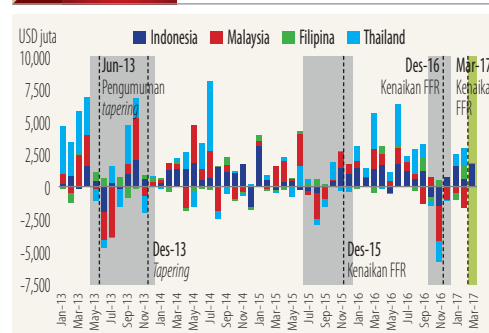
Sepanjang triwulan I-2017, kinerja ekonomi AS dalam tren membaik. Membaiknya perekonomian AS tercermin dari tingkat inflasi yang berada dalam tren meningkat dan perbaikan sektor tenaga kerja. Pada Januari 2017, *Personal Consumption Expenditures* (PCE) yang menjadi target The Fed dalam menaikkan suku bunga acuannya berada pada level 1,9%, hampir mencapai level yang diharapkan 2%. Data-data ketenagakerjaan AS yang rilis sebelum *FOMC Meeting* juga mencatatkan perbaikan, tingkat pengangguran Februari 2017 berada pada level rendah sebesar 4,7% dan *nonfarm payroll* yang berada pada level yang memadai sebesar 235 ribu.

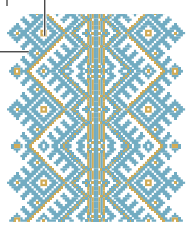
Grafik I - 1 Tingkat PCE Amerika Serikat



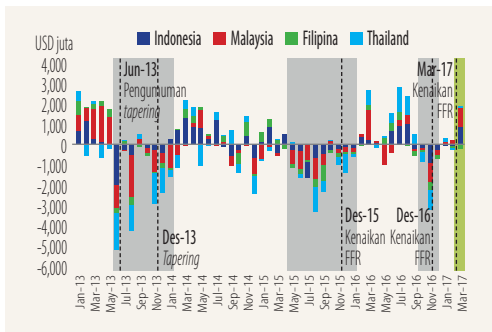
Kondisi ekonomi AS yang membaik mendorong The Fed untuk menaikkan FFR pada *FOMC Meeting* Maret 2017 menjadi 0,75% - 1,00%. Kenaikan FFR 2017 diperkirakan hanya akan terjadi tiga kali, dengan sisa dua kali kenaikan lagi sampai akhir 2017. Hal ini mengakibatkan pasar tidak terlalu bergejolak dalam merespon normalisasi kebijakan moneter *Advanced Economics* (AE). Pasar cenderung tetap melirik pasar EM dalam berinvestasi meskipun masih dibayangi risiko penurunan harga komoditas.

Grafik I - 2 Net buy/sell di Pasar Obligasi EM



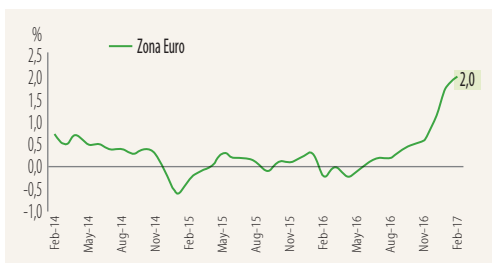


Grafik I - 3 Net buy/sell di Pasar Saham EM



Sejalan perbaikan ekonomi AS, pemulihan ekonomi Zona Eropa mulai menunjukkan tren menguat. Inflasi Zona Eropa pada Februari 2017 telah mencapai level 2%. Dari sisi sektoral, sektor manufaktur dan industri menunjukkan perbaikan sehingga berpengaruh positif terhadap perbaikan kondisi tenaga kerja, tercermin dari tingkat pengangguran yang kembali berada dalam tren menurun. Risiko guncangan di Eropa terkait *Euroscpticism* juga cenderung menurun seiring dengan menurunnya peluang kemenangan kandidat ultra kanan. Kekalahan Geert Wilders pada pemilihan umum di Belanda, elektabilitas Le Pen yang merosot menjelang pemilihan putaran pertama Pemilu Perancis, dan masih tingginya elektabilitas Angela Merkel dalam Pemilu Jerman mendorong turunnya risiko *Euroscpticism*.

Grafik I - 4 Inflasi Zona Euro

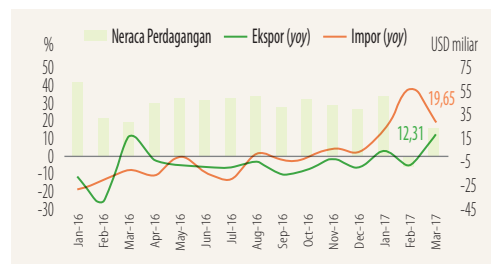


Di Jepang, perekonomian perlahan mulai membaik, dengan data kinerja ekspor yang mulai ekspansi dan inflasi yang sudah tumbuh. Namun, BoJ masih cenderung lebih berhati-hati dalam pengetatan kebijakannya. Pada pertemuan BoJ Meeting Maret 2017, BoJ tetap mempertahankan suku bunga acuan pada

level -0,1% dan tidak mengubah pembelian obligasi per tahun sebesar JPY80 triliun. Penguatan nilai tukar JPY sepanjang triwulan I-2017 juga menjadi pertimbangan BoJ dalam mengambil kebijakannya moneter.

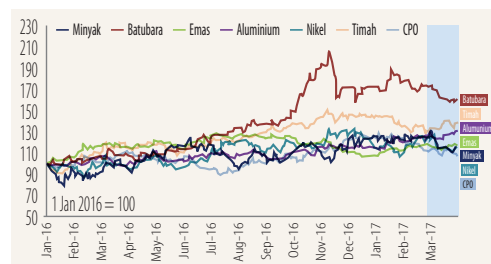
Sementara itu, pemulihan ekonomi Tiongkok masih stagnan, inflasi yang rendah pada triwulan I-2017 dengan capaian inflasi sebesar 0,9% yoy. Pertumbuhan ekspor mulai meningkat namun diiringi oleh penurunan pertumbuhan impor. Pertumbuhan ekonomi triwulan I-2017 masih stagnan pada level 6,9% yoy (Q4'17: 6,8%). Risiko Pemerintahan baru AS juga menimbulkan kekhawatiran terhadap kinerja eksternal Tiongkok ke depan.

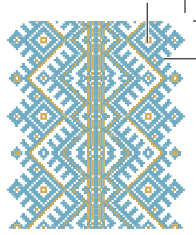
Grafik I - 5 Kinerja Eksternal Tiongkok



Harga komoditas pada triwulan I-2017 bergerak stagnan. Harga minyak yang menjadi pendorong pergerakan harga komoditas, bergerak melemah pada akhir triwulan I-2017. Komitmen negara-negara OPEC dalam memangkas produksinya untuk menaikkan harga minyak global sedikit terkendala dengan terus meningkatnya cadangan minyak mentah AS. Hal ini masih menimbulkan risiko bagi negara-negara EM yang telah berada dalam tren perbaikan.

Grafik I - 6 Perkembangan Harga Komoditas





1.1.2 Perkembangan Ekonomi Domestik

Pertumbuhan ekonomi domestik triwulan I-2017 diperkirakan melanjutkan perbaikan dengan laju yang lebih lambat. Tingkat inflasi secara keseluruhan terpantau meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya. Sementara itu, kinerja eksternal terpantau masih berada dalam tren meningkat dengan perbaikan sektor riil yang masih belum solid. Di tengah perkembangan tersebut, persepsi risiko dan prospek perekonomian domestik cenderung membaik seiring dengan mulai membaiknya perekonomian global.

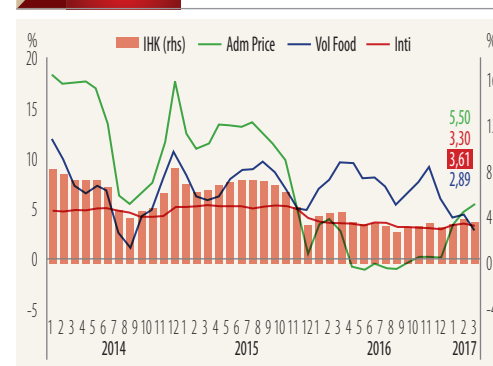
Pertumbuhan ekonomi pada triwulan I-2017 tumbuh sebesar 5,01% yoy, meningkat dari pertumbuhan triwulan sebelumnya sebesar 4,94% yoy. Pertumbuhan tersebut juga lebih tinggi bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2016 yang sebesar 4,92% yoy. Pertumbuhan didukung oleh hampir semua lapangan usaha kecuali pertambangan dan penggalian yang mengalami kontraksi sebesar 0,49%. Sedangkan dari sisi pengeluaran, perbaikan pertumbuhan ekonomi didorong oleh perbaikan kinerja eksternal dengan ekspor tumbuh tinggi sebesar 8,04%, sementara impor tumbuh sebesar 5,02%. Perbaikan kinerja ekspor terutama dipengaruhi oleh membaiknya harga komoditas, seperti batubara dan minyak kelapa sawit, serta meningkatnya pertumbuhan ekonomi global.

Grafik I - 7 Pertumbuhan Ekonomi



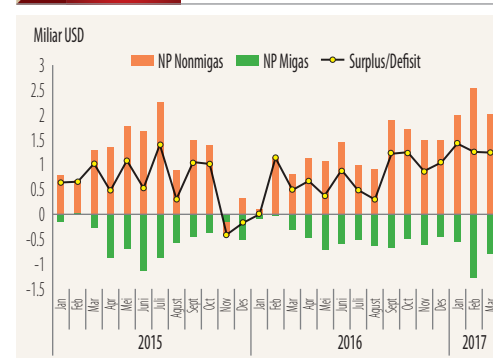
Pada akhir triwulan I-2017, tingkat inflasi berada pada level 3,61% yoy. Tingkat inflasi cenderung berada pada level rendah disebabkan oleh penurunan dari sisi *volatile food* akibat panen raya. Namun jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, tingkat inflasi pada akhir triwulan I-2017 masih lebih tinggi. Sementara itu, dari sisi *demand*, tingkat inflasi inti (*core inflation*) juga masih melanjutkan tren melambat.

Grafik I - 8 Tingkat Inflasi Indonesia

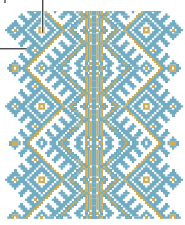


Dari sisi kinerja perdagangan eksternal, pada triwulan I-2017 neraca perdagangan Indonesia membukukan surplus sebesar USD1,23 miliar. Pertumbuhan ekspor dan impor berada pada tren yang meningkat, meskipun pertumbuhan ekspor sempat menurun pada Februari 2017 akibat larangan ekspor konsentrat.

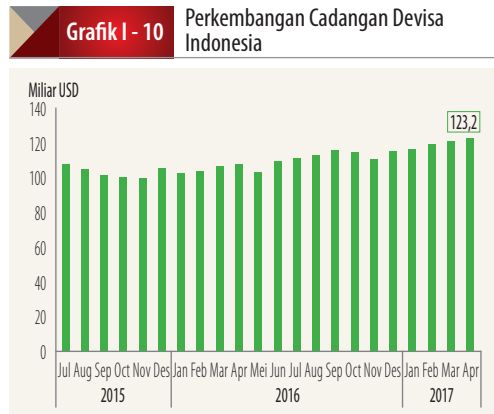
Grafik I - 9 Neraca Perdagangan Indonesia



Sejalan dengan perbaikan kinerja eksternal, posisi cadangan devisa Indonesia April 2017 tercatat kembali meningkat menjadi USD123,2 miliar, lebih tinggi dibandingkan Maret sebesar



USD121,8 miliar. Peningkatan tersebut turut dipengaruhi oleh penerimaan pajak dan devisa ekspor migas bagian pemerintah serta hasil lelang Surat Berharga Bank Indonesia (SBI) valas.



Posisi cadangan devisa per akhir April 2017 tersebut cukup untuk membiayai 8,9 bulan impor atau 8,6 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa yang akan datang.

Di tengah perbaikan kinerja perdagangan eksternal, kinerja sektor riil belum sepenuhnya solid, antara lain tercermin dari penjualan semen yang tumbuh melambat dan penjualan ritel yang kembali menurun. Sementara itu, pertumbuhan penjualan kendaraan bermotor sudah mulai meningkat namun masih dalam tren yang lambat. Meskipun demikian, kinerja manufaktur Indonesia (tercermin dari indikator PMI) sudah berada dalam zona ekspansi pada Maret 2017, lebih baik dari kinerja triwulan sebelumnya yang mencatatkan kontraksi.

Meskipun perkembangan makroekonomi belum terlalu menggembirakan, pada triwulan I-2017 persepsi risiko domestik terpantau menunjukkan perkembangan positif. Indikator persepsi risiko jangka menengah, *Credit Default Swap* (CDS) 5 tahun, cenderung menguat sebagaimana juga dialami oleh beberapa *emerging markets*. Volatilitas di pasar keuangan

domestik jauh mereda dibandingkan triwulan sebelumnya, diiringi masuknya kembali dana investor nonresiden di pasar modal.

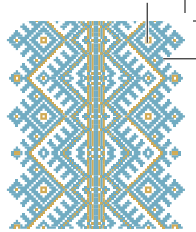
Pada laporan *Indonesia Economic Quarterly* Maret 2017, Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia 2017 sebesar 5,2% dan masih lebih tinggi dari target Pemerintah sebesar 5,1%. Namun, dampak *downside risks* terkait ketidakpastian global (kebijakan moneter AS dan kondisi politik di Eropa), tekanan inflasi yang meningkat, dan penerimaan pajak yang masih rendah diperkirakan masih lebih dominan dalam mempengaruhi kinerja ekonomi di masa depan. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, Bank Dunia merekomendasikan untuk mereformasi sektor jasa dengan mengurangi tarif dan hambatan perdagangan, serta meninjau kembali program subsidi bunga KUR yang berpotensi memberi dampak distorsi pasar jauh yang lebih besar dibandingkan peningkatan pertumbuhan.

Dengan mempertimbangkan kondisi global terutama dampak lanjutan kenaikan FFR dan risiko geopolitik di Eropa, sepanjang triwulan I-2017 Bank Indonesia tetap mempertahankan *BI 7-day (Reverse) Repo Rate* pada level 4,75%. Kebijakan ini diharapkan dapat menahan *outflow* pasar keuangan domestik dengan tetap mempertimbangkan dampak penyesuaian *administered prices* terhadap inflasi.

1.1.3 Perkembangan Pasar Keuangan

Sejalan dengan berkurangnya risiko ketidakpastian global serta persepsi positif investor terhadap perekonomian domestik, pasar keuangan domestik sepanjang triwulan I-2017 bergerak menguat. Hal ini turut ditandai dengan berlanjutnya aliran masuk modal investor nonresiden yang berdampak positif bagi perkembangan pasar saham, pasar Surat Berharga Negara (SBN), dan nilai tukar Rupiah.

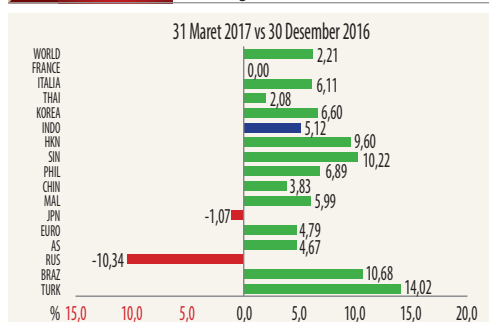
Pasca kenaikan FFR pada Maret 2017 yang tanpa diiringi oleh proyeksi kenaikan suku bunga *The Fed* pada tahun 2017 dan tren penurunan



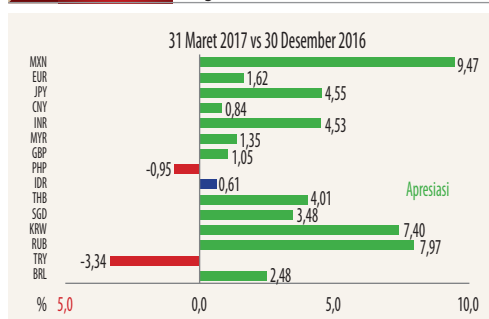
risiko EM, memberikan dampak mengalirnya dana portofolio kembali masuk ke pasar EM, termasuk Indonesia. Aliran masuk modal nonresiden tersebut turut mempengaruhi arah penguatan pasar saham domestik di triwulan I-2017. Penguatan pasar saham juga mendorong beberapa laporan kinerja emiten yang mendorong indeks saham bergerak menguat. Pada triwulan I-2017, IHSG mencatat pertumbuhan sebesar 5,12% *qtq* yang disertai oleh *net buy* investor nonresiden sebesar Rp8,3 triliun (triwulan IV-2016: *net sell* Rp18,3 triliun).

Sejalan dengan penguatan mayoritas mata uang global, penguatan nilai tukar Rupiah pada triwulan I-2017 ditopang oleh depresiasi USD. Pengaruh kondisi AS terutama beberapa kebijakan Presiden Trump lebih mendorong penguatan nilai tukar Rupiah terhadap USD pada triwulan I-2017.

Grafik I - 11 Perkembangan Indeks Saham Global dan Regional



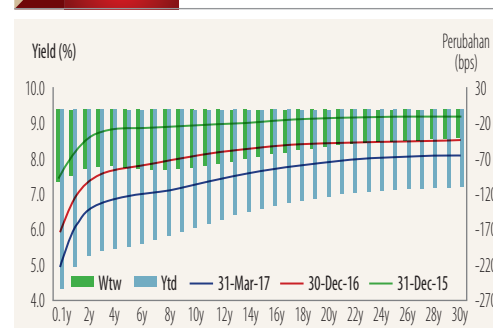
Grafik I - 12 Perkembangan Nilai Tukar Global dan Regional



Sejalan dengan apresiasi nilai tukar Rupiah, pada triwulan I-2017 pasar surat utang dalam negeri terpantau mengalami penguatan. Dibandingkan akhir triwulan sebelumnya, imbal hasil (*yield*) SBN turun rata-rata sebesar 66

basis point. Sebagaimana di pasar saham, arah penguatan pasar SBN juga diiringi oleh aksi beli investor nonresiden. Pada triwulan I-2017, tercatat *net buy* investor nonresiden di pasar SBN sebesar Rp57,4 triliun (triwulan IV-2016: *net sell* Rp19,2 triliun).

Grafik I - 13 Perkembangan *Yield* SBN



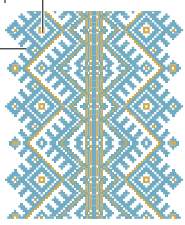
1.2 PERKEMBANGAN INDUSTRI PERBANKAN

1.2.1 Perkembangan Bank Umum Konvensional

Pada triwulan I-2017¹, secara umum kondisi Bank Umum Konvensional (BUK) masih terjaga baik, meskipun fungsi intermediasi mengalami perlambatan dengan pertumbuhan kredit turun sebesar 1,58% (*qtq*) sedangkan pertumbuhan DPK melambat sebesar 0,16% (*qtq*). Pertumbuhan Kredit yang menurun disertai perlambatan pertumbuhan DPK mengakibatkan LDR yang turun menjadi 89,12% dari 90,70% pada triwulan sebelumnya. Hal tersebut berdampak pada perlambatan pertumbuhan aset BUK yang hanya 0,29% (*qtq*) atau lebih lambat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 4,05% (*qtq*). Namun demikian, ketahanan BUK masih cukup solid karena ditopang permodalan yang cukup kuat dengan CAR mencapai 23,47% atau meningkat 43 bps (*qtq*).

Di sisi lain, profitabilitas BUK cukup stabil dengan ROA sebesar 2,35%, meskipun sedikit lebih rendah dibandingkan periode yang sama

¹ Data kinerja perbankan triwulan I-2017 menggunakan data posisi Februari 2017



Tabel I - 1 Kondisi Umum Perbankan Konvensional

Rasio	2016		2017	qtq	yoy
	Triwulan I	Triwulan IV	Triwulan I		
Bank Umum Konvensional					
Total Aset (dalam miliar rupiah)	5,954,688	6,475,618	6,493,734	↑ 0.29%	↑ 9.05%
Kredit (dalam miliar rupiah)	3,847,481	4,199,713	4,133,456	↓ -1.58%	↑ 7.43%
Dana Pihak Ketiga (dalam miliar rupiah)	4,294,176	4,630,352	4,637,991	↑ 0.16%	↑ 8.01%
- Giro (dalam miliar rupiah)	1,028,170	1,104,583	1,106,662	↑ 0.19%	↑ 7.63%
- Tabungan (dalam miliar rupiah)	1,274,070	1,487,077	1,426,394	↓ -4.08%	↑ 11.96%
- Deposito (dalam miliar rupiah)	1,991,936	2,038,692	2,104,934	↑ 3.25%	↑ 5.67%
CAR (%)	22.00	23.04	23.47	↑ 0.43	↑ 1.47
ROA (%)	2.44	2.23	2.35	↑ 0.12	↓ (0.09)
NIM (%)	5.55	5.63	5.28	↓ (0.35)	↓ (0.27)
BOPO (%)	82.96	82.22	81.69	↓ (0.53)	↓ (1.27)
NPL Gross (%)	2.73	2.86	3.09	↑ 0.22	↑ 0.36
NPL Net (%)	1.28	1.20	1.32	↑ 0.12	↑ 0.04
LDR (%)	89.60	90.70	89.12	↓ (1.58)	↓ (0.48)

Ket : ↑ Menunjukkan peningkatan pertumbuhan dan berdampak baik ↓ Menunjukkan penurunan pertumbuhan dan berdampak kurang baik
 ↓ Menunjukkan penurunan pertumbuhan dan berdampak baik ↑ Menunjukkan peningkatan pertumbuhan dan berdampak kurang baik

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia (SPI) dan LBU, Februari 2017

tahun sebelumnya sebesar 2,44%. Tingkat efisiensi BUK juga membaik dengan BOPO yang turun menjadi sebesar 81,69%. Meskipun terjadi perbaikan dibandingkan triwulan sebelumnya, *downside risk* masih berpotensi mengganggu kinerja BUK seiring dengan peningkatan risiko kredit seperti terlihat dari NPL *gross* yang naik menjadi 3,09% sebagai dampak kinerja perekonomian yang belum memuaskan yang terefleksi dari lambannya pertumbuhan kredit.

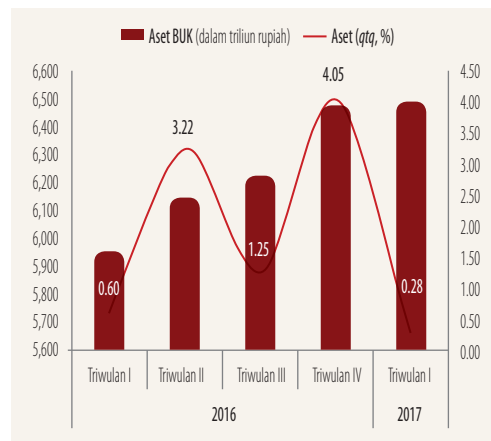
A. Aset

Total aset BUK pada triwulan I-2017 tumbuh 0,29% (*qtq*), lebih lambat dibandingkan dengan 4,05% (*qtq*) pada triwulan sebelumnya maupun dari 0,60% (*qtq*) pada periode yang sama tahun sebelumnya. Perlambatan ini utamanya disebabkan penurunan kredit sebesar 1,58% (*qtq*) yang merupakan komponen terbesar (63,56%) dari total aset BUK.

Berdasarkan kepemilikan bank, aset BUK lebih banyak terkonsentrasi pada BUSD (41,41%) dan Bank BUMN (40,35%). Sementara itu, porsi aset BUSND, BPD, dan Bank Asing masing-masing berada di bawah 10% dari total aset BUK. Selanjutnya, aset

perbankan Indonesia terindikasi memiliki tingkat konsentrasi cukup tinggi yang tergambar dari *Concentration Ratio* (CR) aset 4 BUK terbesar yang mencapai 47,42%. Sedangkan *Concentration Ratio* (CR) aset 20 BUK terbesar bahkan mencapai 79,67% dari aset perbankan.

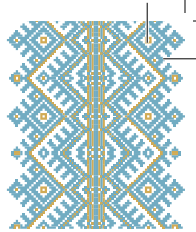
Grafik I - 14 Perkembangan Aset BUK



Sumber: SPI, Februari 2017

B. Dana Pihak Ketiga

Sumber dana BUK didominasi oleh DPK dengan porsi mencapai 89,87%, meskipun sedikit lebih rendah dibandingkan 89,91%

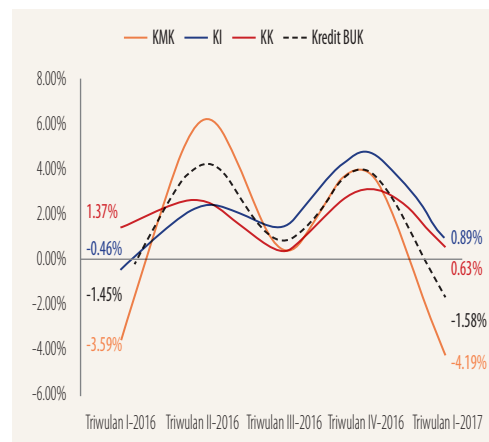


pada triwulan sebelumnya. Perlambatan pertumbuhan dipengaruhi DPK BUK yang hanya tumbuh 0,26% (*qtq*) atau lebih lambat 5,10% (*qtq*) dibandingkan triwulan sebelumnya.

Perlambatan DPK tersebut dipengaruhi penurunan tabungan sebesar 4,08% (*qtq*), jauh lebih rendah dari pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 8,52% (*qtq*), serta rendahnya pertumbuhan giro yang tumbuh 0,19% (*qtq*) atau jauh lebih rendah dibandingkan 5,49% (*qtq*) pada triwulan sebelumnya. Sementara itu, deposito menjadi satu-satunya komponen DPK yang tumbuh dibandingkan triwulan sebelumnya, dengan pertumbuhan 3,25% (*qtq*) yang dipengaruhi oleh realisasi dana *tax amnesty*. Berdasarkan porsinya, deposito mendominasi DPK sebesar 45,38%, diikuti tabungan dan giro masing-masing sebesar 30,75% dan 23,86%. Sementara itu berdasarkan kelompok kepemilikan, DPK BUK dikuasai oleh BUSD (44 bank) sebesar 42,75%, BUMN (4 bank) sebesar 41,11%. Sementara porsi DPK terkecil berada pada BUSND (20 Bank) yaitu hanya sebesar 2,76%

non bank (99,19%). Pada triwulan I-2017, kredit BUK turun sebesar 1,58% (*qtq*). Penurunan kredit pada awal tahun memang merupakan siklus musiman (*seasonal*) namun penurunan periode ini masih lebih besar dibandingkan penurunan sebesar 1,45% (*qtq*) pada periode yang sama tahun sebelumnya antara lain disebabkan oleh pelunasan Kredit Modal Kerja (KMK) yang disalurkan pada triwulan IV tahun sebelumnya.

Grafik I - 16 Tren Pertumbuhan Kredit



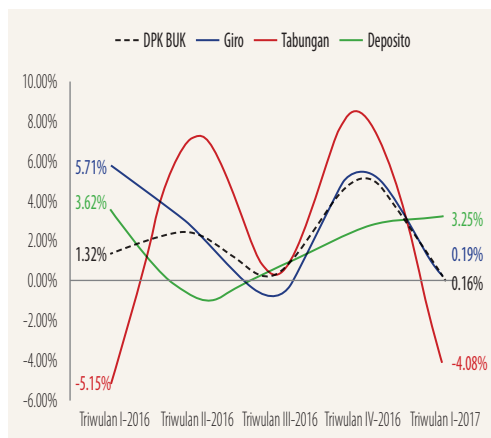
Sumber: SPI, Februari 2017

Berdasarkan jenis penggunaan, kredit masih didominasi oleh KMK dengan porsi 45,91%, diikuti dengan Kredit Konsumsi (KK) dan Kredit Investasi (KI) dengan porsi masing-masing sebesar 27,74% dan 26,35%. Perlambatan kredit terjadi pada KI dan KK yang tumbuh masing-masing sebesar 0,89% (*qtq*) dan 0,63% (*qtq*) sedangkan KMK justru mengalami penurunan sebesar 4,19% (*qtq*) karena seiring pelunasan kredit serta masih rendahnya *demand* pada awal tahun.

D. Rentabilitas

Rentabilitas BUK pada triwulan I-2017 masih cukup baik dengan ROA sebesar 2,35% meningkat dari 2,23% pada triwulan sebelumnya di tengah penurunan NIM menjadi 5,28% dari 5,63% pada triwulan sebelumnya. Penurunan NIM disebabkan oleh penurunan pendapatan bunga bersih

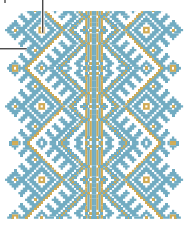
Grafik I - 15 Tren Pertumbuhan DPK



Sumber: SPI, Februari 2017

C. Kredit

Penggunaan dana BUK sebagian besar disalurkan untuk kredit (65,63%), yang umumnya diberikan kepada pihak ketiga



sebesar 0,60% (*qtq*) sejalan dengan suku bunga kredit yang menurun secara bertahap seiring penurunan BI-7 days (*Reverse*) Repo Rate menjadi 4,75%.

E. Permodalan

Pada triwulan I-2017, permodalan BUK tumbuh 1,86% (*qtq*) karena adanya penambahan modal sebesar Rp27,54 triliun serta pertumbuhan laba sebesar Rp15,95 triliun dari triwulan sebelumnya, dengan porsi modal inti (*tier 1*) mencapai 92,96%. Sementara itu, Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) BUK tumbuh lebih lambat sebesar 0,79% (*qtq*) sehingga membuat CAR BUK naik 43 bps menjadi 23,47%. Selain itu, rasio modal inti terhadap ATMR juga meningkat 36 bps (*qtq*) menjadi 21,55% menunjukkan kondisi permodalan BUK cukup solid untuk menyerap risiko yang ada.

1.2.2 Perkembangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Pada triwulan I-2017, industri BPR menunjukkan kondisi yang cukup baik terlihat dari permodalan yang terjaga dengan rasio CAR mencapai 24,32%. Namun, dibandingkan dengan triwulan sebelumnya terjadi perlambatan pada

pertumbuhan aset, kredit dan DPK masing-masing dari 4,18% (*qtq*); 2,00% (*qtq*); dan 4,08% (*qtq*) menjadi 0,29% (*qtq*); 1,45% (*qtq*); dan 1,08% (*qtq*).

Disisilain, kualitas kredit BPR belum menunjukkan perbaikan, tercermin dari NPL *gross* dan NPL *net* yang meningkat masing-masing menjadi 6,61% dan 4,87%. Rentabilitas BPR juga relatif stabil dengan ROA sebesar 2,58%. Sementara itu, likuiditas BPR cukup memadai tercermin dari *cash ratio* (CR) yang tercatat 15,69% meskipun turun dari triwulan sebelumnya, namun masih jauh di atas *threshold* 4,05%.

A. Aset

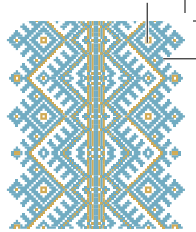
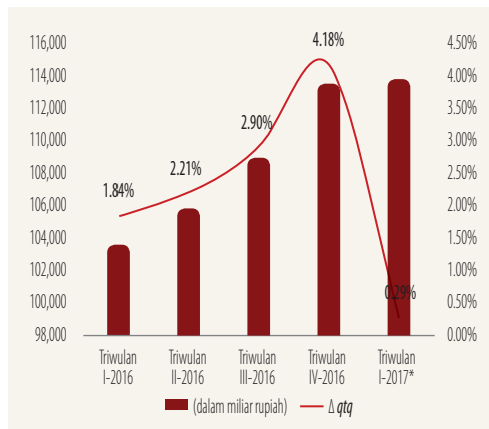
Aset BPR tumbuh melambat 0,29% (*qtq*) dibandingkan dengan triwulan sebelumnya 4,18% (*qtq*) seiring dengan perlambatan kredit yang merupakan komponen terbesar pada aset BPR (72,80%). Perlambatan tersebut dipengaruhi antara lain oleh perlambatan penyaluran kredit (1,45%, *qtq*) serta penurunan aset yang berasal dari penempatan pada bank lain (-3,61%, *qtq*). Kedua komponen tersebut merupakan aset BPR dengan porsi terbesar masing-masing 72,80% dan 23,46%.

Tabel I - 2 Kondisi Umum BPR

Rasio	2016	2017	<i>qtq</i> Triwulan I	ytd
	Triwulan IV	Triwulan I*		
Total Aset (dalam miliar rupiah)	113.501	113.834	↑ 0,29%	↑ 10,88%
Kredit (dalam miliar rupiah)	81.684	82.868	↑ 1,45%	↑ 9,78%
Dana Pihak Ketiga (dalam miliar rupiah)	75.725	76.546	↑ 1,08%	↑ 11,36%
- Tabungan (dalam miliar rupiah)	23.748	23.484	↓ -1,11%	↑ 12,69%
- Deposito (dalam miliar rupiah)	51.977	53.062	↑ 2,09%	↑ 10,79%
NPL Gross (%)	5,83	6,61	↑ 0,78	↑ 0,39
NPL Net (%)	4,20	4,87	↑ 0,67	↑ 0,39
ROA (%)	2,59	2,58	↓ (0,01)	↓ (0,13)
LDR (%)	76,24	76,15	↓ (0,09)	↓ (0,74)
CR (%)	19,01	15,69	↓ (3,32)	↓ (1,11)
KAP (%)	4,02	4,35	↑ 0,33	↑ 0,30
BOPO (%)	81,19	81,59	↑ 0,39	↓ (0,66)
CAR (%)	22,77	24,32	↑ 1,55	↑ 0,39

Ket : ↑ Menunjukkan peningkatan pertumbuhan dan berdampak baik ↓ Menunjukkan penurunan pertumbuhan dan berdampak kurang baik
 ↓ Menunjukkan penurunan pertumbuhan dan berdampak baik ↑ Menunjukkan peningkatan pertumbuhan dan berdampak kurang baik

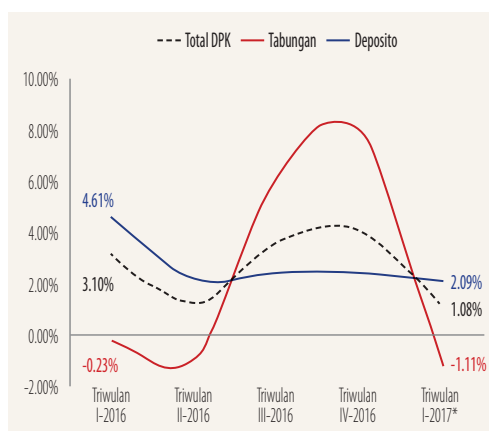
Sumber: SPI, Februari 2017

**Grafik I - 17** Tren Aset BPR

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia BPR, Februari 2017

B. Dana Pihak Ketiga (DPK)

DPK merupakan sumber dana BPR terbesar dengan porsi 81,48% atau sebesar Rp76,55 triliun. Porsi terbesar DPK masih dikuasai oleh deposito (69,32%) sedangkan tabungan 30,68%. DPK BPR tumbuh melambat menjadi hanya 1,08% (*qtq*) dibandingkan dengan 4,08% (*qtq*) pada triwulan sebelumnya. Penurunan tersebut didorong turunnya tabungan sebesar 1,11% (*qtq*). Sementara deposito tumbuh relatif stabil sebesar 2,09% (*qtq*).

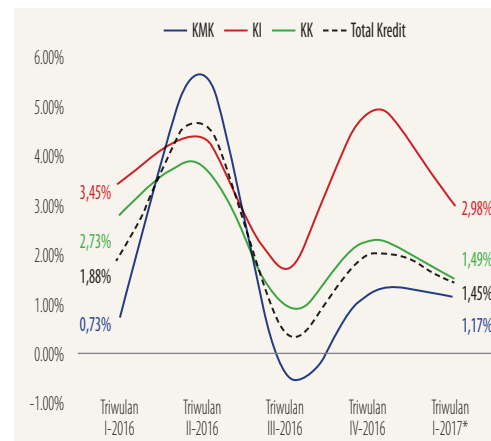
Grafik I - 18 Tren Pertumbuhan DPK

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia BPR, Februari 2017

C. Kredit

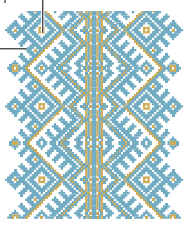
Penyaluran kredit BPR tumbuh sebesar 1,45% (*qtq*), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 2,00% (*qtq*).

Berdasarkan jenis penggunaan, penyaluran kredit BPR masih didominasi oleh KK dan KMK masing-masing sebesar 49,09% dan 43,90%. Adapun porsi kredit investasi BPR hanya sebesar 7,01%, namun mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 2,98% (*qtq*).

Grafik I - 19 Pertumbuhan Kredit BPR**Tabel I - 3** Porsi Kredit BPR dalam miliar rupiah

Jenis Penggunaan	2016	2016	Δ qtq
	Triwulan IV	Triwulan I*	
KMK	35.958	36.379	1,17%
KI	5.641	5.809	2,98%
KK	40.085	40.680	1,49%
Total	81.684	82.868	1,45%

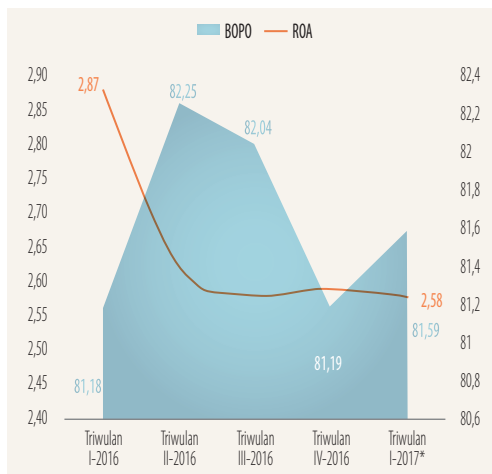
Berdasarkan sektor ekonomi, kredit BPR banyak disalurkan pada sektor perdagangan besar dan eceran dengan porsi mencapai 25,67% (Rp21,27 triliun) atau tumbuh 1,20% (*qtq*). Sementara itu, pertumbuhan kredit BPR tertinggi terdapat pada sektor perikanan dan sektor penyediaan akomodasi, makanan, dan minuman masing-masing sebesar 6,71% (*qtq*) dan 6,59% (*qtq*). Namun demikian, kredit BPR juga banyak disalurkan ke sektor bukan lapangan usaha-lainnya dengan porsi mencapai 44,63% yang menunjukkan masih lemahnya SDM BPR dalam melakukan klasifikasi usaha debitur menurut sektor ekonomi.



D. Rentabilitas

Dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, rentabilitas BPR relatif stabil tercermin dari ROA sebesar 2,58%. Namun dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya terdapat penurunan ROA BPR yang dipengaruhi oleh penurunan laba dan jumlah BPR. Selain itu, efisiensi BPR juga menunjukkan penurunan yang terlihat dari kenaikan rasio BOPO sebesar 39 bps (*qtq*) menjadi 81,59%.

Grafik I - 20 ROA dan BOPO BPR



Sumber: Statistik Perbankan Indonesia BPR, Februari 2017

E. Permodalan

Di tengah kinerja BPR yang tumbuh terbatas, permodalan BPR masih terjaga dengan CAR sebesar 24,32% atau naik 155 bps (*qtq*). Tingginya CAR dipengaruhi modal BPR yang tumbuh 8,05% (*qtq*) antara lain karena adanya tambahan modal disetor. Tingginya permodalan BPR tersebut relatif memadai untuk menyerap risiko yang dihadapi.

1.2.3 Perkembangan Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

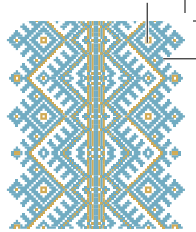
Pada triwulan I-2017, kredit UMKM tumbuh 15,18% (*qtq*) menjadi Rp1.060 triliun atau setara dengan 25,65% dari total kredit perbankan. Komposisi tersebut jauh lebih tinggi dari minimal 15% dari total kredit pada akhir 2017 sebagaimana diatur dalam PBI tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Berdasarkan sektor ekonomi, kredit UMKM terpusat pada sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 44,18%, industri pengolahan

Tabel I - 4 Konsentrasi Penyaluran UMKM

Jenis	Triwulan IV-2016			Triwulan I-2017		
	miliar rupiah	Δ	NPL	miliar rupiah	Δ	NPL
Pertanian, Perburuan dan Kehutanan						
Baki Debet	74,069	7.34%		108,541	46.54%	
NPL	2,959	-5.54%	4.00%	3,185	7.61%	2.93%
Industri Pengolahan						
Baki Debet	136,716	10.12%		169,615	24.06%	
NPL	4,017	-14.99%	2.94%	4,375	8.92%	2.58%
Perdagangan Besar dan Eceran						
Baki Debet	457,535	2.27%		468,342	2.36%	
NPL	17,803	-9.16%	3.89%	20,267	13.84%	4.33%
Total Baki Debet	920,392	3.41%		1,060,105	15.18%	
Total NPL	36,409	-7.94%	3.96%	42,898	17.82%	4.05%

Sumber: OJK, Februari 2017

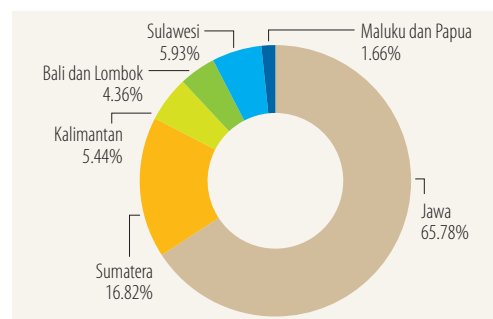


(16,00%), serta pertanian, perburuan dan kehutanan (10,24%). Dari ketiga sektor tersebut, rasio NPL *gross* UMKM tertinggi terdapat pada sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 4,33%, diikuti sektor pertanian (2,93%), dan industri pengolahan (2,58%). Secara keseluruhan, NPL kredit UMKM meningkat 9 bps (*qtq*) menjadi 4,05% dari 3,96% pada triwulan sebelumnya.

Secara spasial, sebagian besar kredit UMKM masih terpusat di pulau Jawa dan Sumatera, di mana total porsi lima provinsi terbesar (DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sumatera Utara) sebesar 65,78%, meningkat dari 61,75% pada triwulan sebelumnya. Adapun porsi kelima provinsi tersebut meliputi DKI Jakarta (32,05%), Jawa Timur (11,64%), Jawa Barat (9,75%), Jawa Tengah (8,86%), dan Sumatera Utara (6,16%).

Sementara itu, kredit UMKM di wilayah Indonesia bagian tengah dan timur (Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Bali, Maluku, dan Papua) hanya sebesar 17,40%. Rendahnya penyaluran kredit UMKM di wilayah Indonesia bagian tengah dan timur antara lain disebabkan jumlah penduduk yang lebih sedikit, jumlah *bankable entrepreneurs* yang relatif terbatas, serta jangkauan bank yang lebih terbatas karena infrastruktur yang kurang memadai.

Grafik I - 21 Penyebaran UMKM Berdasarkan Wilayah



Sumber: Statistik Perbankan Indonesia, Februari 2017

Berdasarkan kelompok bank, sebagian besar kredit UMKM disalurkan oleh BUMN (57,23%) dan BUSN Devisa (26,65%). Dibandingkan triwulan sebelumnya, penyaluran kredit UMKM pada BUMN mengalami peningkatan,

sementara pada kelompok bank lainnya mengalami penurunan.

Tabel I - 5 Porsi UMKM Berdasarkan Kelompok Bank (dalam miliar rupiah)

Kelompok Bank	Baki Debet Desember 2016	Persentase Triwulan IV 2016	Baki Debet Februari 2017	Persentase Triwulan I 2017
BUMN	449,449	48.83%	606,748	57.23%
BUSN Devisa	293,602	31.90%	282,506	26.65%
BUSN Non Devisa	33,006	3.59%	32,833	3.10%
BPD	62,186	6.76%	57,245	5.40%
KCBA	38,101	4.14%	37,624	3.55%
Syariah	44,047	4.79%	43,148	4.07%
Total UMKM	920,392	100%	1,060,105	100%

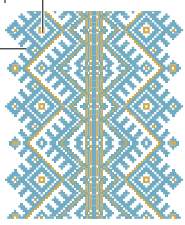
Sumber: OJK Februari 2017

1.2.4 Penguatan Sektor Riil Melalui Penyaluran Kredit Produktif

Sektor lapangan usaha yang menjadi prioritas pemerintah adalah sektor pertanian, perikanan, pertambangan, konstruksi, perdagangan besar dan eceran, dan industri pengolahan. Sektor-sektor tersebut dipandang krusial bagi perekonomian Indonesia antara lain karena mampu menyerap tenaga kerja yang cukup besar, menciptakan dampak lanjutan bagi aktivitas di sektor ekonomi lainnya, atau menjadi kontributor yang cukup signifikan bagi pertumbuhan ekonomi.

Dari keenam sektor tersebut, sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan besar dan eceran merupakan sektor ekonomi lapangan usaha yang paling banyak menerima kredit perbankan dengan porsi masing-masing sebesar 17,40% dan 18,95%. Sementara itu, untuk sektor non lapangan usaha, penerima kredit perbankan dengan porsi terbesar adalah sektor rumah tangga sebesar 23,00%.

Sebagaimana faktor musiman, penyaluran kredit awal tahun mengalami penurunan sebesar 1,58% (*qtq*), atau lebih besar dari penurunan sebesar 1,42% (*qtq*) pada periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan kredit tersebut terjadi pada hampir seluruh sektor ekonomi. Sementara itu, sektor yang mengalami pertumbuhan adalah sektor pertambangan (tumbuh 0,71%, *qtq*), penyediaan akomodasi,


Tabel I - 6 PDB per Sektor Ekonomi
dalam miliar rupiah

Sektor Ekonomi Prioritas	2016				Δ		Persentase
	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	qtq	yoy	
Pertanian	234,082.60	269,550.10	282,550.30	209,395.00	-25.89%	6.06%	8.78%
Perikanan	52,076.90	52,533.70	54,130.60	55,782.00	3.05%	2.62%	2.34%
Pertambangan	195,814.80	191,093.00	192,193.10	196,384.70	2.18%	1.60%	8.23%
Industri Pengolahan	490,175.70	507,499.70	511,699.10	508,180.60	-0.69%	3.36%	21.30%
Konstruksi	220,736.90	224,166.10	234,722.70	245,436.80	4.56%	4.21%	10.29%
Perdagangan Besar dan Eceran	302,856.80	314,954.70	319,337.70	318,075.70	-0.40%	3.90%	13.33%
Sektor Lainnya	768,346.00	795,414.40	833,936.40	852,322.30	2.20%	8.48%	35.73%
PDB	2,264,089.70	2,354,797.70	2,428,569.90	2,385,577.10	-1.77%	5.37%	100.00%

Sumber: BPS

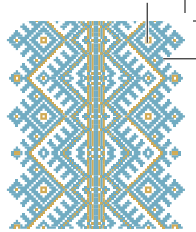
Tabel I - 7 Konsentrasi Kredit Perbankan Menurut Sektor Ekonomi (%)

No.	Sektor Ekonomi	Triwulan IV 2016		Triwulan I 2017*	Porsi
		Kredit (dalam triliun rupiah)	Kredit (dalam triliun rupiah)	qtq	
Lapangan Usaha					
1	Pertanian, Perburuan dan Kehutanan	283.83	281.61	-0,78%	6,54%
2	Perikanan	9.48	9,30	-1,93%	0,22%
3	Pertambangan dan Penggalian	126.34	127,23	0,71%	2,95%
4	Industri Pengolahan	781.76	749,53	-4,12%	17,40%
5	Listrik, Gas, dan Air	135.46	133,70	-1,30%	3,10%
6	Konstruksi	214.76	210,54	-1,96%	4,89%
7	Perdagangan Besar dan Eceran	841.38	816,25	-2,99%	18,95%
8	Penyediaan Akomodasi dan PMM	93.39	93,83	0,47%	2,18%
9	Transportasi	171.80	166,67	-2,99%	3,87%
10	Perantara Keuangan	193.95	194,88	0,48%	4,52%
11	Real Estate	210.00	204,08	-2,82%	4,74%
12	Administrasi Pemerintahan	14.70	22,47	52,82%	0,52%
13	Jasa Pendidikan	8.55	8,54	-0,10%	0,20%
14	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	16.97	16,31	-3,87%	0,38%
15	Jasa Kemasyarakatan	58.71	57,39	-2,24%	1,33%
16	Jasa Perorangan	2.64	2,63	-0,44%	0,06%
17	Badan Internasional	0.23	0,12	-46,67%	0,00%
18	Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya	10.61	2,41	-77,25%	0,06%
Bukan Lapangan Usaha					
19	Rumah Tangga	980.34	990,74	1,06%	23,00%
20	Bukan Lapangan Usaha Lainnya	222.31	219,84	-1,11%	5,10%
Total		4,377.19	4,308,08	-1,58%	100%

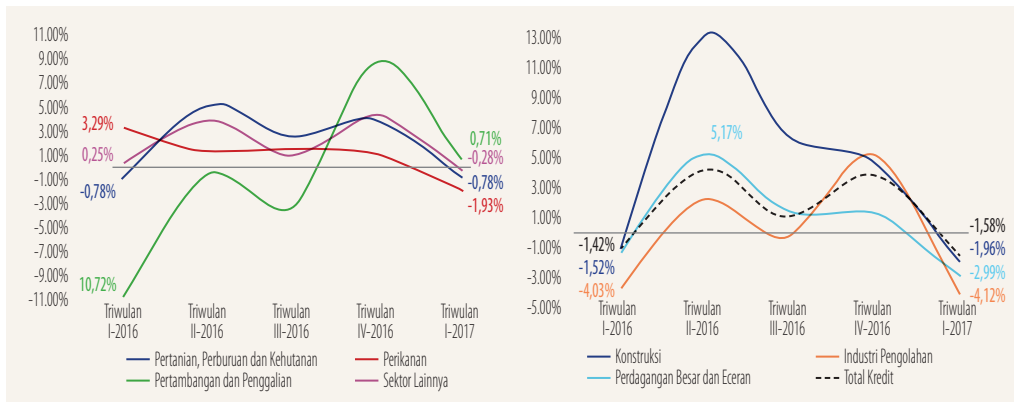
Sumber: Diolah dari Statistik Perbankan Indonesia, Februari 2017

makanan dan minuman (0,47%, qtq), administrasi pemerintahan (52,82%, qtq), dan sektor rumah tangga (1,06%, qtq). Tingginya pelunasan serta rendahnya kebutuhan pembiayaan nasabah korporasi ditengarai menjadi faktor penyebab siklus musiman

Hampir seluruh sektor prioritas mengalami penurunan kredit, dengan penurunan terbesar terjadi pada industri pengolahan (-4,12%, qtq) yang dipengaruhi kinerja usaha sektor industri yang melambat tercermin dari indikator PMI (*Purchasing Manager Index*) yang menurun dari



Grafik I - 22 Pertumbuhan Kredit Perbankan (*qtq*)



Sumber: Statistik Perbankan Indonesia, Februari 2017

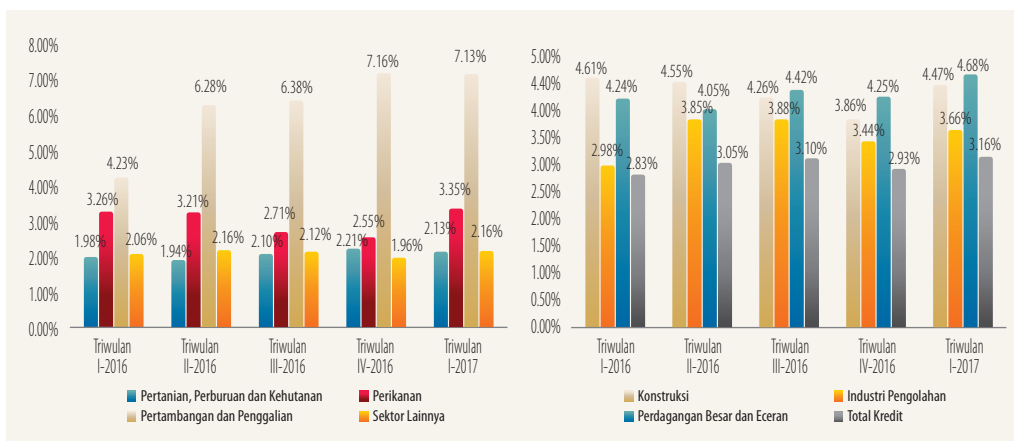
50,91% menjadi 47,93% pada triwulan I-2017. Namun demikian, diperkirakan akan terjadi peningkatan kegiatan usaha pada triwulan II didorong oleh *event* hari raya Idul Fitri pada Juni 2017.

Adapun sektor prioritas yang mengalami pertumbuhan kredit adalah sektor pertambangan dan penggalian sebesar 0,71% (*qtq*) meskipun melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang sempat tumbuh mencapai 8,83% (*qtq*). Kredit sektor perikanan (sektor prioritas Pemerintah dan OJK melalui program JARING) juga turun (-1,93%, *qtq*) pada triwulan I-2017. Selain faktor musiman, adanya kebijakan moratorium penggunaan kapal asing

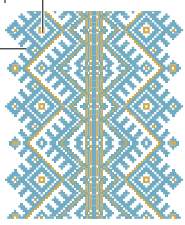
di Indonesia yang membuat produksi perikanan nasional menurun dipandang menjadi salah satu penyebab turunnya penyaluran kredit ke sektor perikanan. Selain itu, belum siapnya infrastruktur dan kesiapan debitur juga menjadi kendala dalam penyaluran kredit perikanan.

Sementara itu, kualitas kredit yang kurang baik juga menjadi penyebab perbankan cenderung berhati-hati dalam menyalurkan kredit juga ikut menekan laju pertumbuhan kredit di sektor perikanan. Beberapa sektor ekonomi prioritas yang memiliki NPL *gross* di atas industri perbankan meliputi: sektor pertambangan, konstruksi, perikanan, serta perdagangan besar dan eceran.

Grafik I - 23 NPL Gross Sektor Ekonomi



Sumber: Statistik Perbankan Indonesia, Februari 2017



1.3 PERKEMBANGAN INDUSTRI PASAR MODAL

1.3.1 Perkembangan Perdagangan Efek

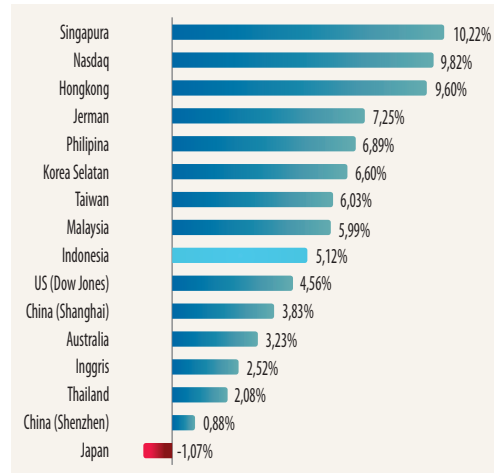
Selama triwulan I-2017 Pasar Modal Indonesia menunjukkan peningkatan. Beberapa hal yang dominan mempengaruhi peningkatan tersebut adalah optimisme terhadap pertumbuhan ekonomi global pada tahun ini berdasarkan proyeksi IMF dan World Bank serta kenaikan harga komoditas dunia. Sementara itu stabilitas indikator makroekonomi domestik masih berada pada level yang terjaga.

Selain dipengaruhi oleh kondisi global, kinerja Pasar Modal Indonesia juga dipengaruhi faktor domestik, di antaranya *World Bank* memperkirakan laju ekonomi Indonesia 2017 lebih tinggi dari pada 2016 sebesar 5,2%, Bank Indonesia menetapkan BI-7 *Day Repo Rate* masih di level 4,75%, dengan suku bunga *Deposit Facility* tetap 4,00% dan *Lending Facility* tetap 5,50% yang berlaku efektif sejak 16 Maret 2017, cadangan devisa pada akhir Maret tercatat USD 121,81 miliar atau naik USD 5,49 miliar (4,72%) jika dibandingkan periode sebelumnya, serta menguatnya nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS sebesar Rp147 menjadi Rp13.326/USD.

Faktor-faktor tersebut turut membuat kinerja indeks saham dan obligasi mengalami peningkatan. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada penutupan akhir triwulan I-2017 berada pada posisi 5.568,11 atau mengalami kenaikan sebesar 5,12% jika dibandingkan dengan posisi akhir triwulan IV-2016. Pada triwulan ini indeks mencatatkan nilai tertinggi yaitu pada level 5.592,95 pada 30 Maret 2017.

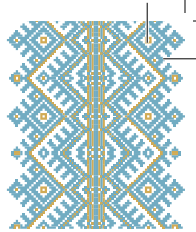
Nilai kapitalisasi pasar saham pada triwulan ini Rp6.055,23 triliun atau mengalami kenaikan

Grafik I - 24 Kinerja Indeks di Beberapa Bursa Utama (qta)

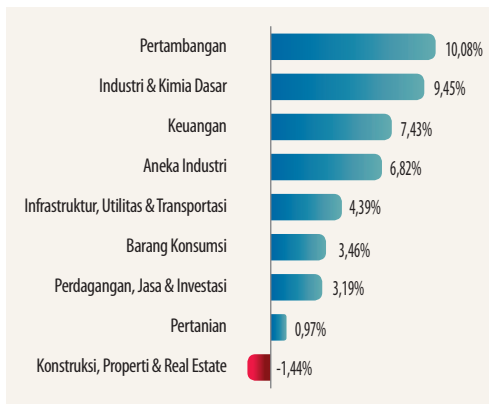


sebesar 5,24% dibandingkan posisi triwulan sebelumnya. Rata-rata nilai perdagangan per hari mengalami penurunan sebesar Rp3.475,41 miliar (-33,19%) menjadi sebesar Rp6.995,23 miliar. Namun demikian, volume perdagangan per hari mengalami peningkatan sebesar Rp2.948,85 juta (22,55%) menjadi sebesar Rp16.026,47 juta. Rata-rata frekuensi perdagangan saham harian juga mengalami peningkatan sebesar 42 kali (14,44%) menjadi 337 kali transaksi. Secara regional, IHSG menempati posisi kesembilan setelah Malaysia dengan pertumbuhan sebesar 5,12% *ytd*.

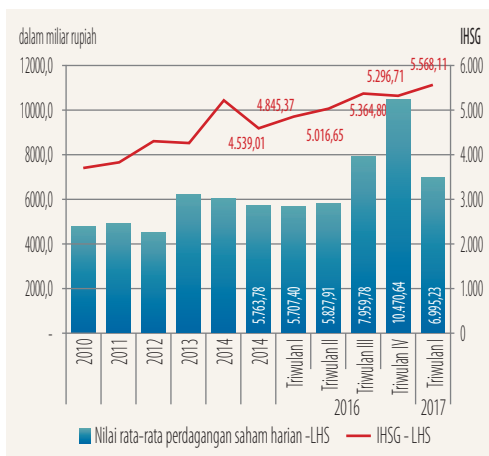
Kinerja indeks sektoral pada triwulan I-2017 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Kenaikan tertinggi terdapat pada indeks sektor pertambangan sebesar 10,08% indeks yang mengalami penurunan terdapat pada indeks properti sebesar -1,44%. Peningkatan indeks pada sektor ini dipengaruhi oleh harga komoditas global yang kian membaik. Sementara itu, penurunan pada sektor properti penyebabnya adalah turunnya penerimaan kredit untuk kepemilikan rumah tangga, apartemen dan ruko sejak Januari 2017.



Grafik I - 25 Perkembangan Indeks Industri (ytd)



Grafik I - 26 Perkembangan IHSG dan Nilai Rata-rata Perdagangan Saham Harian



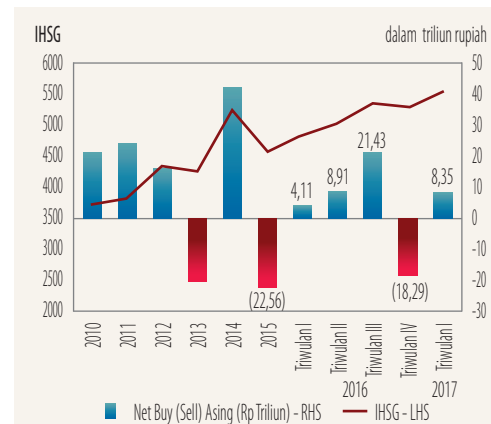
Tabel I - 8 Perkembangan Transaksi Perdagangan Saham

Perkembangan Perdagangan Saham Oleh Pemodal Asing dan Domestik

Indikator (Rata-rata harian)	2016				2017
	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Triwulan I
Nilai Perdagangan Saham Harian (dalam miliar rupiah)	5,707.40	5,827.91	7,959.78	10,470.64	6,995.23
Investor Asing (dalam miliar rupiah)					
Beli	2,682.89	2,528.81	3,451.13	2,596.91	2,411.95
Jual	2,615.57	2,387.30	3,087.85	2,860.15	2,227.32
Investor Domestik (dalam miliar rupiah)					
Beli	3,024.52	3,299.11	4,508.65	7,900.73	4,583.28
Jual	3,091.84	3,440.61	4,871.92	7,610.49	4,717.91
Frekuensi Perdagangan Saham Harian	236,976	242,989	282,768	294,098	336,568

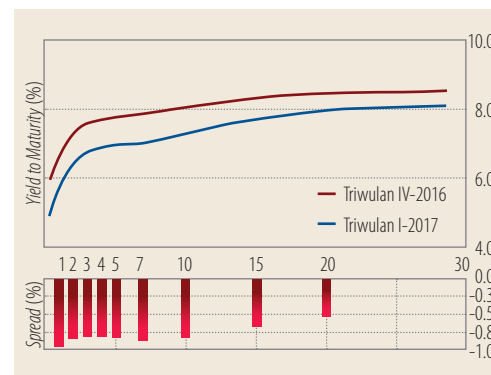
Selama triwulan I-2017 transaksi investor asing membukukan *net buy* sejumlah Rp8,35 triliun.

Grafik I - 27 Perkembangan IHSG dan Net Asing

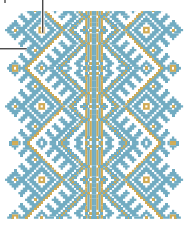


Periode	IHSG	Net Sell/Buy (Rp Triliun)
2015	Triwulan I	5,518.68
	Triwulan II	4,910.66
	Triwulan III	4,223.91
	Triwulan IV	4,593.01
Total		-22.59
2016	Triwulan I	4,845.37
	Triwulan II	5,016.65
	Triwulan III	5,364.80
	Triwulan IV	5,296.71
2017	Triwulan I	8,35

Grafik I - 28 Indonesia Government Securities Yield Curve (IBPA-IGSYC)



Secara umum kinerja pasar Obligasi mengalami peningkatan dibanding periode sebelumnya. Hal ini terlihat dari *yield* Obligasi Pemerintah menunjukkan tren penurunan dengan rata-rata *yield* untuk seluruh tenor turun sebesar -64,90 bps. Rata-rata *yield* tenor pendek, menengah,



dan panjang mengalami penurunan masing-masing sebesar -84,6 bps, -83,9 bps, dan -59 bps.

Tabel I - 9 Perkembangan Transaksi Perdagangan Surat Hutang (laporan CTP PLTE)

Jenis Transaksi	Triwulan I-2016			Triwulan IV-2016			Triwulan I-2017		
	Volume	Nilai	Frekuensi	Volume	Nilai	Frekuensi	Volume	Nilai	Frekuensi
	Rp T	Rp T	(Kali)	Rp T	Rp T	(Kali)	Rp T	Rp T	(Kali)
Obligasi:									
- Korporasi	49,71	49,81	5.845	60,59	60,86	5.992	58,84	59,18	6.212
- SUN	899,86	899,17	51.618	981,54	997,86	48.893	955,64	965,92	48.514
Total	949,57	949,98	57.463	1.042,13	1.058,72	54.885	1.014,48	1.025,10	54.726
Repo	63,44	59,15	171	58,15	55,01	242	103,72	100,12	369

Volume perdagangan obligasi pemerintah pada triwulan I-2017 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan triwulan IV-2016 yaitu Rp25,90 triliun (-2,64%) menjadi Rp955,64 triliun. Adapun nilai perdagangan mengalami penurunan sebesar Rp31,94 triliun (-3,20%) menjadi Rp965,92 triliun dan frekuensi transaksi mengalami penurunan sebesar 379 kali transaksi (-0,78%) menjadi 48.514 kali. Namun, jika dibandingkan dengan triwulan I-2016, volume perdagangan mengalami peningkatan sebesar Rp55,78 triliun (6,20%) menjadi Rp955,64 triliun, nilai perdagangan mengalami peningkatan sebesar Rp66,75 triliun (7,42%) menjadi Rp965,92 triliun dan frekuensi menurun sebesar 3.104 kali transaksi (-6,01%) menjadi 48.514 kali.

Volume dan nilai transaksi perdagangan obligasi korporasi pada triwulan I-2017 juga mengalami penurunan jika dibandingkan dengan triwulan IV-2016. Di sisi lain, apabila dibandingkan dengan triwulan I-2016, volume dan nilai transaksi mengalami peningkatan. Apabila dibandingkan dengan triwulan IV-2016, volume perdagangan turun sebesar Rp1,75 triliun (2,89%) menjadi Rp58,84 triliun. Nilai perdagangan turun sebesar Rp1,68 triliun (-2,77%) menjadi Rp59,18 triliun. Namun, frekuensi perdagangan mengalami kenaikan

sebesar 220 kali transaksi (3,67%) menjadi 6.212 kali. Sementara itu, jika dibandingkan dengan triwulan I-2016, volume perdagangan naik sebesar Rp9,13 triliun (18,37%) menjadi Rp58,84 triliun. Nilai perdagangan naik sebesar Rp9,37 triliun (18,80%) menjadi Rp59,18 triliun. Frekuensi naik sebesar 367 kali (6,28%) menjadi 6.212.

Tabel I - 10 Jumlah Perusahaan Efek

No	Jenis Izin Usaha	Jumlah
1	Perantara Pedagang Efek	36
2	Penjamin Emisi Efek *)	3
3	Perantara Pedagang Efek + Penjamin Emisi Efek	88
4	Perantara Pedagang Efek + Manajer Investasi	2
5	Penjamin Emisi Efek + Manajer Investasi	-
6	Perantara Pedagang Efek + Penjamin Emisi Efek + Manajer Investasi	3
Total		132

*) Khusus izin Penjamin Emisi Efek yang tidak melakukan aktivitas sebagai Perantara Pedagang Efek

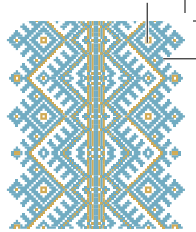
Pada triwulan ini tidak terdapat perizinan baru atau peningkatan izin atau pencabutan izin usaha Perusahaan Efek (PE), sehingga jumlah PE yang terdaftar di OJK sejumlah 132 PE.

Terkait dengan kegiatan PE di berbagai lokasi selain Kantor Pusat, OJK mencatat pelaporan pembukaan sejumlah 12 lokasi kantor cabang dan penutupan sejumlah enam lokasi kantor cabang.

Tabel I - 11 Jumlah Lokasi Kegiatan PE Selain Kantor Pusat

Periode	2016	2017
	s.d. Triwulan VI	s.d. Triwulan I
Jumlah lokasi selain Kantor Pusat	663	669

Terkait izin Wakil Perusahaan Efek, sampai dengan periode laporan OJK menerbitkan izin orang perorangan sebanyak 102 izin dengan rincian 96 izin Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) dan sebanyak enam Izin Wakil Penjamin Emisi Efek (WPEE) sehingga jumlah pemegang izin mencapai 9.061 WPPE dan 2.024 WPEE.



Tabel I - 12 Proses Izin Wakil Perantara Pedagang Efek dan Wakil Penjamin Emisi Efek

Jenis Izin	Triwulan IV 2016		Triwulan I 2017		Izin Total s/d Triwulan I	Total Pemegang Izin
	Doku- men yg Masuk	Pemberi- an Ijin	Doku- men yg Masuk	Pemberi- an Ijin		
WPPE	237	151	183	96	96	9.061
WPEE	14	14	11	6	6	2.024
Total	251	165	194	102	102	11.085

Sesuai amanat POJK Nomor 27/POJK.04/2014 tentang Perizinan Wakil Penjamin Emisi Efek dan Wakil Perantara Pedagang Efek maka pemegang izin WPEE dan WPPE wajib memperpanjang izin setiap dua tahun dan dapat dilakukan paling cepat 90 hari sebelum masa izin habis. Pada periode laporan OJK menerima 264 dokumen perpanjangan izin dengan rincian 244 dokumen perpanjangan izin WPPE dan 20 dokumen perpanjangan izin WPEE dan menerbitkan 133 perpanjangan izin WPPE dan 12 perpanjangan izin WPEE. Selanjutnya, OJK telah menerbitkan 145 perpanjangan izin dengan rincian 133 perpanjangan izin WPPE dan 12 perpanjangan izin WPEE sehingga secara total OJK menerbitkan 4.958 perpanjangan izin dengan rincian 4.288 perpanjangan izin WPPE dan 670 perpanjangan izin WPEE

Tabel I - 13 Proses Perpanjangan Izin Wakil Perantara Pedagang Efek dan Wakil Penjamin Emisi Efek

Jenis Izin	Triwulan IV 2016		Triwulan I 2017		Izin Total s/d Triwulan I	Total
	Doku- men yang Masuk	Pemberi- an Ijin	Doku- men yang Masuk	Pemberi- an Ijin		
WPPE	3.124	4.024	244	133	133	4.288
WPEE	492	492	20	12	12	670
Total	3.616	4.516	264	145	145	4.958

Selain Perizinan WPEE dan WPPE, OJK menerbitkan POJK Nomor 22/POJK.04/2016 tentang Segmentasi Perizinan Wakil Perantara Pedagang Efek. POJK tersebut memberlakukan segmentasi terhadap WPPE menjadi Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran (WPPEP) dan Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran Terbatas (WPPEPT). Sampai periode laporan,

OJK menerima 122 dokumen perizinan dengan rincian 118 dokumen permohonan izin WPPEP dan empat permohonan WPPEPT. OJK juga menerbitkan 19 izin WPPEP. Sementara itu, untuk WPPEPT belum menerbitkan pemberian izin.

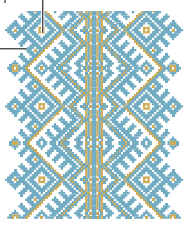
Tabel I - 14 Proses Perizinan Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran dan Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran Terbatas

Jenis Izin	Triwulan IV 2016		Triwulan I 2017		Izin Total s/d Triwulan I	Total
	Doku- men yang Masuk	Pemberi- an Ijin	Doku- men yang Masuk	Pemberi- an Ijin		
WPPEP	0	0	118	19	19	19
WPPEPT	0	0	4	0	0	0
Total	0	0	122	19	19	19

1.3.2 Perkembangan Pengelolaan Investasi

Sepanjang triwulan I-2017, kinerja Reksa Dana menunjukkan pertumbuhan yang cukup menggembirakan. Pertumbuhan Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana pada triwulan I-2017 meningkat sebesar Rp25,67 triliun (7,58%) menjadi Rp364,42 triliun dibandingkan triwulan IV-2016 sebesar Rp338,75 triliun.

Pada triwulan I-2017, NAB Reksa Dana Pasar Uang menunjukkan kenaikan jumlah NAB terbesar yaitu Rp12,35 triliun (43,27%) dibandingkan dengan triwulan IV-2016, diikuti oleh Reksa Dana Pendapatan Tetap sebesar Rp6,98 triliun (10,03%), Reksa Dana Terproteksi sebesar Rp3,94 triliun (4,64%), Reksa Dana Syariah sebesar Rp2,39 triliun (16,02%), Reksa Dana Campuran sebesar Rp1,70 triliun (8,08%), *Exchange Traded Fund* (ETF) sebesar Rp1,40 triliun (23,10%), dan Reksa Dana Indeks sebesar Rp0,27 triliun (45,00%). Namun demikian Reksa Dana Saham mengalami penurunan sebesar Rp3,37 triliun (-2,98%). Penurunan tersebut dikarenakan banyaknya *redemption* untuk merealisasikan keuntungan atau melakukan *profit taking* kembali atas investasi dalam portofolio saham pada periode sebelumnya.


Tabel I - 15 Perkembangan NAB per Jenis Reksa Dana

NAB Per Jenis Reksa Dana	2016 (dalam triliun rupiah)				2017 (dalam triliun rupiah)
	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Triwulan I
RD Pasar Uang	33,61	26,96	30,51	28,54	40,89
RD Pendapatan Tetap	55,18	62,94	68,67	69,56	76,54
RD Saham	109,31	112,41	101,89	113,10	109,73
RD Campuran	19,87	21,15	22,16	21,05	22,75
RD Terproteksi	61,35	70,57	75,40	84,92	88,86
RD Indeks	0,89	0,86	0,51	0,60	0,87
ETF	3,67	4,65	5,49	6,06	7,46
RD Syariah*	9,43	9,90	12,09	14,91	17,31
Total	293,31	309,44	316,72	338,75	364,42

*) termasuk ETF Saham Syariah

Selanjutnya, dana kelolaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) mengalami penurunan sebesar 8,04% menjadi Rp16,22 triliun pada triwulan I-2017. Namun demikian, jumlah kontrak RDPT justru mengalami kenaikan menjadi 77 RDPT dari sebelumnya 73 RDPT. 77 RDPT tersebut terdiri dari 51 RDPT proyek dengan dana kelolaan sebesar Rp11,94 triliun dan 26 RDPT non proyek dengan dana kelolaan sebesar Rp4,27 triliun.

Tabel I - 16 Perkembangan Reksa Dana dan Produk Investasi Lainnya

Jenis Investasi		2016				2017
		Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Triwulan I
Reksa Dana	Jumlah	1.150	1.226	1.347	1.425	1.491
	Total NAB	293,31	309,44	316,72	338,75	364,42
RDPT	Jumlah	67	63	69	73	77
	Total NAB	19,49	20,47	19,19	17,64	16,22
EBA	Jumlah	7	7	7	7	7
	Nilai Sekuritisasi	2,38	2,13	1,96	1,79	1,63
EBA-SP	Jumlah	1	1	2	3	3
	Nilai Sekuritisasi	0,20	0,20	0,70	1,70	1,43
DIRE	Jumlah	1	1	2	2	3
	Total Nilai	0,53	0,56	0,56	0,56	0,56
KPD	Jumlah	279	279	317	372	372
	Total Nilai	138,36	144,59	165,62	164,01	177,89

*) Dalam Rp triliun

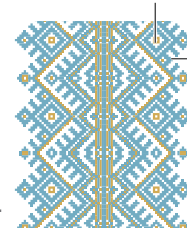
Selama periode laporan, OJK menerbitkan satu izin baru untuk Kontrak Investasi Kolektif Dana Investasi Real Estate (DIRE), sehingga KIK DIRE berjumlah tiga KIK dengan dana kelolaan sebesar Rp0,56 triliun. Adapun selama periode laporan, OJK tidak menerbitkan surat izin baru Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset-Surat Partisipasi (EBA-SP) dan Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (EBA). Jumlah KIK EBA SP tetap berjumlah tiga KIK dengan dana kelolaan sebesar Rp1,43 triliun atau menurun sebesar 18,88% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Sementara itu, KIK EBA juga berjumlah tujuh KIK dengan dana kelolaan sebesar Rp1,63 triliun atau menurun sebesar 8,94% dibandingkan triwulan sebelumnya. Penurunan tersebut dikarenakan adanya hutang (KPR) yang menjadi sekuritisasi dalam KIK EBA dan KIK EBA-SP telah jatuh tempo.

Pada triwulan I-2017, nilai Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) meningkat sebesar 8,46% menjadi Rp177,89 triliun. Namun demikian, jumlah kontrak KPD tidak mengalami perubahan, yaitu tetap sebanyak 372 KPD.

Sampai dengan triwulan I-2017, OJK telah menerbitkan 95 Surat Efektif pernyataan pendaftaran Reksa Dana yang unit penyertaannya ditawarkan melalui penawaran umum.

Tabel I - 17 Jenis Reksa Dana Yang Mendapat Surat Efektif

Jenis Reksa Dana	Jumlah Surat Efektif
Reksa Dana Saham	13
Reksa Dana Campuran	11
Reksa Dana Pendapatan Tetap	9
Reksa Dana Pasar Uang	8
Reksa Dana Terproteksi	45
Reksa Dana ETF-Pendapatan Tetap	1
Reksa Dana Syariah Pendapatan Tetap	2
Reksa Dana Syariah Saham	2
Reksa Dana Syariah Terproteksi	3
Reksa Dana Syariah Pasar Uang	1
Total	95



Tabel I - 18 Perkembangan Pelaku di Industri Pengelolaan Investasi yang Memperoleh Izin

INDIVIDU	2016				2017
	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Triwulan I
Wakil Manajer Investasi (WMI)	2.864	2.932	2.959	3.043	3.136
Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana (WAPERD)	20.094	20.912	21.672	22.271	23.182
Penasehat Investasi (PI)	3	3	4	4	4
Institusi					
Manajer Investasi (MI)	84	84	84	85	85
Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD)	28	30	30	32	32
Penasehat Investasi (PI)	2	2	2	3	3

Di samping itu, OJK juga menerbitkan 29 surat pembubaran Reksa Dana yang terdiri dari 28 Reksa Dana Konvensional dan satu Reksa Dana Syariah. Adapun rincian pembubaran Reksa Dana tersebut terdiri dari :

- 20 Reksa Dana Terproteksi terdiri dari 18 Reksa Dana dibubarkan karena kesepakatan MI dan BK dan dua Reksa Dana tidak terpenuhinya minimum dana kelolaan;
- Dua Reksa Dana Saham yang dibubarkan karena kesepakatan MI dan BK;
- Satu Reksa Dana Pendapatan Tetap

dibubarkan karena memiliki NAB kurang dari Rp10 miliar dalam 90 hari berturut-turut;

- Lima Reksa Dana Pasar Uang terdiri dari tiga Reksa Dana dibubarkan karena kesepakatan MI dan BK dan dua Reksa Dana tidak dapat memenuhi minimum dana kelolaan;
- Satu Reksa Dana Syariah Pendapatan Tetap karena kesepakatan MI dan BK.

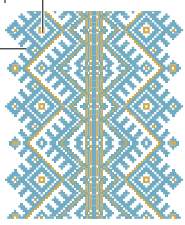
Selama periode triwulan I-2017, OJK tidak memberikan izin kepada pelaku institusi. Jumlah MI, APERD dan PI institusi masing-masing sebanyak 85 MI, 32 APERD, dan 3 PI institusi. Sementara itu, pelaku individu industri Pengelolaan investasi mengalami peningkatan pada WMI dan WAPERD masing-masing sebesar 3,06% dan 4,09% dibandingkan triwulan sebelumnya. Selain itu, selama periode ini OJK tidak menerbitkan izin kepada PI individu.

1.3.3 Perkembangan Emiten dan Perusahaan Publik

Selama triwulan I-2017, jumlah Penawaran Umum mengalami peningkatan sebesar 109% dibanding triwulan I-2016 bersamaan dengan peningkatan nilai emisi Penawaran Umum sebesar 94%. Jumlah emisi Penawaran Umum Perdana Saham tidak mengalami perubahan namun terdapat peningkatan nilai emisi sebesar

Tabel I - 19 Perkembangan Penawaran Umum (Emisi)

Jenis Penawaran Efek	Triwulan I 2016		Triwulan IV 2016		Triwulan I 2017		Δ (%) Jumlah Emisi Triwulan I 2016 : Triwulan I 2017	Δ (%) Nilai Emisi Triwulan I 2016 : Triwulan I 2017
	Jumlah Emisi	Nilai Emisi (Dalam miliar rupiah)	Jumlah Emisi	Nilai Emisi (Dalam miliar rupiah)	Jumlah Emisi	Nilai Emisi (Dalam miliar rupiah)		
Penawaran Umum Perdana Saham (IPO)	2	110	2	1.404	2	571	0%	419%
Penawaran Umum Terbatas (PUT/Rights Issue)	2	669	13	23.183	8	9.491	300%	1319%
Penawaran Umum Efek Bersifat Hutang	7	16.292	24	32.907	13	23.092	86%	42%
a. Obligasi/ Sukuk + Subordinasi	0	0	8	6.750	0	0	0%	0%
b. PUB Obligasi/ Sukuk Tahap I	0	0	8	14.800	1	500	100%	100%
c. PUB Obligasi/ Sukuk Tahap II dst	7	16.292	8	11.357	12	22.592	39%	39%
Total Emisi	11	17.072	39	57.494	23	33.154	109%	94%



419%. Secara keseluruhan jumlah dan nilai emisi mengalami kenaikan pada Penawaran Umum Terbatas sebesar 300% dan 1319%, Penawaran Umum Obligasi/Sukuk Tahap I sebesar 100% dan 100%, dan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi/Sukuk Tahap II dst sebesar 39% dan 39%.

Tabel I - 20 Perkembangan Nilai Emisi Berdasarkan Sektor Industri pada Triwulan I-2017

No	Sektor Industri	Penawaran Umum Perdana	Penawaran Umum Terbatas	Penawaran Umum Efek Bersifat Hutang
1	Perbankan	-	703.050	4.000.000
2	Asuransi dan Pembiayaan	-	63.037	16.035.370
3	Sekuritas dan Investasi	-	112.497	-
4	Perdagangan	262.500	4.100.196	-
5	Perhubungan dan Telekomunikasi	308.619	242.690	-
6	Media Massa, Teknologi Informasi, Pariwisata dan Perusahaan Jasa Lainnya	-	-	-
7	Properti dan Perhotelan	-	408.933	-
8	Real Estate dan Konstruksi	-	3.860.313	1.657.000
9	Tekstil, Garmen, dan Alas Kaki	-	-	-
10	Barang Konsumsi	-	-	500.000
11	Aneka Industri Lainnya	-	-	-
12	Industri Dasar	-	-	-
13	Industri Logam	-	-	-
14	Industri Kimia	-	-	-
15	Agrobisnis	-	-	-
16	Pertambangan dan Kehutanan	-	-	900.000
Total		571.119	9.490.715	23.092.370

(dalam jutaan rupiah)

A. Penawaran Umum Perdana Saham

Selama triwulan I-2017, terdapat 11 perusahaan yang mengajukan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham, di mana sebanyak dua Perusahaan telah mendapat surat efektif dan sembilan Perusahaan masih dalam proses. Nilai emisi dari dua Emiten tersebut sebesar Rp571 miliar.

Tabel I - 21 Perusahaan Yang Melakukan Penawaran Umum Perdana Saham

No.	Emiten/Perusahaan Publik	Sektor	Tanggal Efektif	Nilai Emisi (dalam jutaan rupiah)
1	PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk	Perhubungan dan Telekomunikasi	6 Maret 2017	308.619
2	PT Bintraco Dharma Tbk.	Perdagangan	30 Maret 2017	262.500
Total				571.119

B. Penawaran Umum Terbatas (*Right Issue*)

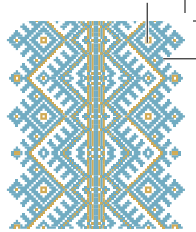
Pada triwulan I-2017, terdapat 12 perusahaan yang menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Terbatas dan delapan perusahaan telah mendapatkan Pernyataan Efektif dari OJK. Nilai emisi Penawaran Umum Terbatas dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) atau *right issue* dari perusahaan tersebut sebesar Rp9,49 triliun.

Tabel I - 22 Perusahaan Yang Melakukan Penawaran Umum Terbatas

No.	Emiten/Perusahaan Publik	Sektor	Tanggal Efektif	Nilai Emisi (dalam jutaan rupiah)
1	PT Bank Ina Perdana Tbk	Perbankan	3 Feb 2017	703.050
2	PT Red Planet Indonesia Tbk	Properti dan Perhotelan	6 Feb 2017	408.933
3	PT Buana Listya Tama Tbk	Perhubungan dan Telekomunikasi	20 Feb 2017	242.690
4	PT Pool Advista Indonesia Tbk	Sekuritas dan Investasi	27 Feb 2017	112.497
5	PT Rimo International Lestari Tbk	Perdagangan	2 Mar 2017	4.100.196
6	PT Batavia Prosperindo Finance Tbk	Asuransi dan Pembiayaan	6 Mar 2017	63.037
7	PT Sentul City Tbk	Real Estate dan Konstruksi	22 Mar 2017	2.320.859
8	PT PP Properti Tbk	Real Estate dan Konstruksi	27 Mar 2017	1.539.453
TOTAL				9.490.715

C. Penawaran Umum Efek Bersifat Hutang

Dalam memperoleh pendanaan di Pasar Modal, pelaku usaha melakukan penerbitan Efek bersifat Hutang melalui Penawaran Umum Obligasi, Penawaran Umum Sukuk


Tabel I - 23 Perusahaan yang telah Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Utang

PUB Obligasi Tahap I					
No	Emiten/Perusahaan Publik	Sektor	Jenis PUB	Tanggal Efektif	Nilai Emisi (dalam jutaan rupiah)
1	PT Mayora Indah Tbk	Barang Konsumsi	PUB Obligasi Tahap I	17 Feb '17	500.000
Total					500.000

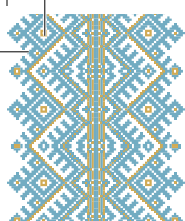
Tabel I - 24 Perusahaan yang telah Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Utang

PUB Obligasi Tahap II dst						
No	Emiten/Perusahaan Publik	Sektor	Jenis PUB	Tanggal Efektif	Masa Penawaran	Nilai Emisi (dalam jutaan rupiah)
1	PT Toyota Astra Financial Services	Asuransi dan Pembiayaan	PUB Obligasi II Tahap II	20 Mei 2016	8-9 Februari 2017	1.555.370
2	PT Waskita Karya (Persero) Tbk	Real Estate dan Konstruksi	PUB Obligasi II Tahap III	6 Juni 2016	14 dan 16 Februari 2017	1.657.000
3	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	Asuransi dan Pembiayaan	PUB Obligasi II Tahap IV	30 Mei 2016	17 dan 20 Februari 2017	5.221.000
4	PT Bank Bukopin Tbk	Perbankan	PUB Obligasi Subordinasi II Tahap II	23 Juni 2015	20-23 Februari 2017	1.600.000
5	PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	Asuransi dan Pembiayaan	PUB Obligasi III Tahap VII	30 Juni 2015	24-27 Februari 2017	1.677.000
6	PT BFI Finance Indonesia Tbk	Asuransi dan Pembiayaan	PUB Obligasi III Tahap II	17 Oktober 2016	20-21 Februari 2017	1.000.000
7	PT Astra Sedaya Finance	Asuransi dan Pembiayaan	PUB Obligasi III Tahap III	3 Mei 2016	27-28 Februari 2017	2.500.000
8	PT Bank Pan Indonesia Tbk	Perbankan	PUB Obligasi Subordinasi II Tahap II	17 Juni 2016	13-14 Maret 2017	2.400.000
9	PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk	Asuransi dan Pembiayaan	PUB Obligasi III Tahap V	25 Juni 2015	16 - 17 Maret 2017	2.014.000
			PUB Sukuk II Tahap III			386.000
10	PT Indomobil Finance Indonesia	Asuransi dan Pembiayaan	PUB Obligasi II Tahap IV	15 April 2015	17-20 Maret 2017	410.000
11	PT Surya Artha Nusantara Finance	Asuransi dan Pembiayaan	PUB Obligasi II Tahap II	1 Juni 2016	21-24 Maret 2017	1.272.000
12	PT Medco Energi Indonesia Tbk	Pertambangan dan Kehutanan	PUB Obligasi II Tahap IV	28 Juni 2016	24 Maret 2017	900.000
Total						22.592.370

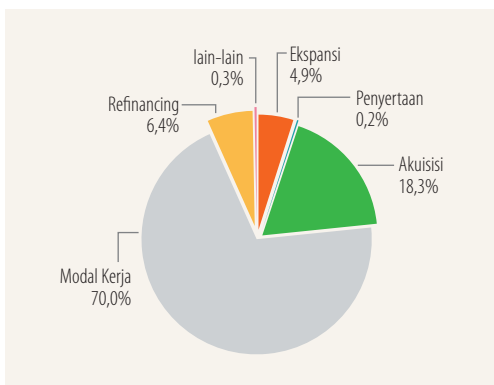
dan Penawaran Umum Berkelanjutan. Pada triwulan ini terdapat satu Perusahaan melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi (PUB Obligasi) Tahap I dan 12 Perusahaan yang telah melakukan PUB Obligasi Tahap II dan seterusnya. Total nilai emisi Penawaran Umum Efek Bersifat Utang tersebut sebesar Rp23.09 triliun.

D. Rencana Penggunaan Dana

Dari seluruh Penawaran Umum yang dilakukan di triwulan I-2017, persentase terbesar penggunaan dana adalah untuk modal kerja, yaitu sebanyak 70,0% atau sekitar Rp23,07 triliun. Rincian porsi penggunaan dana lainnya adalah 18,3% atau sekitar Rp6,02 triliun untuk akuisisi; 6,4% atau sekitar Rp2,09 triliun untuk restrukturisasi hutang; dan 4,9% atau sekitar Rp1,63 triliun untuk ekspansi.



Grafik I - 29 Rencana Penggunaan Dana



1.3.4 Perkembangan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal

A. Lembaga Penunjang Pasar Modal Serta Pernerjemkat Efek

Lembaga Penunjang Pasar Modal merupakan Lembaga yang memberikan jasa pada satu pihak atau lebih sesuai izin kegiatan usahanya di Pasar Modal, terdiri dari Biro Administrasi Efek, Bank Kustodian, Wali Amanat, Pernerjemkat Efek, dan Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM). Pada triwulan I-2017, OJK menerbitkan satu Surat Persetujuan

Sebagai Bank Kustodian Atas Nama PT Bank HSBC Indonesia.

Jumlah Lembaga Penunjang Pasar Modal yang tercatat di OJK adalah sebagai berikut:

Tabel I - 26 Jumlah Lembaga Penunjang Pasar Modal

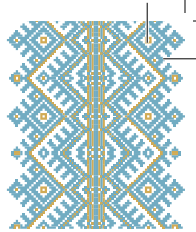
Lembaga Penunjang	2016	2017	Jenis
	TW IV	TW I	
Biro Administrasi Efek	10	10	Surat Perizinan
Bank Kustodian	21	22	Surat Persetujuan
Wali Amanat	12	12	Surat Tanda Terdaftar
Pernerjemkat Efek	2	2	Surat Perizinan
Ahli Syariah Pasar Modal	0	0	Surat Perizinan

B. Biro Administrasi Efek (BAE)

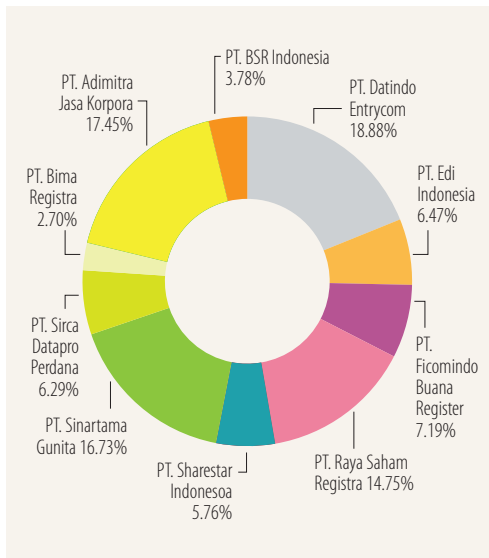
Berdasarkan jumlah klien yang dimiliki oleh BAE, dari data di atas dapat diketahui pangsa pasar BAE didominasi oleh PT. Datindo Entrycom yang mencapai 18,88%, PT. Adimitra Jasa Korpora sebanyak 17,45%, PT. Sinartama Gunita sebanyak 16,73% dari keseluruhan klien yang menggunakan jasa BAE.

Tabel I - 25 Rencana Penggunaan Dana Atas Aksi Korporasi Pada Triwulan I-2017 Berdasarkan Sektor Industri (dalam jutaan rupiah)

No	Sektor Industri	Ekspansi	Penyertaan	Akuisisi	Modal Kerja	Restruk. Hutang	Lain-Lain
1	Perbankan	-	-	-	4.659.652	-	-
2	Asuransi dan Pembiayaan	-	-	56.000	15.445.919	560.000	-
3	Sekuritas dan Investasi	-	-	-	109.133	-	-
4	Perdagangan	82.453	50.000	3.948.696	100.451	45.000	82.453
5	Perhubungan dan Telekomunikasi	25.337	-	-	242.725	265.382	-
6	Media Massa, Teknologi Informasi, Pariwisata dan Perusahaan Jasa Lainnya	-	-	-	-	-	-
7	Properti dan Perhotelan	110.000	-	2.017.499	9.055	285.789	-
8	Real Estate dan Konstruksi	1.050.000	-	-	2.251.837	150.000	-
9	Tekstil, Garmen, dan Alas Kaki	-	-	-	-	-	-
10	Barang Konsumsi	-	-	-	246.400	250.000	-
11	Aneka Industri Lainnya	-	-	-	-	-	-
12	Industri Dasar	-	-	-	-	-	-
13	Industri Logam	-	-	-	-	-	-
14	Industri Kimia	-	-	-	-	-	-
15	Agrobisnis	-	-	-	-	-	-
16	Pertambangan dan Kehutanan	358.056	-	-	-	537.084	-
Total		1.625.846	50.000	6.022.196	23.065.173	2.093.255	82.453



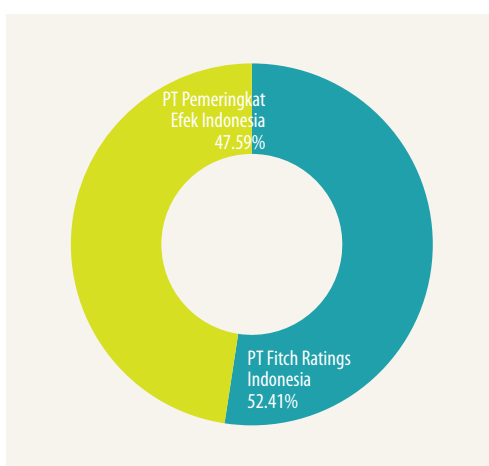
Grafik I - 30 Market Share BAE Berdasarkan Jumlah Klien Sampai Triwulan I-2017 (per Maret 2017)



C Pemingkat Efek

Sampai triwulan I-2017, total perusahaan yang diperingkat oleh dua Pemingkat Efek sebanyak 166 Perusahaan. Pangsa pasar berdasarkan jumlah perusahaan yang diperingkat masing-masing Pemingkat Efek adalah PT Pemingkat Efek Indonesia sebanyak 79 Perusahaan dan PT Fitch Ratings Indonesia sebanyak 87 Perusahaan. Berikut *market share company rating* (%) berdasarkan jumlah perusahaan yang diperingkat oleh Perusahaan Pemingkat Efek triwulan I-2017:

Grafik I - 31 Market Share Company Rating Triwulan I 2017



Berikut data lengkap komposisi peringkat perusahaan yang masuk kategori *Investment Grade* dan *Non Investment Grade* per triwulan I-2017:

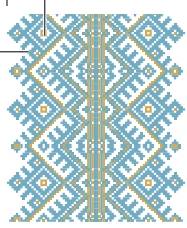
Tabel I -27 Data Lengkap Komposisi Peringkat Perusahaan yang Masuk Kategori *Investment Grade* Dan *Non Investment Grade*

Pemingkat Efek	Investment Grade (Perusahaan)		Non Investment Grade (Perusahaan)	
	Triwulan IV-2016	Triwulan I-2017	Triwulan IV-2016	Triwulan I-2017
PT Pemingkat Efek Indonesia	78	76	6	3
PT Fitch Ratings Indonesia	84	86	1	1
Total	162	162	7	4

D. Profesi Penunjang Pasar Modal

Profesi Penunjang Pasar Modal adalah profesi yang menyediakan jasa pada satu pihak atau lebih di bidang Pasar Modal, terdiri dari Akuntan, Penilai, Konsultan Hukum dan Notaris. Dalam periode laporan, OJK menerbitkan 12 Surat Tanda Terdaftar (STTD) untuk Akuntan, empat STTD untuk Konsultan Hukum, delapan STTD untuk Penilai dan tiga STTD untuk Notaris. Selain menerbitkan STTD, OJK juga menetapkan 44 Keputusan Dewan Komisioner terkait pembatalan STTD yang terdiri dari empat pembatalan STTD Akuntan, lima pembatalan STTD Konsultan Hukum dan 35 pembatalan STTD Notaris, seluruh pembatalan STTD tersebut merupakan permintaan sendiri dari profesi yang bersangkutan. Pada triwulan I-2017 ini, terdapat dua Akuntan yang dilaporkan meninggal dunia, satu Penilai yang dilaporkan meninggal dunia dan satu Notaris yang dilaporkan meninggal dunia, serta dua Notaris yang Pensiun.

Mulai triwulan I-2016, Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM) masuk dalam pengawasan OJK sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan OJK Nomor 16/POJK.04/2015 Tentang Ahli Syariah Pasar Modal. Selama triwulan I-2017, OJK menerbitkan tiga Surat



Keputusan Pemberian Izin Perorangan sebagai ASPM.

Berikut merupakan hasil pemetaan profesi Penunjang Pasar Modal:

Profesi	Aktif	
	Triwulan IV-2016	Triwulan I-2017
Akuntan	604	610
Konsultan Hukum	721	720
Penilai	199	206
Notaris	1378	1343
Penilai Pemerintah	251	251
Ahli Syariah Pasar Modal	32	35

Untuk meningkatkan profesionalisme Profesi Penunjang Pasar Modal, OJK selama triwulan I-2017 bekerjasama dengan asosiasi telah menyelenggarakan tiga Pendidikan Profesi Lanjutan (PPL). Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

- a. Akuntan
FAPM-IAPI telah menyelenggarakan PPL sebanyak satu kali pada triwulan I-2017 dengan materi kegiatan bertemakan *Year End Reminder Audit & Temuan - Temuan Penerapan Peraturan Nomor: VIII.G.7 pada LKT Emiten.*
- b. Konsultan Hukum
HKHPM telah menyelenggarakan PPL sebanyak dua kali pada triwulan I-2017 dengan materi Peran Organisasi Advokat dalam Menghasilkan Advokat yang Kompeten, Berintegrasi & Profesional dan Diklat Transaksi Berbasis Syariah Untuk Konsultan Hukum Pasar Modal.

1.4 PERKEMBANGAN INDUSTRI KEUANGAN NON BANK

Sepanjang triwulan I-2017, kinerja Industri Keuangan Non Bank (IKNB) bergerak positif. Hal tersebut tercermin dari meningkatnya total aset IKNB sebesar 4,50% menjadi Rp1.945,40 triliun. Adapun penyumbang terbesar kenaikan aset

IKNB adalah industri Asuransi Konvensional dan BPJS, Dana Pensiun, serta Lembaga Jasa Keuangan Khusus.

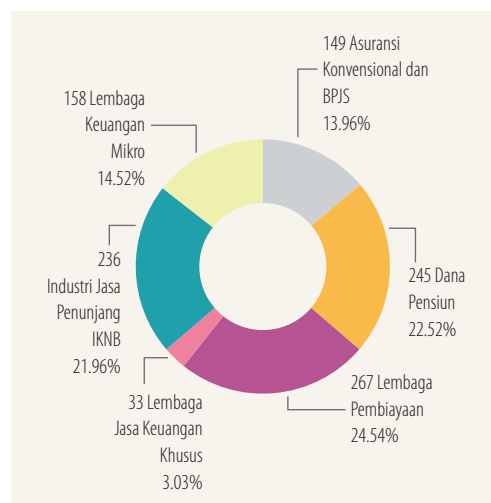
Tabel I - 29 Total Aset IKNB (dalam Triliun Rupiah)

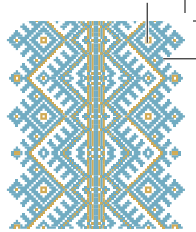
No	Industri	Triwulan I-2016	Triwulan II-2016	Triwulan III-2016	Triwulan IV-2016	Triwulan I-2017
1	Asuransi Konvensional dan BPJS	842,29	872,02	910,03	932,08	981,14
2	Dana Pensiun	220,13	227,01	235,51	238,30	246,80
3	Lembaga Pembiayaan	472,52	487,30	487,99	509,22	516,69
4	Lembaga Jasa Keuangan Khusus	153,75	161,77	166,41	174,50	193,18
5	Industri Jasa Penunjang IKNB *)	6,81	6,81	6,81	7,25	7,30
6	Lembaga Keuangan Mikro	0,22	0,26	0,27	0,28	0,29
Total Aset		1.695,71	1.755,17	1.807,02	1.861,63	1.945,40

*) Revisi data dengan menambahkan aset PT PNM dan PT Danareksa
**) Aset Industri Jasa Penunjang IKNB adalah per Semester II 2016

Bila dilihat berdasarkan jumlah Pelaku, maka industri Lembaga Pembiayaan merupakan jumlah pelaku IKNB yang terbesar dengan jumlah sebanyak 267 pelaku, diikuti oleh Dana Pensiun, Industri Jasa Penunjang IKNB, Lembaga Keuangan Mikro, Asuransi Konvensional dan BPJS serta Lembaga Jasa Keuangan Khusus. Di samping itu, jumlah entitas Lembaga Keuangan Mikro sampai dengan triwulan I-2017 berjumlah 158 LKM atau tumbuh 29 LKM dibandingkan

Grafik I - 32 Komposisi Jumlah Pelaku IKNB Triwulan I-2017





dengan triwulan sebelumnya seiring dengan peningkatan jumlah pelaku IKNB lainnya.

1.4.1 Perkembangan Perasuransian Konvensional dan BPJS

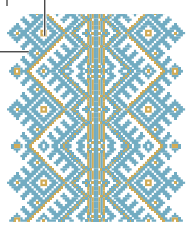
Sampai akhir periode laporan, aset industri Asuransi dan BPJS tumbuh 3,9% menjadi Rp981,14 triliun. Peningkatan aset tersebut seiring dengan peningkatan jumlah investasi yang naik 4,6% menjadi Rp816,14 triliun. Peningkatan investasi terbesar terdapat pada jenis investasi saham, reksa dana, serta Surat Berharga Negara (SBN). Peningkatan investasi pada jenis investasi saham seiring dengan meningkatnya nilai IHSG yang naik 271,4 poin menjadi 5.568,11 pada triwulan I-2017.

Sementara itu, bila dilihat dari jenis industri asuransi, maka kenaikan nilai investasi terbesar didominasi oleh asuransi jiwa dan asuransi wajib (BPJS) dengan total kenaikan investasi sebesar Rp30,27 triliun.

Peningkatan aset dan investasi industri Asuransi dan BPJS didukung juga dengan peningkatan kinerja industri yaitu dari sisi pendapatan premi maupun klaim bruto yang masing-masing meningkat sebesar 17,06% dan 23,89% menjadi Rp86,11 triliun dan Rp56,47 triliun. Komposisi pendapatan premi masih didominasi Asuransi Jiwa dengan porsi sebesar 28,10%, diikuti oleh BPJS sebesar 16,90%, Asuransi Umum dan Reasuransi sebesar 3,13%, serta Asuransi Wajib sebesar 1,05%

Tabel I - 30 Indikator Perusahaan Perasuransian Konvensional dan BPJS (dalam Triliun Rupiah)

No.	Jenis Indikator	Triwulan I-2016	Triwulan II-2016	Triwulan III-2016	Triwulan IV-2016	Triwulan I-2017
1	Total Aset					
	Asuransi Jiwa	347,86	363,16	385,24	395,11	419,50
	Asuransi Umum dan Reasuransi	137,67	139,41	136,70	139,47	140,70
	Asuransi Wajib	114,14	115,93	117,55	120,01	123,01
	BPJS	242,60	253,52	272,60	289,98	297,93
	Jumlah	842,29	872,02	912,09	944,58	981,14
2	Total Investasi					
	Asuransi Jiwa	297,60	313,02	334,44	343,27	365,22
	Asuransi Umum dan Reasuransi	69,00	68,16	69,13	69,71	71,80
	Asuransi Wajib	89,21	88,36	92,84	94,28	102,60
	BPJS	227,74	235,83	256,70	273,16	276,52
	Jumlah	683,55	705,36	753,12	780,42	816,14
3	Total Pendapatan Premi					
	Asuransi Jiwa	27,47	61,17	95,71	137,79	35,19
	Asuransi Umum dan Reasuransi	18,20	38,02	54,04	74,93	18,77
	Asuransi Wajib	2,85	5,77	8,69	11,73	2,88
	BPJS	25,03	55,25	84,69	116,28	29,26
	Jumlah	73,54	160,21	243,12	340,73	86,11
4	Total Klaim Bruto					
	Asuransi Jiwa	17,07	36,26	58,65	79,05	20,39
	Asuransi Umum dan Reasuransi	8,21	16,67	23,96	32,61	7,74
	Asuransi Wajib	2,07	4,56	7,18	9,91	2,64
	BPJS	18,24	41,77	63,87	86,80	25,70
	Jumlah	45,58	99,26	153,67	208,37	56,47
5	Total Liabilitas					
	Asuransi Jiwa	270,41	287,27	305,01	317,53	336,43
	Asuransi Umum dan Reasuransi	84,88	86,72	84,43	85,86	85,03
	Asuransi Wajib	92,21	93,56	95,16	97,96	99,05
	BPJS	32,52	33,33	36,33	40,56	40,37
	Jumlah	480,02	500,87	520,93	541,91	560,88



Sampai dengan periode laporan, tidak terdapat perubahan jumlah pelaku dibanding triwulan sebelumnya, yaitu 138 perusahaan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel I - 31 Jumlah Industri Perusahaan Perasuransian Konvensional dan BPJS

No	Perusahaan Perasuransian	Triwulan I-2016	Triwulan II-2016	Triwulan III-2016	Triwulan IV-2016	Triwulan I-2017
1	Asuransi Jiwa					
	a. BUMN	1	1	1	1	1
	b. Swasta Nasional	27	27	27	23	24
	c. Patungan	22	22	22	28	27
	Sub Total	50	50	50	52	52
2	Asuransi Kerugian					
	a. BUMN	3	3	3	2	2
	b. Swasta Nasional	58	58	58	53	53
	c. Patungan	15	15	15	21	21
	Sub Total	76	76	76	76	76
3	Reasuransi	6	6	5	5	5
4	BPJS	2	2	2	2	2
5	Penyelenggara Asuransi Wajib	3	3	3	3	3
	Total Asuransi dan Reasuransi	137	137	136	138	138

Tabel I - 32 Densitas dan Penetrasi Industri Perasuransian Konvensional dan BPJS

Uraian	Triwulan I-2016	Triwulan II-2016	Triwulan III-2016	Triwulan IV-2016	Triwulan I-2017
GDP (miliar Rupiah)	12.406.800	12.406.800	12.406.800	12.406.800	12.406.800
Premi Bruto (miliar Rupiah)	272.878	289.221	300.882	323.564	335.199
Jumlah Penduduk (juta)	255	255	255	257	257
Penetrasi	2,20%	2,33%	2,43%	2,61%	2,70%
Densitas (ribu Rupiah)	1.070,11	1.134,20	1.179,93	1.259,00	1.304,28

Catatan:

- 1) Angka Premi Bruto merupakan premi bulan Maret 2017
- 2) Angka GDP merupakan angka sementara dari Indikator Ekonomi BPS per Februari 2016.
- 3) Penetrasi: Premi Bruto/GDP
- 4) Densitas: Premi Bruto/Jumlah penduduk

Selama periode laporan, densitas asuransi yang menggambarkan rata-rata pengeluaran

tiap penduduk untuk pembayaran premi asuransi naik sebesar 3,60% menjadi Rp1.304,28 dibanding triwulan sebelumnya. Adapun tingkat penetrasi asuransi yang menggambarkan kontribusi premi bruto terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 2,70% atau naik 0,09%. Kenaikan penetrasi terjadi karena laju pertumbuhan premi asuransi dibandingkan nilai PDB yang tetap.

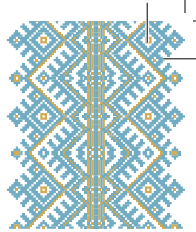
Tabel I - 33 Risk Based Capital (RBC) Industri Asuransi

Uraian	Triwulan I-2016	Triwulan II-2016	Triwulan III-2016	Triwulan IV-2016	Triwulan I-2017
Asuransi Jiwa	538,7%	527,6%	528,8%	432,4%	512,3%
Asuransi Umum dan Reasuransi	253,5%	265,1%	268,6%	266,7%	279,7%

Sementara itu, ketahanan permodalan industri masih terjaga dengan rata-rata RBC untuk industri asuransi jiwa sebesar 512,3% atau naik 14,9% dibanding periode sebelumnya. Sementara itu, RBC Asuransi Umum sebesar 279,7% atau naik 13,0% dibanding periode sebelumnya. Dengan demikian, RBC kedua jenis industri asuransi tersebut masih memenuhi batas ketentuan RBC minimal yaitu 120%.

1.4.2 Perkembangan Industri Dana Pensiun

Perkembangan industri Dana Pensiun selama periode laporan mengalami peningkatan yang tercermin dari indikator pertumbuhan aset dan investasi dana pensiun. Aset industri Dana Pensiun meningkat sebesar 3,57% menjadi Rp246,80 triliun bila dibandingkan triwulan sebelumnya. Peningkatan aset tersebut sejalan dengan meningkatnya nilai investasi sebesar 4,60% menjadi Rp239,30 triliun. Adapun penyumbang kenaikan nilai investasi industri terbesar adalah pada jenis investasi deposito yang naik 9,50% atau dari Rp57,35 triliun menjadi Rp62,8 triliun.



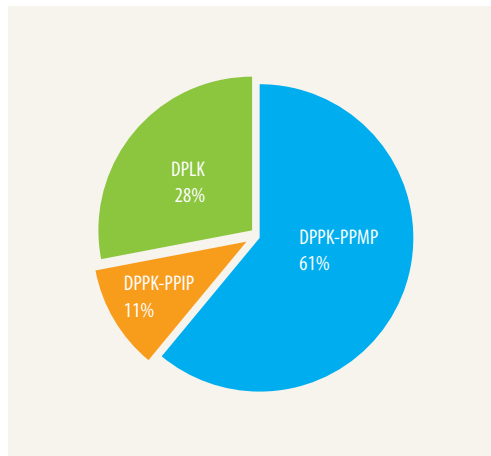
Tabel I - 34 Distribusi Aset Industri Dana Pensiun
(dalam Triliun Rupiah)

Jenis Program	Triwulan I-2016	Triwulan II-2016	Triwulan III-2016	Triwulan IV-2016	Triwulan I-2017
Dana Pensiun Pemberi Kerja - Program Pensiun Manfaat Pasti (DPPK - PPMP)	142,54	144,72	148,31	147,81	150,49
<i>Growth</i>	4,46%	1,53%	2,48%	-0,34%	1,81%
Dana Pensiun Pemberi Kerja - Program Pensiun Iuran Pasti (DPPK - PPIP)	23,36	25,55	26,56	26,65	27,45
<i>Growth</i>	5,62%	9,39%	3,96%	0,34%	3,00%
Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK)	54,23	56,74	60,64	63,84	68,86
<i>Growth</i>	12,92%	4,63%	6,87%	5,28%	7,86%
TOTAL ASET	220,13	227,01	235,51	238,30	246,80
<i>Growth</i>	6,55%	3,13%	3,74%	1,18%	3,57%

Tabel I - 35 Distribusi Investasi Industri Dana Pensiun
(dalam Triliun Rupiah)

Jenis Program	Triwulan I-2016	Triwulan II-2016	Triwulan III-2016	Triwulan IV-2016	Triwulan I-2017
Dana Pensiun Pemberi Kerja - Program Pensiun Manfaat Pasti (DPPK - PPMP)	135,60	136,82	141,07	139,87	145,04
<i>Growth</i>	4,29%	0,90%	3,11%	-0,85%	3,70%
Dana Pensiun Pemberi Kerja - Program Pensiun Iuran Pasti (DPPK - PPIP)	22,87	24,95	25,93	26,07	26,82
<i>Growth</i>	5,44%	9,09%	3,93%	0,54%	2,88%
Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK)	53,14	55,66	59,81	62,83	67,44
<i>Growth</i>	12,22%	4,73%	7,45%	5,05%	7,34%
TOTAL INVESTASI	211,61	217,43	226,80	228,77	239,30
<i>Growth</i>	6,30%	2,75%	4,31%	0,87%	4,60%

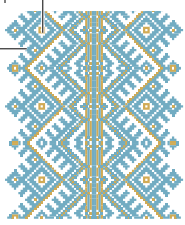
Grafik I - 33 Distribusi Investasi Industri Dana Pensiun



Di antara jenis investasi yang diperkenankan tersebut, terdapat empat jenis investasi yang mendominasi yaitu Deposito Berjangka, Surat Berharga Pemerintah, Obligasi, dan Saham. Jumlah Dana Pensiun yang aktif pada periode laporan adalah 245 Dana Pensiun. Pada periode ini terdapat empat pembubaran Dana pensiun dan satu Dana Pensiun berubah Program dari PPMP menjadi PPIP.

Tabel I - 36 Portofolio Investasi Dana Pensiun
(dalam triliun Rupiah)

No.	Jenis Aset Investasi	Triwulan I-2016	Triwulan II-2016	Triwulan III-2016	Triwulan IV-2016	Triwulan I-2017
1	Surat Berharga Pemerintah	43,98	48,11	52,91	54,33	56,10
2	Tabungan	0,17	0,24	0,26	0,19	0,21
3	Deposito <i>On Call</i>	1,75	1,25	1,45	1,09	1,71
4	Deposito Berjangka	59,54	54,73	56,91	57,35	62,80
5	Sertifikat Deposito	0,03	0,72	0,85	1,07	1,51
6	Sertifikat Bank Indonesia				0,44	0,004
7	Saham	28,43	29,18	29,98	28,71	29,93
8	Obligasi	44,54	47,44	49,08	48,39	48,54
9	Sukuk	1,75	2,25	1,84	1,95	2,12
10	Unit Penyertaan Reksadana	13,41	14,24	13,87	13,94	14,50
11	Medium Term Notes (MTN)				0,07	0,13
12	Efek Beragun Aset dari KIK EBA	0,19	0,18	0,51	0,50	0,49
13	Unit Penyertaan berbentuk KIK	0,16	0,14	0,14	0,14	0,13
14	Kontrak Opsi Saham				-	-
15	REPO				-	-
16	Penempatan Langsung pada Saham	6,86	7,69	7,58	7,47	7,60
17	Tanah	3,40	3,37	3,35	4,42	4,69
18	Bangunan	1,62	2,03	2,11	1,99	2,08
19	Tanah dan Bangunan	5,79	5,87	5,96	6,70	6,76
	TOTAL	206,39	213,57	224,61	228,77	234,71



Tabel I - 37 Jumlah Dana Pensiun

Jenis Dana Pensiun	2016				2017
	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Triwulan I
DPPK PPMP	188	186	184	180	177
DPPK PPIP	45	44	43	44	43
DPLK	25	25	25	25	25
Jumlah	258	255	252	249	245

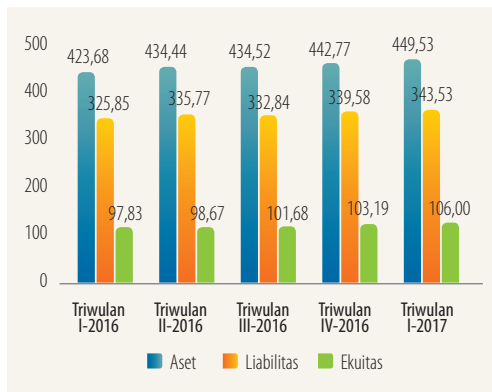
1.4.3 Perkembangan Industri Perusahaan Pembiayaan

Perkembangan industri perusahaan pembiayaan untuk periode triwulan I-2017 sebagai berikut:

A. Aset, Liabilitas, dan Ekuitas Perusahaan Pembiayaan

Sampai dengan periode laporan, total aset, liabilitas, dan ekuitas Perusahaan Pembiayaan mengalami kenaikan, masing-masing sebesar 1,53%, 1,16%, dan 2,72% dibandingkan triwulan sebelumnya.

Grafik I - 34 Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas Perusahaan Pembiayaan (dalam triliun rupiah)



Catatan: Data sudah termasuk Pembiayaan Syariah

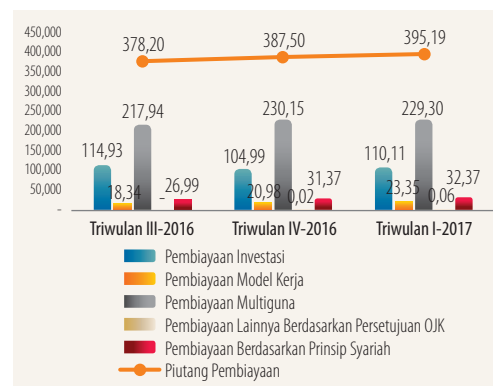
B. Jumlah dan Pangsa Pasar Perusahaan Pembiayaan

Selama periode triwulan IV-2016 sampai triwulan I-2017 tidak terdapat pencabutan maupun penerbitan izin usaha bagi perusahaan pembiayaan. Bila dilihat berdasarkan total aset, sebanyak 72 perusahaan pembiayaan menguasai aset industri dengan porsi sebesar 91%. Sementara itu, 128 perusahaan pembiayaan hanya menguasai aset industri sebesar 9%.

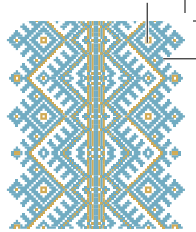
C. Piutang Perusahaan Pembiayaan

Kinerja kegiatan industri Perusahaan Pembiayaan dalam melakukan penyaluran piutang mengalami peningkatan sebesar Rp7,68 triliun atau naik 1,98% dibandingkan triwulan sebelumnya dengan komposisi piutang pembiayaan didominasi oleh Pembiayaan Multiguna dan Pembiayaan Investasi dengan proporsi masing-masing sebesar 58,02% dan 27,86%. Kenaikan piutang pembiayaan terbesar berasal dari jenis Pembiayaan Investasi yang tumbuh 4,88% menjadi Rp110,11 triliun. Sementara itu, bila dilihat dari proporsi pembiayaan yang disalurkan berdasarkan sektor ekonomi, maka Sektor Ekonomi Lapangan Usaha mendominasi piutang dengan proporsi sebesar 61,48% (Rp250,79 triliun).

Grafik I - 35 Piutang Perusahaan Pembiayaan (dalam Triliun Rupiah)



Catatan: Data sudah termasuk Pembiayaan Syariah



Tabel I - 38 Piutang Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan sektor Ekonomi (dalam triliun Rupiah)

Sektor Ekonomi	Triwulan IV-2016	Triwulan I-2017
A. Sektor Ekonomi Lapangan Usaha	241,13	250,79
1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	19,40	15,77
2. Pertambangan dan Penggalian	19,04	20,11
3. Industri Pengolahan	30,43	32,42
4. Pengadaan Listrik, Gas, Iap/Air Panas dan Udara Dingin	22,02	23,77
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang, Pembuangan dan Pembersihan Limbah dan Sampah	0,30	0,31
6. Konstruksi	10,39	11,39
7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	40,04	46,61
8. Transportasi dan Pergudangan	22,09	20,95
9. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	5,13	5,37
10. Informasi dan Komunikasi	3,31	3,07
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	2,63	2,84
12. Real Estat	1,52	1,80
13. Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis	1,27	1,57
14. Jasa Persewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya	23,38	23,96
15. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,26	3,57
16. Jasa Pendidikan	3,10	3,17
17. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,67	7,17
18. Kesenian, Hiburan dan Rekreasi	0,40	0,43
19. Kegiatan Jasa Lainnya	17,15	16,95
20. Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga; Kegiatan yang Menghasilkan Barang dan Jasa oleh Rumah Tangga yang Digunakan Sendiri untuk Memenuhi Kebutuhan	9,59	9,56
21. Kegiatan Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	0,01	0,01
B. Sektor Ekonomi Bukan Lapangan Usaha	159,11	157,15
1. Rumah Tangga	53,31	52,75
2. Bukan Lapangan Usaha Lainnya	105,79	104,39
JUMLAH	400,24	407,93

D. Indikator Kesehatan Keuangan Perusahaan Pembiayaan

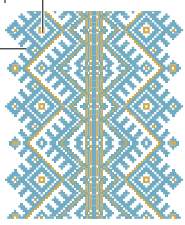
Tabel I - 39 Indikator Kesehatan Keuangan Perusahaan Pembiayaan

Uraian	Triwulan IV-2016	Triwulan I-2017
FAR (%)	87,52%	87,91%
NPF (%)	3,26%	3,16%
Gearing Ratio (kali)	3,03	2,98

Seiring dengan pertumbuhan piutang pembiayaan, rasio FAR (*Financing to Asset Ratio*) masih terjaga pada rasio 87,91% atau masih dalam batas ketentuan, yaitu minimum 40%. Kualitas piutang pembiayaan (NPF) masih berada pada level 3,16% atau dalam batas ketentuan (maksimal 5%). Selain itu, Gearing Ratio pada periode laporan tercatat 2,98 kali atau masih memenuhi ketentuan (maksimal 10 kali).

Tabel I - 40 NPF Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Sektor Ekonomi

Sektor Ekonomi	Triwulan IV-2016	Triwulan I-2017
A. Sektor Ekonomi Lapangan Usaha	3,85%	3,79%
1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2,50%	2,53%
2. Pertambangan dan Penggalian	7,26%	7,65%
3. Industri Pengolahan	2,00%	2,59%
4. Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	0,03%	0,03%
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang, Pembuangan dan Pembersihan Limbah dan Sampah	2,81%	2,69%
6. Konstruksi	3,09%	3,64%
7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	2,02%	2,14%
8. Transportasi dan Pergudangan	16,97%	15,09%
9. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	9,03%	8,46%
10. Informasi dan Komunikasi	1,83%	1,49%
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	0,98%	1,68%
12. Real Estat	3,75%	4,50%
13. Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis	1,18%	2,51%
14. Jasa Persewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya	2,20%	2,62%
15. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,77%	2,05%
16. Jasa Pendidikan	1,32%	1,88%
17. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,58%	2,13%
18. Kesenian, Hiburan dan Rekreasi	1,34%	1,66%
19. Kegiatan Jasa Lainnya	2,15%	2,40%
20. Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga; Kegiatan yang Menghasilkan Barang dan Jasa oleh Rumah Tangga yang Digunakan Sendiri untuk Memenuhi Kebutuhan	2,10%	1,58%
21. Kegiatan Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	1,47%	0,07%
B. Sektor Ekonomi Bukan Lapangan Usaha	2,37%	2,15%
1. Rumah Tangga	1,75%	2,12%
2. Bukan Lapangan Usaha Lainnya	2,68%	2,16%
Jumlah	3,26%	3,16%



E. Laba (Rugi) Perusahaan Pembiayaan

Seiring dengan peningkatan jumlah piutang pembiayaan, maka berdampak pada laba bersih industri perusahaan pembiayaan yang pada periode laporan mengalami kenaikan sebesar 1,26% menjadi Rp3,1 triliun.

F. Jenis Valuta Pinjaman

Dalam rangka mendukung kegiatan bisnis operasional perusahaan pembiayaan dalam menyalurkan piutang pembiayaan, maka perusahaan pembiayaan menerima sumber pendanaan antara lain yang berasal dari pinjaman (utang) baik dari dalam dan luar negeri. Dari jumlah pinjaman sebesar Rp243,37 triliun yang diterima industri pembiayaan, 53,80% berdenominasi Rupiah, diikuti US Dollar 33,53%, dan Yen Jepang 12,67%. Untuk melindungi perusahaan dari fluktuasi nilai tukar valas, maka seluruh pinjaman berdenominasi mata uang asing tersebut telah dilakukan lindung nilai (*hedging*).

1.4.4 Perkembangan Industri Perusahaan Modal Ventura

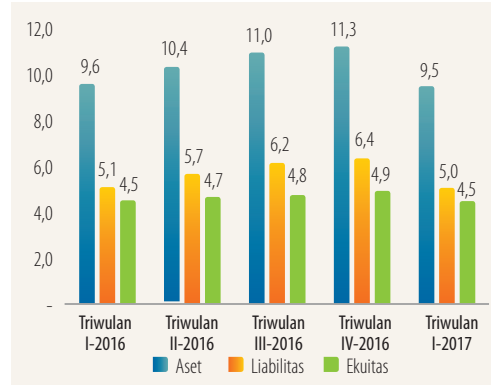
Perusahaan Modal Ventura merupakan perusahaan pembiayaan yang menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang pembiayaan/penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (usaha kecil, mikro dan menengah) untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan/atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha. Perkembangan industri perusahaan modal ventura untuk periode triwulan I-2017 sebagai berikut:

A. Aset, Liabilitas, dan Ekuitas Perusahaan Modal Ventura

Total aset, liabilitas, dan ekuitas Perusahaan Modal Ventura turun, masing-masing

sebesar 15,72%, 20,58%, dan 9,44% menjadi Rp9,51 triliun, Rp5,05 triliun, dan Rp4,46 triliun, bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

Grafik I - 36 Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas (dalam Triliun Rupiah)

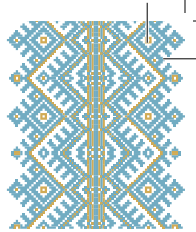


B. Jumlah Perusahaan Modal Ventura

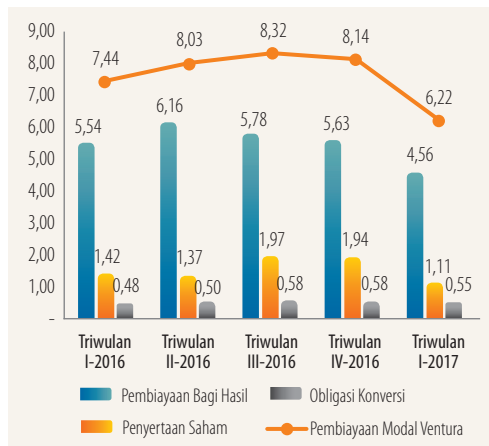
Selama periode laporan, terdapat satu pencabutan izin usaha Perusahaan Modal Ventura sehingga jumlah Perusahaan Modal Ventura pada Triwulan I-2017 menjadi 61 perusahaan.

C. Pembiayaan/Penyertaan Perusahaan Modal Ventura

Seiring dengan turunnya aset Perusahaan Modal Ventura, industri Perusahaan Modal Ventura dalam bentuk pembiayaan/penyertaan juga menurun. Total pembiayaan/penyertaan tercatat turun 23,60% menjadi Rp6,22 triliun bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya dengan proporsi pembiayaan/penyertaan terbesar berasal dari pembiayaan bagi hasil dengan proporsi sebesar 73,35% dari total pembiayaan/penyertaan dengan nilai pembiayaan yang disalurkan sebesar Rp4,56 triliun. Sementara itu, bila dilihat berdasarkan jenis sektor ekonomi, maka sektor perdagangan, restoran, dan hotel mendominasi keseluruhan total pembiayaan/penyertaan yang disalurkan industri PMV dengan total pembiayaan/penyertaan sebesar Rp2,87 triliun atau dengan proporsi sebesar 44,93%.



Grafik I - 37 Pertumbuhan Pembiayaan/Penyertaan Modal (dalam Triliun Rupiah)



Tabel I - 41 Pembiayaan/Penyertaan Berdasarkan sektor Ekonomi (triliun Rupiah)

Sektor Ekonomi	Triwulan I-2016	Triwulan II-2016	Triwulan III-2016	Triwulan IV-2016	Triwulan I-2017
1. Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan	566	640	619	658	727
2. Pertambangan	559	509	525	581	538
3. Perindustrian	408	484	470	490	528
4. Konstruksi	570	563	559	505	498
5. Perdagangan, Restoran, dan Hotel	2.197	2.656	2.724	2.772	2.874
6. Pengangkutan, Pergudangan, dan Komunikasi	312	306	334	286	168
7. Jasa Pendukung Bisnis	319	388	426	319	375
8. Jasa Sosial dan Masyarakat	951	959	994	999	138
9. Lain-Lain	1.695	1.683	1.834	1.715	549
Jumlah	7.578	8.190	8.485	8.325	6.397

Catatan : Data Pembiayaan sebelum dikurangi pencadangan

D. Rasio Keuangan

Kinerja Perusahaan Modal Ventura diukur dengan rasio keuangan yang terdiri dari Beban Operasi terhadap Pendapatan Operasi (BOPO), rasio Investasi Terhadap Total Aset (IFAR), *Return on Asset* (ROA), dan *Return on Equity* (ROE). Rasio keuangan tersebut masing-masing adalah 90,48%, 65,40%, 2,30%, dan 4,90%.

- a) Penurunan BOPO dari 97,26% pada triwulan IV-2016 menjadi 90,48% pada triwulan I-2017 disebabkan turunnya

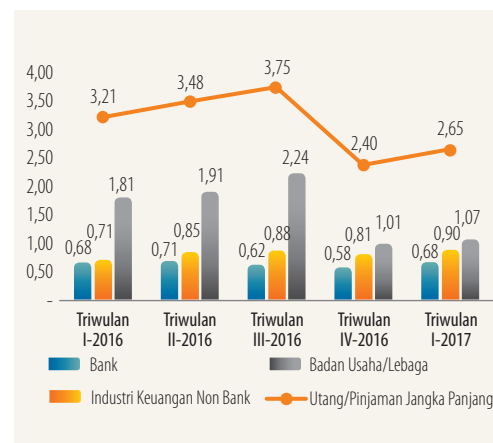
pendapatan operasional dan beban operasional masing-masing menjadi Rp326 miliar dan Rp295 miliar.

- b) Terjadi penurunan IFAR dari 72,15% pada triwulan IV-2016 menjadi 65,40% triwulan I-2017 disebabkan penurunan jumlah pembiayaan/penyertaan sebesar 23,60% menjadi Rp6,22 triliun.
- c) ROA mengalami peningkatan dari 1,88% pada triwulan IV-2016 menjadi 2,30% pada triwulan I-2017.
- d) ROE mengalami peningkatan dari 4,31% pada triwulan IV-2016 menjadi 4,90% pada triwulan I-2017.

E. Sumber Pendanaan

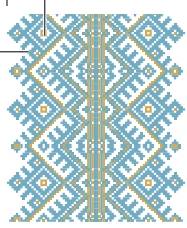
Selain menggunakan modal sendiri, untuk membiayai kegiatan usahanya, Perusahaan Modal Ventura menerima pinjaman jangka panjang yang berasal dari bank atau badan usaha lainnya dengan total pinjaman pada triwulan I-2017 adalah sebesar Rp2,65 triliun atau naik 10,63% dibandingkan triwulan sebelumnya.

Grafik I - 38 Sumber Pendanaan Perusahaan Modal Ventura (dalam Triliun Rupiah)



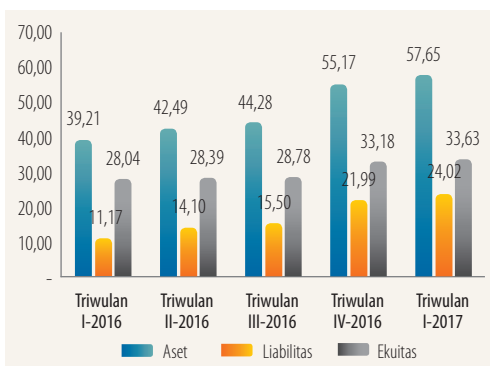
1.4.5 Perkembangan Industri Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur

Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur adalah badan usaha yang didirikan khusus untuk melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana pada proyek infrastruktur.



Terdapat dua Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yaitu *Indonesia Infrastructure Finance (IIF)* dan Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dengan total aset Rp57,65 triliun dan total liabilitas Rp24,02 triliun. Total aset mengalami kenaikan sebesar 4,50% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Peningkatan aset tersebut seiring dengan kenaikan jumlah pinjaman yang diberikan (pembiayaan) sebesar 2,66% menjadi Rp38,47 triliun dengan kenaikan pinjaman terbesar adalah pada infrastruktur Jalan yang naik sebesar 11,18% menjadi Rp8,08 triliun. Peningkatan tersebut seiring dengan program pemerintah dalam mendukung percepatan pertumbuhan pembangunan pada sektor infrastruktur.

Grafik I - 39 Tren Aset, Liabilitas dan Ekuitas (dalam Triliun Rupiah)



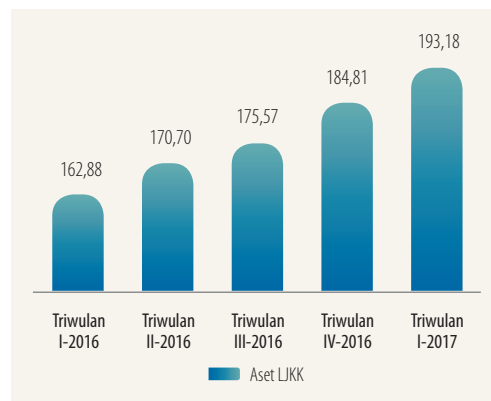
Tabel I - 42 Pembiayaan Berdasarkan Jenis Infrastruktur (dalam triliun Rupiah)

Jenis Infrastruktur	Triwulan I-2016	Triwulan II-2016	Triwulan III-2016	Triwulan IV-2016	Triwulan I-2017
Air Minum	0,16	0,19	0,23	0,31	0,32
Jalan	3,06	3,3	4,38	7,26	8,08
Ketenagalistrikan	10,92	11,52	11,42	12,97	12,98
Lainnya	4,88	5,15	5,88	6,93	3,18
Minyak & Gas Bumi	1,71	1,85	1,77	3,14	1,53
Telekomunikasi	1,33	1,46	0,70	1,53	5,45
Transportasi	1,13	1,54	2,60	5,34	6,94
Total	23,19	25,02	26,98	37,47	38,47

1.4.6 Perkembangan Industri Jasa Keuangan Khusus

Perusahaan-perusahaan yang termasuk dalam Industri Jasa Keuangan Khusus didirikan dengan tujuan khusus untuk membantu mensukseskan program-program pemerintah dalam rangka meningkatkan kapasitas perekonomian nasional. Total Aset LJKK naik 4,53% menjadi Rp193,18 triliun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

Grafik I - 40 Pertumbuhan Aset LJK (dalam Triliun Rupiah)

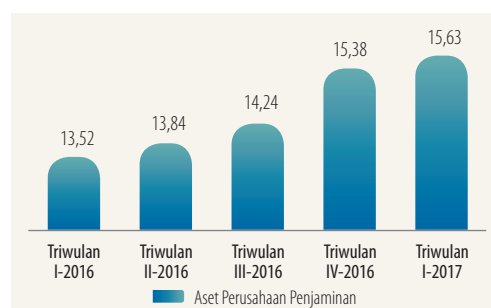


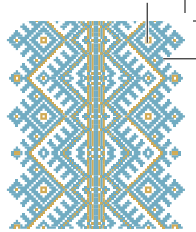
A. Perusahaan Penjaminan

Perusahaan Penjaminan didirikan untuk mendorong program pemerintah melalui peningkatan kemampuan akses UMKM melalui penjaminan kredit.

Pada periode laporan, tercatat total aset perusahaan penjaminan naik 1,62% menjadi Rp15,63 triliun.

Grafik I - 41 Pertumbuhan Aset Perusahaan Penjaminan (dalam Triliun Rupiah)

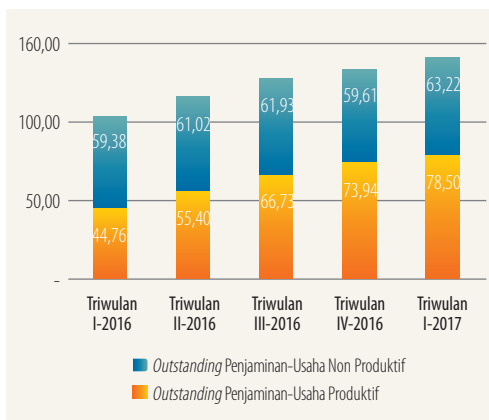




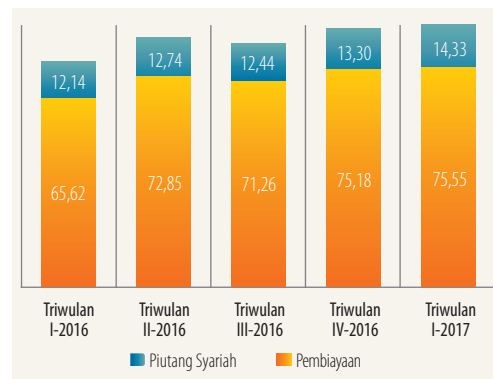
Outstanding penjaminan selama triwulan I-2017 naik 6,12% menjadi Rp141,72 triliun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Peningkatan nilai *outstanding* penjaminan tersebut didorong oleh nilai *outstanding* usaha produktif dan non produktif yang masing-masing meningkat sebesar 6,17% dan 6,06% dibanding dengan triwulan sebelumnya. Pertumbuhan *outstanding* penjaminan tersebut seiring dengan misi pemerintah untuk mendorong peningkatan kemampuan akses UMKM melalui penjaminan kredit.

Kenaikan aset tersebut seiring dengan pertumbuhan nilai pembiayaan dalam rangka peningkatan kegiatan program ekspor nasional. Sampai dengan periode laporan, LPEI mencatat total pembiayaan yang disalurkan sebesar Rp89,87 triliun atau naik 1,57%. Kenaikan tersebut terdiri dari naiknya pembiayaan melalui sistem konvensional sebesar 0,49% dan piutang melalui sistem syariah sebesar 7,69% dari triwulan sebelumnya.

Grafik I - 42 Outstanding Penjaminan (dalam Triliun Rupiah)



Grafik I - 44 Pertumbuhan Nilai Pembiayaan Ekspor Indonesia (dalam Triliun Rupiah)



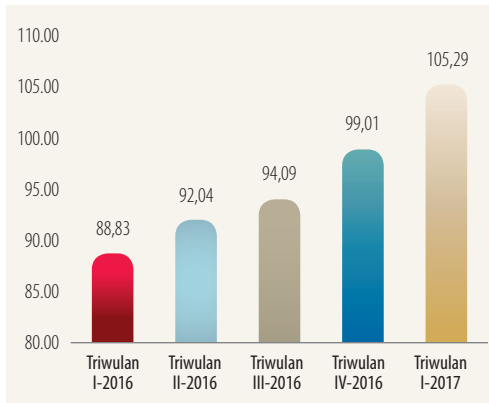
B. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

Pada periode pelaporan, total aset LPEI naik 6,35% menjadi Rp105,29 triliun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

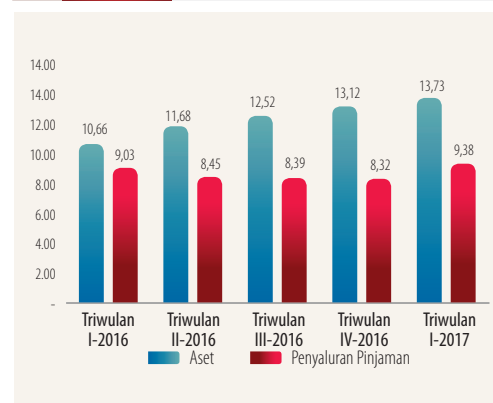
C. Sarana Multigriya Finansial

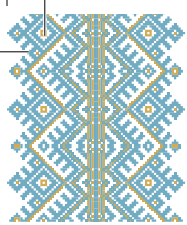
Aset PT SMF (Persero) pada triwulan I-2017 naik 4,66% dibandingkan triwulan sebelumnya menjadi Rp13,73 triliun. Nilai pinjaman yang disalurkan juga mengalami pertumbuhan sebesar 12,70% dari triwulan sebelumnya menjadi Rp9,38 triliun.

Grafik I - 43 Pertumbuhan Aset Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (dalam Triliun Rupiah)

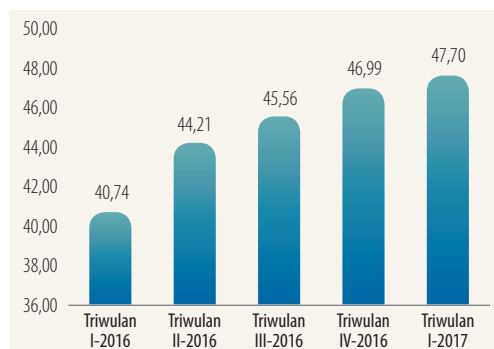


Grafik I - 45 Aset dan Outstanding Penyaluran Pinjaman PT SMF (Persero) (dalam Triliun Rupiah)

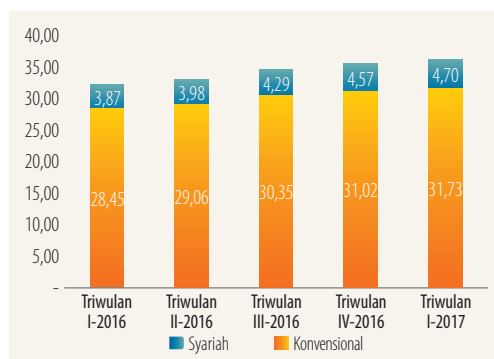


**D. Pergadaian**

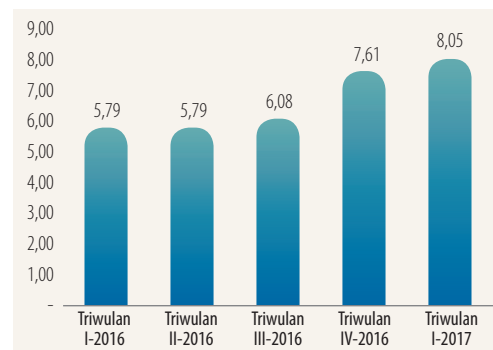
Sampai dengan periode laporan, industri pergadaian yang berkewajiban menyampaikan laporan kepada OJK hanya PT Pegadaian (Persero). Adapun perusahaan gadai swasta yang telah terdaftar atau memiliki izin usaha dari OJK belum berkewajiban menyampaikan laporan keuangan berkala. Pada periode laporan, total aset PT Pegadaian (Persero) tercatat naik 1,51% menjadi Rp47,70 triliun.

Grafik I - 46 Pertumbuhan Aset PT Pegadaian (dalam Triliun Rupiah)

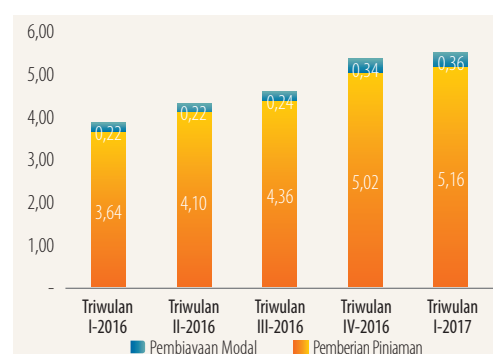
Outstanding pinjaman yang disalurkan pada triwulan I-2017 sebesar Rp36,43 triliun, atau naik sebesar 2,35% dibandingkan triwulan sebelumnya. Kenaikan tersebut terjadi baik pada pinjaman konvensional maupun syariah. *Outstanding* konvensional naik sebesar 2,29%, sedangkan untuk *outstanding* syariah naik sebesar 2,77%.

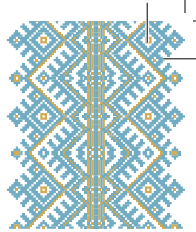
Grafik I - 47 Outstanding Pinjaman PT Pegadaian (Persero) (dalam Triliun Rupiah)**E. PT PNM (Persero)**

PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau disingkat PNM merupakan badan usaha milik negara yang didirikan dengan tujuan memberikan jasa pembiayaan termasuk kredit program dan jasa manajemen untuk pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah. Aset PNM pada periode laporan tercatat sebesar Rp8,05 triliun, naik 5,72% dari triwulan sebelumnya.

Grafik I - 48 Pertumbuhan Aset PT PNM (Persero) (dalam Triliun Rupiah)

Sesuai tujuan pendiriannya, kegiatan usaha utama PNM adalah pemberian pinjaman dan modal untuk pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah. Pada triwulan I-2017, baik pemberian pinjaman maupun pemberian modal mengalami kenaikan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang masing-masing sebesar 2,76% dan 4,91%.

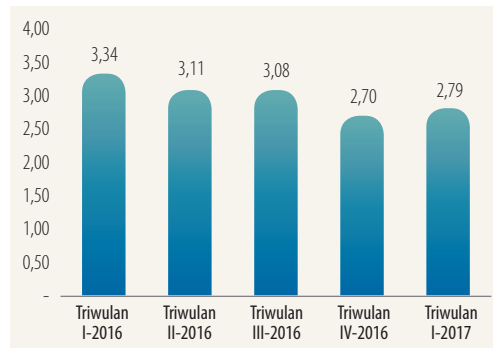
Grafik I - 49 Pertumbuhan Pemberian Pinjaman dan Pembiayaan Modal PT PNM (Persero) (dalam Triliun Rupiah)



F. PT Danareksa (Persero)

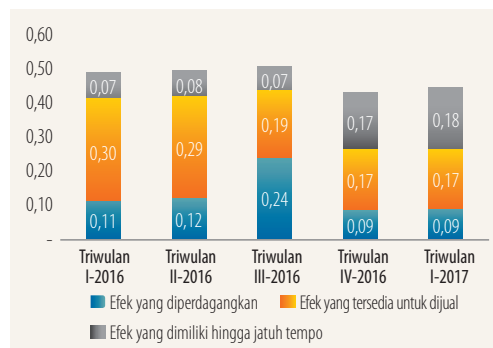
Aset PT Danareksa pada triwulan I-2017 sebesar Rp2,79 triliun, naik 3,12% dari triwulan sebelumnya, meskipun mengalami penurunan 16,50% dari triwulan I-2016.

Grafik I - 50 Pertumbuhan Aset PT Danareksa (Persero) (dalam Triliun Rupiah)



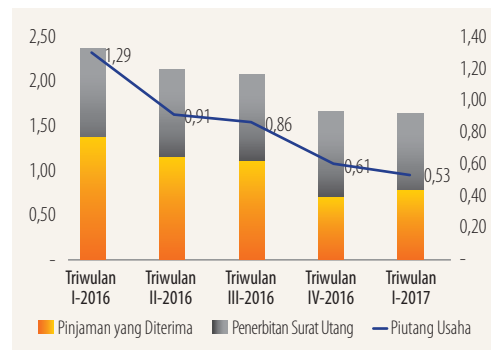
Portofolio efek PT Danareksa terdiri dari efek yang diperdagangkan, efek yang tersedia untuk dijual, dan efek yang dimiliki hingga jatuh tempo. Total portofolio efek PT Danareksa pada triwulan I-2017 tercatat sebesar Rp0,44 triliun, naik 2,77% dari triwulan sebelumnya. Sementara itu, jika dibandingkan dengan triwulan I-2016, portofolio efek mengalami penurunan 8,50%.

Grafik I - 51 Pertumbuhan Portofolio PT Danareksa (Persero) (dalam Triliun Rupiah)



Piutang usaha PT Danareksa mengalami penurunan 12,35% dari triwulan sebelumnya atau 58,93% jika dibandingkan triwulan I-2016. Penurunan tersebut seiring dengan turunnya sumber dana PT Danareksa yang berasal dari pinjaman serta surat utang yang diterbitkan.

Grafik I - 52 Pertumbuhan Piutang Usaha PT Danareksa (dalam Triliun Rupiah)



1.4.7 Perkembangan Industri Jasa Penunjang IKNB

Industri Jasa Penunjang IKNB adalah industri yang mendukung kegiatan usaha perasuransian antara lain jasa keperantaraan dalam penutupan asuransi, keperantaraan dalam penempatan reasuransi, serta penilaian klaim dan/atau jasa konsultasi atas objek asuransi. Jasa Penunjang IKNB hanya berkewajiban menyampaikan laporan keuangan per semester, maka data keuangan industri jasa penunjang IKNB triwulan I-2017 mengacu kepada data laporan keuangan semester II-2016.

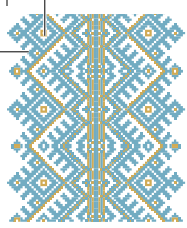
Aset semester II-2016 meningkat 0,68% menjadi Rp7,30 triliun dibandingkan semester sebelumnya. Pendapatan jasa keperantaraan mengalami kenaikan 4,5% menjadi Rp1,11 triliun dibandingkan semester sebelumnya.

Tabel I - 43 Indikator Keuangan Industri Jasa Penunjang IKNB (dalam Triliun Rupiah)

No.	Jenis Indikator	Semester I-2015	Semester II-2015	Semester I-2016	Semester II-2016
1.	Aset	6,04	6,81	7,25	7,30
2.	Liabilitas	4,25	4,84	5,12	5,00
3.	Modal Sendiri	1,80	1,97	2,13	2,30
4.	Pendapatan Jasa Keperantaraan	1,01	1,14	1,06	1,11
5.	Laba/ (Rugi)	0,34	0,24	0,26	0,21

*menggunakan data Semester II 2016

Selama periode pelaporan, terdapat pencabutan izin kepada perusahaan jasa penunjang penilai kerugian asuransi IKNB sehingga sampai



dengan periode laporan Jumlah Perusahaan Pialang Asuransi, Pialang Reasuransi, dan Penilai Kerugian sampai akhir periode pelaporan adalah 236 perusahaan.

Tabel I - 44 Jumlah Perusahaan Jasa Penunjang IKNB

No.	Jenis Perusahaan	Triwulan I-2016	Triwulan II-2016	Triwulan III-2016	Triwulan IV-2016	Triwulan I-2017
1.	Pialang Asuransi	169	169	168	169	169
2.	Pialang Reasuransi	38	38	40	40	40
3.	Jasa Penilai Kerugian Asuransi	28	27	27	28	27
Jumlah		235	234	235	237	236

*) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, sejak Januari 2015, OJK sudah tidak mengawasi perusahaan agen asuransi dan konsultan aktuaria.

1.4.8 Perkembangan Industri Lembaga Keuangan Mikro

Jumlah Lembaga Keuangan Mikro yang telah mendapatkan izin usaha sampai akhir periode triwulan I-2017 adalah sebanyak 158 LKM, dengan total aset sebesar Rp296,77 miliar.

Tabel I - 45 Jumlah Lembaga Keuangan Mikro

No.	Jenis Badan Usaha	Triwulan I-2016	Triwulan II-2016	Triwulan III-2016	Triwulan IV-2016	Triwulan I-2017
1.	Konvensional	31	67	76	116	141
	Koperasi	19	51	59	99	124
	PT	12	16	17	17	17
2.	Syariah	11	12	13	13	17
	Koperasi	11	12	13	13	17
	PT	0	0	-	-	-
Jumlah		42	79	89	129	158

Tabel I - 46 Indikator Keuangan Lembaga Keuangan Mikro (dalam Miliar Rupiah)

No.	Jenis Indikator	Triwulan I-2016	Triwulan II-2016	Triwulan III-2016	Triwulan IV-2016	Triwulan I-2017
1.	Aset	220,14	255,38	275,00	283,84	296,77
2.	Liabilitas	142,32	164,61	173,64	176,94	182,25
3.	Dana Syirkah Temporer	18,13	18,13	18,54	18,54	20,84
4.	Ekuitas	59,69	72,64	82,82	88,35	93,67
5.	Penempatan Dana	35,31	41,33	46,78	48,40	49,32
6.	Pinjaman Yang Diberikan	142,75	168,59	180,92	186,75	194,88
7.	Simpanan/Tabungan	123,70	142,49	148,87	151,38	153,34
8.	Pinjaman Yang Diterima	10,23	12,49	14,65	14,80	17,10

1.5 PERKEMBANGAN PROGRAM FLAGSHIP OJK

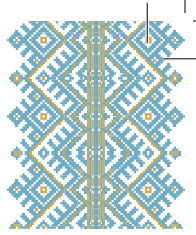
1.5.1 Layanan Keuangan Tanpa Kantor (LAKU PANDAI)

Jumlah agen Laku Pandai pada triwulan I-2017 mencapai 328.466 agen (316.529 agen perorangan dan 11.937 outlet badan hukum) yang tersebar di 34 Provinsi dan 508 Kota/Kabupaten. Sementara itu, jumlah dana dan nasabah tabungan berkarakteristik *basic saving account* (BSA) yang berhasil dihimpun, masing-masing sebesar Rp244,1 miliar dan 5.119.595 nasabah. Dari 328.466 Agen Laku Pandai tersebut, sebesar 69,48% tersebar di pulau Jawa, 17,22% di pulau Sumatera, 4,89% di pulau Sulawesi, 3,41% di pulau Kalimantan, 1,90% di pulau Maluku dan Papua, dan sisanya 3,10% berada di pulau NTB-NTT-Bali.

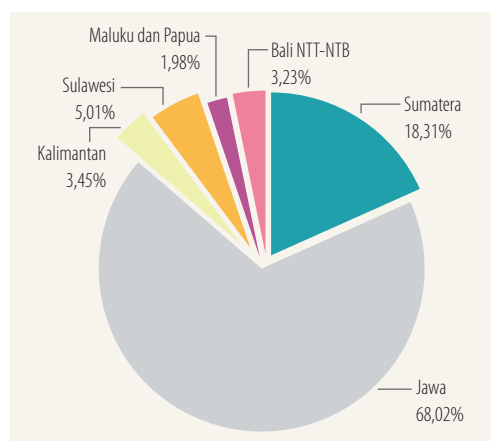
Tabel I - 47 Realisasi Laku Pandai Triwulan I-2017

Agen Laku Pandai	
Perorangan	Outlet Badan Hukum
316.529	11.937
Nasabah Laku Pandai	
Jumlah Rekening	Outstanding Tabungan BSA
5.119.595	Rp244,1 milyar

Sumber: OJK



Grafik I - 53 Wilayah Penyebaran Agen Laku Pandai Triwulan I-2017



Cakupan layanan yang disediakan oleh agen terkait tabungan dengan karakteristik BSA, meliputi pembukaan rekening, penyetoran dan penarikan tunai, pemindahbukuan, pembayaran tagihan, transfer dana, pengecekan saldo, dan/atau penutupan rekening. Selain itu, agen klasifikasi tertentu juga dapat melayani transaksi lain seperti: pembelian dan pembayaran tagihan. Selanjutnya, rencana pengembangan Laku Pandai yang akan dilakukan oleh beberapa bank penyelenggara antara lain, penjualan asuransi mikro oleh agen dan pelayanan terkait program Pemerintah mengenai bantuan sosial non tunai.

1.5.2 Jangkauan, Sinergi, dan *Guideline* (JARING)

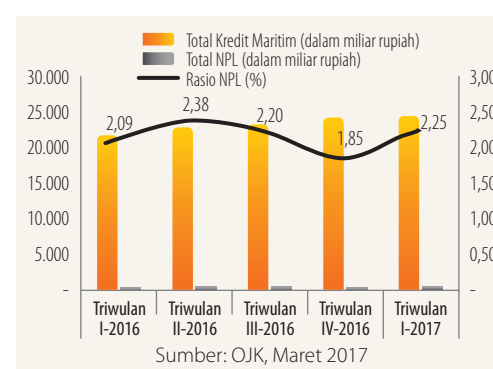
Pada tahun 2015, OJK bekerjasama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk meluncurkan program Jangkauan, Sinergi, dan *Guideline* (JARING). Program tersebut bertujuan menjawab kebutuhan *stakeholders* terhadap informasi tentang *database* Kelautan dan Perikanan, skim pembiayaan, pemetaan risiko bisnis dan dukungan regulasi dari otoritas terkait.

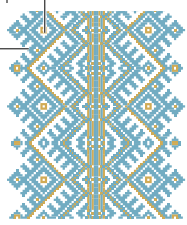
Sasaran utama program JARING adalah peningkatan pertumbuhan pembiayaan di sektor Kelautan dan Perikanan (KP) dengan

target pertumbuhan pembiayaan ditetapkan 50% lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya. Selain itu, diharapkan program JARING dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap jasa keuangan yang lebih luas, meningkatkan pemahaman Sektor Jasa Keuangan (SJK) terhadap bisnissektor KP lebih baik, memperbaiki tingkat kesejahteraan nelayan dan pelaku usaha mikro dan kecil (peningkatan pendapatan per kapita), dan menambah jumlah lapangan kerja serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Sampai periode pelaporan jumlah LJK yang terlibat mencapai 16 Bank dan konsorsium perusahaan pembiayaan, asuransi jiwa, asuransi umum dan penjaminan.

Sampai dengan triwulan I-2017, penyaluran kredit program JARING tumbuh 1,07% (*qtq*) menjadi Rp24,5 triliun, melambat dibandingkan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya (4,21%, *qtq*). Di tengah melambatnya pertumbuhan kredit, kualitas kredit program JARING terpantau menurun. Hal itu terlihat dari NPL *gross* yang meningkat dari 1,85% menjadi 2,25%. Penurunan kualitas kredit terjadi pada hampir seluruh kegiatan usaha program JARING kecuali pada kegiatan usaha industri pengolahan dan pengawetan ikan dengan NPL yang relatif stabil dan terendah sebesar 0,83%. Peningkatan NPL terbesar terjadi pada kegiatan usaha jasa sarana produksi perikanan yaitu dari 2,21% menjadi 5,56%.

Grafik I - 54 Kredit & NPL Sektor Maritim terkait JARING



**Tabel I - 48** NPL Kegiatan Usaha Kredit Maritim (%)

Kegiatan Usaha	Triwulan I-2016	Triwulan II-2016	Triwulan III-2016	Triwulan IV-2016	Triwulan I-2017
Penangkapan	2,76	2,55	2,77	3,05	3,33
Budidaya	3,40	3,37	2,63	1,96	2,41
Jasa Sarana Produksi	5,82	6,76	2,68	2,21	5,56
Industri Pengolahan	0,34	1,59	1,58	0,84	0,83
Perdagangan	2,07	2,03	2,11	1,93	2,51
NPL JARING	2,09	2,38	2,20	1,85	2,25

Sumber: OJK, Maret 2017

1.5.3 Simpanan Pelajar (SIMPEL)

SimPel/SimPel iB merupakan program inklusi keuangan yang bertujuan untuk mendorong budaya menabung sejak dini. Program yang diluncurkan pada 14 Juni 2015 ini sejalan dengan Peraturan Presiden (Perpres) No.82 tahun 2016.

Sejak dilakukannya aktivasi program tabungan SimPel/SimPel iB tersebut, terdapat 279 Bank yang menjadi peserta dalam program SimPel/SimPel iB. Jumlah rekening SimPel/SimPel iB mencapai 4.196.915 dengan volume sebesar Rp 987,29 miliar. Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang sudah terjalin antara Bank dan sekolah sebanyak 31.784.

1.5.4 Efek Beragun Aset – Surat Partisipasi (EBA SP)

Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi (EBA-SP) merupakan Efek Beragun Aset yang diterbitkan oleh Penerbit yang portofolionya berupa kumpulan piutang dan merupakan bukti kepemilikan secara proporsional atas kumpulan piutang yang dimiliki bersama oleh sekumpulan pemegang EBA-SP. EBA-SP dibentuk dengan tujuan untuk menunjang pembiayaan sekunder perumahan dan menyediakan pilihan produk investasi bagi investor.

EBA-SP yang pertama kali diterbitkan adalah EBA-SP SMF-BTN01 yang diterbitkan oleh PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) pada 20 November 2015.

Selama 2016 terdapat dua EBA-SP yang memperoleh efektif dari OJK, yaitu EBA – SP SMF-BMRI01 dan EBA – SP SMF-BTN02 dengan total nilai sekuritisasi awal sebesar Rp 1,5 triliun. Sampai dengan akhir triwulan I-2017 terdapat 3 (tiga) EBA-SP dengan nilai sekuritisasi sebesar Rp 1,70 triliun.

1.5.5 Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)

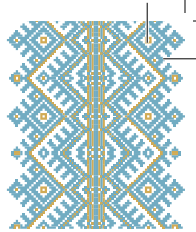
AUTP bertujuan untuk memberikan perlindungan dalam bentuk bantuan modal kerja kepada petani apabila terjadi kerusakan pertanian, serta serangan hama padi yang menyebabkan gagal panen. Dalam rangka mendukung program pemerintah, OJK terlibat aktif dalam penyusunan Peraturan Menteri Pertanian tentang Asuransi Pertanian dan Pedoman Pengelolaan Bantuan Premi. OJK juga berperan serta dalam penyusunan kajian mengenai besaran premi, respon petani membayar premi, dan zona risiko asuransi. Dalam implementasinya, Kementerian BUMN telah menunjuk PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) sebagai pelaku AUTP.

AUTP diberikan untuk areal tanam padi seluas 1 juta Ha secara nasional, dengan harga pertanggungan sebesar Rp6.000.000/ha. Suku premi asuransi diperkirakan sebesar 3% dari harga pertanggungan atau Rp180.000/ha/MT. Porsi pembayaran premi AUTP yang dibebankan kepada petani adalah sebesar 20%, sedangkan Pemerintah memberikan subsidi premi sebesar 80% menggunakan dana APBN.

Sampai dengan triwulan I-2017, jumlah lahan pertanian yang terdaftar adalah 777.889,11 ha atau 77,79% dari target 1 juta ha. Jumlah ini meningkat 50,02% dari jumlah lahan pertanian terdaftar pada akhir Desember 2016.

1.5.6 Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS)

Asuransi Usaha Ternak Sapi bertujuan untuk memberikan perlindungan dalam bentuk ganti



rugi kepada peternak jika terjadi kematian atau kehilangan sapi sehingga peternak dapat melanjutkan usahanya melalui skema pertanggung jawaban asuransi. AUTS memberikan manfaat utama sebagai berikut:

- a. Ketentraman dan ketenangan dalam melaksanakan usaha peternakan.
- b. Pemulihan kerugian jika terjadi sapi mati/hilang, dengan tersedianya dana ganti rugi asuransi sebagai modal untuk pembelian penggantinya sapi, sehingga usaha peternak dapat tetap berlanjut.
- c. Meningkatkan pendapatan peternak dari keberhasilan usaha peternakan secara berkesinambungan.

Risiko yang dijamin oleh AUTS adalah kematian ternak sapi karena penyakit, kecelakaan dan beranak, serta kehilangan karena pencurian. Jumlah pertanggung jawaban dari AUTS adalah Rp10 juta per ekor. AUTS menggunakan skema subsidi 80% premi dari APBN, sedangkan 20% premi dibayarkan oleh peternak.

Realisasi AUTS sampai akhir triwulan I-2017 adalah:

- a. Jumlah sapi yang tercover AUTS adalah 42.413 ekor sapi.
- b. Realisasi premi AUTS adalah sebesar Rp8.5 miliar.
- c. Klaim AUTS sebesar Rp4.7 miliar.

1.5.7 Asuransi Nelayan

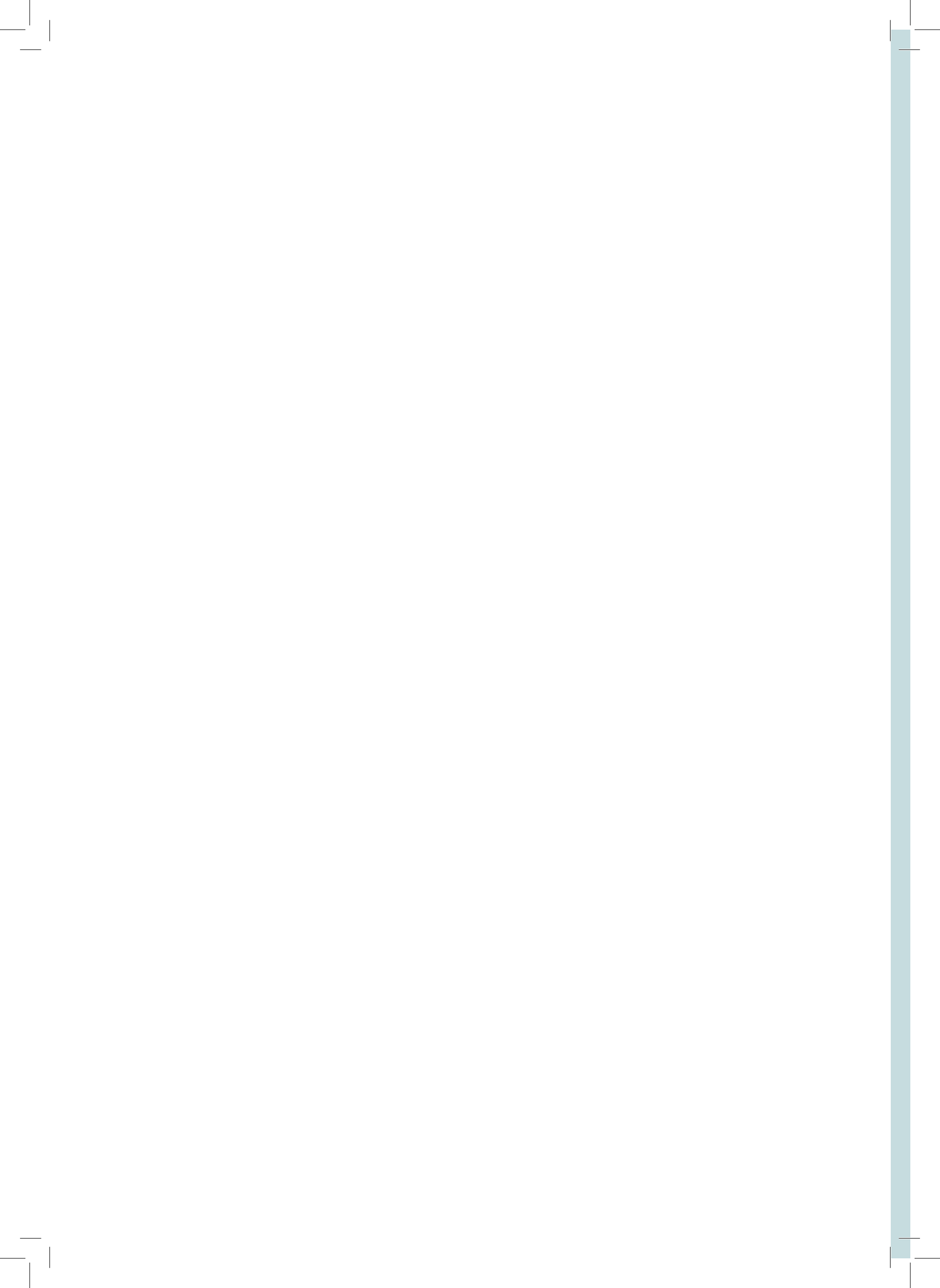
Asuransi Nelayan bertujuan memberikan proteksi bagi nelayan saat melaut dalam bentuk

kompensasi ketika mengalami musibah baik saat bekerja maupun tidak bekerja. Diharapkan nelayan lebih mandiri dalam meningkatkan produktifitas penangkapan. Hal tersebut merupakan tindak lanjut dari UU Perlindungan Nelayan.

Besar kompensasi untuk setiap kejadian berbeda-beda. Misalnya, bila seorang nelayan meninggal saat melaut, ahli waris akan mendapat santunan Rp200 juta. Jika terluka sampai cacat permanen, santunan sebesar Rp100 juta, dan untuk biaya pengobatan mendapat Rp20 juta. Adapun untuk santunan kecelakaan di luar aktifitas penangkapan ikan, jika sampai mengakibatkan kematian, ahli waris mendapat Rp160 juta, cacat permanen Rp100 juta, dan untuk biaya pengobatan sebesar Rp20 juta.

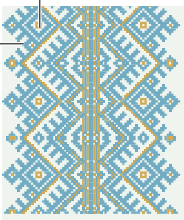
1.5.8 Asuransi Kerangka Kapal

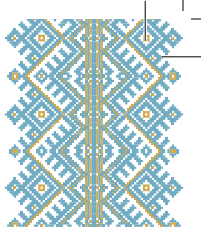
Asuransi penyingkiran kerangka kapal dilatarbelakangi adanya ketentuan Pasal 203 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Pasal 119 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian dan Pasal 18 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 71 Tahun 2013 tentang *Salvage* dan/atau Pekerjaan Bawah Air, yang mengatur bahwa pemilik kapal wajib mengasuransikan kapalnya dengan asuransi penyingkiran kerangka kapal dan/atau perlindungan dan ganti rugi. Sampai dengan triwulan I-2017, realisasi jumlah kapal yang terlindungi asuransi penyingkiran kerangka kapal (*wreck removal*) menjadi 3.718 kapal.





Tinjauan Operasional Sektor Jasa Keuangan





Tinjauan Operasional Sektor Jasa Keuangan

II

2.1 AKTIVITAS PENGATURAN

2.1.1 Pengaturan Bank

Selama periode laporan, OJK menerbitkan satu POJK dan lima SEOJK terkait pengaturan Perbankan yang dijabarkan sebagai berikut:

1. **POJK Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan**

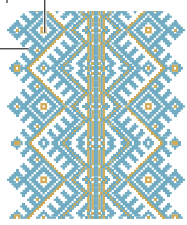
Penerbitan peraturan ini bertujuan untuk melibatkan peran dari Komite Audit dalam mengawasi efektivitas penyelenggaraan fungsi audit eksternal oleh Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP), sehingga AP dan KAP memiliki peran yang penting sebagai penunjang kegiatan sektor jasa keuangan dalam penegakan disiplin pasar. Adapun pokok pengaturan yang diatur antara lain: (i) Pihak yang melaksanakan kegiatan jasa keuangan wajib menggunakan AP dan KAP yang terdaftar di OJK dan memiliki kompetensi sesuai dengan kompleksitas usahanya, (ii) KAP wajib menyampaikan kepada OJK laporan berkala tahunan berupa rekapitulasi pemberian jasa kepada Pihak yang melaksanakan kegiatan

jasa keuangan dan laporan insidental berupa perubahan data AP dan/atau KAP dan (iii) OJK berwenang memerintahkan Pihak yang melaksanakan kegiatan jasa keuangan untuk melakukan penggantian AP dan/atau KAP yang telah ditunjuk dan/atau audit/pemeriksaan ulang terhadap laporan yang telah diaudit.

2. **SEOJK Nomor 4/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko Pada Bank Yang Melakukan Aktivitas Berkaitan Dengan Reksa Dana**

Peraturan ini merupakan peraturan pelaksana dari POJK Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. SE ini bertujuan agar Bank meningkatkan penerapan manajemen risiko secara efektif dengan melakukan prinsip kehati-hatian dan melindungi kepentingan nasabah.

3. **SEOJK Nomor 11/SEOJK.03/2017 tentang Prinsip Kehati-hatian Bagi Bank Umum yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Pihak Lain**



Peraturan ini merupakan peraturan pelaksanaan dari POJK Nomor 9/POJK.03/2016 tentang Prinsip Kehatian Bagi Bank Umum Yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Pihak Lain.

4. SEOJK Nomor 12/SEOJK.03/2017 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum

Peraturan ini merupakan peraturan pelaksana dari POJK Nomor 56/POJK.03/2016 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum. Latar belakang penerbitan SE ini adalah Dominasi kepemilikan Bank oleh salah satu pihak sering menghambat Bank dalam menerapkan Tata Kelola yang baik. Pengalaman krisis pada masa lalu membuktikan bahwa Bank yang terkena dampak krisis adalah Bank yang dimiliki secara dominan oleh pemegang saham tertentu. Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan penyebaran kepemilikan saham Bank dengan menerapkan batas maksimum kepemilikan saham Bank sehingga Bank dapat menerapkan Tata Kelola yang baik.

5. SEOJK Nomor 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum

Peraturan ini merupakan peraturan pelaksana dari POJK Nomor 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dan POJK Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum. SE ini dilatarbelakangi oleh pengalaman dari krisis keuangan global mendorong perlunya peningkatan efektivitas penerapan manajemen risiko dan Tata Kelola agar Bank mampu mengidentifikasi permasalahan secara lebih dini, melakukan tindak lanjut perbaikan yang tepat dan cepat, serta lebih tahan dalam menghadapi krisis.

6. SEOJK Nomor 14/SEOJK.03/2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum

Peraturan ini merupakan peraturan pelaksana dari POJK Nomor

4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, dan POJK Nomor 18 /POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.

2.1.2 Pengaturan Pasar Modal

Selama periode laporan, OJK menerbitkan tujuh POJK dan dua SEOJK yang mengatur Pasar Modal, yaitu:

1. POJK Nomor 4/POJK.04/2017 tentang Dana Investasi Multi Aset Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif

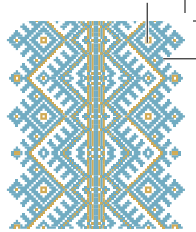
Latar belakang penyusunan peraturan ini adalah untuk memperluas pilihan instrumen investasi bagi pemodal khususnya pemodal dalam rangka pengampunan pajak.

2. POJK Nomor 6/POJK.04/2017 tentang Perlakuan Akuntansi atas Transaksi Berdasarkan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik

Peraturan ini merupakan bentuk dukungan OJK terhadap program pemerintah dalam percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.

Dalam Peraturan ini diatur:

- Transaksi jual beli tenaga listrik yang dilakukan berdasarkan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik diperlakukan sebagai transaksi jual beli, meskipun dalam pelaksanaan transaksi tersebut terdapat substansi selain jual beli.
- Perlakuan akuntansi sebagaimana dimaksud di atas wajib diterapkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik yang melakukan transaksi jual beli tenaga listrik berdasarkan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik secara prospektif untuk periode tahun buku yang dimulai 1 Januari 2017 atau lebih awal (secara prospektif untuk tahun buku yang dimulai 1 Januari 2016).
- Perlakuan Akuntansi hanya berlaku selama Pemerintah melaksanakan



program percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dengan memberikan penugasan kepada PT PLN (Persero).

3. POJK Nomor 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk telah ditetapkan oleh Ketua Dewan Komisiner OJK

Peraturan ini mengatur mengenai dokumen-dokumen yang harus disampaikan dalam rangka pengajuan Pernyataan Pendaftaran, cakupan dari laporan pemeriksaan dan pendapat dari segi hukum, dan kewenangan OJK untuk dapat meminta informasi dan/atau dokumen lain yang tidak merupakan bagian dari Pernyataan Pendaftaran dan tidak dimaksudkan untuk diumumkan kepada masyarakat.

4. POJK Nomor 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.

Peraturan ini bertujuan untuk:

- Menyelaraskan keterbukaan informasi dalam Prospektus dengan ASEAN *Disclosure Standards* (ADS) baik ADS *Equity* maupun ADS *Debt*.
- Memisahkan ketentuan yang mengatur pengungkapan dalam Prospektus untuk Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas dan untuk Penawaran Umum Efek bersifat utang dalam peraturan yang berbeda.
- Peraturan ini mengatur mengenai bagian-bagian yang harus dimuat dalam Prospektus, informasi yang harus dimuat dalam bagian-bagian pada Prospektus dan informasi yang harus dimuat dalam bagian-bagian pada Prospektus Ringkas.

5. POJK Nomor 9/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus

Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang

Peraturan ini bertujuan untuk:

- Menyelaraskan keterbukaan informasi dalam Prospektus dengan ASEAN *Disclosure Standards* (ADS) baik ADS *Equity* maupun ADS *Debt*.
- Memisahkan ketentuan yang mengatur pengungkapan dalam Prospektus untuk Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas dan untuk Penawaran Umum Efek bersifat utang dalam peraturan yang berbeda.
- Peraturan ini mengatur mengenai bagian-bagian yang harus dimuat dalam Prospektus, informasi yang harus dimuat dalam bagian-bagian pada Prospektus dan informasi yang harus dimuat dalam bagian-bagian pada Prospektus Ringkas.

6. POJK Nomor 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan atas POJK tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

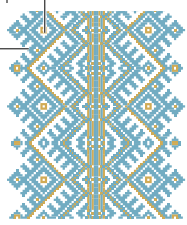
Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan perlindungan investor di Indonesia dan meningkatkan peringkat indikator *Protecting Minority Investor* dalam *survey Ease of Doing Business*.

Peraturan ini mengatur mengenai:

- Mekanisme perubahan hak atas saham; dan
- Penunjukan dan pemberhentian akuntan publik yang diputuskan dalam RUPS.

7. POJK Nomor 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka

Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan perlindungan investor di Indonesia dan meningkatkan peringkat indikator *Protecting Minority Investor* dalam *survey Ease of Doing Business*. Peraturan ini mengatur mengenai kewajiban anggota Direksi atau anggota



Dewan Komisaris melaporkan kepada OJK atas kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham Perusahaan Terbuka baik langsung maupun tidak langsung.

Pihak yang memiliki saham paling sedikit 5% dari modal disetor dalam Perusahaan Terbuka baik secara langsung maupun tidak langsung wajib melaporkan kepada OJK atas kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya.

8. SEOJK Nomor 8/POJK.04/2017 tentang Tata Cara Perhitungan Modal Kerja Bersih Disesuaikan Bagi Perantara Pedagang Efek Yang Ditunjuk Sebagai Gateway Yang Melakukan Transaksi Efek Untuk Kepentingan Nasabah Dalam Rangka Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak

Penyusunan Rancangan Surat Edaran OJK ini bertujuan untuk membedakan perhitungan Modal Kerja Bersih Disesuaikan bagi Perantara Pedagang Efek yang ditunjuk sebagai *Gateway* dalam Rangka Pengampunan Pajak dan Perantara Pedagang Efek pada akun Utang Lembaga Kliring Penjaminan dan Akun Utang Nasabah Pemilik Rekening.

9. SEOJK Nomor 5/SEOJK.04/2017 tentang Pencabutan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/SEOJK.04/2015 tentang Kondisi Lain sebagai Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara Signifikan Dalam Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik.

Pencabutan kondisi lain ini dengan mempertimbangkan bahwa kondisi bursa saat ini tidak lagi mengalami tekanan.

2.1.3 Pengaturan IKNB

Pada periode laporan, OJK menerbitkan empat POJK dan dua SEOJK yang mengatur sektor IKNB yaitu:

- 1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin

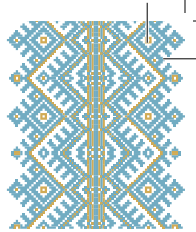
Penerbitan peraturan ini bertujuan untuk mengatur mengenai proses perizinan dan kelembagaan yang ada di dalam Lembaga Penjamin. Adapun pokok pengaturan yang diatur antara lain: Bentuk Badan Hukum dan Permodalan, Lingkup Wilayah Operasional dan Proses Perizinan Usaha.

- 2) POJK nomor 2/POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin.

Peraturan ini bertujuan untuk mengatur mengenai ketentuan yang harus dipenuhi oleh Lembaga Penjamin dalam proses penyelenggaraan usaha lembaga penjamin. Adapun pokok pengaturan yang diatur antara lain: Kegiatan Usaha, Penyelenggaraan Penjamin dan Cadangan, Klaim, Pembayaran Klaim, dan Peralihan Hak Tagih.

- 3) POJK nomor 3/POJK.05/2017 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Lembaga Penjamin

Peraturan ini bertujuan untuk penguatan kredibilitas dan reputasi Lembaga Penjamin. POJK ini berlandaskan pada lima prinsip penerapan tata kelola yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan. Adapun pokok pengaturan yang diatur antara lain: Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, Rapat Umum Pemegang Saham dan Transparansi Kepemilikan Saham.



4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 5/POJK.05/2017 tentang luran, Manfaat Pensiun, dan Manfaat Lain yang Diselenggarakan oleh Dana Pensiun

Peraturan ini mengatur mengenai penyesuaian besaran manfaat pensiun yang dapat dibayarkan secara sekaligus dan membuka peluang bagi dana pensiun untuk mengelola manfaat bagi peserta selain manfaat pensiun. Adapun pokok peraturan yang diatur antara lain: Dana Pensiun Pemberi Kerja Program Pensiun Manfaat Pasti, Dana Pensiun Pemberi Kerja Program Pensiun luran Pasti dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan.

5) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) nomor 6/SEOJK.05/2017 tentang Penetapan Tarif Premi atau Kontribusi pada Lini Usaha Asuransi Harta Benda dan Asuransi Kendaraan Bermotor Tahun 2017

SEOJK ini merupakan amanat dari POJK nomor 2/POJK.05/2015 tentang Pemeliharaan dan Pelaporan Data Risiko Asuransi serta Penerapan Tarif Premi dan Kontribusi untuk Lini Usaha Asuransi Harta Benda dan Asuransi Kendaraan Bermotor. Secara garis besar SEOJK ini merupakan peraturan mengenai tarif premi atau kontribusi pada lini usaha asuransi harta benda dan asuransi kendaraan bermotor yang disusun dalam rangka menyesuaikan beberapa ketentuan dalam SEOJK No.21/SEOJK.05/2015 tentang Penetapan Tarif Premi atau Kontribusi Pada Lini Usaha Asuransi Harta Benda dan Asuransi Kendaraan Bermotor Tahun 2015.

6) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 9/SEOJK.05/2017 tentang Produk Asuransi Mikro dan Saluran Pemasaran Produk Asuransi Mikro

Surat Edaran ini merupakan amanat ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi

dan Pemasaran Produk Asuransi, yang ditetapkan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank. Secara garis besar SEOJK ini merupakan peraturan mengenai ketentuan penjabaran dari karakteristik Produk Asuransi Mikro, jangka waktu pembayaran klaim, dan ketentuan mengenai tenaga pemasar.

2.2 AKTIVITAS PENGAWASAN

2.2.1 Pengawasan Perbankan

A. Pemeriksaan Umum dan Pemeriksaan Khusus

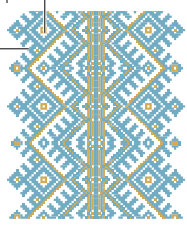
OJK wajib dilakukan pemeriksaan umum setahun sekali secara berkala. Selama periode laporan, OJK melakukan pemeriksaan terhadap 552 bank yang terdiri dari 518 kantor pusat dan 116 Kantor Cabang. Dari 552 bank, 511 adalah kantor BPR dan BPRS dan 41 adalah kantor BUK dan BUS.

Selain melakukan pemeriksaan umum, OJK juga melaksanakan pemeriksaan khusus di mana pemeriksaan dilakukan secara insidental dan berkaitan dengan aspek tertentu dari bank. Selama periode laporan, OJK telah melakukan 96 subjek pemeriksaan khusus terhadap BUK dan BPR dengan cakupan pemeriksaan antara lain pemeriksaan setoran modal, aktivitas operasional, *joint audit*, GCG, teknologi dan informasi, *fraud*, serta pemeriksaan kesiapan rencana bank devisa.

Tabel II - 1 Pemeriksaan Khusus Bank

Subjek Pemeriksaan	Triwulan I-2017
Setoran Modal	33
Aktivitas Operasional	43
Teknologi dan Informasi	3
<i>Joint Audit</i>	4
GCG	1
<i>Fraud</i>	2
Pemeriksaan Kesiapan Rencana Bank Devisa	3
Lainnya	7
TOTAL	96

Sumber: OJK



B. Perizinan Produk dan Aktivitas Bank

Terkait dengan perizinan produk dan aktivitas bank, OJK menerbitkan 177 produk yang sebagian besar terkait dengan reksadana dan *bancassurance* serta produk lainnya seperti *mobile banking*, *private banking*, EDC, dan lain-lain.

Produk/Aktivitas Baru	Triwulan I-2017
Reksa Dana	69
<i>Bancassurance</i>	29
<i>E-banking</i>	6
Perkreditan/Pembiayaan	7
Surat berharga (Obligasi/MTN/Sukuk)	9
Pendanaan	9
APMK	1
<i>Structured Product</i>	6
LC	3
<i>Cash Management</i>	16
Lainnya	22
TOTAL	177

Sumber: OJK

C. Penegakan Kepatuhan Bank

- 1) Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Existing*)
 Dalam rangka melindungi industri bank dari pihak-pihak yang diindikasikan tidak memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan, secara berkesinambungan terhadap pihak-pihak yang telah mendapat persetujuan untuk menjadi Direksi, Komisaris, Pemegang Saham Pengendali (PSP), dan Pejabat Eksekutif, OJK melakukan penilaian kembali atas kemampuan dan kepatutannya sebagai pemilik dan pengelola Bank (*Fit and Proper Existing*). Penilaian kembali dilakukan dalam hal terdapat indikasi permasalahan integritas, reputasi keuangan dan/atau kompetensi. Pada triwulan I-2017, tidak terdapat tambahan pengurus/pengelola dan pegawai bank yang telah menjalani proses *Fit and Proper Existing*. Sementara itu, untuk *database track record* (TR), terdapat penambahan lima pelaku yang

dilakukan oleh pihak-pihak yang telah mendapat persetujuan untuk menjadi Direksi, Dewan Komisaris, Pemegang Saham Pengendali (PSP), dan Non-Pejabat Eksekutif untuk pelanggaran yang terjadi pada periode sebelumnya.

Objek Track Record	Jumlah Input TR
Pemegang Saham	1
Dewan Komisaris	1
Direksi	2
Non Pejabat Eksekutif	1
TOTAL	5

Sumber: OJK

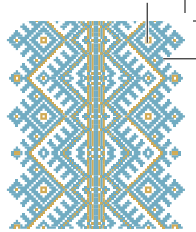
2) Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan

Selama triwulan I-2017, OJK menindaklanjuti 15 Penyimpangan Ketentuan Perbankan (PKP) yang diduga *fraud* pada tujuh kantor bank, yang merupakan *carry over* dari periode sebelumnya. Selanjutnya, OJK melakukan investigasi pada enam PKP yang terjadi di dua kantor bank umum dan satu kantor BPR. Sementara itu, sisanya terjadi di empat kantor BPR dan telah dikembalikan kepada pengawasan bank karena tidak ditemukan dugaan tindak pidana perbankan.

Keterangan	Triwulan I-2017 (Jan – Mar)					
	BU		BPR		TOTAL	
	KTR BANK	PKP (Kasus)	KTR BANK	PKP (Kasus)	KTR BANK	PKP (Kasus)
A. PKP Yang Diterima	0	0	4	9	4	9
1. Berdasarkan Rekomendasi Hasil Riksus	0	0	0	0	0	0
2. Diterima dari Hasil Pengawasan	0	0	4	9	4	9
B. Tindak Lanjut	2	3	5	12	7	15
1. Telah Dilakukan Investigasi *)	2	3	1	3	3	6
2. Dikembalikan Kepada Pengawasan	0	0	4	9	4	9
C. Dilimpahkan Kepada Penyidikan OJK	2	3	2	3	4	6

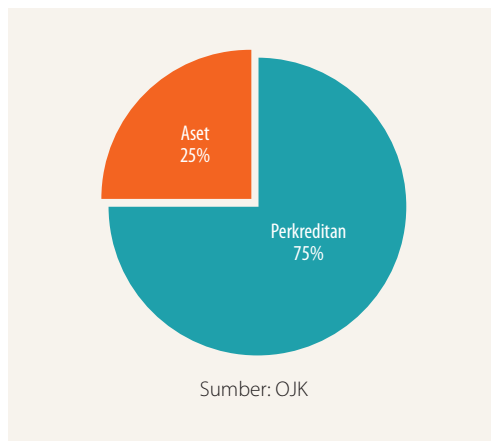
Sumber: OJK

*) Ket: data termasuk *carry over* dari triwulan sebelumnya



OJK juga menangani dugaan tindak pidana kredit sebesar 75% diikuti 25% terkait pengadaan aset. Adapun jumlah pelaku yang diduga melakukan Tipibank sebanyak enam Direksi, empat Pejabat Eksekutif, dan empat Karyawan.

Grafik II - 1 Sebaran Jenis Dugaan Tipibank Pada Triwulan I-2017



Grafik II - 2 Pelaku *Fraud* yang diduga Tipibank Pada Triwulan I-2017



- 3) Pemberian Keterangan Ahli atau Saksi
Selama periode laporan, OJK menindaklanjuti 94 permintaan pemberian keterangan ahli dan/atau saksi kepada Kepolisian atau Kejaksaan di mana 71 pemberian keterangan diserahkan kepada Kepolisian masing-masing 11 keterangan saksi dan 60 keterangan ahli serta 23 keterangan ahli dan/atau saksi lainnya yang diberikan kepada kejaksaan.

Tabel II - 5 Pemberian Keterangan Ahli/Saksi Januari-Maret 2017

No.	Klasifikasi	Permintaan		
		Total	Saksi	Ahli
1.	Kepolisian	71	11	60
2.	Kejaksaan	23	3	20
TOTAL		94	14	80
			94	

Sumber: OJK

D. Kelembagaan Bank Umum

1) Perizinan

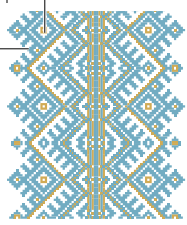
Pada periode laporan, OJK menyelesaikan 124 perizinan perubahan jaringan kantor bank umum yang terdiri dari pembukaan kantor, penutupan

Tabel II - 6 Perizinan Perubahan Jaringan Kantor BUK

No	Jenis Kegiatan	Triwulan IV-2016	Triwulan I-2017
1	Pembukaan Bank Umum		
	a. Kantor Wilayah (Kanwil)	1	4
	b. Kantor Cabang (KC)	7	7
	c. Kantor Cabang Pembantu (KCP)	7	13
	d. Kantor Fungsional (KF)	4	1
	e. Kantor Perwakilan Bank Umum di Luar Negeri	1	-
2	Penutupan Bank Umum		
	a. Izin Usaha	-	1
	b. Kantor Perwakilan	-	-
	c. Kantor Cabang (KC)	3	1
	d. Kantor Cabang Pembantu (KCP)	23	24
	e. Kantor Fungsional (KF)	2	17
3	Pemindahan Alamat Bank Umum		
	a. Kantor Pusat (KP)	-	2
	b. Kantor Wilayah (Kanwil)	1	-
	c. Kantor Cabang (KC)	8	5
	d. Kantor Cabang Pembantu (KCP)	31	18
	e. Kantor Fungsional (KF)	1	1
	f. Kantor Perwakilan Bank	-	-
4	Perubahan Status Bank Umum		
	a. Peningkatan Status		
	- KCP menjadi KC	11	6
	- KK menjadi KCP	16	10
	- KF menjadi KCP	-	-
	- KK menjadi KC	-	-
	b. Penurunan Status Bank Umum		
	- KP menjadi KC	-	-
	- KC menjadi KCP	10	11
	- KCP ke KF/KK	-	3
5	Perubahan Penggunaan Izin Usaha (Perubahan Nama)	2	-
6	Perubahan Badan Hukum	-	-
7	Merger Bank Umum	2	-
8	Izin Bank Devisa	1	-
9	Pembukaan Kantor Perwakilan Bank Luar Negeri di Indonesia	-	-
Jumlah		131	124

Sumber: LKPBUI, Maret 2017

*)Ket: Hanya mencakup perubahan perizinan jaringan kantor di wilayah Jabodetabek



kantor, pemindahan alamat kantor, dan perubahan status. Pencabutan izin usaha dilakukan kepada kantor The Royal Bank of Scotland N.V di Indonesia. Sementara itu, perubahan perizinan lainnya didominasi oleh penutupan KCP (19,35% - 24 perizinan), diikuti dengan pemindahan alamat KCP (14,52% - 18 perizinan), penutupan kantor fungsional (13,71% - 17 perizinan), dan pembukaan KCP (10,48% - 13 perizinan).

2) Jaringan Kantor

OJK mencatat bahwa selama periode laporan, jaringan kantor BUK meningkat 125 jaringan kantor menjadi 135.944 jaringan kantor. Peningkatan terbesar terjadi pada ATM/ADM sebanyak 236. Sementara itu, untuk KCP dalam negeri mengalami pengurangan terbesar sebanyak 96 kantor.

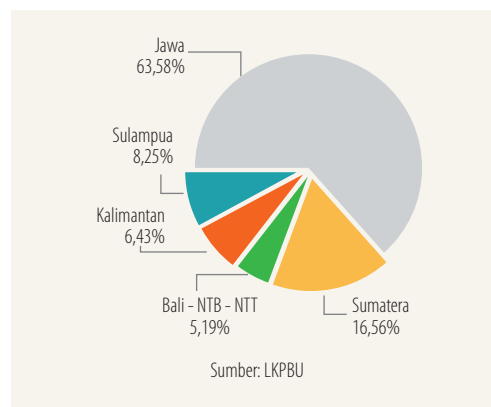
Tabel II - 7 Jaringan Kantor Bank Umum Konvensional

Status Kantor	Triwulan IV-2016	Triwulan I-2017	Perubahan Δ
Kantor Pusat Operasional	52	51	(1)
Kantor Pusat Non Operasional	55	55	-
Kantor Cabang Bank Asing	10	9	(1)
Kantor Wilayah Bank Umum (Konvensional+Syariah)	165	169	4
Kantor Cabang (Dalam Negeri)	2,876	2,890	14
Kantor Cabang (Luar Negeri)	-	-	-
Kantor Cabang Pembantu Bank Asing	33	33	-
Kantor Cabang Pembantu (Dalam Negeri)	16,896	16,800	(96)
Kantor Cabang Pembantu (Luar Negeri)	-	-	-
Kantor Kas	10,714	10,682	(32)
Kantor Fungsional (Konvensional+Syariah)	1,639	1,641	2
Payment Point	1,719	1,688	(31)
Kas Keliling/Kas Mobil/Kas Terapung	1,489	1,520	31
Kantor di bawah KCP KCBA yang Tidak Termasuk 11,12,13,14 *)	24	23	(1)
Kantor Perwakilan Bank Umum di Luar negeri	2	2	-
ATM/ADM	100,145	100,381	236
TOTAL	135,819	135,944	125

Sumber: Laporan Kantor Pusat Bank Umum (LKPBU)

Berdasarkan pembagian wilayah, sebaran jaringan kantor BUK sebagian besar berada di pulau Jawa dengan jumlah sebanyak 86.427 jaringan kantor (63,58%), diikuti pulau Sumatera 22.516 (16,56%), Sulampua 11.213 (8,25%), Kalimantan 8.735 (6,43%), dan Bali-NTB-NTT 7.053 (5,19%).

Grafik II - 3 Penyebaran Jaringan Kantor BUK Pada Triwulan I-2017



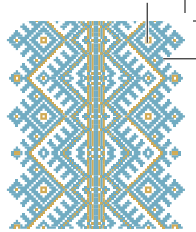
3) Uji Kemampuan dan Kepatutan (*New Entry*)

Pada triwulan I-2017, terdapat 36 pemohon FPT *New Entry* yang lulus mengikuti proses wawancara, terdiri dari dua Pemegang Saham Pengendali atau Pemegang Saham Pengendali Terakhir (PSP/PSPT), 15 anggota Dewan Komisaris dan 19 anggota Direksi. Dari 36 yang lulus proses wawancara tersebut, 20 peserta mendapatkan Surat Keputusan Lulus mencakup *carry over* dari triwulan sebelumnya.

Tabel II - 8 FPT Calon Pengurus dan PSP Bank Umum Selama Triwulan I-2017

New Entry	Wawancara		Surat Keputusan (SK)		Jumlah Tidak ditindak-lanjuti	Tri-wulan I - 2017
	Lulus	Tidak Lulus	Lulus	Tidak Lulus		
PSP/PSPT	2	0	1	0	1	4
Dewan Komisaris	15	1	10	0	1	27
Direksi	19	1	0	1	1	31
Total	36	2	20	1	3	62

Sumber: OJK



E. Kelembagaan BPR

1) Perizinan

Selama periode laporan, terdapat 12 BPR dalam pengawasan khusus dan dua pencabutan izin usaha BPR yang telah diselesaikan. Adapun dua pencabutan izin usaha dilakukan terhadap PT BPR Nova Trijaya dan PT BPR Dhasatra Artha Sempurna.

Tabel II - 9 Perizinan BPR

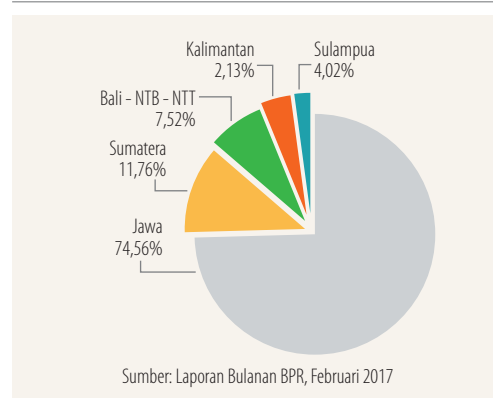
Perizinan BPR	Triwulan I-2017
Pendirian BPR	-
Merger BPR	-
Konsolidasi BPR	-
BPR dalam Pengawasan Khusus	12
Pencabutan Izin Usaha	2
Konversi Syariah	-
Total	14

Sumber: OJK, Februari 2016

2) Jaringan Kantor

Pada triwulan I-2017, OJK mencatat bahwa terdapat pengurangan tiga BPR menjadi 1.630 BPR. Jumlah jaringan kantor dari 1.630 BPR tersebut bertambah 15 kantor menjadi 6.090 jaringan kantor. Penyebaran jaringan kantor pada lima wilayah di Indonesia masih terpusat di wilayah Jawa (74,56% atau 4.541 kantor), diikuti wilayah Sumatera (11,76% atau 716 kantor), wilayah Bali-NTB-NTT (7,52% atau 458 kantor), wilayah Sulampua (4,02% atau 245 kantor), dan wilayah Kalimantan (2,13% atau 130 kantor).

Grafik II - 4 Penyebaran Jaringan Kantor BPR Triwulan I-2017



3) Uji Kemampuan dan Kepatutan (*New Entry*)

Pada triwulan I-2017, OJK melakukan *FPT New Entry* kepada 313 calon pengurus dan PSP BPR dengan hasil 260 calon Pengurus/PSP BPR yang mendapatkan persetujuan untuk menjadi Direksi, Komisaris dan PSP, serta 53 calon yang ditolak.

Tabel II - 10 Daftar Hasil *Fit and Proper Test New Entry* BPR

<i>New Entry</i>	2016			2017		
	Triwulan IV			Triwulan I		
	Lulus	Tidak Lulus	Total	Lulus	Tidak Lulus	Total
Direksi	49	21	70	124	34	158
Komisaris	60	9	69	113	18	131
PSP	13	0	13	22	0	22
Pengurus	0	0	0	1	1	2
Jumlah	122	30	152	260	53	313

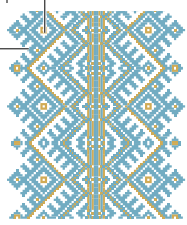
Sumber: OJK

2.2.2 Pengawasan Industri Pasar Modal

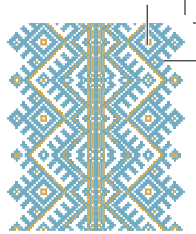
a) Pengawasan Lembaga dan Transaksi Efek

1) Pengawasan Transaksi Saham

Sampai akhir periode laporan, OJK melakukan *monitoring* terhadap 39 saham atas hasil pantauan laporan harian, mingguan, dan bulanan perdagangan yang diindikasikan tidak wajar, di mana sebanyak lima saham dalam tahap penelaahan dan enam saham di-*discard*, serta 28 saham dalam tahap *monitoring*. OJK juga melakukan penelaahan terhadap perdagangan lima saham sebagai tindak lanjut dari hasil kegiatan *monitoring unusual market activity* di mana satu saham sedang dilakukan penelaahan dan empat saham ditingkatkan ke pemeriksaan teknis. Terkait pemeriksaan teknis, OJK memeriksa empat saham sebagai tindak lanjut dari proses penelaahan untuk membuktikan adanya indikasi transaksi semu, manipulasi perdagangan dan/ atau perdagangan orang dalam, di mana



- satu saham dalam tahap pemeriksaan, dan tiga lainnya dalam selesai diperiksa dan sedang dilimpahkan.
- 2) Pengawasan Transaksi Surat Utang dan Efek Lainnya.
Terkait dengan pengawasan transaksi Surat Utang dan Efek Lainnya, OJK melakukan penelaahan atas laporan dari Penerima Laporan Transaksi Efek (PLTE) bulan Oktober dan November berupa keterlambatan pelaporan transaksi Efek masing-masing oleh 15 dan 22 partisipan dengan total frekuensi keterlambatan masing-masing sebanyak 92 dan 157 kali. OJK juga melakukan *review alert* pada bulan Januari dan Februari yang menghasilkan 3.029 *alert* obligasi pemerintah, 1.128 *alert* obligasi korporasi dan 137 *alert* waran. Selama periode laporan, OJK menerima permohonan pembatalan pelaporan transaksi obligasi pada sistem PLTE oleh sembilan Partisipan yang terdiri dari 15 pelaporan. Dari 15 laporan tersebut 10 pelaporan disetujui permohonan pembatalannya, sedangkan sisanya masih dalam proses penyelesaian.
 - 3) Pengawasan terhadap *Self Regulatory Organization*, Lembaga Penilai harga Efek dan Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal
Terkait dengan pengawasan terhadap *Self Regulatory Organization* (SRO), Lembaga Penilai Harga Efek (LPHE) dan Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal (PDPP), OJK telah melakukan beberapa kegiatan pengawasan antara lain: (i) Penyampaian usulan terkait luran Keanggotaan Tahunan Dana Perlindungan Pemodal bagi Perantara Pedagang Efek Tahun 2017; (ii) Penyampaian surat Kepada SRO terkait luran Keanggotaan Tahunan Dana Perlindungan Pemodal bagi PPE yang Mengadministrasikan Rekening Efek Nasabah tahun 2017; (iii) Penyampaian surat Tanggapan atas Rencana Penyampaian Program *Buyback* Saham BEI pada kondisi khusus ke dalam agenda RUPS BEI (iv) Penyampaian laporan analisis atas Laporan Realisasi Anggaran dan Rencana Kerja PT KSEI, PT KPEI dan PT P3IEI triwulan IV-2016 serta (v) Penyampaian surat Penetapan Apresiasi Kinerja 2016 Bagi Direksi dan Komisaris PT BEI, PT KPEI dan PT KSEI.
 - 4) Pengawasan Perusahaan Efek
Terkait dengan perijinan, OJK menyetujui 30 perubahan susunan direksi, 11 perubahan susunan komisaris, dan enam proses persetujuan perubahan pemegang saham. OJK juga menyetujui tiga permintaan peningkatan modal disetor yang diajukan oleh Perusahaan Efek. Selama periode laporan, OJK melakukan analisis dan pemantauan atas laporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) terhadap 132 Perusahaan Efek, di mana rata-rata total MKBD meningkat 2,91% menjadi Rp19,4 triliun. Peningkatan tersebut disebabkan kenaikan nilai aset lancar industri yang lebih besar dari pada kenaikan liabilitas industri.
OJK juga melakukan analisis dan pemantauan atas 23 Perusahaan Efek yang melakukan Penjaminan Emisi Efek terhadap 15 Emiten. Selanjutnya, OJK memantau laporan bulanan atas Laporan Kegiatan Perantara Pedagang Efek (LKPPE) untuk periode Desember 2016 sampai dengan LKPPE periode bulan Februari 2017, di mana delapan Perusahaan Efek belum menyampaikan LKPPE dan dua Perusahaan Efek terlambat menyampaikan LKPPE periode bulan Januari 2017.
 - 5) Pemeriksaan Perusahaan Efek
Terkait dengan pemeriksaan kepatuhan terhadap perusahaan efek, selama periode laporan, OJK melakukan pemeriksaan kepatuhan terhadap delapan Kantor Cabang Perusahaan Efek dengan fokus pemeriksaan kegiatan



penanganan pesanan dan pemasaran kantor cabang. Hasil pemeriksaan tersebut ialah dua perusahaan efek telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan Pasar Modal yang berlaku. Sementara itu, enam Perusahaan Efek lainnya ditemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan Pasar Modal yang berlaku sehingga diminta untuk melakukan langkah-langkah perbaikan

Terkait dengan pemeriksaan teknis, OJK menerima satu pelimpahan pengaduan yang terkait dengan Perusahaan Efek di mana saat ini sedang dalam proses penanganan. Selain itu telah diselesaikan satu Laporan Hasil Pemeriksaan atas pengaduan terkait dengan Perusahaan Efek yang diterima pada tahun 2016.

b) Pengawasan terhadap Pengelolaan Investasi

OJK melakukan pemeriksaan kepatuhan pelaku industri pengelolaan investasi terhadap delapan kantor pusat Manajer Investasi (MI), sembilan kantor cabang APERD, dan dua Bank Kustodian. Sampai akhir periode laporan, sebanyak satu MI telah selesai Laporan Hasil Pemeriksaannya (LHP), lima MI dalam proses finalisasi LHP, dan dua MI masih dalam tahap proses permintaan konfirmasi ke MI. Pemeriksaan kepatuhan terhadap APERD, sebanyak tiga APERD telah selesai LHP nya, tiga APERD dalam proses finalisasi LHP, dan dua APERD masih dalam tahap proses permintaan konfirmasi ke APERD. Untuk pemeriksaan kepatuhan terhadap BK, seluruhnya dalam proses finalisasi LHP.

Terkait dengan pengawasan atas laporan berkala, OJK mencatat bahwa terdapat dua MI yang tidak menyampaikan laporan serta tidak ada MI yang terlambat menyampaikan laporan X.N.1 bulan Januari, Februari, dan Maret 2017. OJK juga mewajibkan MI untuk

menyampaikan laporan MKBD setiap bulan di mana selama periode laporan terdapat dua MI yang tidak menyampaikan laporan MKBD bulan Januari, Februari, dan Maret 2017 dan dua MI yang terlambat menyampaikan laporan MKBD bulan Maret 2017.

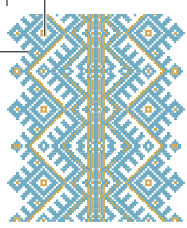
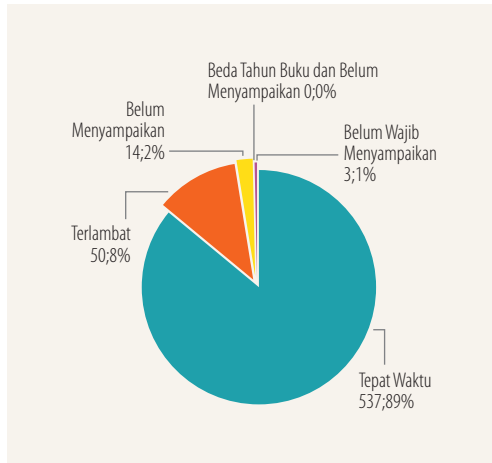
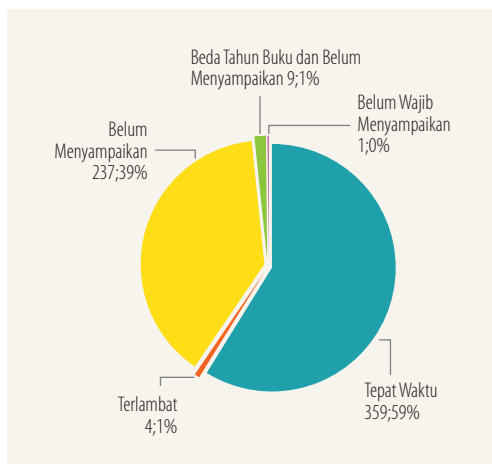
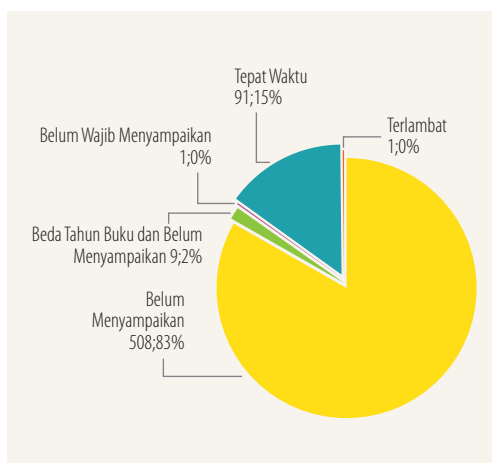
c) Pengawasan terhadap Emiten dan Perusahaan Publik

Selama periode laporan, OJK melakukan pengawasan atas berbagai aksi korporasi yang dilakukan oleh Emiten dan Perusahaan Publik, yaitu sebagai berikut:

Tabel II - 11 Pengawasan Emiten dan Perusahaan Publik

No	Aksi Korporasi	Triwulan II 2016	Triwulan III 2016	Triwulan IV 2016	Triwulan I 2017
1.	Transaksi Afiliasi	39	59	63	53
2.	Transaksi Afiliasi Bersamaan dengan Transaksi Material	2	-	-	-
3.	Transaksi Material Tidak Memerlukan RUPS	3	8	3	11
4.	Transaksi Material yang Harus Terlebih Dahulu Mendapat Persetujuan RUPS	9	3	2	8
5.	Transaksi Perubahan Kegiatan Usaha Utama	3	-	-	1
6.	Pembagian Saham Bonus	-	-	-	-
7.	Pembagian Dividen Berupa Kas	25	14	2	3
8.	Pembagian Dividen Saham	1	-	-	-
9.	Laporan <i>Buyback</i> Saham	-	3	1	7
10.	Laporan <i>Buyback</i> Saham dalam Kondisi Pasar yang Berpotensi Krisis	19	6	4	-
11.	Pembelian Kembali Obligasi	-	-	-	1
12.	Penelaahan terhadap Program <i>ESOP/MSOP</i>	2	-	3	1
13.	Penelaahan atas Rencana Penggabungan Usaha	-	-	2	-
14.	Penelaahan atas Penawaran <i>Tender</i>	-	1	-	2
15.	Penelaahan atas Penawaran <i>Tender Sukarela</i>	-	-	-	-
16.	Penelaahan atas Rencana Penambahan Modal Tanpa HMETD	16	3	3	2
17.	Penelaahan <i>Go Private</i>	-	-	-	-

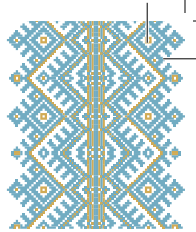
OJK juga melakukan pemantauan atas penyampaian laporan berkala sebagai berikut:

**Grafik II - 5** Penyampaian Laporan Keuangan Tengah Tahunan (LKTT) 2016**Grafik II - 6** Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan (LKT) 2016**Grafik II - 7** Penyampaian Laporan Tahunan (LT) 2016

OJK melakukan pemantauan atas kesesuaian dengan ketentuan Pasar Modal terhadap 281 laporan keterbukaan atas informasi atau fakta material, 68 laporan hasil pemeringkatan efek, 68 hasil RUPS, serta lima laporan penjatahan Penawaran Umum. Selain itu, OJK juga melakukan rekapitulasi terhadap laporan hutang valas yang disampaikan setiap bulan oleh Emiten dan Perusahaan Publik, dengan jumlah total sebanyak 724 laporan dengan tujuan untuk melihat *exposure* hutang valas terhadap Emiten dan Perusahaan Publik.

Selama periode laporan, OJK melakukan Pemeriksaan Teknis terhadap delapan Emiten dan Perusahaan Publik yaitu:

- Satu Emiten dan Perusahaan Publik untuk memastikan pemenuhan Peraturan Nomor X.K.2 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik;
- Satu Emiten dan Perusahaan Publik untuk memastikan pemenuhan Peraturan Nomor IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu;
- Satu Emiten dan Perusahaan Publik untuk memastikan adanya dugaan pelanggaran tentang Kelangsungan Usaha (*going concern*), pemenuhan Peraturan Nomor IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik, peraturan terkait Tata Kelola Perusahaan, serta memahami dan melihat langsung proses bisnis Perseroan;
- Satu Emiten dan Perusahaan Publik untuk memastikan pemenuhan Peraturan Nomor VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 60/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu,



dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik;

- e. Satu Emiten dan Perusahaan Publik untuk memastikan adanya dugaan pelanggaran tentang Kelangsungan Usaha (*going concern*) serta memahami dan melihat langsung proses bisnis Perseroan;
- f. Satu Emiten dan Perusahaan Publik untuk memastikan pemenuhan PSAK 58 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik;
- g. Satu Emiten dan Perusahaan Publik untuk memastikan adanya dugaan pelanggaran Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum; dan
- h. Satu Emiten untuk memastikan pemenuhan peraturan terkait Tata Kelola Perusahaan yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik, Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi Dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik, Nomor 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten Atau Perusahaan Publik, Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, dan Nomor 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

d) Pengawasan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal

Selama periode laporan, OJK melakukan penelaahan atas 87 laporan perubahan data dan informasi Profesi Penunjang Pasar Modal, yang terdiri dari 45 laporan dari Akuntan, 13 laporan dari Konsultan Hukum, 28 laporan dari Penilai dan satu laporan dari

Notaris. OJK juga melakukan pemeriksaan kepatuhan terhadap dua Biro Administrasi Efek dan dua Perusahaan Pemeringkat dan telah menyelesaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap dua Biro Administrasi Efek.

Selama periode laporan OJK melakukan *Monitoring on-site* terhadap satu profesi Penilai dan tiga Konsultan Hukum. Terkait dengan kepatuhan Akuntan Publik Pasar Modal, OJK melakukan pemeriksaan terhadap 12 KAP dan telah menyelesaikan revidu bahan awal pemeriksaan dan penyampaian berkas pemeriksaan kepada empat KAP.

e) Penegakan Hukum Industri Pasar Modal

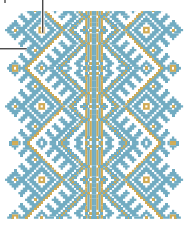
1) Pemeriksaan Pasar Modal

Salah satu tugas OJK adalah mengawasi kegiatan di Pasar Modal, baik melalui upaya preventif maupun represif dalam bentuk penegakan hukum. Dari sisi industri, penegakan hukum yang efektif merupakan faktor krusial dalam membentuk tingkat kepercayaan serta kepastian hukum di sektor jasa keuangan. Sampai akhir periode laporan, OJK melakukan pemeriksaan Pasar Modal yang diduga melakukan pelanggaran sebanyak 31 pemeriksaan yang terdiri 11 Pemeriksaan terkait Emiten dan Perusahaan Publik, 18 Pemeriksaan terkait Transaksi dan Lembaga Efek, dan dua Pemeriksaan terkait Pengelolaan Investasi.

2) Penetapan Sanksi dan Penanganan Keberatan Pada Industri Pasar Modal

a. Penetapan Sanksi Administratif

Selama periode laporan, OJK menetapkan 150 sanksi administratif kepada para pelaku industri Pasar Modal, di mana 33 Sanksi administratif berupa Peringatan Tertulis, 116 Sanksi Administratif Berupa Denda, satu Sanksi Administratif berupa



Pencabutan Izin. Sanksi berupa denda dapat dijabarkan sebagai berikut:

a) 115 Sanksi Administratif Berupa Denda dengan nilai Rp2.473.650.000,- (dua miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dikenakan atas pelanggaran berupa keterlambatan penyampaian laporan, dokumen lain, dan keterlambatan pengumuman keterbukaan informasi.

b) Satu Sanksi Administratif Berupa Denda dengan nilai Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dikenakan atas pelanggaran selain keterlambatan penyampaian laporan, dokumen lain, dan keterlambatan pengumuman.

Sebagai upaya penagihan atas Sanksi Administratif Berupa Denda, OJK telah menetapkan 45 Surat Teguran Pertama dan 21 Surat Teguran Kedua terkait dengan keterlambatan pembayaran Sanksi Administratif Berupa Denda. Selanjutnya terdapat dua piutang macet atas Sanksi Administratif Berupa Denda yang telah diproses pelimpahannya ke Panitia Urusan Piutang Negara. OJK juga memproses pengenaan sanksi administratif karena keterlambatan penyampaian laporan, dokumen selain laporan, dan pengumuman sebanyak 17 rekomendasi sanksi administratif serta enam rekomendasi atas kasus pelanggaran ketentuan di sektor Pasar Modal selain keterlambatan penyampaian laporan, dokumen selain laporan, dan pengumuman.

b. Penanganan Keberatan Atas Sanksi Administratif
Terkait dengan penanganan keberatan atas Sanksi Administratif,

OJK menindaklanjuti 33 Permohonan Keberatan di mana empat Keberatan telah ditanggapi dan 29 Keberatan masih dalam proses.

2.2.3 Pengawasan IKNB

A. Pengawasan Asuransi dan BPJS Kesehatan

Tabel II - 12 Penyampaian Laporan Bulanan Perusahaan Asuransi dan Reasuransi

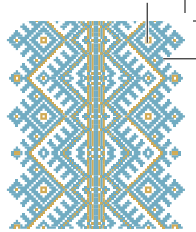
Jenis Perusahaan	Jan 2017			Feb 2017			Mar 2017		
	M	TM	T	M	TM	T	M	TM	T
Asuransi Jiwa	49	1	0	49	1	0	49	1	-
Asuransi Umum dan Reasuransi	81	0	0	81	0	0	81	0	1
Asuransi Wajib	3	0	0	3	0	0	3	0	-
BPJS Kesehatan	1	0	0	1	0	0	1	0	-

M: Menyampaikan; TM: Tidak Menyampaikan; T: Terlambat

Selama periode laporan, terkait dengan pengawasan asuransi dan BPJS Kesehatan (*off-site supervision*), OJK melakukan analisis terhadap 21 laporan keuangan berkala, yang terdiri dari 17 laporan perusahaan asuransi umum, dua laporan perusahaan asuransi jiwa, dan dua laporan perusahaan reasuransi. OJK juga melakukan pemeriksaan (*on-site supervision*) terhadap tujuh perusahaan asuransi umum dan tiga perusahaan asuransi jiwa. OJK juga menerbitkan 20 LHP yang terdiri dari 11 LHP Sementara dan sembilan LHP Final. Selanjutnya, terkait rekomendasi kepada perusahaan asuransi, OJK juga menerbitkan 113 rekomendasi.

Terkait dengan pengenaan sanksi, OJK mengenakan sanksi peringatan pertama kepada 27 perusahaan, sanksi peringatan kedua kepada satu perusahaan, dan sanksi peringatan ketiga kepada tiga perusahaan. OJK juga melakukan pencabutan sanksi yang terdiri dari sepuluh surat pencabutan sanksi peringatan pertama.

OJK telah menindaklanjuti pengaduan-pengaduan yang berkaitan dengan klaim asuransi sebanyak 31 tindak lanjut, berupa surat kepada perusahaan asuransi, pihak pelapor dan kepada konsorsium



Asuransi TKI selaku pihak dilaporkan. Terkait dengan kegiatan pendukung, OJK memproses 34 permohonan pencairan/ penggantian dana jaminan, menyelesaikan 22 permohonan surat keterangan tingkat kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan menindaklanjuti satu permohonan pengesahan cadangan premi yang diajukan oleh perusahaan.

B. Pengawasan Dana Pensiun dan BPJS Ketenagakerjaan

Tabel II - 13 Penyampaian Laporan Bulanan Dana Pensiun

Jenis Dana Pensiun	Telah Menyampaikan			Belum Menyampaikan		
	Jan 2017	Feb 2017	Mar 2017	Jan 2017	Feb 2017	Mar 2017
Dana Pensiun Pemberi Kerja	213	206	206	18	24	24
Dana Pensiun Lembaga Keuangan	25	24	24	0	1	1
Total	238	230	230	18	25	25

Terkait dengan pengawasan Dana Pensiun, OJK melakukan pemeriksaan langsung (*on-site supervision*) terhadap 14 Dana Pensiun. Selain itu, OJK juga menerbitkan 11 LHPL Sementara dan delapan LHPL Final Dana Pensiun (Pemeriksaan Tahun 2016).

Terkait dengan pengawasan BPJS Ketenagakerjaan, OJK melakukan pengawasan tidak langsung dan pengawasan langsung (pemeriksaan). Pengawasan tidak langsung dilakukan melalui kegiatan analisis terhadap laporan berkala yang disampaikan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Sementara itu, pengawasan langsung dilakukan melalui kegiatan pemeriksaan di kantor BPJS Ketenagakerjaan dan/atau pihak terkait lainnya. Selama periode laporan, OJK menerima dan melakukan analisis terhadap laporan berkala dari BPJS Ketenagakerjaan sebanyak sembilan laporan berkala yang terdiri dari tiga laporan pengelolaan program Dana Jaminan Sosial periode Desember 2016, Januari dan Februari 2017

dan enam laporan keuangan bulanan periode Desember 2016, Januari dan Februari 2017 masing-masing untuk Badan dan Dana Jaminan Sosial. OJK juga telah menyelesaikan laporan hasil pemeriksaan *batch* II-2016.

C. Pengawasan Lembaga Pembiayaan

Selama periode laporan, OJK melakukan pemeriksaan langsung (*on-site supervision*), dengan detail sebagai berikut:

Tabel II - 14 Pemeriksaan Lapangan Lembaga Pembiayaan

Jenis Perusahaan	Jumlah yang diperiksa selama triwulan I-2017
Perusahaan Pembiayaan	11
Perusahaan Modal Ventura	4
Jumlah	15

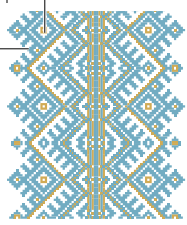
Selain itu, OJK menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dengan detail sebagai berikut:

Tabel II - 15 Hasil Pemeriksaan Langsung

Proses penyusunan LHPLS dan LHPL yang telah dikirimkan	15
Proses penyusunan LHPLF dan LHPL yang telah dikirimkan	29

Terkait dengan penerapan *Risk Based Supervision*, OJK melakukan pemeriksaan langsung terhadap 13 Perusahaan Pembiayaan. Kewajiban penyampaian laporan *self assessment* atas tingkat risiko dan pelaporan penerapan manajemen risiko telah disampaikan oleh Perusahaan Pembiayaan.

OJK juga mewajibkan Perusahaan Pembiayaan untuk menyusun rencana bisnis tahunan dan disampaikan kepada OJK paling lambat pada tanggal 30 Januari tahun berikutnya. Rencana bisnis tersebut akan digunakan sebagai dasar bagi OJK untuk dapat memberikan gambaran awal terkait dengan kondisi pertumbuhan industri dan harapan yang ingin dicapai oleh para pelaku industri. Selama periode laporan,



terdapat 159 Perusahaan Pembiayaan dan 32 Perusahaan Modal Ventura yang telah menyampaikan Rencana Bisnis Tahunan. OJK juga memberikan sanksi administratif kepada 41 Perusahaan Pembiayaan dan 30 Perusahaan Modal Ventura yang tidak menyampaikan rencana bisnis.

D. Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro

Selama periode laporan, OJK memberikan izin usaha kepada 28 LKM di mana izin usaha penuh sebanyak empat LKM dan izin usaha bersyarat sebanyak 24 LKM. Sebanyak 25 LKM menjalankan usaha secara konvensional dan tiga LKM menjalankan usaha secara syariah. Berikut rincian 28 LKM yang telah mendapatkan izin usaha sebagai berikut:

Tabel II - 16 LKM yang Mendapatkan Izin Usaha Penuh

No.	Nama LKM
1.	Koperasi LKMS Ukhuwah Bintang Ihsani
2.	Koperasi LKMA Gapoktan Gerak Makmur
3.	Koperasi LKMS Madani Emas Nusantara
4.	Koperasi LKMA Gapoktan Suka Tani Desa Sastrodirjan Kecamatan Wonopringgo

Tabel II - 17 LKM yang Mendapatkan Izin Usaha Bersyarat

No	Nama LKM
1.	Koperasi LKMA Amanah Manggis Ganting
2.	Koperasi LKMA Gapoktan Melati Makmur
3.	Koperasi LKMA Lokuang Kuranji
4.	Koperasi LKMA Taluk Tigo Sakato
5.	Koperasi LKM Gapoktan Panca Karya
6.	Koperasi LKMA Anduring
7.	Koperasi LKM Usaha Murih Kasembadan
8.	Koperasi LKMA Lansano Saiyo
9.	Koperasi LKMA Tani Utama Kertayasa
10.	Koperasi LKM Panuntun Tani
11.	Koperasi LKM Agribisnis Situbanda
12.	Koperasi LKMS MM Sejahtera Propinsi Bengkulu
13.	Koperasi LKMA Gemar Sepakat
14.	Koperasi LKMA Baringin Sakti
15.	Koperasi LKMA Tani Makmur Blater
16.	Koperasi LKM Gapoktan Bunga Padi
17.	Koperasi LKM Gapoktan Tanah Bahagia
18.	Koperasi LKMA Mekar Jaya
19.	Koperasi LKM Sumber Makmur

20.	Koperasi LKM Gapoktan Reski Tunas Semi
21.	Koperasi LKM Gapoktan Karya Tani
22.	Koperasi LKMA Damar Rumpit Jaya
23.	Koperasi LKMA Tri Mulya Tani
24.	Koperasi LKMA Gapoktan Suka Tani Desa Sastrodirjan Kecamatan Wonopringgo

Selain melakukan kegiatan pengawasan, OJK juga melakukan berbagai kegiatan pendampingan, pelatihan dan sosialisasi terhadap LKM untuk meningkatkan pertumbuhan LKM di Indonesia.

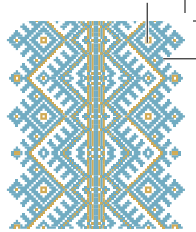
E. Pengawasan Lembaga Keuangan Khusus

Selama periode laporan, OJK menerima laporan bulanan dari Lembaga Keuangan Khusus, yaitu 21 Perusahaan Penjaminan, PT Pegadaian (Persero), Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), PT Danareksa (Persero), PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) untuk periode bulan Januari 2017, Februari 2017, dan Maret 2017. Laporan bulanan tersebut ditindaklanjuti melalui kegiatan pengawasan tidak langsung berupa analisis atas laporan bulanan. OJK juga melakukan pemeriksaan langsung terhadap delapan perusahaan penjaminan.

F. Pengawasan Perusahaan Jasa Penunjang IKNB

Terkait dengan pengawasan terhadap perusahaan Jasa Penunjang IKNB, OJK melakukan analisis atas laporan keuangan dan laporan operasional Perusahaan Penunjang IKNB berdasarkan penyampaian laporan keuangan semesteran, melakukan pemeriksaan rutin dan pemeriksaan khusus dan mengenakan sanksi atas pelanggaran ketentuan yang dilakukan perusahaan jasa penunjang.

Selama periode laporan, OJK melakukan pemeriksaan rutin dan pemeriksaan khusus sebanyak 15 perusahaan yang terdiri dari 10 Perusahaan Pialang Asuransi, empat Perusahaan Pialang Reasuransi, dan satu



Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi dengan telah menerbitkan dua Laporan Hasil Pemeriksaan Sementara (LHPS). Selain itu, terkait dengan analisis atas laporan keuangan dan laporan operasional berdasarkan penyampaian laporan keuangan semesteran per 31 Desember 2016, OJK menerima sebanyak 412 laporan yang terdiri dari 333 laporan keuangan Perusahaan Pialang Asuransi dan 79 laporan keuangan Perusahaan Pialang Reasuransi.

G. Pelayanan Kelembagaan dan Produk IKNB

Selama periode laporan, OJK menerima 1.477 permohonan/pelaporan sehingga sampai akhir Maret 2017, OJK memproses 1.992 permohonan/pelaporan dimana 1.299 (65%) permohonan/pelaporan telah selesai diberikan izin/persetujuan/pencatatan,

Tabel II - 18 Progress Pelayanan Kelembagaan dan Produk IKNB

Kegiatan	Permohonan			Selesai	Telah Diproses dan Ditanggapi ^{*)}	Proses Analisis
	s/d Triwulan-IV 2016	Triwulan I-2017	Total			
Pemberian Izin Usaha	5	19	24	4	15	5
Pencabutan Izin Usaha	4	6	10	5	3	2
Proses Likuidasi	5	5	10	4	5	1
Perubahan AD/Perubahan Kepemilikan/Perubahan Nama/Perubahan PDP/Merger dan Akuisisi	162	48	210	49	141	20
Kantor Cabang	59	172	231	168	48	15
Kantor Pemasaran dan Kantor Selain Kantor Cabang	9	129	138	118	9	11
Penilaian Kemampuan dan Kepatutan	160	226	386	183	186	17
Kepengurusan Lainnya ^{**)}	0	429	429	347	53	29
Produk	111	443	554	421	130	3
Jumlah	515	1.477	1.992	1.299	590	103

^{*)} Telah dilakukan analisis untuk permohonan terkait dan permohonan telah ditanggapi, saat ini menunggu kelengkapan dokumen dari pemohon.

^{**)} Kepengurusan lainnya meliputi kegiatan perubahan susunan direksi dan dewan komisaris perusahaan, laporan syarat keberlanjutan, laporan tenaga ahli, dan laporan rekomendasi penggunaan tenaga kerja asing

590 (30%) permohonan/pelaporan telah ditanggapi dan sisanya 103 permohonan/pelaporan (5%) masih dalam proses analisis.

1) Pemberian Izin Usaha

Sampai akhir triwulan I-2017, terdapat 24 permohonan izin usaha dengan rincian berikut:

Tabel II - 19 Permohonan Izin Usaha IKNB

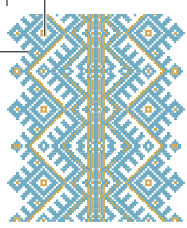
IKNB	Permohonan			Selesai	Telah Diproses dan Ditanggapi ^{*)}	Proses Analisis
	s/d Triwulan-IV 2016	Triwulan I-2017	Total			
Perusahaan Asuransi dan Reasuransi	0	1	1	0	0	1
Perusahaan Pembiayaan	1	0	1	0	1	0
Perusahaan Modal Ventura	1	2	3	0	2	1
Perusahaan Penjaminan	0	0	0	0	0	0
Perusahaan Pergadaian	3	3	6	3	2	1
LPMBTI (P2P Lending)	0	13	13	1	10	2
Total	5	19	24	4	15	5

^{*)} Telah dilakukan analisis untuk permohonan terkait dan permohonan telah ditanggapi, saat ini menunggu kelengkapan dokumen dari pemohon.

Adapun empat perusahaan yang telah diberikan izin usaha/pendaftaran yaitu:

Tabel II - 20 Rincian Pemberian Izin Usaha Bidang IKNB

No.	Nama Perusahaan	Jenis Usaha
1.	PT Rimba Hijau Investasi (Pendaftaran)	Pendaftaran Pergadaian
2.	PT Pasar Dana Pinjaman (Pendaftaran)	Penyelenggara P2P Lending
3.	PT Gadai Pinjam Indonesia (Izin Usaha)	Izin Usaha Pergadaian
4.	PT Sarana Gadai Prioritas (izin Usaha)	Izin Usaha Pergadaian



2) Pencabutan Izin Usaha

Terkait dengan pencabutan izin usaha, selama periode laporan, OJK menerima enam permohonan pencabutan izin usaha, dengan detail sebagai berikut:

Tabel II - 21 Permohonan Pencabutan Izin Usaha

IKNB	Permohonan			Selesai	Telah Diproses dan Ditanggapi ^{*)}	Proses Analisis
	s/d Triwulan-IV 2016	Triwulan I-2017	Total			
Perusahaan Asuransi dan Reasuransi	1	0	1	1	0	0
Dana Pensiun	1	5	6	3	3	0
Perusahaan Pembiayaan	1	1	2	0	0	2
Perusahaan Modal Ventura	1	0	1	1	0	0
Total	4	6	10	5	3	2

**) Telah dilakukan analisis untuk permohonan terkait dan permohonan telah ditanggapi, saat ini menunggu kelengkapan dokumen dari pemohon.*

Adapun lima perusahaan yang telah dicabut izin usahanya oleh OJK yaitu:

Tabel II - 22 Penyelesaian Pencabutan Izin Usaha

No.	Nama Perusahaan
1.	PT Reasuransi Internasional Indonesia
2.	Dana Pensiun IBM Indonesia
3.	Dana Pensiun Indolife Group
4.	PT Layar Persada
5.	Dana Pensiun Tirta Kamuning

3) Proses Likuidasi Dana Pensiun

Selama periode laporan, OJK menerima lima permohonan rencana kerja likuidasi dana pensiun dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II - 23 Permohonan Rencana Kerja Likuidasi Dana Pensiun

IKNB	Permohonan			Selesai	Telah Diproses dan Ditanggapi ^{*)}	Proses Analisis
	s/d Triwulan-IV 2016	Triwulan I-2017	Total			
Persetujuan Rencana Kerja Likuidasi	4	5	9	4	4	1
Persetujuan Hasil Penyelesaian Likuidasi	1	0	1	0	1	0
Total	5	5	10	4	5	1

Adapun proses yang telah mendapatkan persetujuan OJK yaitu:

Tabel II - 24 Daftar Dana Pensiun yang Telah Mendapat Persetujuan

No.	Nama Perusahaan
1.	Dana Pensiun Kertas Leces
2.	Dana Pensiun Gunung Mulia
3.	Dana Pensiun Purbaya
4.	Dana Pensiun Karyawan Mobil Oil Indonesia

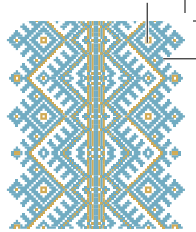
4) Perubahan Kepemilikan Perusahaan/Perubahan Anggaran Dasar/Perubahan Pemegang Saham/Perubahan Peraturan Dana Pensiun (PDP) serta Merger dan Akuisisi

Selama triwulan I-2017, OJK menerima 37 permohonan terkait perubahan kepemilikan perusahaan/perubahan anggaran dasar/perubahan pemegang saham/perubahan PDP, dengan detail sebagai berikut:

Tabel II - 25 Permohonan terkait Perubahan Kepemilikan, Anggaran Dasar, Pemegang Saham dan PDP

IKNB	Permohonan			Selesai	Telah Diproses dan Ditanggapi ^{*)}	Proses Analisis
	s/d Triwulan-IV 2016	Triwulan I-2017	Total			
Perusahaan Asuransi dan Reasuransi	3	21	24	17	7	0
Dana Pensiun	26	12	38	12	23	3
Perusahaan Pembiayaan	85	17	102	16	78	8
Perusahaan Modal Ventura	30	3	33	4	27	2
Perusahaan Penjaminan	7	5	12	5	2	5
Total	148	37	185	37	130	18

**) Telah dilakukan analisis untuk permohonan terkait dan permohonan telah ditanggapi, saat ini menunggu kelengkapan dokumen dari pemohon.*



Merger dan Akuisisi

Terkait proses merger selama periode laporan, OJK menerima satu permohonan penyelesaian merger. Sementara itu, proses akuisisi yang diproses sebanyak 17 permohonan. Adapun rincian proses akuisisi dimaksud yaitu:

Tabel II - 26 Permohonan Proses Merger dan Akuisisi

IKNB	Permohonan			Selesai	Telah Diproses dan Ditanggapi ^{*)}	Proses Analisis
	s/d Triwulan-IV 2016	Triwulan I-2017	Total			
Perusahaan Asuransi dan Reasuransi	2	0	2	0	2	0
Perusahaan Pembiayaan	11	4	15	4	9	2
Total	13	4	17	4	11	2

Perubahan Nama

Selama triwulan I-2017 terdapat tujuh perusahaan yang melaporkan perubahan nama dengan rincian sebagai berikut :

Tabel II - 27 Daftar Perusahaan dengan Perubahan Nama

No.	Nama Perusahaan
1.	PT QBE Pool General Insurance menjadi PT QBE General Insurance Indonesia
2.	PT Heksa Eka Life Insurance menjadi PT Heksa Solution Insurance
3.	PT Top Finance menjadi PT Shakti Top Finance
4.	PT Mitra Dana Putra Utama Finance menjadi PT Mitra Dana Top Finance
5.	PT Bumikusuma Multi Finance menjadi PT Emas Persada Finance
6.	PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera menjadi PT Asuransi BRI Life
7.	PT Pan Pacific Oto Finance menjadi PT Mitra Adipratama Sejati Finance

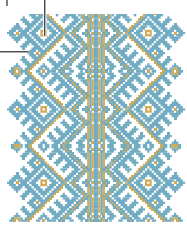
Perizinan Kantor Cabang

Selama periode laporan, OJK menerima 172 permohonan/pelaporan terkait kantor cabang perusahaan asuransi, perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura, dan perusahaan penjaminan, dengan detail sebagai berikut:

Tabel II - 28 Permohonan terkait Kantor Cabang Perusahaan Asuransi, Pembiayaan, Modal Ventura dan Penjaminan

IKNB	Permohonan			Selesai	Telah Diproses dan Ditanggapi ^{*)}	Proses Analisis
	s/d Triwulan-IV 2016	Triwulan I-2017	Total			
Perusahaan Asuransi dan Reasuransi						
· Pembukaan Kantor Cabang	1	4	5	5	0	0
· Penutupan Kantor Cabang	0	0	0	0	0	0
· Pencatatan Perubahan Alamat	0	8	8	7	0	1
Perusahaan Pembiayaan						
· Pembukaan Kantor Cabang	15	47	62	40	19	3
· Penutupan Kantor Cabang	7	12	19	13	4	2
· Pencatatan Perubahan Alamat	31	75	106	79	18	9
Perusahaan Modal Ventura						
· Pembukaan Kantor Cabang	1	20	21	18	3	0
· Penutupan Kantor Cabang	1	0	1	0	1	0
· Pencatatan Perubahan Alamat	1	4	5	5	0	0
Perusahaan Penjaminan						
· Pembukaan Kantor Cabang	0	0	0	0	0	0
· Penutupan Kantor Cabang	0	0	0	0	0	0
· Pencatatan Perubahan Alamat	2	2	4	1	3	0
Total KC	59	172	231	168	48	15

^{*)} Telah dilakukan analisis untuk permohonan terkait dan permohonan telah ditanggapi, saat ini menunggu kelengkapan dokumen dari pemohon.



5) Kantor Cabang, Kantor Pemasaran dan Kantor Selain Kantor Cabang

Sampai dengan triwulan I-2017, OJK menerima 129 laporan pembukaan kantor pemasaran dan kantor selain kantor cabang, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II - 29 Pembukaan Kantor Pemasaran Selain Kantor Cabang

IKNB	Permohonan			Selesai	Telah Diproses dan Ditanggapi*)	Proses Analisis
	s/d Triwulan-IV 2016	Triwulan I-2017	Total			
Perusahaan Asuransi dan Reasuransi	0	56	56	56	0	0
Perusahaan Pembiayaan	9	73	82	62	9	11
Total KP dan KSKC	9	129	138	118	9	11

6) Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama IKNB

Selama triwulan I-2017, OJK menerima 226 permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan pihak utama IKNB dengan rincian sebagai berikut:

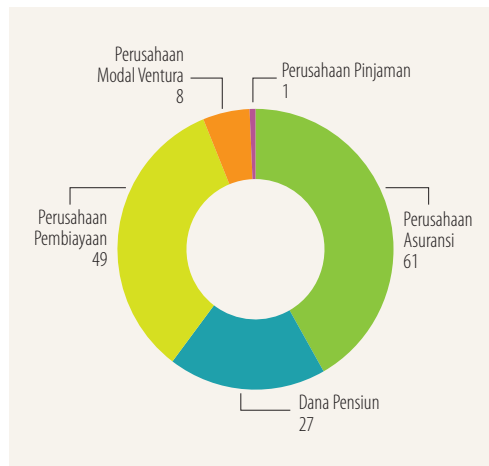
Tabel II - 30 Permohonan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Pihak Utama IKNB

IKNB	Permohonan			Selesai	Telah Diproses dan Ditanggapi*)	Dalam Proses Analisis
	s/d Triwulan-IV 2016	Triwulan I-2017	Total			
Perusahaan Asuransi dan Reasuransi	0	90	90	67	23	0
Dana Pensiun	51	61	112	50	50	12
Perusahaan Pembiayaan	109	71	180	66	110	4
Perusahaan Penjaminan	0	4	4	0	3	1
Jumlah	160	226	386	183	186	17

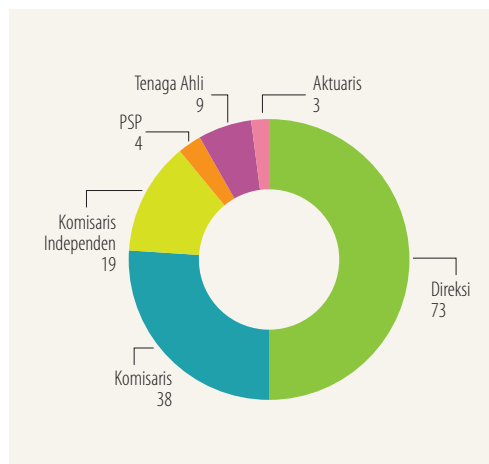
*) Telah dilakukan analisis untuk permohonan terkait dan permohonan telah ditanggapi, saat ini menunggu kelengkapan dokumen dari pemohon.

Dari seluruh pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan sebanyak 183, OJK menetapkan keputusan hasil penilaian sebanyak 146, sementara 37 permohonan batal/dikembalikan dengan rincian sebagai berikut:

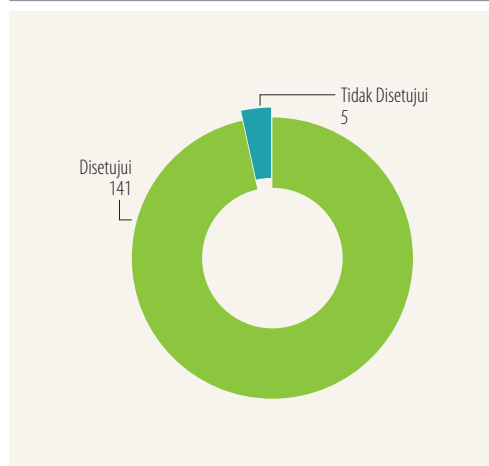
Grafik II - 8 Jumlah Penetapan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan per Triwulan I-2017 Berdasarkan Jenis Industri

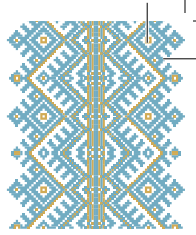


Grafik II - 9 Jumlah Penetapan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan per Triwulan I-2017 Berdasarkan Jabatan



Grafik II - 10 Tingkat Kelulusan Pihak Utama IKNB pada Penilaian Kemampuan dan Kepatutan per Triwulan I-2017





OJK memproses pelaporan yang berkaitan dengan kepengurusan perusahaan, yaitu perubahan susunan direksi dan dewan komisaris perusahaan, pelaporan syarat keberlanjutan, pelaporan tenaga ahli, dan pelaporan rekomendasi penggunaan tenaga kerja asing.

a. Pelaporan Perubahan Kepengurusan IKNB

Selama periode laporan, terdapat 132 pelaporan perubahan pengurus IKNB. Secara rinci pelaporan perubahan pengurus IKNB adalah sebagai berikut:

Tabel II - 31 Permohonan Perubahan Pengurus IKNB

IKNB	Permohonan			Selesai	Telah Diproses dan Ditanggapi ¹⁾	Dalam Proses Analisis
	s/d Triwulan-IV 2016	Triwulan I-2017	Total			
Perusahaan Asuransi dan Reasuransi	0	34	34	23	11	0
Dana Pensiun	0	65	65	53	9	3
Perusahaan Pembiayaan	0	29	29	27	0	2
Perusahaan Modal Ventura	0	2	2	2	0	0
Perusahaan Penjaminan	0	2	2	2	0	0
Jumlah	0	132	132	107	20	5

b. Pelaporan Syarat Keberlanjutan Pengurus IKNB

Selama triwulan I-2017, terdapat 225 pelaporan syarat keberlanjutan pengurus IKNB. Secara rinci pelaporan syarat keberlanjutan pengurus IKNB adalah sebagai berikut:

Tabel II - 32 Pelaporan Syarat Keberlanjutan Pengurus IKNB

IKNB	Permohonan			Selesai	Telah Diproses dan Ditanggapi ¹⁾	Dalam Proses Analisis
	s/d Triwulan-IV 2016	Triwulan I-2017	Total			
Perusahaan Asuransi dan Reasuransi	0	68	68	68	0	0
Dana Pensiun	0	75	75	58	0	17
Perusahaan Pembiayaan	0	82	82	64	11	7
Jumlah	0	225	225	190	11	24

c. Pelaporan Tenaga Ahli

Selama triwulan I-2017, terdapat 35 pelaporan tenaga ahli. Secara rinci pelaporan tenaga ahli adalah sebagai berikut:

Tabel II - 33 Pelaporan Tenaga Ahli IKNB

IKNB	Permohonan			Selesai	Telah Diproses dan Ditanggapi ¹⁾	Dalam Proses Analisis
	s/d Triwulan-IV 2016	Triwulan I-2017	Total			
Perusahaan Asuransi dan Reasuransi	0	35	35	24	11	0
Jumlah	0	35	35	24	11	0

d. Pelaporan Penggunaan Tenaga Kerja Asing

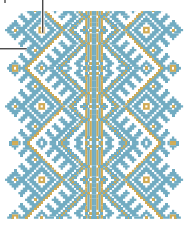
Selama triwulan I-2017, terdapat 37 pelaporan penggunaan tenaga kerja asing. Secara rinci pelaporan penggunaan tenaga kerja asing adalah sebagai berikut:

Tabel II - 34 Pelaporan Penggunaan Tenaga Kerja Asing

IKNB	Permohonan			Selesai	Telah Diproses dan Ditanggapi ¹⁾	Dalam Proses Analisis
	s/d Triwulan-IV 2016	Triwulan I-2017	Total			
Perusahaan Asuransi dan Reasuransi	0	28	28	17	11	0
Perusahaan Pembiayaan	0	9	9	9	0	0
Jumlah	0	37	37	26	11	0

7) Perizinan Produk Asuransi

Selama periode laporan, OJK menerima sebanyak 443 permohonan/pelaporan dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel II - 35** Perizinan Produk Asuransi

Uraian	Permohonan			Selesai	Telah Diproses dan Ditanggapi ^{*)}	Dalam Proses Analisis
	s/d Triwulan-IV 2016	Triwulan I-2017	Total			
Pencatatan Nama Lain	1	8	9	5	4	0
Pencatatan Perubahan Produk	35	104	139	108	31	0
Pencatatan Produk Baru	10	28	38	30	8	0
Persetujuan Perubahan Produk	6	55	61	47	14	0
Persetujuan Produk Baru	59	169	228	153	72	3
Persetujuan Bancassurance	0	79	79	78	1	0
Grand Total	111	443	554	421	130	3

^{*)} Telah dilakukan analisis untuk permohonan terkait dan permohonan telah ditanggapi, saat ini menunggu kelengkapan dokumen dari pemohon

H. Pelayanan Kelembagaan Jasa Penunjang IKNB

Selama periode laporan OJK, menerima 121 permohonan terkait dengan kelembagaan Jasa Penunjang IKNB dengan detail sebagai berikut:

Tabel II - 36 Rekapitulasi Kegiatan Pelayanan Kelembagaan Jasa Penunjang IKNB selama Triwulan I 2017

No	Jenis Layanan	Permohonan Triwulan I tahun 2017	Outstanding Triwulan IV 2016	Status		
				Selesai	Proses*	Batal
1	Pemberian Izin Usaha	0	4	2	2	0
2	Perubahan Kepemilikan	19	28	5	42	0
3	Penambahan Modal	7	8	6	9	0
4	Perubahan Pengurus	23	28	11	40	0
5	Perubahan Alamat	19	10	15	14	0
6	Pembukaan Kantor Cabang	1	1	2	0	0
7	Perubahan Nama	0	2	0	2	0
8	Pendaftaran Tenaga Ahli	12	7	9	10	0
9	Rekomendasi Tenaga Kerja Asing	3	0	3	0	0
10	Pendaftaran Profesi	121	50	130	34	7

*Dalam proses meliputi permintaan kelengkapan dokumen, menunggu penjadwalan fit & proper atau masih proses analisis.

Tabel II - 37 Pendaftaran Profesi selama Triwulan I 2017

Jenis Profesi	Permohonan	Jumlah Profesi yang Terdaftar pada Triwulan I-2017	Total Jumlah Pendaftaran Profesi s/d Triwulan I-2017 (per 31 Maret 2017)
Akuntan Publik	86	21	238
Konsultan Aktuaria	29	66	15
Penilai	56	43	49
Jumlah	171	130	302

Penetapan Hasil Pengujian Kemampuan dan Kepatutan bagi Direksi, Komisaris, Pemegang Saham Pengendali, dan Tenaga Ahli

Selama periode laporan, OJK mencatat penetapan hasil pengujian kemampuan dan kepatutan sebagaimana pada tabel berikut.

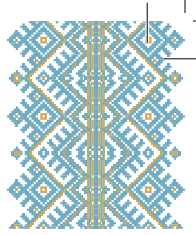
Tabel II - 38 Jumlah Penetapan Hasil Pengujian Kemampuan dan Kepatutan (PKK) selama Triwulan I 2017

Jabatan	Pelaksanaan PKK Triwulan I 2017		Jumlah
	Direkomendasikan	Tidak Direkomendasikan	
Pemegang Saham Pengendali	1	-	1
Komisaris	1	1	2
Direksi	7	1	8
Auditor Internal	1	-	1
Jumlah	10	2	12

OJK juga memberikan izin usaha terhadap dua Perusahaan Pialang Reasuransi, dan melakukan pencabutan izin usaha terhadap satu Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II - 39 Jumlah Perusahaan Penunjang Berdasarkan Jenis Usaha

No	Jenis Perusahaan	Tahun 2016	Triwulan I 2017		Jumlah
			Pemberian Izin	Pencabutan Izin	
1.	Pialang Asuransi	169	-	-	169
2.	Pialang Reasuransi	40	2	-	42
3.	Jasa Penilai Kerugian	28	-	1	27
Jumlah		237	2	1	238



2.3 AKTIFITAS PENGEMBANGAN

2.3.1 Pengembangan Industri Perbankan

A. Pengembangan Bank Umum

Pada periode laporan, OJK menyusun *Standard Operating Procedure* (SOP) untuk Permohonan Izin Saluran Pemasaran Produk Asuransi Melalui Kerjasama Dengan Bank (*Bancassurance*), Laporan Analisa Harmonisasi Ketentuan Pemahaman Terhadap Bank (*Know Your Bank/KYB*), Kertas Kerja Pemeriksaan, serta Penelitian Administratif dan Analisis Pelaporan Bank sebagai tindak lanjut dalam rencana pembuatan ketentuan pengawasan bank.

Terkait dengan pelaksanaan konversi ketentuan, OJK akan memprioritaskan ketentuan terkait Pengawasan Bank Berdasarkan Risiko dan konversi ketentuan SEBI Intern mengenai Pedoman Pengawasan Bank Berdasarkan Risiko untuk Tahapan Penilaian Berdasarkan Risiko dan Tingkat Kesehatan. OJK juga melakukan penyusunan pedoman dalam rangka pengembangan pengawasan bank umum antara lain Pedoman Pemeriksaan APU/PPT, Pedoman Analisis Laporan Rutin Bank dan Penyusunan Laporan Analisis Bulanan/Triwulanan.

B. Pengembangan BPR/BPRS

Terkait dengan pengembangan BPR, OJK menerbitkan dua SEDK untuk mendukung fungsi pengawasan BPR yaitu: (i) SEDK tentang Pedoman Pengawasan BPR Berdasarkan Risiko Untuk Tahapan Pemantauan Hasil Tindak Lanjut Pengawasan dan/atau Pemeriksaan BPR yang bertujuan untuk memberikan panduan bagi Pengawas BPR dalam memantau pelaksanaan komitmen tindak lanjut hasil temuan pengawasan maupun pemeriksaan yang harus diselesaikan oleh BPR dalam jangka waktu yang telah disepakati, serta (ii) SEDK tentang Pedoman Penilaian Analisis Potensi dan Kelayakan (Studi Kelayakan) BPR yang bertujuan untuk menyediakan pedoman

serta petunjuk teknis bagi pengawas terkait dengan proses pemberian izin kelayakan pendirian BPR, pembukaan Kantor Cabang BPR, dan pemindahan alamat Kantor Pusat/ Kantor Cabang BPR.

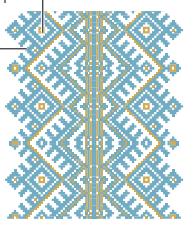
OJK juga menyusun dua kajian yang mendukung pengawas BPR yaitu Kajian *Early Warning System* (EWS) BPR yang bertujuan untuk mendukung pelaksanaan proses pengawasan untuk mendeteksi secara dini adanya perkembangan yang tidak diinginkan atau bahkan membahayakan kelangsungan usaha BPR dan Kajian Sistem Informasi Pengawasan (SIP) BPR untuk Modul Pemahaman Terhadap BPR (KYBPR) yang bertujuan untuk Meningkatkan efektivitas dan efisiensi Pengawasan BPR berdasarkan Risiko khususnya pada tahapan KYBPR; Membantu pengawas serta meminimalisir *human error* dalam penyusunan dokumen KYBPR; dan Menjadi media penyimpanan dokumen KYBPR yang terstruktur dan terorganisir untuk kesinambungan proses pengawasan serta memudahkan *audit trail*.

2.3.2 Pengembangan Industri Pasar Modal

A. Kajian Pasar Modal

Selama periode laporan, beberapa kajian telah dilakukan OJK, antara lain:

1. Kajian tentang Pengendalian Internal Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. Penyusunan kajian ini sebagai dasar kebutuhan atas pengaturan pengendalian internal BE, LKP, dan LPP yang sesuai dengan tuntutan saat ini guna mendukung kebutuhan pengawasan dan kepatuhan oleh OJK
2. Kajian Pengawasan Terhadap Pemerintah Daerah Sebagai Pihak Penerbit Obligasi Daerah.
Kajian ini dilatarbelakangi oleh upaya untuk mendukung pendanaan



infrastruktur dan sektor ekonomi prioritas dengan mendorong Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lainnya untuk merealisasikan rencana penerbitan obligasi daerah.

3. Kajian tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Usaha di Pasar Modal

Kajian ini dilatarbelakangi oleh adanya permasalahan implementasi atau penggunaan Peraturan Bapepam LK Nomor VIII.C.3 tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Usaha di Pasar Modal oleh Profesi Penilai, kebutuhan pengawasan dan proses penelaahan bagi internal OJK.

B. Sosialisasi dan Edukasi Pasar Modal Terpadu (SEPMT)

Selama periode laporan, OJK melakukan serangkaian kegiatan sosialisasi dan edukasi yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat akan industri Pasar Modal, antara lain dengan melakukan *workshop* pendalaman materi Pasar Modal, sosialisasi peraturan terbaru, serta sosialisasi tentang Penilaian *ASEAN Corporate Governance Scorecard 2017* kepada Pelaku Industri Pasar Modal. Dari serangkaian kegiatan tersebut, OJK melakukan survei tingkat kephahaman kepada seluruh responden yang mana dapat disimpulkan bahwa setelah menerima edukasi dan sosialisasi para responden dapat mengenal Pasar Modal dengan lebih baik.

2.3.3 Pengembangan IKNB

Selama periode laporan, beberapa kegiatan pengembangan IKNB dapat dijabarkan sebagai berikut:

• Program 1000 Aktuaris

Program ini bertujuan mempercepat jumlah aktuaris sehingga perkiraan kebutuhan profesional aktuaris untuk IKNB dapat terpenuhi. Beberapa kegiatan yang dilakukan

dalam program ini adalah sosialisasi dan promosi, perkuliahan singkat sertifikasi aktuaris yang bekerjasama dengan Persatuan Aktuaris Indonesia (PAI), serta pendidikan dan pelatihan aktuarial keahlian khusus asuransi umum. Sampai akhir periode laporan, telah disusun perencanaan pelaksanaan seminar mengenai Program 1000 Aktuaris ke perguruan tinggi

• *Risk Management, Economic Sustainability & Actuarial Science Development in Indonesia (READI)*

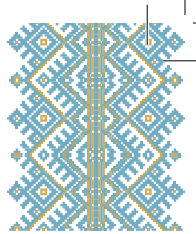
Proyek READI bertujuan untuk membangun Indonesia sebagai pusat regional keunggulan dalam ilmu aktuarial dan manajemen risiko, dengan meningkatkan jumlah dan kualitas lulusan ilmu aktuarial Indonesia tersedia untuk bisnis Indonesia, universitas dan lembaga pemerintah, dan untuk memperkuat profesi aktuarial di Indonesia. Proyek ini, diharapkan dapat meningkatkan jumlah lulusan ilmu pengetahuan aktuarial dan memenuhi kebutuhan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank terutama industri asuransi dalam hal aktuaris.

• Standar Kompetensi Kinerja Nasional Indonesia Bidang Asuransi (SKKNI)

Dalam rangka mendukung penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia dan Kompetensi Kerja Nasional Indonesia serta pelaksanaan ketentuan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, OJK membentuk Tim Perumus dan Tim Verifikasi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Perasuransian.

• Pokja Program Pembiayaan Ekonomi Kreatif

Dalam rangka meningkatkan Penyaluran Pembiayaan pada Sektor Produktif khususnya di sektor industri kreatif serta mendukung Program Pemerintah untuk meningkatkan pembiayaan ekspor pada ekonomi kreatif dan UMKM, OJK membentuk Pokja Program Pembiayaan Ekonomi Kreatif di mana pada



tahun 2017 program tersebut dilanjutkan dengan target sebesar Rp6 triliun - Rp 6,5 triliun. Sampai periode laporan, total *outstanding* pembiayaan yang sudah disalurkan sebesar Rp5,9 triliun.

2.4 STABILITAS SISTEM KEUANGAN

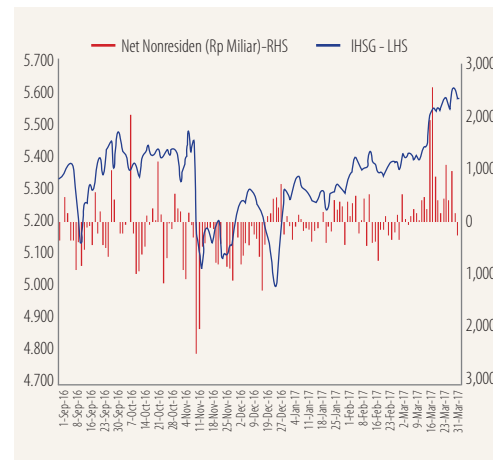
Di tengah berlanjutnya pemulihan ekonomi dan intermediasi keuangan pada triwulan I-2017, stabilitas sistem keuangan domestik secara keseluruhan masih dalam kondisi terjaga. Kinerja industri jasa keuangan masih memadai, didukung indikator keuangan dan profil risiko yang tetap terjaga. Sejalan dengan meredanya ketidakpastian global dan prospek perekonomian domestik yang membaik, volatilitas pasar modal domestik terpantau mereda.

2.4.1 Pasar Keuangan dan Lembaga Jasa Keuangan

OJK menilai bahwa secara umum kondisi sektor jasa keuangan dalam negeri pada periode laporan masih terjaga. Ketidakpastian ekonomi dan pasar keuangan global terpantau berkurang. Peningkatan *Fed Funds Rate* (FFR) pada akhir periode tidak berdampak signifikan terhadap *emerging markets*. Dana global terpantau kembali masuk ke *emerging markets* sehingga pasar keuangan global bergerak positif. Sementara itu, indikator lembaga jasa keuangan masih solid dengan peningkatan aktivitas intermediasi.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia terpantau menguat sebesar 5,12% (*qtq*) tercermin dari Investor nonresiden yang membukukan *net buy* sebesar Rp8,3 triliun. Aksi *net buy* nonresiden mulai terjadi pasca peningkatan FFR tidak diiringi dengan perubahan *outlook* ke depan.

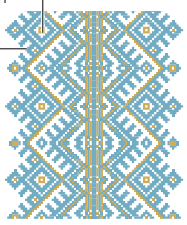
Grafik II - 11 IHSG dan Arus Modal Nonresiden di Pasar Saham



Dari sisi pasar surat utang, OJK mencatat perkembangan positif, yang dipengaruhi oleh faktor-faktor global maupun domestik yang tercermin dari imbal hasil (*yield*) Surat Berharga Negara (SBN) mencatat penurunan rata-rata sebesar 66 *basis point*. Selain itu, *Net buy* nonresiden juga meningkat sebesar Rp57,4 triliun dibandingkan periode sebelumnya.

Kegiatan intermediasi juga menunjukkan perbaikan tercermin dari pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) tercatat sebesar 9,21% *yoy*. Sementara itu, kredit perbankan bertumbuh sebesar 8,57% *yoy*. Piutang pembiayaan yang disalurkan melanjutkan tren peningkatan dengan pertumbuhan sebesar 7,20% *yoy*. Namun demikian apabila dilihat secara triwulanan, DPK BUK tumbuh 0,26% (*qtq*) atau lebih lambat dibandingkan pada triwulan sebelumnya. Sementara itu, kredit BUK mengalami penurunan sebesar 1,58%. Kinerja penyaluran piutang mengalami peningkatan sebesar naik 1,98% dibandingkan triwulan sebelumnya.

Ketahanan industri lembaga jasa keuangan terpantau masih memadai. Risiko likuiditas, kredit, dan pasar perbankan masih terjaga, ditopang oleh permodalan yang memadai di



Perkembangan FSAP

Pada triwulan I-2017, Indonesia melaksanakan dua misi Program Asesmen Sektor Jasa Keuangan (FSAP), yaitu *Mission I* tanggal 19 September - 4 Oktober 2016 dan *Main Mission* tanggal 30 Januari - 16 Februari 2017. FSAP merupakan *joint program* antara *International Monetary Fund* (IMF) dan *World Bank* (WB) yang bertujuan mengevaluasi kondisi stabilitas sistem keuangan dan perkembangan sektor keuangan suatu negara. Indonesia sebagai anggota G-20 berkomitmen untuk melaksanakan FSAP 5 tahun sekali dan tahun 2016/2017 merupakan pelaksanaan FSAP yang kedua bagi Indonesia setelah yang pertama pada tahun 2009/2010.

Berdasarkan hasil *scoping mission* Tim FSAP pada 30 Mei - 3 Juni 2016, FSAP disepakati difokuskan pada tujuh *workstreams* (WS)/gugus tugas, yaitu WS1. *Risk Analysis & Stress Testing*, WS2. *Macroprudential Policy*, WS3. *Liquidity Management*, WS4. *Microprudential Oversight*, WS5. *Financial Safety Nets, Crisis Management and Resolution*, WS6. *Financial Deepening*, WS7. *Financial Inclusion*.

Sejalan dengan hal itu, telah dibentuk Tim Kerja Nasional FSAP yang beranggotakan

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dengan OJK sebagai koordinator. Pada saat kedatangan Tim FSAP IMF/WB ke Indonesia dalam rangka *Mission I* dan *Main Mission*, selain berdiskusi dengan anggota Tim Kerja Nasional FSAP, Tim FSAP IMF/WB juga berdiskusi dengan Industri Jasa Keuangan (IJK), Asosiasi IJK, Lembaga Jasa Penunjang, dan lembaga terkait lainnya agar masukan yang diperoleh dapat lebih komprehensif. Agar pelaksanaan FSAP berjalan lancar dan dapat memberikan hasil sesuai yang diharapkan, OJK sebagai koordinator Tim Kerja Nasional FSAP secara aktif berkomunikasi tidak saja dengan anggota Tim Kerja Nasional FSAP, tetapi juga dengan lembaga terkait lainnya serta Tim FSAP IMF/WB.

Berdasarkan asesmen tersebut, selanjutnya akan disusun laporan atas kondisi sektor jasa keuangan dan sistem keuangan Indonesia. Direncanakan laporan hasil FSAP tersebut akan dibahas oleh *Executive Board* IMF.

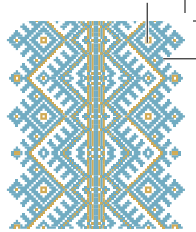
mana *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berada pada level 23,18%, jauh di atas ketentuan minimum 8%. *Risk-Based Capital* (RBC) industri perasuransian juga terjaga pada level memadai dan terjaga jauh di atas level minimum (512,3% untuk asuransi jiwa dan 279,7% untuk asuransi umum).

Pada perusahaan pembiayaan, *gearing ratio* perusahaan pembiayaan pada level 2,98 kali, masih jauh di bawah ketentuan maksimum (10 kali).

Risiko likuiditas di sektor perbankan relatif rendah, tercermin dari alat likuid yang cukup memadai

untuk mengantisipasi potensi penarikan DPK yaitu rasio Alat Likuid terhadap *Non-Core Deposit* (AL/NCD) dan rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) masing-masing sebesar 93,30% dan 19,32%.

Risiko kredit di lembaga jasa keuangan terpantau mengalami sedikit peningkatan. Meskipun demikian, rasio kredit bermasalah masih terjaga jauh di bawah *threshold* (5%). Per Februari 2017, *Non-Performing Loan* (NPL) industri perbankan berada dalam tren meningkat pada level rendah 3,16% *gross* dan 1,38% *net*. Rasio NPL tertinggi terdapat pada sektor pertambangan



dan transportasi terkait masih rendahnya harga komoditas terutama batubara. Sementara itu, tingkat *Non-Performing Financing* (NPF) perusahaan pembiayaan juga terjaga pada level 3,03%. NPF paling tinggi juga terjadi pada sektor transportasi dan pergudangan (14,32%), khususnya angkutan air.

Persepsi risiko domestik yang membaik berpengaruh terhadap risiko pasar yang *manageable*. Di sektor perbankan, Rasio Posisi Devisa Neto (PDN) tercatat sebesar 2,13%. Nilai investasi industri perasuransian dan dana pensiun juga menunjukkan peningkatan seiring kinerja pasar saham dan obligasi yang menguat. Sementara itu, Utang Luar Negeri (ULN) perusahaan pembiayaan melanjutkan penurunan.

2.4.2 Respons Kebijakan

OJK terus memantau perkembangan terkini di perekonomian dan pasar keuangan, baik global maupun domestik, yang berpotensi mempengaruhi kondisi sektor jasa keuangan nasional. Koordinasi dengan pihak-pihak terkait juga diperkuat agar kinerja industri keuangan dan stabilitas sistem keuangan nasional tetap terjaga. Di samping itu, OJK melanjutkan respons kebijakan pengawasan yang diperlukan dalam rangka menjaga stabilitas sektor jasa keuangan nasional. OJK memastikan bahwa lembaga jasa keuangan telah melakukan langkah-langkah antisipasi yang memadai dalam menjaga agar risiko likuiditas, risiko kredit, dan risiko pasar tetap *manageable*.

2.5 EDUKASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

2.5.1 Inklusi Keuangan

Pusat Edukasi, Layanan Konsumen dan Akses Keuangan UMKM (PELAKU)

PELAKU merupakan gerai informasi di daerah sebagai sarana penyampaian informasi keuangan, penanganan pengaduan, serta peningkatan akses keuangan khususnya sektor UMKM. Dalam rangka mengembangkan PELAKU, OJK melakukan *branding* Gerai PELAKU di 6 Kantor Regional (KR) dan Kantor

OJK (KOJK), yaitu: KR 3 Jawa Tengah dan DIY; KR 2 Jawa Barat; KR 7 Sumatera Bagian Selatan; KOJK Jambi; KR 9 Kalimantan; dan KR 6 Sulawesi, Maluku dan Papua.

Gambar II - 1 Layanan Keuangan Mikro



Layanan Keuangan Mikro (Laku Mikro)

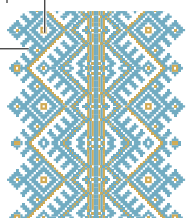
Layanan Keuangan Mikro (Laku Mikro) merupakan layanan terpadu dengan proses yang sederhana, cepat, akses mudah, dan harga terjangkau yang terdiri atas Layanan SiPINTAR, Layanan Edukasi dan Konsultasi kepada masyarakat serta produk dan jasa keuangan mikro lainnya. Layanan SiPINTAR adalah suatu layanan keuangan mikro terpadu yang terdiri atas produk simpanan, investasi, dan asuransi mikro.

Selama periode laporan, terdapat 11 lembaga jasa keuangan yang menjadi *entry gate* dan 14 mitra bisnis dengan total rekening SiPINTAR tercatat 9.366.455 dengan nominal Rp216,01 miliar. Adapun jumlah outlet yang melayani Laku Mikro sebanyak 8.305.

Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)

Tim percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) merupakan forum koordinasi antar instansi dan *stakeholders* terkait untuk meningkatkan percepatan akses keuangan di daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera.

OJK melakukan serangkaian kegiatan *coaching clinic* TPAKD di tiga lokasi Kantor Regional dan Kantor OJK yang bertujuan untuk memenuhi pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi terhadap program kerja TPAKD Provinsi/Kabupaten/Kota serta penyampaian arah pengembangan (*roadmap*) TPAKD yang mampu mendukung Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI).



AKSI PANGAN

Dalam rangka mendukung Program Nawa Cita mewujudkan kedaulatan pangan, pada triwulan I-2017, OJK meluncurkan Program "AKSI Pangan" yang merupakan upaya sinergi kebijakan dalam mengakselerasi inklusi keuangan. AKSI Pangan ini merupakan upaya nyata OJK bersama Kementerian terkait serta pelaku industri jasa keuangan untuk mempercepat dan meningkatkan pembiayaan sektor pangan khususnya pada sebelas komoditi utama pangan.

Peluncuran Program AKSI Pangan dilaksanakan di Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, yang dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Anggota Komisi XI

DPR RI, Gubernur Provinsi Sumatera Barat, pejabat Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, serta diikuti oleh asosiasi dan pimpinan industri jasa keuangan dan pelaku *financial technology (fintech)* di bidang pertanian.

Diharapkan program ini dapat menjawab masalah terbatasnya akses pembiayaan khususnya di sektor ketahanan pangan yakni pertanian, kehutanan, perkebunan, dan peternakan. OJK mengharapkan agar Program

AKSI Pangan yang diluncurkan menjadi gerakan nasional dalam memperkenalkan dan mengimplementasikan skema pembiayaan secara rantai nilai (*value chain financing*) yang diharapkan menjadi momentum percepatan akses keuangan di sektor pangan.

Melalui AKSI Pangan ini, 19 bank partner menargetkan peningkatan penyaluran kredit pada sektor tani, buruh dan hutan sebesar 14,12% menjadi Rp260 triliun. Asuransi usaha tani, premi dan luas lahan terlindungi akan meningkat 64,88% menjadi Rp180 miliar dan 1 juta hektar. Asuransi usaha ternak sapi, premi dan jumlah sapi terlindungi akan meningkat

238,42%

menjadi

Rp27 miliar

dan 120.000

ekor sapi.

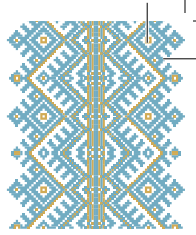
Penjaminan

kredit sektor pertanian meningkat 6,42% menjadi Rp8,8 triliun. Penjaminan KUR sektor pertanian meningkat 5,44% menjadi Rp9,9 triliun.

Untuk mencapai sasaran program dalam meningkatkan pembiayaan di bidang pangan, terdapat beberapa karakteristik utama dalam Program AKSI Pangan OJK yakni:

1. Dilakukan melalui pola pembiayaan rantai nilai (*value chain financing*) yang mengedepankan proses yang terpadu





dan saling terkait dari hulu ke hilir dengan memanfaatkan kredit/pembiayaan dari sektor perbankan dan pasar modal, penggunaan produk asuransi pertanian/sapi dan nelayan, melibatkan *FinTech*, dan bersinergi dengan berbagai lembaga terkait;

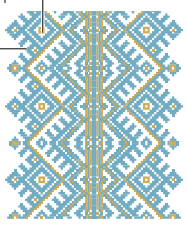
2. Melibatkan produsen/petani, logistik pedesaan, pemasok bibit pupuk, pengolahan, pergudangan, serta *off taker*,
3. Memanfaatkan penerapan teknologi informasi bidang pertanian mulai dari teknologi informasi budidaya pertanian, penanganan paska panen, distribusi sampai dengan teknologi penjualan dan literasi keuangan; serta
4. Dilengkapi dengan program pendampingan secara intensif untuk memastikan adanya peningkatan kapasitas produksi, keterampilan, teknologi pertanian, peningkatan akses keuangan serta literasi keuangan.

Program AKSI Pangan ini akan disinergikan dengan program kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang telah dibentuk OJK di berbagai daerah. Diharapkan upaya ini dapat mengakselerasi capaian target indeks inklusi keuangan Indonesia yang diamanatkan Presiden RI sebesar 75% pada 2019.

Dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional, terdapat beberapa isu yang dicermati, antara lain keterbatasan dan kelangkaan produksi, keterbatasan lahan produktif, menurunnya lahan pertanian yang dikonversi menjadi lahan komersil, masih rendahnya penggunaan teknologi dalam skema pembiayaan serta belum optimalnya pembiayaan pada sektor pertanian.

Dalam kesempatan peluncuran AKSI Pangan ini, OJK juga menerbitkan buku tentang "Model Pembiayaan Rantai Nilai Pangan di Indonesia" sebagai satu acuan bagi IJK dalam mengakselerasi pembiayaan di sektor Pangan.





2.5.2 Literasi dan Edukasi Keuangan

OJK Goes To School

Selama periode laporan, OJK bekerja sama dengan empat sekolah di Jakarta menyelenggarakan kegiatan edukasi keuangan *OJK Goes To School* dalam rangka meningkatkan literasi keuangan untuk kelompok pelajar/siswa tingkat SD, SMP, SMA dan SMK. Rangkaian kegiatan tersebut ialah memberikan edukasi materi tentang Pengenalan OJK dan LJK, Menabung sejak dini, Pengelolaan dan Perencanaan Keuangan, Pengenalan Ciri-Ciri Investasi Ilegal dan khusus untuk siswa SMK diberikan materi Kewirausahaan. Setelah kegiatan edukasi, OJK melaksanakan survei tingkat pemahaman kepada seluruh siswa, yang mana dapat disimpulkan bahwa setelah diberikan edukasi, para siswa lebih memahami tentang materi seputar sektor jasa keuangan.

Kegiatan *OJK Goes to School* bertujuan untuk menanamkan budaya menabung kepada pelajar/siswa SD, SMP dan SMA/SMK sejak dini; memperkenalkan produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan pelajar/siswa yaitu Simpanan Pelajar (SimPel dan SimPel iB); memperkenalkan industri jasa keuangan lain di luar perbankan beserta produk dan layanannya; dan khusus untuk siswa SMA/SMK, memperkenalkan pekerjaan/profesi yang tersedia di lembaga jasa keuangan, dasar kewirausahaan, perencanaan keuangan dan ciri-ciri investasi bodong.

Students Visit OJK

Selama periode laporan, OJK melakukan kegiatan *Students Visit* di kantor OJK. Dalam kegiatan tersebut, OJK melakukan sosialisasi dan edukasi dengan materi antara lain Pengenalan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Pengenalan LJK serta produk/jasa keuangan. OJK juga memperkenalkan layanan konsumen keuangan (*Financial Customer Care - FCC*) OJK. Melalui kegiatan ini, diharapkan peserta memperoleh pengetahuan baru mengenai statistik dan perkembangan terkini dalam industri keuangan syariah, pemahaman mengenai produk/layanan keuangan syariah, serta

strategi, kebijakan, dan peraturan yang berlaku dalam industri keuangan syariah.

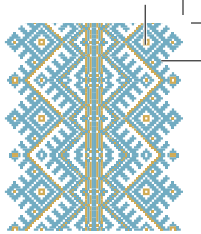
Focus Group Discussion Literasi dan Inklusi Keuangan

Dalam rangka mengevaluasi materi dan metode kegiatan literasi dan edukasi keuangan, memperoleh masukan dari masyarakat, serta untuk mengetahui produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan, OJK menyelenggarakan beberapa *Focus Group Discussion* (FGD) dengan berbagai kelompok narasumber di antaranya akademisi, *financial planner*, pengusaha UMKM, kelompok Ibu Rumah Tangga dan wanita serta guru SD, SMP, SMA dan Dosen.

Selama periode laporan, OJK melakukan tiga kali FGD dengan tema yang berbeda antara lain "Penyusunan Strategi dan Materi Edukasi Keuangan Serta Skim Pembiayaan Mikro Dalam Rangka Pemberdayaan UMKM". Dari serangkaian kegiatan tersebut, OJK menerima banyak masukan terkait materi dan metode edukasi keuangan, serta implementasi skim pembiayaan mikro yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Masukan tersebut menjadi dorongan bagi OJK untuk menjadi lebih baik terutama dalam hal sosialisasi dan edukasi.

Edukasi Waspada Investasi bagi PNS di Kabupaten Majalengka

Selama periode laporan, telah dilaksanakan kegiatan edukasi waspada investasi bagi pegawai negeri sipil (PNS) di kabupaten Majalengka. Kegiatan tersebut diikuti oleh 108 orang peserta yang terdiri atas camat, kepala desa, perwakilan TNI/Polri serta PNS dari berbagai unit kerja di lingkungan pemerintah kabupaten Majalengka. Materi yang disampaikan dalam kegiatan ini yaitu materi Waspada Investasi Ilegal. Dalam sesi ini peserta diberikan pemahaman mengenai jenis dan ciri investasi ilegal serta berbagai contoh kasus yang marak terjadi. Setelah sesi tersebut kemudian dilanjutkan dengan materi pengenalan pasar modal serta materi pengenalan OJK. Dalam kegiatan tersebut juga dilaksanakan sesi *talkshow* dengan tema yang sama di radio Sela FM.



Training of Trainers Guru Tingkat SMA

Selama periode laporan, OJK melakukan dua kali *Training of Trainers* di berbagai daerah. Kegiatan tersebut memberikan materi tentang Pengenalan OJK dan IJK, Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Perusahaan Pembiayaan, Dana Pensiun, Pergadaian, dan Strategi Pembelajaran. Salah satu rangkaian kegiatan tersebut adalah melakukan survei indeks literasi keuangan para pengajar dan dari hasil survei tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat peningkatan indeks literasi keuangan para pengajar.

Edukasi Dalam Rangka Bansos Non Tunai

OJK bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Sosial, Bank Indonesia, Dinas Sosial kota setempat dan LJK penyalur Bantuan Sosial Non Tunai telah melaksanakan tiga kegiatan edukasi keuangan dengan tema "Kelola Dana Bansosmu dengan Bijak". Kegiatan edukasi keuangan tersebut dilaksanakan sebagai salah satu bentuk dukungan OJK terhadap program pemerintah yaitu Penyaluran Bantuan Sosial (bansos) Non Tunai, khususnya untuk mendukung kesiapan implementasi program Bantuan Sosial Pangan Non Tunai (BPNT) yang telah diluncurkan oleh Presiden Republik Indonesia

Dalam kegiatan edukasi keuangan ini, peserta menerima materi pengenalan OJK, IJK dan waspada investasi, perencanaan keuangan dan pengenalan produk/layanan jasa keuangan, khususnya produk keuangan mikro, pengenalan Layanan Keuangan Digital dan *e-money*.

Edukasi Keuangan Komunitas di Kota Mamuju

OJK bekerja sama dengan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat telah melaksanakan Kegiatan Edukasi Keuangan kepada Komunitas Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), pengurus Dharma Wanita, Pegawai Negeri Sipil dan Ibu Rumah Tangga (IRT) serta UMKM di Kota Mamuju dan Sekitar. Kegiatan edukasi keuangan diikuti oleh 111 orang peserta yang terdiri dari antara lain

pengurus Dharma Wanita Provinsi Sulawesi Barat dan Anggota Tim Penggerak PKK. Adapun materi yang disampaikan antara lain: Perbankan Syariah (Tabungan dan Deposito) serta KUR, Pergadaian – Tabungan Emas dan Perasuransian – Asuransi Mikro.

Training of Trainers Penyuluh Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP) TKI di Sentul Bogor

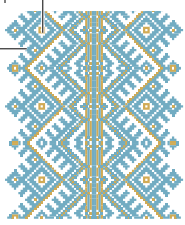
OJK bekerja sama dengan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) melaksanakan Kegiatan *Training of Trainers* (ToT) Penyuluh PAP TKI yang diikuti oleh 132 orang peserta. Materi yang disampaikan pada *ToT* tersebut antara lain: (i) Jasa Remitansi dan Perdagangan Valuta Asing, (ii) Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan dan (iii) Asuransi TKI.

Edukasi Keuangan Bagi Perempuan

Pada periode laporan, OJK mengadakan Edukasi Keuangan bagi perempuan di Surabaya bekerja sama dengan Dharma Wanita Persatuan Provinsi Jawa Timur. Kegiatan tersebut diikuti oleh 116 orang peserta yang terdiri atas pengurus dan anggota Dharma Wanita Persatuan Provinsi Jawa Timur. Peserta kegiatan menerima materi edukasi keuangan dalam beberapa sesi, yaitu Pengenalan OJK dan Waspada Investasi, Perencanaan Keuangan, dan pengenalan produk/layanan jasa keuangan

Edukasi Keuangan dan Pelatihan Kewirausahaan Pemuda dan Perintis UMKM

OJK juga melakukan kegiatan edukasi Keuangan dan Pelatihan Kewirausahaan Pemuda dan Perintis UMKM yang bekerja sama dengan Pemerintah Kota Surabaya. Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan pemahaman peserta mengenai pengelolaan keuangan, kewirausahaan, serta produk/layanan jasa keuangan (manfaat, risiko, hak, kewajiban, dan biaya); membangun kepercayaan dan memberikan kemudahan kepada peserta untuk mengakses LJK; dan meningkatkan kemampuan peserta untuk mengembangkan



usaha dan meningkatkan pendapatannya. Kegiatan ini diikuti oleh 859 peserta yang terdiri dari komunitas pemuda dan ibu rumah tangga baik yang telah atau belum memiliki usaha.

Peluncuran Program Galeri Investasi *Mobile* Universitas Muhammadiyah Riau (UMRI)

Dalam rangka meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di Pasar Modal, OJK dan Bursa Efek Indonesia (BEI) berupaya mendorong Galeri Investasi yang tersebar di berbagai perguruan tinggi agar lebih proaktif menjangkau masyarakat di sekitar kampus, dengan meluncurkan program yang dinamakan Galeri Investasi *Mobile*. Kegiatan ini berisikan antara lain: memberikan edukasi pasar modal kepada masyarakat dalam upaya menanamkan pentingnya merencanakan keuangan, mendorong peningkatan pemahaman masyarakat mengenai produk dan jasa di sektor pasar modal, dan membuka akses keuangan masyarakat atas sektor dimaksud.

2.5.3 Perlindungan Konsumen

Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi

Pada triwulan I-2017, Layanan Konsumen OJK menerima 6.571 layanan yang terdiri dari 1.403 informasi, 5.147 pertanyaan dan 21 pengaduan. Berdasarkan sektornya, persentase layanan informasi terdiri dari sektor Perbankan sebesar 60,9%, sektor IKNB sebesar 29,0%, dan sektor Pasar Modal sebesar 1,9%, serta lain-lain sebesar 8,1%.

Secara substansi, layanan informasi terbanyak pada sektor Perbankan terkait Restrukturisasi Kredit/ Pembiayaan yaitu sebesar 25,7%, pada sektor IKNB adalah terkait Restrukturisasi Kredit/ Pembiayaan pada Lembaga Pembiayaan sebesar 11,3%, dan pada sektor Pasar Modal terkait Edukasi Produk/ Layanan sebesar 22,2%. Sementara itu pada sektor lain-lain, substansi informasi terkait dengan sektor jasa keuangan yang paling banyak disampaikan adalah mengenai legalitas perusahaan non LJK (30,7%), pelayanan non LJK (21,9%), dan mengenai Konfirmasi Surat/ Email (12,3%).

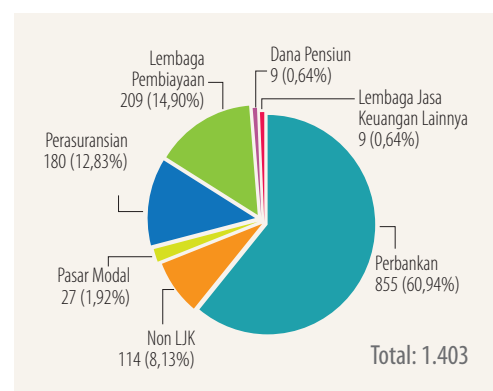
Untuk layanan pengaduan, terdapat 21 layanan yang masuk yaitu pada sektor Perbankan dan IKNB. Pada sektor Perbankan, pengaduan terbanyak yaitu mengenai Keberatan Biaya Tambahan/Denda, Pembobolan Rekening dan Restrukturisasi Kredit/Pembiayaan. Pada Sektor IKNB pengaduan yang diterima yaitu mengenai Dugaan Penyalahgunaan Data, Penolakan Pencairan Klaim, Permintaan Pengembalian Premi, Kesulitan Klaim, Keberatan Biaya Tambahan/Denda dan Klaim Asuransi Objek Pembiayaan.

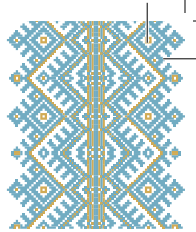
Pada layanan pertanyaan, dari sektor Perbankan adalah sebesar 30,7%, sektor IKNB sebesar 29,9%, sektor Pasar Modal sebesar 6,4%, serta kategori lain-lain, yaitu sebesar 33,1%. Pertanyaan terbanyak pada sektor Perbankan adalah terkait Peraturan Perbankan sebesar 11,3%, pada sektor IKNB adalah terkait Legalitas LJK dan Produk sebesar 32,0%, dan pada sektor Pasar Modal terkait Peraturan Pasar Modal sebesar 25,4%. Pada kategori lain-lain substansi pertanyaan terkait dengan sektor jasa keuangan yang paling banyak disampaikan adalah mengenai legalitas non LJK (54,0%) dan Asistensi SI PERDULI (7,5%).

Tabel II - 40 Pelayanan Konsumen

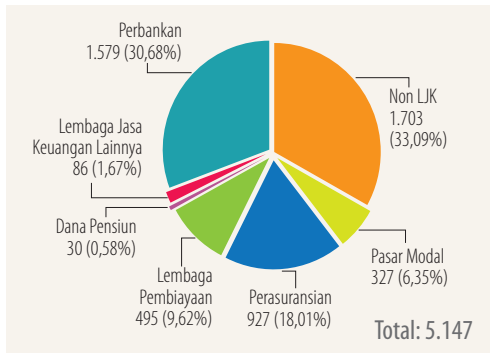
Jenis Layanan	Total Layanan (Triwulan I-2017)	% Total Layanan (Triwulan I-2017)
Pertanyaan	5.147	78,33%
Informasi	1.403	21,35%
Pengaduan	21	0,32%
Total	6.571	

Grafik II - 12 Rincian Layanan Informasi

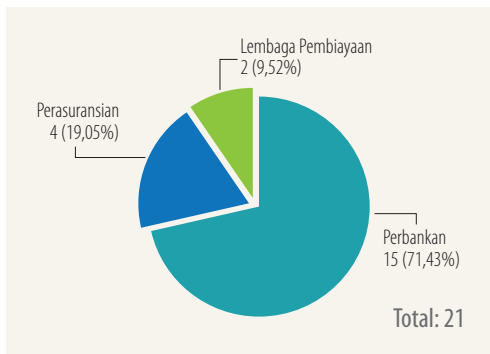




Grafik II - 13 Rincian Layanan Pertanyaan

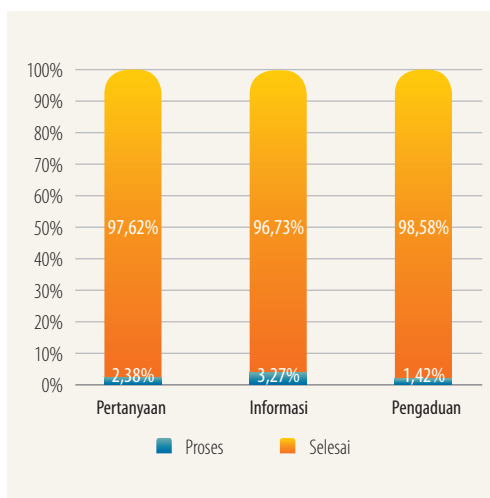


Grafik II - 14 Rincian Layanan Pengaduan



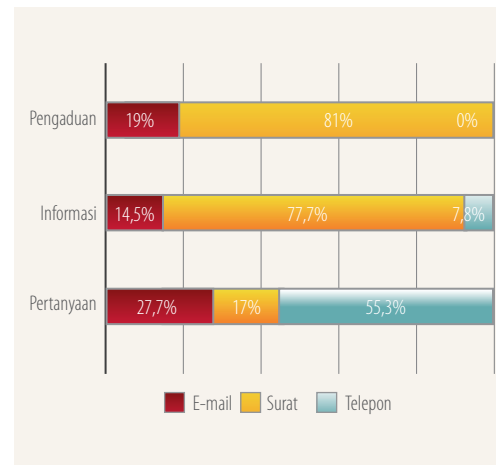
Secara akumulatif (2013-Maret 2017), tingkat penyelesaian layanan informasi adalah sebesar 96,73% (20.218 layanan), layanan pertanyaan sebesar 97,62% (55.490 layanan), serta layanan Pengaduan mencapai 98,58% (3.818 pengaduan).

Grafik II - 15 Tingkat Penyelesaian Layanan



Guna mempermudah Konsumen dan/atau masyarakat dalam mengakses Layanan Konsumen, OJK menyediakan berbagai kanal penerimaan layanan antara lain melalui media email, telepon maupun surat.

Grafik II - 16 Kanal Layanan



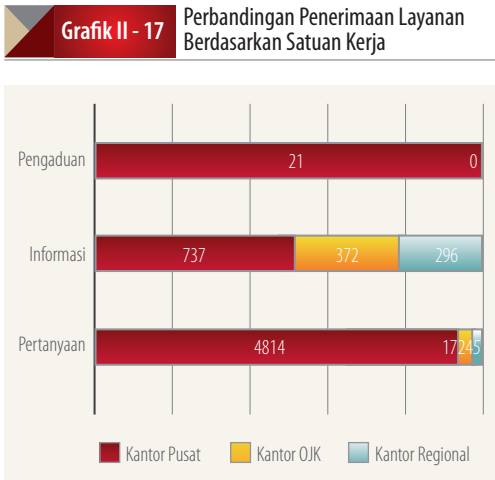
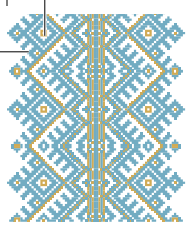
Pada triwulan I-2017, terlihat bahwa untuk layanan pertanyaan, Konsumen dan/atau masyarakat lebih banyak mempergunakan kanal Telepon dibandingkan Email dan Surat. Sementara itu, untuk layanan informasi dan pengaduan, kanal yang digunakan terbanyak adalah melalui kanal Surat.

Guna meningkatkan aksesibilitas layanan Konsumen, OJK memberikan tugas dan kewenangan kepada Kantor Regional (KR) dan Kantor OJK (KOJK) yang tersebar di seluruh Indonesia untuk menerima dan menangani layanan Konsumen. Adapun demikian, penerimaan layanan terbanyak pada triwulan I-2017 dilakukan di Kantor Pusat yaitu sebesar 85.0%

Tabel II - 41 Penerimaan Layanan per Business Unit

Penginput	Total Layanan	Proses	Selesai
Kantor Pusat	5.572	823	4.749
Kantor Regional	441	116	325
Kantor OJK	544	116	325
Total	6.557	1.067	5.490

Sumber: OJK



Pada triwulan I-2017 Layanan Informasi, Layanan Pertanyaan dan Layanan Pengaduan paling banyak diterima oleh Kantor Pusat (KP) yaitu sebesar 13,2%, 86,4% dan 0,4%.

Focus Group Discussion (FGD)

Pelaksanaan *Focus Group Discussion* tentang Bijak Berinvestasi dilaksanakan dengan narasumber yang berasal dari Bidang Anti Money Game, Pakar Hukum dan Sosiolog/Dosen. *Focus Group Discussion* Bijak Berinvestasi ini telah memperkaya informasi dan memberikan masukan terhadap penyusunan Majalah Edisi Khusus Bijak Berinvestasi dan buku saku tips Konsumen Cerdas Berinvestasi.

OJK juga mengadakan FGD Strategi Perlindungan Perlindungan Konsumen Keuangan (SPKK) yang dilaksanakan dalam dua tahap dengan pokok materi sebagai berikut :

Tabel II - 42 Materi FGD Strategi Perlindungan Konsumen Keuangan (SPKK)

Instansi	Pokok Materi
Akademisi	Kondisi Perlindungan Konsumen Indonesia dikaitkan dengan Undang-Undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
Mahkamah Agung	Tata Cara Penyelesaian Sengketa
Jurnalis	Menjaga Kepercayaan Masyarakat terhadap Industri Jasa Keuangan di Tengah Maraknya Kerugian atas Investasi Ilegal
Dewan Pembina Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia	Menyeimbangkan Persepsi Publik mengenai Definisi Fasilitasi Penyelesaian Sengketa oleh Otoritas Jasa Keuangan

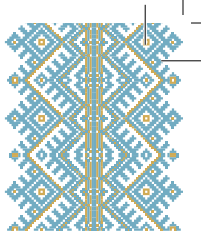
Peserta FGD SPKK yang hadir dalam kegiatan berjumlah 58 orang yang terdiri dari perwakilan Satuan Kerja Pelaksana Inisiatif Strategis 1 dan Satuan Kerja terkait, narasumber, perwakilan Asosiasi, perwakilan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS).

Serangkaian kegiatan pertemuan koordinasi dan FGD SPKK ini telah memperkaya informasi dan memberikan masukan terhadap penyusunan SPKK.

Monitoring Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan

Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di sektor jasa keuangan yang ditetapkan oleh OJK berisi enam LAPS yang beroperasi untuk menyelesaikan sengketa di masing-masing sektor jasa keuangan yaitu Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) untuk sektor perasuransian, Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) untuk sektor pasar modal, Badan Mediasi Dana Pensiun (BMDP) untuk sektor dana pensiun, Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI) untuk sektor perbankan, Badan Arbitrase dan Mediasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (BAMPPI), dan Badan Mediasi Pembiayaan, Pegadaian dan Ventura Indonesia (BMPPVI).

Keenam LAPS tersebut wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada OJK, yaitu pada Juni dan Desember. Hal-hal yang dilaporkan oleh LAPS antara lain informasi umum LAPS, sumber daya manusia (SDM) LAPS, demografi para pihak dalam permohonan penyelesaian sengketa, jenis para pihak, jenis sengketa sesuai dengan sektor jasa keuangannya, nilai sengketa, status penanganan, nomor perkara, proses penanganan, dan *monitoring* pelaksanaan kesepakatan atau putusan. Pada periode laporan, modul pelaporan LAPS telah dipasangkan pada Sistem Informasi Pelaporan Edukasi dan Perlindungan Konsumen (SIPEDULI) sehingga LAPS dapat menyampaikan laporan



secara daring. Secara garis besar, hasil *monitoring* pelaporan LAPS antara lain: Jumlah permohonan penyelesaian sengketa terbanyak adalah untuk LAPS di sektor perbankan, yaitu LAPSPI; Domisili pemohon paling banyak berasal dari Jakarta; dan Permohonan penyelesaian sengketa sebanyak 71% diterima, sedangkan 29% sisanya ditolak. Alasan penolakan permohonan penyelesaian sengketa antara lain karena para pihak belum menyelesaikan masalah melalui *internal dispute resolution* (IDR); dan sengketa sudah ditangani oleh lembaga lain seperti Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);

Pelaksanaan Kegiatan *Thematic Surveillance* dan Operasi Intelijen Pasar

Memasuki 2017 dalam kerangka implementasi awal pengawasan *market conduct*, pelaksanaan pemantauan dan analisis perlindungan konsumen oleh OJK menggunakan *tools* pemeriksaan *thematic surveillance* secara *onsite*. Pengawasan *market conduct* akan fokus pada interaksi antara konsumen dengan pelaku usaha jasa keuangan (aspek kualitatif) sedangkan pengawasan prudensial tetap fokus pada tingkat kesehatan PUJK (aspek kuantitatif).

Pada periode laporan, OJK melakukan pemeriksaan *thematic surveillance onsite* sebagai *pilot project* pelaksanaan pengawasan *market conduct* pada dua bank dengan metode pengamatan dokumen, wawancara dan observasi lapangan. Tema yang diambil pada 2017 adalah mengenai aspek perlindungan konsumen meliputi perjanjian baku dan praktik penawaran produk melalui *telemarketing*. Sementara itu, kegiatan operasi intelijen pasar juga dilaksanakan dengan mengambil *sampling*. Cakupan kegiatan intelijen pasar memetakan isu perlindungan konsumen terkait dengan praktik pemasaran asuransi jiwa dengan metode *Multi Level Marketing* (MLM). Tema ini sejatinya telah teridentifikasi dari kegiatan *thematic surveillance* sebelumnya mengenai *unit link*.

Isu kerawanan konsumen yang perlu mendapat perhatian, antara lain: Bisnis lebih fokus pada perluasan jaringan untuk mendapatkan *fee*

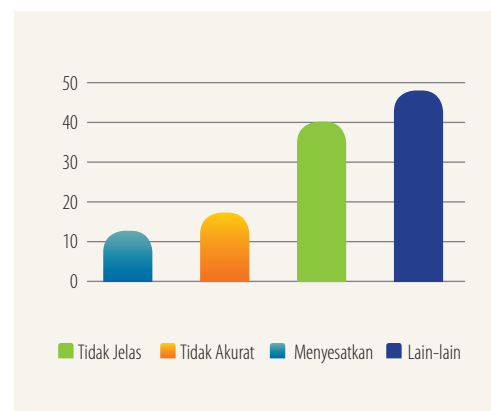
daripada penjualan manfaat produk *unit link*; Pemasar maupun calon nasabah yang nantinya akan menjadi tenaga pemasar tidak tersertifikasi AAJ sebagai justifikasi telah memiliki tingkat literasi yang memadai terkait produk *unit link* dan Mekanisme penjualan menyerupai MLM dan sejauh ini tidak memiliki SIUPL (Surat Izin Usaha Penjualan Langsung).

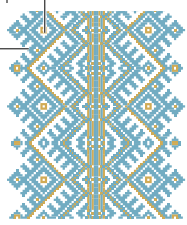
Pemantauan Iklan Triwulanan

Salah satu sumber data dan informasi untuk mendukung kegiatan market intelijen adalah pemantauan iklan dan penawaran produk dan layanan jasa keuangan melalui Sistem Informasi Pelaporan Market Intelijen (SIPMI). Kriteria iklan yang baik meliputi akurat, jelas, jujur dan tidak menyesatkan diatur berdasarkan POJK tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan SEOJK tentang Penyampaian Informasi dalam Rangka Pemasaran Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan. Selama periode laporan, OJK mencatat sebanyak 307 iklan berkaitan dengan produk/jasa keuangan, yang terdiri dari 214 iklan dari sektor perbankan, 90 iklan dari sektor IKNB, dan 3 iklan sektor Pasar Modal. Berdasarkan sebaran iklan terlihat bahwa produk yang diduga melakukan pelanggaran terbanyak adalah KPR, tabungan, modal ventura, dan *privilege banking*.

Dari seluruh iklan tersebut, 21% diduga belum sesuai dengan POJK dan SEOJK terkait dan dikategorikan sebagai tidak jelas, menyesatkan, tidak akurat, dan lain-lain.

Grafik II - 18 Jumlah Pelanggaran Iklan Berdasarkan Kategori





Kategori yang paling banyak dilanggar adalah kategori "lain-lain" dan "tidak jelas". Masih banyak PUJK yang tidak memberikan informasi lengkap terkait penawaran yang dilakukan melalui iklan di media massa. Terkait dengan kategori "lain-lain" yang harus mencantumkan bahwa lembaga keuangan terkait terdaftar dan diawasi oleh OJK juga menjadi salah satu kategori dengan dugaan pelanggaran terbanyak.

2.6 PENYIDIKAN SEKTOR JASA KEUANGAN

Dalam rangka mewujudkan kegiatan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Langkah-langkah yang dilakukan OJK adalah secara berkesinambungan berupaya memenuhi infrastruktur baik dari segi sumber daya manusia dan pendukung kebijakan di bidang tindak pidana di sektor jasa keuangan.

2.6.1 Koordinasi dengan Instansi Terkait

Untuk memperkuat langkah penyidikan dan dalam rangka membangun sistem peradilan pidana yang kredibel, OJK menggelar koordinasi dan penandatanganan Nota Kesepakatan dengan Kejaksaan RI tentang Penanganan Tindak Pidana di sektor jasa keuangan. Kerjasama tersebut diharapkan dapat mewujudkan penegakan hukum yang efektif sehingga penindakan yang dilakukan menjadi terarah khususnya dalam mempertahankan ke stabilitas sistem perekonomian.

2.6.2 Penanganan Perkara

Sampai akhir periode pelaporan, OJK menerbitkan 17 SPRINDIK yang terdiri dari 13 perkara perbankan (1 perkara BU, 6 perkara BPR dan 6 perkara BPD) dan 4 perkara pasar modal (4 perkara Emiten/PP) di mana 14 berkas telah dikirim kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan RI, namun belum terdapat perkara

yang sampai tahap P21. Modus dari perkara tersebut adalah pencatatan palsu, mengubah/mengaburkan/menghapus suatu pencatatan, transaksi tanpa merubah kepemilikan, penyajian informasi yang tidak benar, dan klaim asuransi yang melebihi nilai penilaian (appraisal).

2.6.3 Sosialisasi Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan

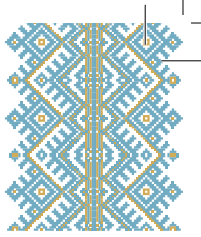
Sampai akhir periode pelaporan, OJK melakukan sosialisasi tindak pidana di sektor jasa keuangan kepada Perwira Polri di Pusat Pendidikan Bareskrim Polri Jakarta dan sosialisasi tindak pidana sektor jasa keuangan kepada mahasiswa Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian di Kampus PTIK Jakarta.

2.6.4 Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi (Satgas Waspada Investasi)

Ajakan kepada masyarakat untuk menggunakan produk investasi yang didesain sedemikian rupa agar tidak termasuk dalam produk investasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan semakin marak diikuti dengan semakin bervariasi jenis dan bentuk serta sasaran daripada produk investasi tersebut. Untuk meningkatkan kesadaran akan perkembangan industri jasa keuangan saat ini, diperlukan pengawasan intensif sehingga dapat menghasilkan deteksi dini terhadap industri yang berpotensi merugikan masyarakat.

A. Sosialisasi Satgas Waspada Investasi

Dalam rangka upaya pencegahan terhadap kegiatan penawaran investasi yang diduga ilegal, Satgas Waspada Investasi melakukan kegiatan sosialisasi dan/atau *focus group discussion* mengenai tawaran penempatan dana dengan janji tingkat keuntungan yang tinggi dan perlu diwaspadai.



Pada triwulan I-2017, SWI telah melaksanakan kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) terkait dengan pembahasan permasalahan UN Swissindo World Trust Internasional. OJK juga melaksanakan kegiatan optimalisasi fungsi Satuan Tugas Waspada Investasi dalam mencegah Investasi Ilegal serta perlindungan kepada masyarakat melalui sosialisasi Pedoman Kerja Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi dengan Tema "Peran Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia dalam Mencegah Penyalahgunaan Izin oleh Pengurus Koperasi Simpan Pinjam di Pusat dan Daerah"

B. Penyampaian Informasi Melalui Media

Dalam rangka memberikan perlindungan kepada konsumen dan masyarakat, Satgas Waspada investasi melakukan siaran pers guna memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan kegiatan investasi ilegal yang merugikan masyarakat dan perkembangan penanganannya melalui media massa. Pada periode laporan, OJK melakukan rangkaian kegiatan tersebut antara lain: Siaran Pers "OJK dan Satgas Waspada Investasi Hentikan Kegiatan Enam Usaha Investasi Ilegal"; Siaran Pers "Satgas Waspada Investasi Hentikan Tujuh Kegiatan Penghimpunan Dana Tanpa Izin"; dan Siaran Pers "Satgas Waspada Investasi Minta Masyarakat Waspada Operasional UN Swissindo di Berbagai Daerah".

C. Penanganan Permasalahan Investasi oleh Satgas Waspada Investasi

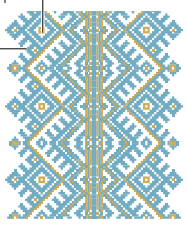
Rekomendasi yang merupakan hasil rapat koordinasi Satgas Waspada Investasi terkait dengan pembahasan investasi ilegal ditindaklanjuti dengan pembahasan dan atau penanganan lebih lanjut oleh masing-masing kementerian dan/atau lembaga dan atau antar kementerian dan/atau lembaga yang memiliki kewenangan terkait dengan

kegiatan investasi yang diduga ilegal. Sampai dengan periode pelaporan, OJK dan Satgas Waspada Investasi melakukan penghentian kegiatan operasional terhadap 19 Entitas yang terindikasi melakukan penyimpangan izin yang diberikan oleh instansi tertentu. Modus dari kasus tersebut diantaranya adalah penawaran surat pelunasan hutang debitur, penawaran investasi emas dan haji, penawaran investasi pemasangan iklan *online*, *direct selling* dan simpan pinjam dana dalam bentuk koperasi. 19 Entitas/Perusahaan tersebut adalah:

1. PT Compact Sejahtera Group, Compact500 atau Koperasi Bintang Abadi Sejahtera atau ILC;
2. PT Inti Benua Indonesia;
3. PT Inlife Indonesia ;
4. Koperasi Segitiga Bermuda/ Profitwin77;
5. PT Cipta Multi Bisnis Group;
6. PT Mi One Global Indonesia;
7. PT Crown Indonesia Makmur;
8. Number One Community;
9. PT Royal Sugar Company;
10. PT Kovesindo;
11. PT Finex Gold berjangka;
12. PT Trima Sarana Pratama (CPRO-Indonesia);
13. Talk Fusion;
14. Starfive2u.com;
15. PT Alkifal Property;
16. Groupmatic170;
17. EA Veow;
18. FX Magnet Profit; dan
19. Koperasi Serba Usaha Agro Cassava Nusantara / Agro Investy.

2.7 HUBUNGAN KELEMBAGAAN

Sesuai dengan sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, kedudukan OJK sebagai lembaga negara tidak sejajar dengan lembaga tinggi negara lain seperti Dewan Perwakilan Rakyat dan Badan Pemeriksa Keuangan. Kedudukan OJK juga tidak sama dengan Kementerian, mengingat kedudukan OJK yang berada di luar



pemerintahan. Adapun status dan kedudukan khusus tersebut diperlukan agar OJK dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang independen. Walau demikian, OJK tetap memiliki hubungan kerja dan koordinasi yang baik antar lembaga dengan DPR, BPK, Pemerintah, BI, LPS, serta pihak lainnya.

2.7.1 Kerjasama Domestik

OJK secara aktif mengadakan koordinasi antar lembaga dengan tujuan menjalin kerjasama strategis yang dapat mendukung pencapaian OJK di masa mendatang. Selama triwulan I-2017, OJK telah melakukan satu penandatanganan kerjasama domestik yaitu MOU OJK bersama Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan tentang Kerja Sama dalam Bidang Pengaturan, Pengawasan dan Penegakan Hukum serta Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.

Di samping penandatanganan kerja sama antar lembaga, OJK juga menjalin hubungan kelembangan dengan menyelenggarakan 50 kegiatan bersama yang melibatkan beberapa

lembaga negara, antara lain:

- Dewan Perwakilan Rakyat;
- Kementerian Keuangan;
- Bank Indonesia;
- Lembaga Penjamin Simpanan;
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Pemerintah Daerah; dan
- Industri Jasa Keuangan.

Kegiatan kelembagaan yang telah dilakukan mencakup antara lain *Focus Group Discussion* (FGD) mengenai Pelaksanaan UU PPKSK, *Financial Executive Gathering* mengenai "Menjaga Stabilitas Sektor Jasa Keuangan dan Membangun Optimisme Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat", pendampingan kunjungan kerja DPR, sosialisasi mengenai peran, fungsi, dan kinerja OJK bekerja sama dengan lembaga lain.

2.7.2 Kerjasama Internasional

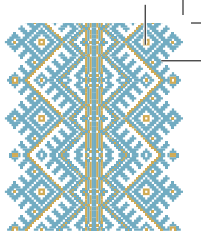
Selama periode laporan, telah dilaksanakan berbagai macam kerjasama internasional dengan detail sebagai berikut :

Penghargaan

OJK memperoleh penghargaan PR Indonesia Awards (PRIA) 2017 untuk kategori Media Relations Subkategori Lembaga Negara. PRIA Awards 2017 adalah apresiasi yang diberikan oleh PR INDONESIA untuk mengukur kinerja dan kredibilitas insan *Public Relations* (Humas) selama setahun. Proses penjurian berlangsung sepanjang awal Februari hingga pertengahan Maret 2017, melibatkan 13 juri, dan diikuti oleh 237 entri. Bekerja sama dengan iSentia, perusahaan media *monitoring* dan media intelijen terkemuka, PR INDONESIA memantau volume pemberitaan positif

untuk 666 kandidat dari berbagai korporasi, lembaga, perusahaan, dan pemerintah daerah di 24 koran nasional, 40 koran daerah, 110 majalah sepanjang periode 1 Januari 2016 31 Desember 2016. Mereka yang masuk ranking sepuluh besar di tiap sektor dan lolos verifikasi akan menjadi pemenang kategori Media Relations.

Penghargaan ini merupakan penghargaan kedua yang diterima oleh OJK setelah sebelumnya pada tahun 2016 OJK juga memperoleh penghargaan serupa untuk kategori yang sama.



1. Kerjasama Regional

- a. Penyelesaian Negosiasi Dalam Rangka Peningkatan Komitmen Jasa Keuangan di ASEAN

Dalam rangka peningkatan komitmen perbankan dalam paket perundingan jasa keuangan dalam lingkup ASEAN (*ASEAN Banking Integration Framework*), serta paket komitmen jasa keuangan lainnya, OJK melakukan berbagai serangkaian kegiatan dengan regulator dari Negara lain untuk meningkatkan kerja sama dalam menghadapi tantangan ke depannya antara lain: melakukan *High Level Meeting* dengan *Bank of Thailand*; melakukan *Bilateral Meeting* teknis dengan *Bangko Sentral ng Pilipinas*; melakukan pertemuan WCFSL dengan *State Bank of Vietnam* dan *Monetary Authority Singapore (MAS)*; serta melakukan *Bilateral Meeting* teknis dengan *Central Bank Myanmar (CMB)*.

- b. Keterwakilan Posisi OJK Dalam Forum Perdagangan Jasa Internasional
Posisi OJK dapat diterima sebagai perwakilan RI dalam Forum Perdagangan Jasa Internasional apabila terlibat aktif dalam kegiatan di Forum Perdagangan Jasa Internasional. karena itu, OJK terus aktif melakukan perundingan dengan berbagai lembaga internasional antara lain: *Indonesia Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA)*; *EFTA Comprehensive Economic Partnership Agreement (IE-CEPA)*; dan *ASEAN Working Committee on Financial Services Liberalization (WC-FSL)*.

2. Memorandum of Understanding

- a. OJK dengan Lembaga Sektor Keuangan Internasional :
Sampai periode laporan, OJK melakukan tahap negosiasi MoU dengan beberapa Lembaga Sektor Keuangan Internasional antara lain: *Central Bank Iran*, *Reserve Bank of India*, *Bank Of Thailand*, *Monetary*

Authority of Brunei Darussalam, *Bangko Sentral ng Pilipinas*.

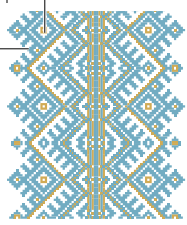
- b. OJK dengan Institusi Internasional :
OJK juga melakukan tahapan negosiasi *Cooperation Agreement OJK- Australian Securities and Investments Commission*, MoU OJK – AANZIF, serta MoU OJK - Cayman Island

3. Pemenuhan kewajiban OJK terhadap internasional *Standar Setting Bodies* dan Lembaga Internasional lainnya;

- a. Penyampaian Pemutakhiran *Economic Review and Policy Dialogue (ERPD Matrix)* dan *ERPD Report Indonesia* guna mendukung Kepala BKF, Kemenkeu RI selaku ketua delegasi dalam pertemuan *ASEAN+3 Finance and Central Bank Deputies' Meeting (AFCDM+3)*.
- b. Penyampaian Policy Matrix ke BKF, Kemenkeu RI dalam rangka *Financial Market Development Integration Program Sub-Program 2 (FMDIP Subprogram 2)* yang merupakan program pinjaman dari pemerintah Indonesia kepada ADB untuk periode tahun 2017-2019. FMDIP Subprogram 2 ditujukan untuk membiayai defisit APBN Indonesia. *Underlying* pinjaman tersebut adalah komitmen-komitmen OJK sebagai regulator dan supervisor sektor jasa keuangan, yang disusun dalam *policy matrix*. Dalam pelaksanaannya OJK sebagai *implementing agency*, yang harus melengkapi *policy matrix* yang berisi perkembangan kebijakan-kebijakan OJK pada sektor jasa keuangan.

4. Pengelolaan, Pemantauan dan Evaluasi Bantuan Teknis Donor Asing dan Lembaga Internasional

- a. OJK-PROKSI: Perkembangan Kerjasama OJK-ILO dalam *Project Promoting Micro and Small Enterprises through Improved Entrepreneurs' Access to Finance (PROMISE IMPACT)*.



PROMISE IMPACT bertujuan untuk mempromosikan inklusi keuangan yang bertanggung jawab bagi usaha mikro dan kecil (UMK) di Indonesia melalui akses keuangan;

- b. OJK-PROKSI: penyusunan Publikasi Buku *FinTech for Microfinance*. Telah dilakukan penyusunan proposal yang disampaikan kepada pihak donor internasional. *Asian Development Bank* (ADB) telah menyampaikan dukungannya dalam penyusunan dan pencetakan publikasi buku *FinTech for Microfinance*.

5. Peningkatan Kerjasama Kelembagaan dengan Pengawas Industri Jasa Keuangan Asing

- a. OJK melakukan pembahasan dengan *Danske Bank's Financial Institutions* dari Denmark dengan topik pembahasan kerangka *Anti-Money laundering* (AML) di Indonesia dan perbankan. Adapun tujuan dari pertemuan tersebut adalah memperkuat hubungan bisnis dengan bank, meningkatkan pemahaman secara menyeluruh terkait perbankan, meningkatkan pemahaman secara menyeluruh terkait kerangka *Anti Money Laundering* (AML) di Indonesia, mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang risiko akan pembiayaan terorisme, AML atau kegiatan kriminal lainnya di Indonesia.
- b. OJKbersamadengan *Islamic Development Bank* (IDB) menyelenggarakan kegiatan *Islamic Finance Seminar and Global Islamic Leadership Program*;

- c. OJK bersama dengan UNDP menyelenggarakan seminar *Social Finance and Social Enterprise*;

2.8 HUBUNGAN KOORDINASI KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER

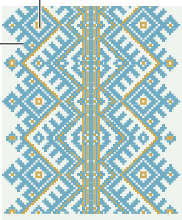
Selama triwulan I-2017, OJK melanjutkan koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait dalam upaya menjaga stabilitas sistem keuangan nasional, termasuk melalui wadah Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

Pada periode laporan, telah dilaksanakan Rapat KSSK yang menyimpulkan bahwa stabilitas sistem keuangan pada periode sebelumnya berada dalam kondisi baik dan terkendali. Selain itu, KSSK juga menyepakati untuk untuk mencermati berbagai potensi risiko yang dapat mempengaruhi kondisi stabilitas sistem keuangan nasional. Rapat tersebut juga membahas penyusunan dan harmonisasi UU PPKSK dan persiapan simulasi krisis sistem keuangan 2017.

OJK juga berperan aktif dalam koordinasi yang diinisiasi oleh lembaga-lembaga terkait dalam rangka penyusunan peraturan-peraturan pelaksanaan UU PPKSK. Termasuk dalam hal ini penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Program Restrukturisasi Perbankan, Rancangan Peraturan Bank Indonesia tentang Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek dan Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah (PLJP/PLJPS), Rancangan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan tentang Penanganan Bank Sistemik, dan Rancangan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan tentang Penyelesaian Bank Tidak Sistemik



Tinjauan Industri dan Operasional Sektor Jasa Keuangan Syariah



Pengaturan

Penerbitan 4 SEOJK terkait
Perbankan Syariah



Pengembangan

RESEARCH
& DEVELOPMENT

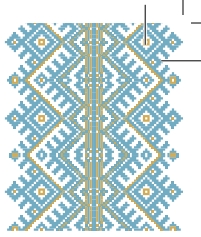


Kajian Tata Kelola dan Manajemen Risiko BPRS
Kajian Pembentukan *Jakarta International Islamic
Financial Centre* (JIIFC)
Pemberdayaan Perbankan Syariah dalam
Pengembangan Pertanian Organik di Indonesia
iB Research Grant Program 2017

Event

Kampanye Aku Cinta Keuangan Syariah
melalui kegiatan *Expo iB Vaganza* Kediri
Workshop Nasional Perbankan Syariah
untuk Da'i, Pengurus Masjid, Kalangan
Pondok Pesantren, Ulama dan Kiai





Tinjauan Industri dan Operasional Sektor Jasa Keuangan Syariah

III

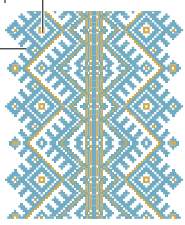
3.1 TINJAUAN INDUSTRI KEUANGAN SYARIAH

3.1.1 Perkembangan Perbankan Syariah

Perbankan syariah selama triwulan I-2017 masih menunjukkan perkembangan yang positif ditunjukkan dengan membaiknya indikator kinerja perbankan syariah, meski pertumbuhan Aset dan Pembiayaan mengalami sedikit penurunan dibandingkan akhir tahun sebelumnya. Menurunnya total aset Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) antara lain karena fenomena tahunan di mana pada awal tahun terjadi penurunan dibandingkan akhir tahun sebelumnya. Sementara itu, rasio NPF mengalami sedikit kenaikan apabila dibandingkan dengan posisi triwulan IV-2016. Namun indikator keuangan perbankan syariah lainnya, yaitu pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) menunjukkan perkembangan yang positif, serta rasio keuangan seperti CAR, ROA, dan BOPO mengalami perbaikan apabila dibandingkan dengan triwulan IV-2016. Perkembangan likuiditas juga membaik ditunjukkan dengan rasio FDR yang mengalami sedikit penurunan.

Pada triwulan I-2017, aset perbankan Syariah yang terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) tercatat sebesar Rp355,9 triliun sedikit mengalami perlambatan pertumbuhan dibandingkan triwulan IV-2016 sebesar 2,67% (*qtq*). Perlambatan pertumbuhan jumlah aset tersebut disebabkan oleh Pembiayaan pada periode yang sama serta penempatan pada bank lain yang menurun dibandingkan triwulan IV-2016. Pada triwulan ini, pembiayaan BUS, UUS, dan BPRS mengalami penurunan sebesar 0,80% menjadi sebesar Rp252,7 triliun yang diikuti dengan menurunnya kualitas pembiayaan di mana rasio *Non Performing Financing* (NPF) BUS dan UUS pada triwulan I-2017 mengalami sedikit kenaikan sebesar 0,29% (*qtq*) menjadi sebesar 4,43%. Sementara itu, DPK BUS, UUS, dan BPRS mengalami peningkatan sebesar Rp1,92 triliun atau naik 0,67% dari triwulan sebelumnya menjadi sebesar Rp287,1 triliun.

Peningkatan DPK yang lebih besar daripada pembiayaan yang disalurkan pada triwulan I-2017 menjadikan rasio FDR BUS dan UUS pada triwulan tersebut turun menjadi 87,45%. Tingkat FDR 87,45% masih dalam *range* yang mengindikasikan ekspansi pembiayaan bank



syariah diimbangi dengan sumber dana (*funding*) yang cukup karena bank memiliki kemampuan likuiditas semakin baik.

Perkembangan positif ditunjukkan dengan membaiknya rasio keuangan seperti CAR, ROA, dan BOPO pada triwulan I-2017 yang mengalami perbaikan kinerja dibandingkan triwulan IV-2016. CAR BUS mengalami peningkatan dari triwulan sebelumnya yang sebesar 16,63% menjadi 17,04%. Begitupun rasio rentabilitas ROA yang mengalami peningkatan dari yang sebesar 0,95% menjadi sebesar 1,46%.

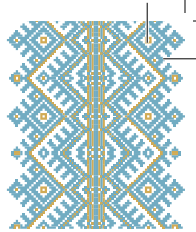
Peningkatan rentabilitas ini diimbangi dengan meningkatnya efisiensi BUS dan UUS yang terlihat dari menurunnya rasio BOPO dari 93,62% pada triwulan sebelumnya menjadi 89,22%.

Pada triwulan I-2017, pangsa pasar aset perbankan syariah terhadap aset perbankan nasional berada pada angka 5,18%, sedikit mengalami penurunan sebesar 0,15% dari triwulan sebelumnya sebesar 5,34%. Penurunan pangsa pasar ini dilatarbelakangi perlambatan pertumbuhan aset perbankan syariah pada awal 2017 ini. Proporsi Aset BUS dan UUS masih

Tabel III - 1 Indikator Perbankan Syariah

Indikator Utama	Triwulan	Triwulan	Triwulan	Triwulan	Triwulan	Pertumbuhan (q-t-q)	
	I-2016	II-2016	III-2016	IV-2016	I-2017*	Nominal	%
SHARE TOTAL ASET BUS + UUS + BPRS							
Total aset BUS + UUS (Rp. T)	297,77	306,22	331,76	356,50	346,51	-9,99	-2,80
Total aset BPRS (Rp. T)	7,95	8,12	8,60	9,16	9,37	0,22	2,37
Share Aset Perbankan Syariah (BUS+UUS+BPRS) terhadap Total Perbankan Indonesia (BUS+BUK+BPRS+BPR)	4,87	4,85	5,17	5,34	5,18		-0,15
BUS + UUS							
DPK (Rp. T)	232,66	241,34	263,52	279,33	281,08	1,75	0,63
- Giro	19,71	23,84	29,07	27,97	27,66	-0,32	-1,13
- Tabungan	68,07	70,24	78,35	85,19	85,20	0,01	0,01
- Deposito	144,88	147,25	156,10	166,17	168,23	2,06	1,24
Pembiayaan (Rp. T)	213,48	222,17	235,01	248,05	245,82	-2,24	-0,90
Jumlah NPF (Rp. T)	10,44	11,23	10,14	10,27	10,88	0,61	5,98
CAR (%) – BUS	14,90	14,72	15,43	16,63	17,04		0,41
NPF Gross (%)	4,89	5,05	4,31	4,14	4,43		0,29
ROA (%)	1,26	1,11	1,04	0,95	1,46		0,51
BOPO (%)	91,16	92,36	92,83	93,62	89,22		-4,40
FDR (%)	91,76	92,06	89,18	88,80	87,45		-1,35
Jumlah Bank							
- BUS	12	12	13	13	13	-	-
- UUS	22	22	21	21	21	-	-
Jumlah Kantor	2230	2129	2210	2201	2205	4	0
BPRS							
DPK (Rp. T)	4,97	5,00	5,44	5,82	6,00	0,18	3,02
Pembiayaan (Rp. T)	5,97	6,46	6,45	6,66	6,87	0,21	3,15
Jumlah NPF (Rp. T)	0,56	0,59	0,68	0,58	0,69	0,11	19,17
CAR (%)	22,15	20,22	20,72	21,73	23,05		1,32
NPF Gross (%)	9,18	9,18	10,47	8,63	9,98		1,34
ROA (%)	2,52	2,18	2,45	2,27	2,31		0,04
BOPO (%)	89,20	87,94	87,91	87,09	84,79		-2,30
FDR (%)	120,25	129,35	118,63	114,40	114,54		0,15
Jumlah Bank	165	165	164	166	166	-	0,00
Jumlah Kantor	454	428	430	453	451	(2)	-0,44

Sumber : Data Statistik Perbankan Indonesia dan Sistem Informasi Perbankan Syariah, Februari 2017



mendominasi total aset perbankan syariah (BUS+UUS+BPRS) dengan persentase sebesar 97,37%.

3.1.2 Perkembangan Pasar Modal Syariah

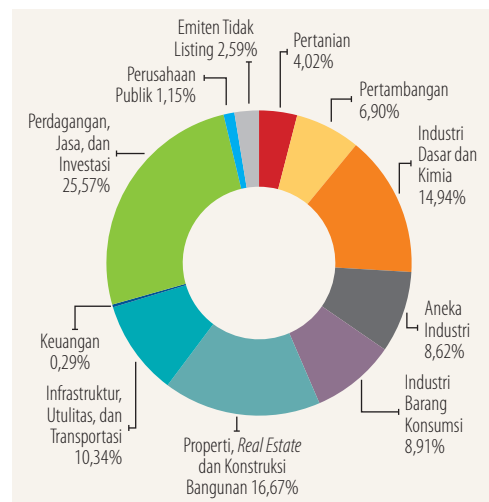
Pada triwulan 1-2017 terjadi peningkatan pada industri pasar modal syariah. Hal tersebut dilihat dari terjadinya peningkatan pada jumlah sukuk korporasi beredar baik jumlah maupun nilainya. Peningkatan terjadi pula pada jumlah serta NAB dari reksa dana syariah beredar dibandingkan periode triwulan sebelumnya. Selain itu, sisi indeks ISSI dan JII baik indeks dan kapitalisasi, mengalami peningkatan mengikuti peningkatan yang terjadi pada indeks IHSG.

A. Perkembangan Saham Syariah

OJK menerbitkan Daftar Efek Syariah (DES) periode II melalui Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-56/D.04/2016 tentang Daftar Efek Syariah yang meliputi 345 Efek jenis Saham Emiten dan Perusahaan Publik serta Efek syariah lainnya. Sejak diterbitkannya DES Periode II sampai akhir triwulan I-2017, terdapat penambahan tiga saham yang masuk dalam DES yang diperoleh dari hasil penelaahan DES insidentil bersamaan dengan efektifnya pernyataan pendaftaran Emiten yang melakukan penawaran umum perdana saham. Secara keseluruhan, saham yang termasuk dalam DES hingga akhir Maret 2017 berjumlah 348 saham.

Mayoritas Saham Syariah berasal dari sektor Perdagangan, Jasa dan Investasi sebanyak 89 saham (25,57%), sektor Properti, *Real Estate* & Konstruksi sebanyak 58 saham (16,67%), sektor Industri Dasar dan Kimia sebanyak 52 saham (14,94%), sektor Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi sebanyak 36 saham (10,34%) dan sektor-sektor lainnya masing-masing di bawah 10%.

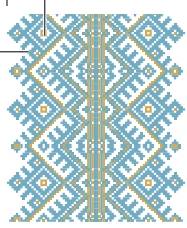
Grafik III - 1 Sektor Industri Saham Syariah di Indonesia



Dari sisi kinerja saham syariah, peningkatan dari sisi indeks maupun kapitalisasi yang terjadi pada bursa saham di Indonesia pada tahun 2017 berdampak pada meningkatnya kinerja saham syariah yang dapat dilihat pada Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) dan *Jakarta Islamic Index* (JII). ISSI ditutup pada level 180,49 poin atau meningkat sebesar 4,89% dibandingkan akhir 2016. Sementara itu, kapitalisasi pasar saham yang tergabung dalam ISSI sebesar Rp3.323,61 triliun atau 54,89% dari total kapitalisasi pasar seluruh saham sebesar Rp6.055,23 triliun, meningkat sebesar 5,71% jika dibandingkan kapitalisasi pasar Saham ISSI pada akhir Desember 2016.

Tabel III - 2 Perkembangan Kapitalisasi Saham Syariah (dalam jutaan rupiah)

Tahun	<i>Jakarta Islamic Index</i>	Indeks Saham Syariah Indonesia	Indeks Harga Saham Gabungan	
2012	1.671.004,23	2.451.334,37	4.126.994,93	
2013	1.672.099,91	2.557.846,77	4.219.020,24	
2014	1.944.531,70	2.946.892,79	5.228.043,48	
2015	1.737.290,98	2.600.850,72	4.872.701,66	
2016	Triwulan I	1.879.354,35	2.796.012,59	5.143.453,35
	Triwulan II	1.964.048,11	3.029.643,77	5.187.528,91
	Triwulan III	2.188.117,33	3.249.148,53	5.799.220,96
	Triwulan IV	2.035.189,92	3.170.056,08	5.753.612,76
2017	Triwulan I	2.106.211,65	3.323.611,39	6.055.232,91

**Tabel III - 3** Perkembangan Indeks Saham Syariah

Tahun	Jakarta Islamic Index	Indeks Saham Syariah Indonesia	Indeks Harga Saham Gabungan	
2012	594,78	144,99	4.316,69	
2013	585,11	143,71	4.274,18	
2014	691,04	168,64	5.226,95	
2015	603,35	145,06	4.593,01	
2016	Triwulan I	652,68	155,91	4.845,37
	Triwulan II	694,34	165,94	5.016,65
	Triwulan III	739,69	176,93	5.364,80
	Triwulan IV	694,13	172,08	5.296,71
2017	Triwulan I	718,35	180,49	5.568,11

Tabel III - 4 Perkembangan Emisi Sukuk Korporasi

Tahun	Emisi Sukuk		Sukuk Outstanding		
	Total Nilai (dalam miliar rupiah)	Total Jumlah	Total Nilai (dalam miliar rupiah)	Total Jumlah	
2012	9.790	54	6.883	32	
2013	11.994	64	7.553	36	
2014	12.956	71	7.105	35	
2015	16.114	87	9.902	47	
2016	Triwulan I	16.114	87	9.516	45
	Triwulan II	18.014	91	11.111	45
	Triwulan III	18.925	97	11.044	51
	Triwulan IV	20.425	102	11.878	53
2017	Triwulan I	20.793	105	12.134	55

B. Perkembangan Sukuk Korporasi

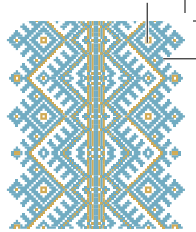
Selama periode triwulan I-2017 terdapat penerbitan sebanyak tiga seri Sukuk Korporasi dengan total nilai penerbitan sebesar Rp 386 miliar. Selain itu, terdapat pula satu seri Sukuk Korporasi yang jatuh tempo senilai Rp 130 miliar. Dengan demikian, jumlah *outstanding* Sukuk korporasi menjadi sebanyak 55 seri atau meningkat sebesar 4,26% dibandingkan periode sebelumnya. Dari sisi nilai *outstanding* sebesar Rp 12,13 triliun atau meningkat sebesar 2,16% dibandingkan triwulan sebelumnya.

C. Perkembangan Reksa Dana Syariah

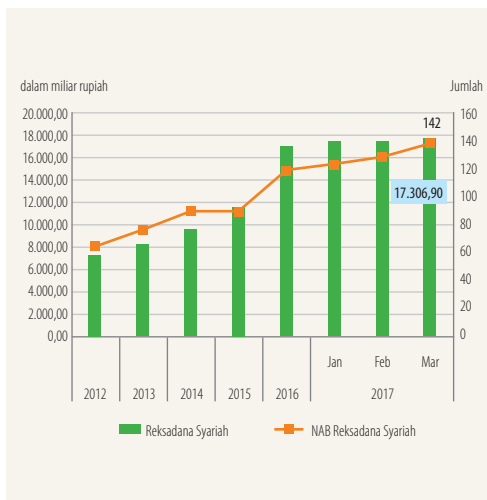
Selama triwulan I-2017 terdapat enam Reksa Dana Syariah efektif terbit. Sampai akhir Maret 2017, total Reksa Dana Syariah yang beredar sebanyak 142 dengan NAB sebesar Rp17,30 triliun atau meningkat 4,41% dari sisi jumlah dan meningkat 16,04% dari sisi NAB dibanding periode sebelumnya. Proporsi jumlah dan NAB Reksa Dana Syariah terhadap total industri Reksa Dana masing-masing mencapai 9,52% dari total 1.491 Reksa Dana dan 4,75% dari total NAB Reksa Dana sebesar Rp364,42 triliun.

Tabel III - 5 Perkembangan Reksa Dana Syariah

Tahun	Perbandingan Jumlah Reksa Dana				Perbandingan NAB (Rp. Miliar)				
	Reksa Dana Syariah	Reksa Dana Konv.	Reksa Dana Total	%	Reksa Dana Syariah	Reksa Dana Konv.	Reksa Dana Total	%	
2010	48	564	612	7,84%	5.225,78	143.861,59	149.087,37	3,51%	
2011	50	596	646	7,74%	5.564,79	162.672,10	168.236,89	3,31%	
2012	58	696	754	7,69%	8.050,07	204.541,97	212.592,04	3,79%	
2013	65	758	823	7,90%	9.432,19	183.112,33	192.544,52	4,90%	
2014	74	820	894	8,31%	11.236,00	230.225,59	241.462,09	4,65%	
2015	93	998	1.091	8,52%	11.019,43	260.949,57	271.969,00	4,05%	
2016	Triwulan I	99	1.051	1.150	8,61%	9.433,71	283.879,95	293.313,66	3,22%
	Triwulan II	106	1.120	1.226	8,65%	9.901,24	299.540,37	309.441,60	3,20%
	Triwulan III	123	1.224	1.347	9,13%	12.087,00	304.629,57	316.716,57	3,82%
	Triwulan IV	136	1.289	1.425	9,54%	14.914,63	323.835,18	338.749,81	4,40%
2017	Triwulan I	142	1349	1491	9,52%	17.306,90	347.114,82	364.421,72	4,75%



Grafik III - 2 Perkembangan Jumlah dan NAB Reksa Dana Syariah



D. Perkembangan Surat Berharga Syariah Negara

Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau disebut Sukuk Negara, adalah surat berharga yang diterbitkan oleh negara berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas penyertaan terhadap aset SBSN baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Sampai akhir Maret 2017, jumlah keseluruhan SBSN *outstanding* sebanyak 53 seri dengan nilai sebesar Rp480,29 triliun.

Grafik III - 3 Perkembangan Sukuk Negara *Outstanding*



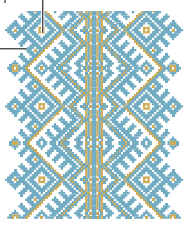
Tabel III - 6 Perkembangan Surat Berharga Syariah Negara *Outstanding*

Tahun	Nilai <i>Outstanding</i> (dalam triliun rupiah)	Total Jumlah <i>Outstanding</i>	
2010	44,34	16	
2011	77,73	22	
2012	124,44	36	
2013	169,29	42	
2014	206,10	42	
2015	296,07	47	
2016	Triwulan I	367,04	51
	Triwulan II	380,89	51
	Triwulan III	406,12	53
	Triwulan IV	411,37	53
2017	Triwulan I	480,29	53

E. Perkembangan Jasa Syariah di Pasar Modal

Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal memerlukan jasa dari para pihak yang mempunyai pengalaman dan kompetensi yang cukup dari sisi penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal dalam penerbitan Efek tersebut. Para pihak tersebut antara lain meliputi Penjamin Emisi Efek, Manajer Investasi, Bank Kustodian, dan Wali Amanat. Sampai dengan triwulan I-2017, para pihak yang terlibat atau telah mempunyai jasa layanan syariah meliputi:

- Manajer Investasi yang telah mengelola Reksa Dana Syariah berjumlah 45 Manajer Investasi.
- Terdapat 10 Pihak yang telah memperoleh persetujuan dari OJK sebagai Pihak Penerbit DES
- Bank Kustodian yang memperoleh rekomendasi DSN-MUI untuk memberikan layanan syariah berjumlah 14 bank.
- Perusahaan Efek yang mengembangkan dan melaksanakan perdagangan *online* saham berdasarkan prinsip syariah (*online trading* syariah) berjumlah 12 Perusahaan Efek
- Perusahaan Efek yang turut serta sebagai penjamin Emisi dalam penerbitan Sukuk



- Korporasi berjumlah 12 Penjamin Emisi Efek
- f. Terdapat enam Wali Amanat yang terlibat dalam perwaliamanatan penerbitan Sukuk Korporasi
- g. Terdapat 35 pihak yang memperoleh izin Ahli Syariah Pasar Modal dari OJK.

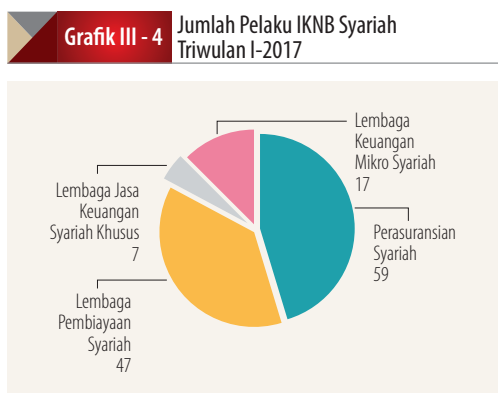
3.1.3 Perkembangan IKNB Syariah

Selama triwulan I-2017, aset IKNB Syariah mengalami kenaikan sebesar 4,4% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya menjadi Rp92,57 triliun. Aset industri lembaga pembiayaan syariah masih mendominasi porsi yaitu sebesar 40,7% dari total aset IKNB syariah secara keseluruhan.

Tabel III - 7 Aset IKNB Syariah
(dalam triliun rupiah)

No.	Industri	Triwulan I-2016	Triwulan II-2016	Triwulan III-2016	Triwulan IV-2016	Triwulan I-2017
1	Perasuransian Syariah	28,97	30,61	32,99	33,24	35,25
2	Lembaga Pembiayaan Syariah	25,91	30,12	33,90	36,94	37,64
3	Lembaga Jasa Keuangan Syariah Khusus	16,47	17,25	17,18	18,43	19,61
4	Lembaga Keuangan Mikro Syariah	0,06	0,06	0,06	0,06	0,07
	Total Aset	71,41	78,03	84,13	88,67	92,57

Sampai akhir periode laporan, terdapat 59 perusahaan perasuransian syariah, 47 lembaga pembiayaan syariah, tujuh lembaga jasa keuangan syariah khusus, dan 17 lembaga keuangan mikro syariah. Selama periode laporan, jumlah entitas



IKNB Syariah meningkat sebanyak tiga perusahaan dari periode sebelumnya.

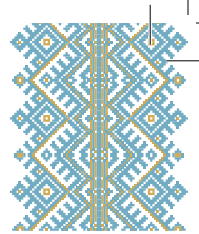
A. Industri Perasuransian Syariah

Pada triwulan I-2017, Industri perasuransian syariah mengalami peningkatan nilai aset dan investasi masing-masing sebesar 0,8% dan 0,3% menjadi Rp33,24 triliun dan Rp28,81 triliun. Kontribusi bruto dan klaim bruto mengalami peningkatan masing-masing sebesar 35,7% dan 35,6% menjadi Rp12,03 triliun dan Rp4,34 triliun. Kewajiban mengalami penurunan sebesar 1,2% menjadi Rp6,47 triliun.

Pengelolaan perusahaan perasuransian syariah dilakukan dalam bentuk *full fledged* dan unit syariah. Sampai akhir periode laporan terdapat 59 perusahaan yang terdiri dari 11 perusahaan asuransi syariah, 45 perusahaan asuransi yang memiliki unit syariah, satu perusahaan reasuransi syariah, dan dua perusahaan reasuransi yang memiliki unit syariah.

Tabel III - 8 Indikator Perusahaan Perasuransian Syariah
(dalam triliun rupiah)

No	Jenis Indikator	Triwulan I-2016	Triwulan II-2016	Triwulan III-2016	Triwulan IV-2016	Triwulan I-2017
1	Total Aset					
	Asuransi Jiwa Syariah	23,62	24,86	26,87	27,08	28,98
	Asuransi Umum Syariah	4,17	4,54	4,80	4,80	4,91
	Reasuransi Syariah	1,18	1,21	1,32	1,37	1,42
	Jumlah	28,97	30,61	32,99	33,24	35,25
2	Total Investasi					
	Asuransi Jiwa Syariah	21,23	22,46	24,49	24,56	26,28
	Asuransi Umum Syariah	2,69	2,97	3,18	3,16	3,23
	Reasuransi Syariah	0,98	0,97	1,04	1,08	1,12
	Jumlah	24,90	26,40	28,71	28,81	30,63
3	Kontribusi Bruto					
	Asuransi Jiwa Syariah	2,17	4,61	6,92	9,49	2,39
	Asuransi Umum Syariah	0,49	1,12	1,61	2,13	0,51
	Reasuransi Syariah	0,10	0,22	0,33	0,41	0,13
	Jumlah	2,75	5,95	8,86	12,03	3,03
4	Klaim Bruto					
	Asuransi Jiwa Syariah	0,69	1,54	2,46	3,32	0,85
	Asuransi Umum Syariah	0,15	0,36	0,54	0,76	0,22
	Reasuransi Syariah	0,06	0,16	0,20	0,25	0,09
	Jumlah	0,90	2,07	3,20	4,34	1,16
5	Kewajiban					
	Asuransi Jiwa Syariah	3,69	3,43	3,46	3,45	3,91
	Asuransi Umum Syariah	2,10	2,42	2,65	2,56	2,66
	Reasuransi Syariah	0,32	0,37	0,44	0,46	0,47
	Jumlah	6,12	6,22	6,55	6,47	7,05



B. Industri Pembiayaan Syariah

Jumlah aset perusahaan pembiayaan syariah pada periode pelaporan mengalami kenaikan sebesar 2,1%.

Tabel III - 9 Komponen Aset Perusahaan Pembiayaan Syariah (dalam miliar rupiah)

No	Komponen	Triwulan I-2016	Triwulan II-2016	Triwulan III-2016	Triwulan IV-2016	Triwulan I-2017
1	Kas dan Setara Kas	488.85	589.90	608.15	648.08	602.17
2	Aset Tagihan Derivatif	-	-	-	16.77	-10.27
3	Investasi Jangka Pendek Dalam Surat Berharga	-	-	-	-	-
4	Piutang Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah - Neto	23,233.78	26,716.28	29,890.29	33,073.30	33,764.41
5	Penyertaan Modal	-	-	-	-	-
6	Investasi Jangka Panjang Dalam Surat Berharga	0.50	-	-	-	-
7	Aset yang Disewaoperasikan - Neto	-	-	125.85	109.00	95.71
8	Aset Tetap dan Inventaris - Neto	-	-	166.61	151.85	144.30
9	Aset Pajak Tangguhan	83.00	132.00	24.48	19.30	23.23
10	Rupa-Rupa Aset	1,646.54	1,596.32	1,942.18	1,727.63	1,888.20
	Aset	25,452.67	29,034.50	32,757.56	35,740.95	36,486.75

Sampai dengan periode laporan, terdapat 39 perusahaan pembiayaan syariah, yang terdiri atas tiga perusahaan berbentuk *full fledged* dan 36 perusahaan berbentuk UUS. Sementara itu, pada perusahaan modal ventura syariah terdapat empat perusahaan berbentuk *full fledged* dan tiga perusahaan berbentuk UUS dengan total aset sebesar Rp1.041,59 miliar. Selain itu, terdapat satu perusahaan pembiayaan infrastruktur unit syariah dengan aset sebesar Rp106,07 miliar.

C. Lembaga Jasa Keuangan Syariah Khusus & Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Jumlah perusahaan penjaminan syariah sebanyak empat perusahaan, terdiri atas dua *full fledged* dan dua UUS dengan total aset sebesar Rp748,37 miliar. Selain itu,

aset kegiatan syariah pada Perusahaan Pergadaian dan LPEI masing-masing sebesar Rp4,70 triliun dan Rp14,17 triliun. Sementara itu, jumlah Lembaga Keuangan Mikro Syariah adalah sebanyak 17 perusahaan berbentuk *full fledged* dengan total aset Rp70,40 miliar.

3.2 PENGATURAN SEKTOR JASA KEUANGAN SYARIAH

3.2.1 Pengaturan Perbankan Syariah

Sepanjang triwulan I-2017, terdapat beberapa ketentuan perbankan syariah yang telah diterbitkan yaitu :

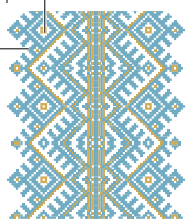
1. SEOJK Nomor 1/SEOJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

SEOJK ini adalah ketentuan pelaksanaan dari POJK Nomor 66/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Pokok-pokok pengaturan terdiri dari komponen modal, besaran dan perhitungan untuk setiap komponen modal.

2. SEOJK Nomor 2/SEOJK.03/2017 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah

SEOJK ini adalah ketentuan pelaksanaan dari POJK Nomor 64/POJK.03/2016 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah. Pokok-pokok pengaturan terdiri dari persyaratan permohonan izin dan format laporan pelaksanaan perubahan kegiatan usaha BUK menjadi BUS.

3. SEOJK Nomor 3/SEOJK.03/2017 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah



SEOJK ini adalah ketentuan pelaksanaan dari POJK Nomor 64/POJK.03/2016 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah. Pokok-pokok pengaturan terdiri dari persyaratan permohonan izin dan format laporan pelaksanaan perubahan kegiatan usaha BPR menjadi BPRS.

4. SEOJK Nomor 10/SEOJK.03/2017 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

SEOJK ini adalah ketentuan pelaksanaan dari POJK Nomor 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank sebagaimana diubah dengan POJK Nomor 32/POJK.03/2016 tentang Perubahan atas POJK 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank. SEOJK ini mencabut SEOJK Nomor 18/SEOJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Pokok-pokok pengaturan terdiri dari komponen Laporan Publikasi, tujuan pembuatan dan konten dari Laporan Publikasi yang wajib disusun dan dirilis oleh BUS dan UUS.

3.2.2 Pengaturan Pasar Modal Syariah

1. Penyusunan RPOJK tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah.

Saat ini telah terdapat Peraturan Bapepam Nomor II.K.1 terkait Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah. Seiring dengan perkembangan dan kebutuhan pasar maka peraturan tersebut harus segera disempurnakan dan disesuaikan dengan peraturan pasar modal syariah terbaru yang telah terbit pada 2015.

3.2.3 Pengaturan IKNB Syariah

Selama triwulan I-2017, OJK menerbitkan POJK terkait dengan pengaturan IKNB Syariah yang diatur bersamaan dengan IKNB Konvensional melalui POJK Nomor 1 /POJK.05/2017 Tentang

Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Lembaga Penjamin, POJK Nomor 2 /POJK.05/2017 Tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin dan POJK Nomor 3 /POJK.05/2017 Tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Lembaga

3.3 PENGAWASAN SEKTOR JASA KEUANGAN SYARIAH

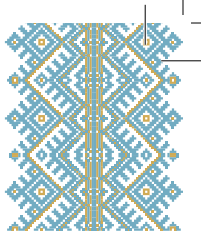
3.3.1 Pengawasan Perbankan Syariah

Pengawasan Perbankan Syariah

Kondisi permodalan industri Perbankan Syariah (terutama untuk BUS) sampai dengan triwulan I-2017 secara umum cukup memadai dan berada di atas *threshold* (rasio KPMM minimum 14%) yakni 17,04% meningkat dibandingkan dengan rasio KPMM triwulan sebelumnya, yakni 15,95% Kenaikan tersebut antara lain terkait dengan pengakuan penuh atas pemanfaatan kembali laba 2016 dari masing-masing BUS, yang sejalan dengan *supervisory concern* dari OJK mengenai aspek permodalan.

Kegiatan usaha pada awal 2017 yang masih relatif lambat berdampak pada penurunan pembiayaan, yaitu 1,61% terhadap posisi triwulan IV-2016 sehingga pembiayaan menjadi Rp174,62 triliun. Sejalan dengan siklus awal tahun tersebut, sejumlah upaya perbaikan NPF yang dilakukan oleh masing-masing BUS, seperti restrukturisasi pembiayaan, hapus buku, dan melakukan litigasi/upaya hukum, sehingga terjadi kenaikan NPF *Gross* BUS posisi triwulan I-2017 menjadi 4,78%. Meski demikian, rasio NPF tersebut masih relatif menurun apabila dibandingkan tahun sebelumnya (5,59% di triwulan I-2016). Terkait hal tersebut, dilakukan penyempurnaan kerangka penerapan manajemen risiko kredit sebagai bagian dari tindak lanjut *supervisory concern* OJK dalam rangka mengantisipasi potensi peningkatan NPF.

Optimalisasi kegiatan usaha masih terus dilaksanakan di tiap BUS, sebagaimana tercermin dari rasio BOPO triwulan I-2017 sebesar 93,35% yang relatif menurun



dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 96,23%. Masih tingginya rasio tersebut secara umum disebabkan struktur dana BUS yang didominasi oleh dana mahal (deposito) sebesar 59,65% (triwulan I-2017), rendahnya *fee based income* yang disebabkan variasi produk terbatas dan jangkauan jaringan kantor bank yang belum optimal. Terkait hal tersebut, masing-masing BUS memulai pembenahan layanan dan produk, peningkatan efisiensi dan produktifitas karyawan, optimalisasi jaringan kantor dengan mengurangi jaringannya secara bertahap (*network reprofiling*) dan membuka layanan tanpa kantor. Sebagai langkah *supervisory action*, pengawas masih menetapkan risiko operasional sebagai bagian dari *primary supervisory concern* OJK (khususnya kegiatan *on-site supervision*) terutama terkait dengan kesiapan infrastruktur (khususnya IT) yang memadai, kompetensi SDM dan kecukupan pengendalian intern.

Berkenaan dengan kondisi dimaksud, secara umum *rating* peringkat RBBR di perbankan syariah tergolong cukup sehat. Adapun potensi risiko terutama berasal dari risiko kredit dan risiko operasional, sehingga *Supervisory Plan* 2017 terutama difokuskan pada kedua risiko tersebut. Adapun aspek permodalan masih menjadi *concern Supervisory Plan* di beberapa BUS tertentu.

Perizinan Perbankan Syariah

Selama triwulan I-2017 telah dilaksanakan proses perizinan penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap satu calon PSP dan 34 Pengurus Bank Syariah serta proses perizinan terhadap sembilan pengajuan calon Dewan Pengawas Syariah (DPS) dengan hasil tujuh calon Pengurus Bank dinyatakan memenuhi syarat (disetujui) dan tiga calon DPS dinyatakan memenuhi syarat (layak), dua calon Pengurus Bank Syariah dibatalkan permohonannya oleh pihak bank, satu dokumen calon PSP, 18 calon Pengurus Bank Syariah dan dua calon DPS dikembalikan karena tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. Hingga akhir triwulan I-2017 terdapat tujuh proses perizinan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Pengurus Bank

Syariah serta empat calon DPS yang masih dalam proses penyelesaian.

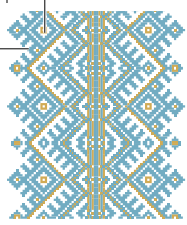
Di bidang perizinan produk baru, telah dilaksanakan tiga permohonan terkait dengan produk baru dengan hasil satu permohonan telah disetujui dan dua permohonan masih dalam proses penyelesaian.

Terkait pengembangan jaringan kantor perbankan syariah, terdapat 74 permohonan jaringan kantor perbankan syariah yang terdiri dari pembukaan kantor, pemindahan alamat kantor, penutupan kantor, dan penghentian kegiatan LSB dengan hasil 55 permohonan telah disetujui, satu permohonan dibatalkan oleh bank, dua permohonan dikembalikan karena belum memenuhi ketentuan yang berlaku, dan 16 permohonan masih dalam proses penyelesaian.

Pada triwulan I-2017, OJK juga menerima 14 permohonan perizinan lainnya yaitu berupa permohonan persetujuan prinsip pendirian Bank Syariah, permohonan izin usaha pendirian bank, permohonan perubahan kegiatan usaha dari bank konvensional menjadi bank syariah, permohonan *spin off* UUS, dan permohonan akuisisi dengan hasil satu permohonan *spin off* UUS telah dikembalikan kepada bank karena tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, empat permohonan izin prinsip pendirian bank syariah sedang dalam proses penyelesaian, empat permohonan izin usaha pendirian bank syariah sedang dalam proses penyelesaian, satu permohonan perubahan kegiatan usaha dari bank konvensional menjadi bank syariah sedang dalam proses penyelesaian, dua permohonan *spin off* UUS sedang dalam proses penyelesaian, dan lima permohonan akuisisi sedang dalam proses penyelesaian.

3.3.2 Pengawasan Pasar Modal Syariah

Dalam bidang pengawasan terkait dengan pasar modal syariah, berdasarkan Peraturan Nomor II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah, OJK memberikan persetujuan



kepada Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah (DES). Atas persetujuan tersebut, Pihak Penerbit DES wajib menyampaikan laporan DES yang diterbitkannya kepada OJK setelah pelaporan terakhir per tanggal 31 Mei dan 30 November, serta disampaikan paling lambat setiap tanggal 5 bulan berikutnya. Selama triwulan I-2017, OJK memberikan persetujuan kepada PT Indosurya Asset Management sebagai Pihak Penerbit DES sehingga sampai akhir triwulan I-2017, terdapat 10 Pihak yang telah memperoleh persetujuan dari OJK sebagai Pihak Penerbit DES

Terkait pengawasan terhadap Pihak Penerbit DES, telah dilakukan pengawasan berdasarkan laporan DES yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit DES secara periodik yang telah disampaikan oleh Pihak tersebut berdasarkan Peraturan Nomor II.K.1. tentang penerbitan dan kriteria Daftar Efek Syariah. Selama periode triwulan I-2017, seluruh Pihak Penerbit DES telah menyampaikan laporan perubahan DES yang diterbitkannya sesuai dengan periode perubahannya.

3.3.3 Pengawasan IKNB Syariah

Selama periode laporan, OJK melakukan pengawasan terhadap 59 perusahaan perasuransian syariah dan menerbitkan tiga Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung Sementara (LHPLS) serta dua Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung Final (LHPLF) terhadap Perusahaan Perasuransian syariah. OJK juga melakukan pemeriksaan *on-site* terhadap lima Perusahaan Perasuransian syariah.

Terkait dengan pengawasan terhadap lembaga pembiayaan dan Industri Lembaga Jasa Keuangan Syariah Lainnya, OJK menerbitkan tiga LHPLS Perusahaan Pembiayaan Syariah, satu LHPLF Perusahaan Pembiayaan Syariah, dan satu LHPLF Perusahaan Penjaminan Syariah, serta melakukan pemeriksaan *on-site* terhadap lima Perusahaan Pembiayaan Syariah.

Berkaitan dengan layanan kelembagaan, OJK memberikan izin usaha asuransi jiwa

dengan prinsip syariah, pemberian izin usaha perusahaan modal ventura unit usaha syariah, pemberian izin usaha pergadaian syariah, pengadministrasian pembukaan 10 kantor pemasaran perusahaan asuransi syariah, pemberian izin pembukaan 27 kantor cabang unit usaha syariah perusahaan pembiayaan, pengadministrasian atas penutupan 15 kantor pemasaran perusahaan perasuransian syariah, pencabutan izin 2 unit usaha syariah perusahaan pembiayaan, pengadministrasian perubahan dewan pengawas syariah perusahaan asuransi syariah, pengadministrasian pengangkatan kepala unit syariah perusahaan asuransi, pengadministrasian pengangkatan tenaga ahli perusahaan asuransi syariah, persetujuan atas 20 produk baru asuransi jiwa dan 6 produk baru asuransi kerugian dan pencatatan atas perubahan 4 produk asuransi jiwa syariah dan 1 produk asuransi jiwa kerugian, uji kemampuan dan kepatutan terhadap 2 calon pihak utama yaitu calon komisaris dan calon auditor internal perusahaan asuransi syariah, 59 pencatatan syarat keberlanjutan pihak utama perusahaan pembiayaan, 1 produk perusahaan modal ventura syariah, dan menyetujui 1 orang untuk menjadi pihak utama pada perusahaan pembiayaan.

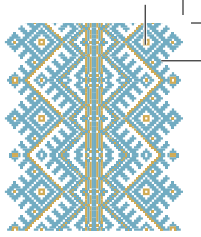
3.4 PENGEMBANGAN SEKTOR JASA KEUANGAN SYARIAH

3.4.1 Pengembangan Perbankan Syariah

Selama triwulan I-2017, OJK melaksanakan beberapa kegiatan, antara lain sebagai berikut :

1. Kajian Tata Kelola dan Manajemen Risiko BPRS

Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi penerapan prinsip-prinsip tata kelola pada BPRS, merumuskan aspek-aspek yang perlu dikembangkan dalam rangka implementasi tata kelola organisasi BPRS sesuai dengan volume usaha BPRS serta mengidentifikasi dampak penerapan tata kelola organisasi BPRS yang ideal.



2. Kajian Pembentukan *Jakarta International Islamic Financial Centre* (JIIFC)

Kajian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi mengenai bentuk atau desain pusat keuangan syariah internasional yang paling sesuai dengan kondisi Indonesia.

3. Kelompok Kerja Pemberdayaan Perbankan Syariah dalam Pengembangan Pertanian Organik

Dalam rangka meningkatkan pembiayaan perbankan syariah di sektor strategis terutama sektor pertanian organik, serta sebagai tindak lanjut kegiatan Pokja Pertanian Organik 2016, OJK telah membentuk Pokja Pertanian Organik 2017 yang beranggotakan 24 orang yang berasal perwakilan kementerian dan regulator, perbankan syariah, akademisi, dan komunitas pertanian organik. Selain itu, telah dilaksanakan Sosialisasi Buku Pola Pembiayaan Pertanian Organik "AKSI PRO SALAM" dan Program Pemerintah terkait Pertanian Organik. Sosialisasi tersebut dihadiri oleh perwakilan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah serta anggota Pokja Pertanian Organik.

4. *iB Research Grant Program 2017*

Dalam rangka mempercepat pelaksanaan agenda riset yang menjadi prioritas sekaligus mendukung perumusan kebijakan dan regulasi berbasis riset (*research-based policy*) yang memenuhi standar akademik yang berkualitas, OJK menyelenggarakan kegiatan *iB Reserch Grant Program 2017*. Pada triwulan I-2017 telah dilaksanakan *Call For Papers iB Research Grant Program 2017*. Dari hasil *Call For Papers* tersebut diperoleh 82 *paper* yang terdiri dari 42 *paper* S1, 25 *paper* S2, dan 15 *paper* S3.

Dalam rangka pengembangan pengawasan, sepanjang triwulan I-2017 telah dilakukan beberapa kegiatan sebagai berikut :

1. Penyempurnaan proses pengawasan yang terstandarisasi melalui penyusunan beberapa pedoman antara lain :
 - Pedoman pelaksanaan forum panel

pengawasan BPRS berdasarkan risiko.

Pedoman pengawasan BPRS berdasarkan risiko untuk tahapan pemahaman terhadap BPRS (KYBPRS).

- Pedoman pemeriksaan berdasarkan risiko untuk risiko imbal hasil dan risiko investasi BUS dan UUS.

2. Pengembangan aplikasi pelaporan dan pengawasan dalam rangka menunjang sistem pelaporan dan pengawasan yang terotomasi antara lain :

- Pengubahan aplikasi SIMWAS BPRS pada modul *Fit and Proper Test – New Entry*.
- Aplikasi pelaporan online OJK (Apolo) Laporan KPMM dan ATMR Syariah.

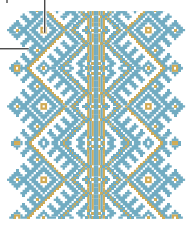
Selama triwulan I-2017, *output* dari proses *review* kebijakan dan standar serta hubungan kerjasama dengan pihak internasional dalam pengembangan perbankan syariah adalah sebagai berikut :

1. Kajian *Review* Stimulus Perekonomian Nasional bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (Stimulus Perbankan Syariah) Kajian ini bertujuan untuk mengetahui dampak penerapan kebijakan tersebut. POJK Nomor 12/POJK.03/2015 tentang Ketentuan Kehati-hatian dalam rangka Stimulus.
2. Kajian *Leveraging* Unit Usaha Syariah Kajian ini bertujuan untuk mendukung perkembangan industri perbankan syariah terkait dengan kewajiban UUS untuk melakukan *spin-off* pada 2023.

Pengembangan Produk dan Edukasi Perbankan Syariah

Dalam rangka meningkatkan *awareness* dan pemahaman masyarakat terhadap perbankan/ keuangan syariah, selama triwulan I-2017 telah dilakukan berbagai kegiatan antara lain:

1. Pelaksanaan Kampanye Aku Cinta Keuangan Syariah melalui kegiatan *Expo iB Vaganza*



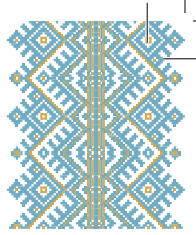
Kediri bekerjasama dengan Forum iB Marcomm (*Marketing Communication*) yang diikuti oleh sembilan BUS/UUS dan 2 BPRS. Dari penyelenggaraan *Expo* dimaksud, diperoleh transaksi perbankan syariah, yaitu: 1.403 rekening Dana Pihak Ketiga (DPK) dengan nominal sebesar Rp. 12,2 miliar dan realisasi pembiayaan sebesar Rp 4,6 miliar.

2. Dalam rangka meningkatkan kompetensi SDM pengajar/akademisi di bidang keuangan/perbankan syariah dilaksanakan pelatihan dalam bentuk *Training of Trainers* (ToT), yaitu:
 - a. *Training of Trainers* Perbankan Syariah kepada dosen/akademisi bekerjasama dengan Institut Agama Islam Tribakti Kediri yang diikuti oleh 95 peserta dengan hasil tingkat pemahaman peserta terhadap perbankan syariah mencapai 82%.
 - b. *Training of Trainers* Keuangan Syariah kepada dosen/akademisi bekerjasama dengan Universitas Gajah Mada Yogyakarta yang diikuti oleh 127 peserta dengan hasil tingkat pemahaman peserta terhadap perbankan syariah mencapai 84%.
3. Dalam rangka memperluas target sosialisasi dan edukasi perbankan syariah, dilaksanakan *Workshop* Nasional Perbankan Syariah untuk Da'i, Pengurus Masjid, Kalangan Pondok Pesantren, Ulama dan Kiai di beberapa kota sebagai berikut:
 - a. *Workshop Halaqah* Perbankan Syariah untuk Kalangan Pondok Pesantren, Ulama dan Kiai di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri.
 - b. *Workshop Halaqah* Perbankan Syariah untuk Kalangan Pondok Pesantren, Ulama dan Kiai di Pondok Pesantren Sunan Pandanaran Yogyakarta yang diikuti oleh 89 orang peserta.
4. Pelaksanaan Sosialisasi dan Edukasi Perbankan Syariah kepada Komunitas

Sosial Media melalui *Workshop* iB *Blogger* bekerjasama dengan Kompasiana di Yogyakarta yang diikuti oleh 77 peserta hasil tingkat pemahaman peserta terhadap perbankan syariah mencapai 82%.

3.4.2 Pengembangan Pasar Modal Syariah

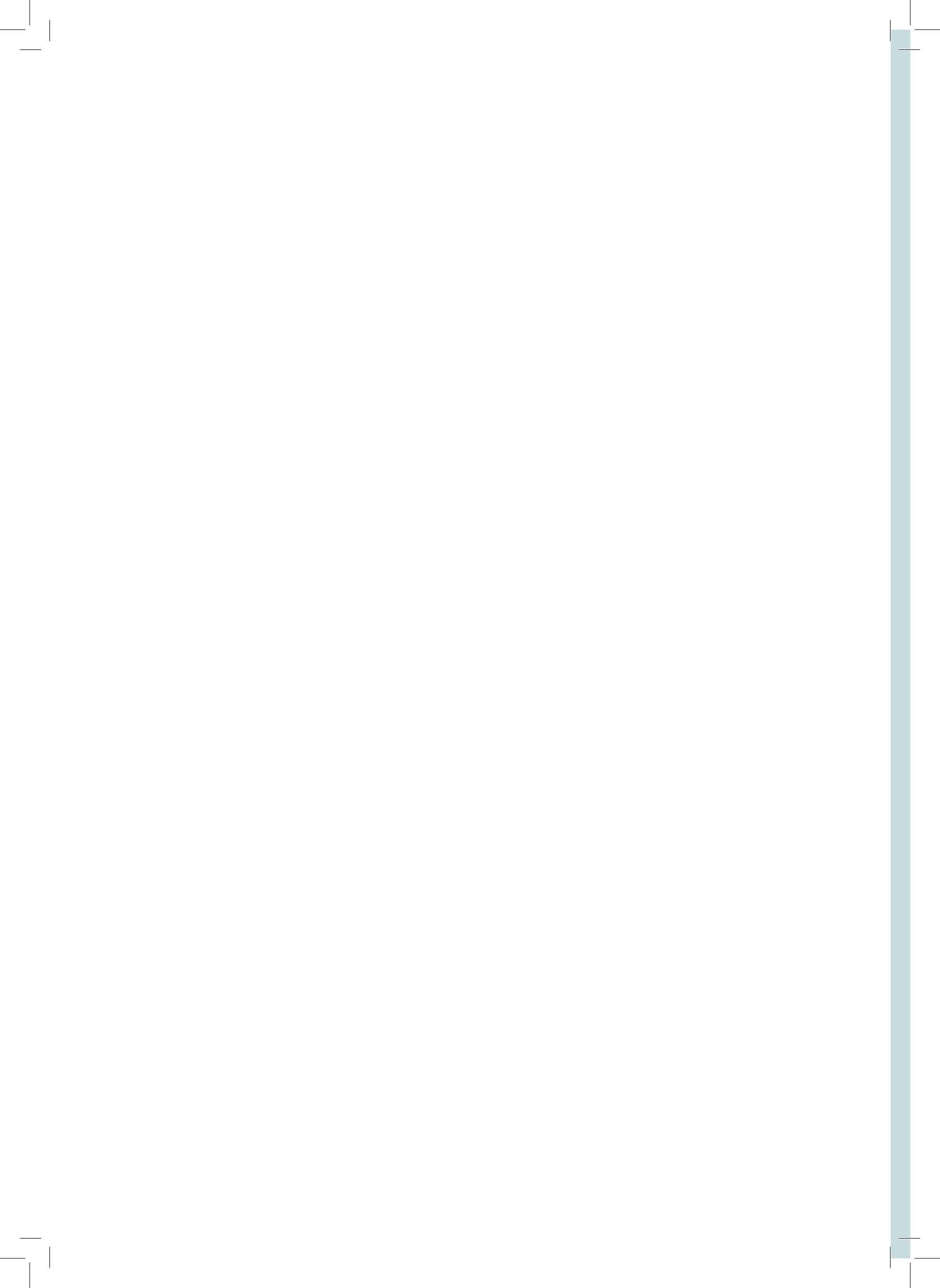
1. Kajian Terkait Produk Investasi Syariah Berbasis Pertanian
Kajian ini bertujuan mengidentifikasi produk investasi syariah di pasar modal yang dapat digunakan sebagai sumber permodalan baru di sektor pertanian serta memperluas alternatif pembiayaan bagi sektor pertanian dan sarana investasi untuk investor.
2. Kajian Terkait *Bundling Product* dengan Keuangan Syariah Lainnya
Kajian ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan pasar modal syariah melalui inovasi produk investasi yang baru serta memberikan alternatif investasi bagi investor.
3. Kajian Terkait Lindung Nilai Syariah dalam Pasar Modal
Kajian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi lindung nilai syariah di pasar modal serta melihat aspek kesyariahan atas lindung nilai di Pasar Modal dan akad yang memungkinkan digunakan.
4. Kajian Lanjutan terkait Inisiasi UU tentang Efek Syariah
Kajian ini dilatarbelakangi oleh perkembangan positif efek syariah khususnya Sukuk, baik jumlah maupun jenisnya. Dengan adanya kajian tersebut diharapkan mendorong BUMN untuk menerbitkan sukuk sebagai alternatif pendanaan dengan menyediakan insentif bagi BUMN dalam penerbitan sukuk dan mengembangkan jenis Sukuk Daerah, Sukuk Perpetual yang belum diatur di Indonesia, baik dalam Peraturan OJK atau peraturan lainnya.



5. Kajian Lanjutan terkait Materi Pasar Modal Syariah Dalam Kurikulum Pendidikan Tinggi
Kajian ini bertujuan menghasilkan standar nasional materi pengajaran pasar modal syariah dan metode pembelajaran yang tepat dalam materi pasar modal syariah di perguruan tinggi.
 6. Kajian terkait Penyusunan Materi Pasar Modal Syariah dalam Pendidikan Profesi Lanjutan (PPL) bagi Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM)
Kajian ini bertujuan sebagai bahan referensi dalam menyusun materi pasar modal syariah dalam PPL bagi ASPM dan menetapkan standar kualifikasi bagi lembaga yang akan menyelenggarakan PPL bagi ASPM.
 7. Kajian terkait Perluasan Akses bagi Masyarakat untuk Berinvestasi di Produk Pasar Modal Syariah
Kajian terkait Perluasan Akses bagi Masyarakat untuk Berinvestasi di Produk Pasar Modal Syariah bertujuan untuk menentukan strategi pengembangan pasar modal syariah melalui perluasan akses serta mengidentifikasi pihak-pihak yang berpotensi memberikan kemudahan akses bagi masyarakat untuk berinvestasi di produk pasar modal syariah.
- Syariah kepada seluruh industri asuransi dan reasuransi syariah.
2. Sosialisasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah di Malang dengan peserta dari Pendiri/Pengurus/Dewan Pengawas Dana Pensiun yang berdomisili wilayah Jawa Timur dan sekitarnya, Akademisi/Perguruan Tinggi dan Instansi/Perusahaan yang memiliki potensi untuk mendirikan Dana Pensiun Syariah.
 3. *Workshop* Penyusunan Laporan Keuangan Asuransi Syariah untuk membantu perusahaan dalam penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan peraturan perundang-undangan terutama Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 72/PJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi Dengan Prinsip Syariah, serta PSAK 101 dan PSAK 108.
 4. *Roadshow* Seminar Asuransi Syariah di Banda Aceh pada tanggal 23 Februari 2017 dan Surakarta pada tanggal 23 Maret 2017.
 5. Sosialisasi Pengembangan IKNB Syariah dengan tema Peluang dan Tantangan IKNB Syariah di Indonesia pada tanggal 13 Maret 2017 di STIE Tanjung Redeb-Berau. Sosialisasi ini bekerjasama dengan STIE Tanjung Redeb dengan peserta berjumlah 100 orang yang berasal dari kalangan mahasiswa dan akademisi di Kota Berau, Kalimantan Timur.

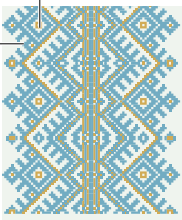
3.4.3 Pengembangan IKNB Syariah

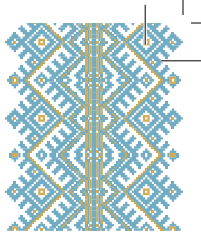
1. Sosialisasi PSAK 101 mengenai Penyajian Laporan Keuangan Syariah dan PSAK 108 mengenai Akuntansi Transaksi Asuransi





Manajemen Strategis dan Tata Kelola Organisasi





Manajemen Strategis dan Tata Kelola Organisasi

IV

4.1 MANAJEMEN STRATEGI DAN KINERJA OJK

4.1.1 Pelaksanaan Siklus Manajemen Strategi dan Kinerja

Manajemen strategi merupakan proses memformulasikan strategi, melaksanakan dan menyelaraskan alokasi sumber daya untuk mencapai sasaran dan *monitoring* atas keberhasilan pencapaian strategi. Untuk mendukung implementasi manajemen strategi, OJK memiliki Sistem Manajemen Strategi, Anggaran dan Kinerja (MSAK) yang mengintegrasikan penyusunan dan penetapan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta penilaian kinerja OJK. Siklus MSAK OJK terdiri dari empat tahap. Pada periode laporan, siklus MSAK berada pada tahap ketiga yaitu *monitoring* pelaksanaan peta strategi serta Rencana Kerja dan Anggaran. Untuk memastikan pengelolaan kinerja dilakukan dengan tata kelola yang baik, telah disusun manual penghitungan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dari masing-masing Satuan Kerja.

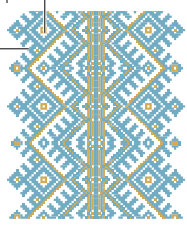
Untuk mendukung proses *monitoring* kinerja, OJK sedang melakukan integrasi Sistem

Pengelolaan Kinerja (SIMPEL) dengan Sistem Informasi Manajemen Risiko (SIMARIO). Melalui integrasi ini, diharapkan risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian IKU dapat dimitigasi dengan baik. Sebagai bentuk akuntabilitas lembaga, OJK menerbitkan Laporan Triwulan IV-2016 sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban kegiatan OJK selama periode laporan serta menerbitkan Laporan Kinerja 2016 yang menginformasikan pencapaian OJK selama 2016 dan didistribusikan pada kegiatan *Financial Executive Gathering* pada awal 2017.

Grafik IV - 1 Siklus Manajemen Strategi, Anggaran dan Kinerja (MSAK)

[sesuai PDK No.1/PDK.01/2013]





4.1.2 Pelaksanaan Sasaran Strategis OJK

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, OJK memiliki *Strategy Map* 2017 yang di dalamnya terdapat tujuh Sasaran Strategis OJK yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Terwujudnya Sektor Jasa Keuangan (SJK) yang Tangguh, Kontributif dan Inklusif
Pencapaian Sasaran Strategis ini diukur melalui indeks penetrasi SJK seperti target peningkatan kredit (Perbankan), pertumbuhan Emiten dan perusahaan publik (Pasar Modal) serta pertumbuhan premi asuransi, piutang pembiayaan, aset penjaminan dan aset dana pensiun (IKNB) serta melalui pengukuran indeks kesehatan SJK seperti rasio *Capital Adequacy Ratio* (Perbankan), Perusahaan Efek yang memenuhi persyaratan Modal Kerja Bersih Disesuaikan/MKBD (Pasar Modal), serta rasio tingkat kesehatan IKNB. Sasaran Strategis ini juga diukur melalui kenaikan Indeks Inklusi keuangan dan tingkat kepuasan *Stakeholder* terhadap kinerja OJK.
2. Mengembangkan SJK yang Kontributif
Pencapaian Sasaran Strategis ini diukur melalui tingkat kontribusi SJK pada sektor prioritas pemerintah, pengembangan *sustainable finance* dan peningkatan kualitas dan peran pelaku SJK.
3. Mengembangkan SJK yang Stabil
Pencapaian Sasaran Strategis ini diukur melalui tingkat penyelesaian Penguatan Protokol Manajemen Krisis, tindak pengawasan dalam rangka menciptakan IJK yang *resilient*, tingkat pelayanan perizinan terintegrasi, peningkatan kualitas *Surveillance* Sistem Keuangan.
4. Mengembangkan SJK yang inklusif
Pencapaian Sasaran Strategis ini diukur melalui pengembangan produk dan atau layanan keuangan dan mikro, tingkat

pelaksanaan program Manfaat Balik kepada IJK dan *Stakeholder*, serta peran OJK terhadap peningkatan perekonomian dan pembangunan daerah.

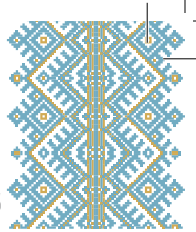
5. Mendorong Akselerasi Pertumbuhan SJK Syariah
Pencapaian Sasaran Strategis ini diukur melalui tingkat pelaksanaan program akselerasi pertumbuhan syariah dan tingkat kualitas pelaksanaan *Outreach* SJK yang terintegrasi.
6. Meningkatkan Pengaturan SJK yang Selaras dan Terintegrasi
Pencapaian Sasaran Strategis ini diukur melalui tingkat penyelesaian penerbitan peraturan yang dapat meningkatkan SJK yang kontributif, stabil dan inklusif

4.2 AUDIT INTERNAL, MANAJEMEN RISIKO, DAN PENGENDALIAN KUALITAS

4.2.1 Penguatan Pengendalian Kualitas Tata Kelola OJK

OJK berkomitmen mengimplementasikan Sistem Pengendalian Kualitas sesuai dengan ISO 9001:2015. Dalam mengimplementasikan hal tersebut ada dua tahapan yang dilakukan yakni *enhancement* kapasitas organisasi oleh internal penyedia asuransi dan eksternal penyedia asuransi (auditor eksternal ISO). Untuk menambah keyakinan yang memadai, OJK melakukan audit *surveillance* berbasis ISO 9001:2015 atas proses bisnis. Kegiatan *audit surveillance* tersebut dilakukan secara berkesinambungan dengan tujuan agar proses bisnis yang dilakukan terjaga, dapat dimonitor dan dievaluasi, serta terukur kualitasnya.

Sampai dengan triwulan I-2017 telah ditetapkan pembentukan *task force*. *Task Force* berfungsi *monitoring* dan mengevaluasi Implementasi Sistem Pengendalian Kualitas



Berbasis ISO 9001:2015. Kegiatan *monitoring* dan evaluasi dilakukan dengan pendekatan *gap* analisis. Analisis tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi titik-titik pada proses bisnis yang masih lemah pengendalian internalnya. Hasil tersebut dievaluasi secara berkala agar dapat dimitigasi dengan baik sehingga tercipta perbaikan secara berkesinambungan.

4.2.2 **Monitoring Implementasi Tindak Lanjut *Grand Design* AIMRPK**

Grand Design AIMRPK adalah model dalam rangka pengelolaan fungsi manajemen risiko, pengendalian kualitas, dan audit internal secara terstruktur dan sistematis yang bertujuan antara lain:

1. Menyelaraskan pemahaman mengenai konsepsi dan model integrasi fungsi manajemen risiko, pengendalian kualitas, dan audit internal OJK;
2. Mewujudkan koordinasi dan keselarasan antar fungsi manajemen risiko, pengendalian kualitas, dan audit internal dalam pengelolaan risiko OJK; dan
3. Menyediakan panduan implementasi untuk mewujudkan tingkat maturitas yang diharapkan.

Sampai dengan periode pelaporan, pemantauan implementasi *Grand Design* tersebut agar maturitas organisasi sesuai dengan yang direncanakan di mana capaian maturitas AIMRPK sampai dengan 2016 berada pada level *managed* dengan skor 4.

4.2.3 **Mitigasi Risiko**

OJK telah menyusun laporan realisasi mitigasi risiko triwulan I-2017 sebagai mana mandat dari Peraturan Dewan Komisiner (PDK) nomor: 24/PDK.02/2014 tentang standar Manajemen Risiko.

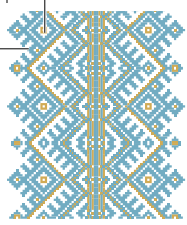
Dalam Profil Risiko OJK 2017, terdapat 17 risiko yang semuanya dimitigasi oleh satuan kerja pemilik risiko. Dalam konteks mitigasi risiko untuk *OJK-Wide*, rencana mitigasi masing-masing satuan kerja telah digeneralisasi. Selama triwulan I-2017 sebanyak 25% mitigasi risiko sudah dilaksanakan sementara 44% sedang dilaksanakan dan 31% belum dilaksanakan dikarenakan waktu pelaksanaan dijadwalkan pada periode berikutnya.

4.2.4 **Program Pengendalian Gratifikasi dan *Whistle Blowing System***

Dalam mendukung Program Pengendalian Gratifikasi (PPG), Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) OJK melakukan pengelolaan laporan gratifikasi. Kegiatan yang dilakukan antara lain menerima dan mengelola laporan gratifikasi baik berupa uang ataupun barang. Melalui pembentukan UPG OJK, diharapkan tingkat integritas dan profesionalitas Insan OJK tetap terjaga. Pada triwulan I-2017 UPG, OJK menerima dan mengelola 22 laporan gratifikasi berupa uang dan barang. Total laporan gratifikasi yang dikelola UPG OJK sejak 2015 sejumlah 234 laporan.

OJK melakukan *enhancement* terhadap proses pelaporan pengendalian gratifikasi dengan membentuk SiPeGa (Sistem Informasi Pengendalian Gratifikasi). *Enhancement* ini bertujuan mengoptimalkan fungsi SiPeGa dalam mendukung pengelolaan laporan gratifikasi. Tak hanya itu, demi menjaga kualitas pelaksanaannya OJK berinisiatif melakukan sertifikasi ISO 9001:2015 terhadap proses pengendalian gratifikasi.

Dalam rangka penguatan integritas, OJK memberikan sarana pelaporan pelanggaran dalam bentuk *Whistle Blowing System* (WBS). Konsultan WBS OJK juga telah melakukan finalisasi laporan hasil *survey* OJK WBS 2017 dan laporan *maturity assessment* serta *action plannya*.



Dukungan Kerjasama OJK dan KPK Mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

Kewajiban penyelenggara negara untuk melaporkan harta kekayaannya diatur dalam UU nomor 28 tahun 1999, UU nomor 30 tahun 2002 dan peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Berdasarkan ketentuan tersebut maka penyelenggara negara berkewajiban untuk:

1. Bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama dan sudah menjabat,
2. Melaporkan harta kekayaannya pada saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi dan pensiun,
3. Mengumumkan harta kekayaannya.

Melihat kedudukan OJK sebagaimana UU Nomor 21 tahun 2011 yang merupakan lembaga negara yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, maka OJK pun dapat dikategorikan sebagai penyelenggara negara yang mewajibkan seluruh pegawainya untuk melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) seluruh pegawainya kepada KPK.

Untuk mendukung hal di atas, telah dirancang Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk mengapresiasi insan OJK yang melakukan

pelaporan LHKPN. Tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN ditargetkan 90% dari jumlah pegawai OJK yang wajib menyampaikan LHKPN. Sampai dengan triwulan I-2017, jumlah pelaporan LHKPN telah mencapai 91,3%.

4.3 RAPAT DEWAN KOMISIONER

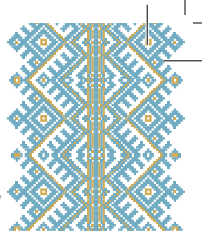
Rapat Dewan Komisiner pada triwulan I-2017 ini terselenggara sebanyak 20 kali yang membahas 54 topik dalam rangka pengambilan keputusan dan 15 materi yang bersifat laporan. Sejumlah Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (RPOJK) telah diputuskan dalam RDK pada triwulan I-2017.

Secara rutin RDK menerima laporan mengenai kondisi terkini perekonomian global dan domestik serta perkembangan industri jasa keuangan (*laporan market update*). Selain itu, RDK juga menerima laporan atas hal-hal strategis yang perlu diketahui oleh Anggota Dewan Komisiner (*laporan strategic support*).

Selain menerima laporan sebagaimana tersebut di atas, RDK juga menetapkan keputusan atas hal-hal yang bersifat strategis. Pada triwulan I-2017, sejumlah Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (RPOJK) telah diputuskan dalam RDK diantaranya adalah RPOJK tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum, RPOJK tentang Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Bagi Bank Sistemik, dan RPOJK tentang Bank Perantara yang diterbitkan oleh

Grafik IV - 2 Gambaran Topik yang Dibahas dalam Rapat Dewan Komisiner





OJK pada triwulan berikutnya. Ketiga RPOJK tersebut merupakan amanat Undang-undang nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan.

Dalam rangka memberikan pilihan produk investasi yang sesuai dengan kebutuhan investor, RDK memberikan persetujuan atas produk baru di Pasar Modal melalui penetapan RPOJK tentang Reksa Dana Target Waktu. Produk ini sendiri sudah berkembang di beberapa negara yang dikemas dalam suatu program *retirement fund*.

Selain produk di Pasar Modal, RDK juga memberikan persetujuan atas pengembangan Industri Keuangan Non Bank khususnya di industri Dana Pensiun. Dalam rangka menumbuhkembangkan penyelenggaraan program pensiun, RDK telah memutuskan RPOJK tentang Luran, Manfaat Pensiun, Dan Manfaat Lain Yang Diselenggarakan Oleh Dana Pensiun. Salah satu pembeda pada RPOJK ini dengan ketentuan sebelumnya adalah adanya Manfaat Lain yang dapat diberikan oleh Dana Pensiun kepada peserta yang aktif bekerja atau peserta pensiun, seperti dana pendidikan untuk anak, dana perumahan, dana pesangon, dan lain sebagainya.

RDK pada triwulan I-2017 juga menetapkan kebijakan OJK sebagai respon terhadap bencana alam yang terjadi di Aceh dan Kota Bima pada akhir 2016. RDK memutuskan kebijakan terhadap perlakuan kredit oleh bank bagi daerah yang terkena dampak bencana alam. Dari topik Kelembagaan, RDK juga memutuskan beberapa topik yang menjadi kewenangan RDK, misalnya hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Calon Pengurus beberapa bank besar dan pencabutan izin usaha bank.

Selain forum RDK, OJK juga menyelenggarakan forum *Board Seminar* (BS). Forum BS adalah forum tanpa pengambilan keputusan yang dihadiri oleh Anggota Dewan Komisiner yang ditujukan untuk mematangkan materi sebelum materi tersebut diputuskan dalam RDK. Pada triwulan I-2017 ini, BS diselenggarakan sebanyak

12 kali dengan jumlah topik yang dibahas sebanyak 18 topik. Sejumlah aturan-aturan yang akan dikeluarkan OJK telah dibahas pada forum BS triwulan I-2017 ini. Setelah mendapatkan masukan dari Anggota Dewan Komisiner dalam forum BS, aturan-aturan tersebut selanjutnya akan dimintakan masukan dan/atau tanggapan kepada pemangku kepentingan misalnya kalangan industri.

4.4 KOMUNIKASI

4.4.1 Komunikasi Informasi OJK

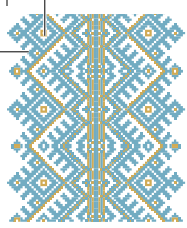
Selama periode laporan, OJK melakukan serangkaian kegiatan komunikasi yang terintegasi dan berkesinambungan melalui berbagai media, baik cetak maupun elektronik dan digital, termasuk media milik OJK antara lain *website* OJK dan media jejaring sosial seperti *Twitter*, *Facebook*, dan *Youtube*.

Statistik Pengunjung *Website* OJK

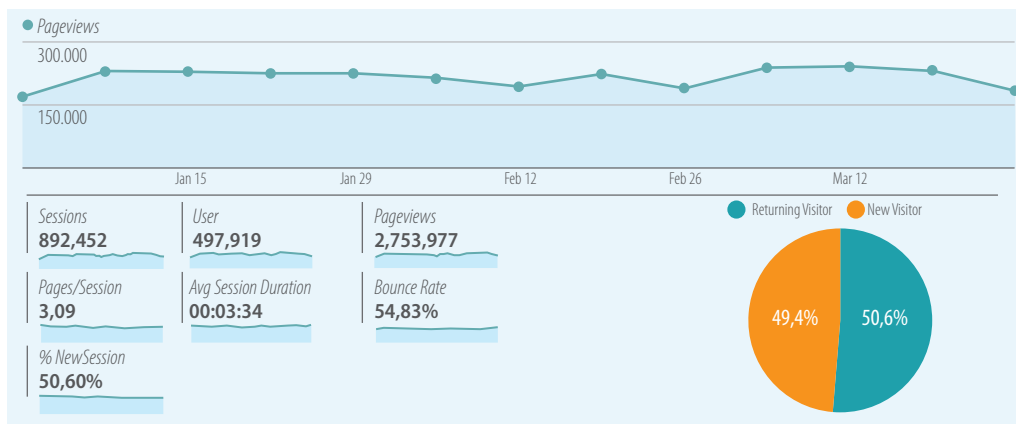
Terkait pengelolaan opini publik, OJK memiliki program analisa kuantitatif dan kualitatif untuk setiap pemberitaan OJK di media. Analisa ini dilakukan melalui *monitoring* terhadap *tone* berita mengenai OJK dan Industri Keuangan secara umum, serta berita mengenai OJK pada 25 media cetak, 30 media *online*, 11 stasiun televisi nasional, TV daerah terpilih, dan media sosial (*Facebook*, *Twitter*, *Youtube*).

Sehingga, total pemberitaan selama Januari-Maret 2017 adalah 4.926 berita dengan rincian proporsi sebesar 3.987 berita positif, 0 berita negatif, dan 939 pemberitaan netral.

Terkait dengan relasi media, selama triwulan I-2017 OJK menerbitkan 29 siaran pers. Penerbitan siaran pers bertujuan untuk mengumumkan program atau kegiatan OJK, peraturan terbaru OJK, atau isu lainnya terkait dengan pelaku Industri Jasa Keuangan yang memiliki nilai berita agar dapat dipublikasikan di media massa. Adapun siaran pers yang telah diterbitkan mencakup topik kontribusi sektor jasa keuangan terhadap perekonomian



Grafik IV - 3 Statistik Pengunjung Website OJK



Grafik IV - 4 Tone Pemberitaan Triwulan I-2017



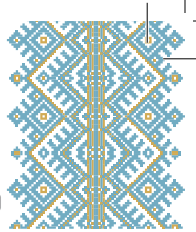
sebanyak 10 siaran pers, perbankan sebanyak lima siaran pers, pasar modal sebanyak satu siaran pers, IKNB sebanyak tiga siaran pers serta edukasi dan perlindungan konsumen sebanyak 10 siaran pers. Selain itu, OJK menyelenggarakan jumpa pers sebanyak 11 (sebelas) kali. Topik jumpa pers triwulan I-2017 mengenai kontribusi sektor jasa keuangan terhadap perekonomian sebanyak tiga siaran pers, perbankan sebanyak dua siaran pers, IKNB sebanyak tiga siaran pers serta edukasi dan perlindungan konsumen sebanyak tiga siaran pers.

Sebagai upaya untuk menjaga relasi yang baik dengan media, OJK mengadakan *media gathering* dan *focus group discussion* (FGD) sebagai sarana tatap muka dan diskusi antara

jurnalis dengan OJK. Kegiatan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk menjalin hubungan baik, namun juga berfungsi sebagai sarana *agenda setting*. Pada kegiatan tersebut, OJK dapat memberikan pendalaman materi mengenai isu-isu OJK yang perlu mendapatkan pemberitaan media di masa mendatang. Sehingga, dengan diadakannya *media gathering* dan FGD tersebut, akan terjadi kesepahaman antara media dengan OJK terkait isu yang perlu mendapatkan publisitas di masa yang akan datang. OJK juga mengadakan kegiatan pelatihan jurnalistik kepada wartawan. Adapun materi pelatihan yang diberikan khususnya mengenai ekonomi, sistem keuangan Indonesia, sistem perbankan nasional, sistem pasar modal Indonesia, sistem keuangan non bank nasional, teknik penulisan artikel dan berita ekonomi, dan fungsi serta peran OJK. Selama periode triwulan I-2017, OJK menyelenggarakan satu pelatihan wartawan, dan satu *Focus Group Discussion*.

4.4.2 Kunjungan Instansi

Sebagai salah satu upaya untuk melaksanakan program edukasi terhadap masyarakat terhadap peran dan fungsi OJK, OJK menerima kunjungan masyarakat (instansi, lembaga pendidikan, dan sebagainya). Permintaan kunjungan dilakukan dengan mengirimkan surat permohonan kunjungan beserta waktu dan topik yang diinginkan ke email visitojk@ojk.go.id. Hingga periode triwulan I-2017 berakhir, OJK menerima



12 kunjungan instansi dengan total 855 peserta.

4.4.3 OJK TV

OJK TV merupakan media informasi baru OJK yang mendokumentasikan berbagai kebijakan, program, dan kegiatan OJK yang dikemas dalam bentuk video dokumentasi dan peliputan berita (*news video*) yang didiseminasikan melalui kanal *Youtube* Jasa Keuangan.

Berdasarkan data empiris, kebutuhan dokumentasi dan peliputan kegiatan di OJK sangat tinggi seiring dengan banyaknya kegiatan/event OJK yang melibatkan pihak eksternal khususnya yang dihadiri oleh Anggota Dewan Komisioner. Hal tersebut dirasa perlu didokumentasikan secara visual dan dikomunikasikan kepada *stakeholder*.

Sejak OJK TV dibentuk pada Maret 2016, video pada Kanal *Youtube* Jasa Keuangan telah disaksikan oleh ± 105.000 *viewers*.

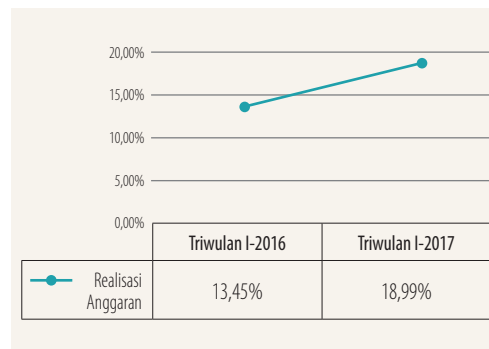
Terbentuknya OJK TV dapat meningkatkan sarana media komunikasi mengenai program dan kebijakan strategis OJK kepada masyarakat maupun internal OJK, serta untuk mendokumentasikan setiap kegiatan penting OJK-wide.

4.5 KEUANGAN

4.5.1 Realisasi Anggaran dan Penggunaan

Sebagaimana 2016, Anggaran OJK 2017 sebesar Rp4.371,49 milyar seluruhnya dibiayai dari penerimaan pungutan OJK. Sampai akhir triwulan I-2017, realisasi anggaran OJK sebesar Rp829,96 milyar (18,99%). Realisasi tersebut mengalami peningkatan dibandingkan dengan triwulan I-2016 yang hanya sebesar 13,45%. Peningkatan realisasi tersebut merupakan indikator bahwa OJK lebih optimal dalam menyusun anggaran dan melaksanakan program kerja yang telah disusun.

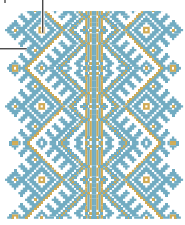
Grafik IV - 5 Realisasi Anggaran



4.5.2 Penyempurnaan Pengelolaan Keuangan

Dalam rangka meningkatkan pengelolaan keuangan secara akuntabel, OJK terus melakukan peningkatan pelayanan kepada *stakeholder* melalui penyempurnaan peraturan dan sistem aplikasi keuangan. Penyempurnaan Sistem aplikasi Keuangan sampai akhir triwulan I-2017 meliputi persiapan *User Acceptance Test* (UAT) dan Inisiasi data Sistem Informasi Akuntansi OJK (SI-AUTO), Penyesuaian *User Requirement* Dukungan penyusunan Kerangka Kerja Acuan (KAK) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) serta Sistem Akuntansi Keuangan Terintegrasi (SAKTI OJK). Manfaat Pembangunan Aplikasi SI-AUTO dan SAKTI akan mendukung pengelolaan dan pengolahan data keuangan, diantaranya:

- Memenuhi kebutuhan sistem keuangan yang terintegrasi sehingga dapat meminimalisir inkonsistensi/perbedaan data dan pencatatan manual.
- Mendukung kesesuaian proses bisnis sistem yang sudah memenuhi standar *best practice* untuk mengakomodasi kebijakan pengelolaan keuangan OJK dan keandalan data transaksi untuk penyusunan Laporan Keuangan OJK.
- Memenuhi kebutuhan pemrosesan data transaksi keuangan secara *real-time*.
- Pembangunan sistem:



- i. Pelaksanaan kegiatan tutup buku secara lebih efisien dan efektif karena proses terhadap transaksi yang terjadi secara *real-time* dan otomatis;
- ii. Keseragaman cara perekaman data sehingga memberikan jaminan akurasi data dan proses secara menyeluruh.

Untuk meningkatkan kualitas penganggaran, telah dilakukan persiapan Implementasi *Performance Based Budgeting* (PBB) dengan menyelenggarakan *Call for Papers "Performance Based Budgeting Award 2017"*. Diharapkan hasil dari acara ini akan memberikan landasan teori dan *best practice* bagi implementasi PBB di OJK. Selain itu, diselesaikan pula perubahan ketentuan di bidang pelaksanaan anggaran, kajian tentang efisiensi anggaran di lingkungan OJK dan bimbingan teknis pengelolaan keuangan kepada satuan kerja.

4.6 SISTEM INFORMASI

OJK sebagai lembaga pengawas industri jasa keuangan terus mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum. Dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tujuan tersebut, OJK dari sisi *supporting* khususnya dalam pengelolaan dan penyediaan sistem informasi antara lain mengembangkan hal-hal sebagai berikut:

4.6.1 Penguatan Sistem Informasi untuk Mendukung Pelaksanaan Tugas Pokok

1. Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)

Untuk mendukung pelayanan kepada Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dan publik dalam memantau informasi kredit yang dimiliki debitur serta untuk mendukung LJK dalam mengendalikan resiko kredit yang diberikan oleh debitur maka OJK melakukan pembangunan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Sistem ini terdiri dari *Client Application* dan *Web Application*. SLIK siap *launching* di triwulan II-2017.

2. Sistem Perizinan dan Registrasi Terintegrasi (SPRINT)

Pengembangan SPRINT merupakan aplikasi perizinan berbasis *web* secara *end-to-end* dan adaptif, di mana LJK dapat melakukan registrasi perizinan dan pemantauan proses perizinan di OJK secara cepat dan transparan. Aplikasi ini dikembangkan untuk meningkatkan transparansi, efisiensi waktu proses perizinan dan mengurangi frekuensi korespondensi serta memudahkan pihak eksternal dalam memantau proses permohonan perizinan.

3. Sistem Informasi Pengawasan Terintegrasi (SIPT)

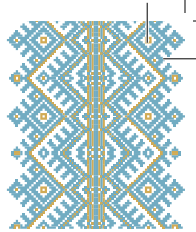
Pengembangan SIPT bertujuan untuk membantu pengawas terintegrasi dalam melakukan analisa, menentukan keputusan terkait konglomerasi keuangan, dan peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan serta standarisasi pelaksanaan tugas pengawasan.

4. Sistem Aplikasi Pengawasan dan Monitoring

OJK juga mengembangkan sistem aplikasi untuk pengawasan dan *monitoring* antara lain (a) Pengembangan Sistem Informasi *Risk Based Supervision* (SIRIBAS), (b) Pengembangan Sistem Informasi Penetapan Tarif Premi Asuransi (SIPETIR), (c) Pengembangan Sistem *Monitoring* Data Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi (SIKARIN), (d) Pengembangan Sistem Informasi Pasar Modal Terpadu (SIPM), (e) Pengembangan Sistem Informasi Perbankan, dan (f) Pengembangan Aplikasi *Banking Surveillance Dashboard*.

4.6.2 Penguatan Sistem Informasi untuk Meningkatkan Kapasitas Organisasi

Selain mengembangkan aplikasi yang digunakan untuk mendukung fungsi pengawasan dan *monitoring*, OJK juga mengembangkan aplikasi untuk mendukung kapasitas organisasi antara



lain (a) *Enhancement* Sistem Informasi Sumber Daya Manusia (SIMFOSIA), (b) Sistem Informasi Pembuatan Peraturan Perundang-undangan di OJK, (c) *E-Library* Laporan Hasil Riset OJK (RISET), (d) Pengembangan Aplikasi Sistem Pengelolaan Kinerja (SIMPEL), (e) Sistem Informasi Pengelolaan Pekerjaan (SIPEKA) DKEU-OJK, (f) Pengembangan *E-Procurement* OJK, (g) Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Terintegrasi (SAKTI).

4.7 LOGISTIK

4.7.1 Penyiapan Gedung Kantor Pusat

Pada triwulan I-2017, OJK melakukan persiapan perancangan *layout* ruang kerja untuk masing-masing Satuan Kerja kantor pusat. Seluruh Satuan Kerja di lingkungan Kantor Pusat diharapkan dapat menempati Kantor Pusat OJK Terpadu secara bertahap hingga triwulan I-2018.

4.7.2 Penyiapan Gedung Kantor Regional/OJK

Adapun Kantor Regional dan Kantor OJK yang menempati gedung kantor sendiri baik secara sewa maupun pinjam pakai aset milik pemerintah provinsi hingga periode laporan adalah sebanyak 24 Kantor, yakni:

1. Kantor Regional 2 Jawa Barat (Bandung),
2. Kantor Regional 3 Jawa Tengah & D.I.Y (Semarang),
3. Kantor OJK Tasikmalaya (Tasikmalaya),
4. Kantor OJK Prov. D.I.Y (Yogyakarta),
5. Kantor OJK Solo (Solo),
6. Kantor OJK Tegal (Tegal),
7. Kantor OJK Purwokerto (Purwokerto),
8. Kantor OJK Jember (Jember),
9. Kantor OJK Kediri (Kediri),
10. Kantor OJK Prov. Kepulauan Riau (Batam),
11. Kantor OJK Prov. N.A.D (Banda Aceh),
12. Kantor Regional 6 Sulawesi, Maluku, dan Papua (Makassar),
13. Kantor OJK Prov. Sulawesi Tenggara (Kendari);
14. Kantor OJK Prov. Sulawesi Tengah (Palu),

15. Kantor OJK Prov. Maluku (Ambon),
16. Kantor OJK Prov. Papua (Jayapura),
17. Kantor Regional 7 Sumatera Bagian Selatan (Palembang),
18. Kantor OJK Provinsi Lampung (Bandar Lampung),
19. Kantor OJK Prov. Jambi (Jambi),
20. Kantor OJK Prov. Bengkulu (Bengkulu),
21. Kantor Regional 8 Bali & Nusa Tenggara (Denpasar),
22. Kantor OJK Prov. Nusa Tenggara Timur (Kupang),
23. Kantor Regional 9 Kalimantan (Banjarmasin),
24. Kantor OJK Provinsi Kalimantan Tengah (Palangkaraya).

Beberapa kantor daerah yang disewa dan telah dilakukan kesepakatan pinjam pakai pada akhir 2016 akan segera dilakukan penataan pada triwulan II-2017.

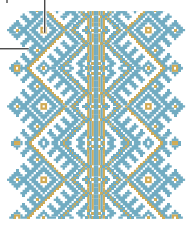
4.7.3 Pengembangan Sistem Logistik dan Pengaturan

OJK memiliki Ketentuan Pengelolaan Barang Milik OJK dan Barang Milik Pihak Lainnya setelah ditetapkannya PDK dimaksud dalam periode laporan. Selain itu, dalam rangka mendukung pelaksanaan pengelolaan dan penatausahaan Barang Milik OJK dan Barang Milik Pihak Lainnya, aplikasi Sistem Penatausahaan Aset (SISPUAS) yang telah disempurnakan telah siap digunakan dalam periode laporan dan juga telah mendukung integrasi dengan aplikasi SI-AUTO. selain itu, OJK juga melakukan penyempurnaan terhadap ketentuan pengadaan agar proses pengadaan di OJK semakin selaras dengan asas *good governance*.

4.8 SUMBER DAYA MANUSIA DAN TATA KELOLA ORGANISASI

4.8.1 Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Pada triwulan I-2017, OJK melakukan program pengelolaan pegawai sebagai berikut:



1. Penilaian Kinerja Pegawai Tahun 2016

Sesuai PDK tentang Sistem Pemetaan Pegawai Otoritas Jasa Keuangan dan SEDK tentang Perubahan Atas Surat Edaran Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/SEDK.02/2013 tentang Penilaian Kinerja Pegawai, proses penilaian kinerja individual atas kinerja periode 2016 telah selesai dilaksanakan dengan baik.

2. Promosi dan Mutasi Pegawai

Pemenuhan pegawai OJK dilakukan melalui proses internal dan eksternal. Pada triwulan I-2017 telah dilakukan pemenuhan baik promosi maupun mutasi untuk level Direktur, Kepala Departemen dan Deputi Komisiner. Promosi dimaksud, diharapkan pengisian lowongan jabatan dapat terpenuhi sehingga pekerjaan-pekerjaan di Satuan Kerja OJK dapat berlangsung lebih baik.

4.8.2 Pengembangan Organisasi

Sampai periode pelaporan terdapat beberapa perubahan mendasar dalam struktur organisasi OJK, antara lain:

1. Penataan Organisasi Fungsi Administrasi
2. Penataan Organisasi Fungsi Pengadaan Barang Dan Jasa Dan Fungsi Kelogistikan Lainnya
3. Pembentukan Grup Penelitian, Pengaturan dan Pengembangan Pengawasan Terintegrasi

Ketiga Penataan Organisasi tersebut telah ditetapkan Peraturan Dewan Komisiner No. 10/PDK.02/2017 tentang Organisasi OJK.

A. Penataan Organisasi Fungsi Administrasi

Mengacu pada Peraturan Dewan Komisiner OJK Nomor 12/PDK.02/2015 tentang Organisasi OJK sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dewan Komisiner OJK Nomor 2/PDK.02/2016, terdapat beberapa perbedaan pengelolaan fungsi administrasi yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja dan

Unit Kerja yang dijadikan latar belakang penataan fungsi administrasi. Penataan fungsi administrasi bertujuan untuk

1. Standardisasi dan kesetaraan bentuk organisasi, fungsi, tugas pokok, dan beban kerja unit kerja fungsi administrasi
2. Meningkatkan dukungan administrasi dalam rangka kelancaran pelaksanaan fungsi dan tugas pokok unit kerja teknis dalam satu Satuan Kerja.

B. Penataan Organisasi Fungsi Pengadaan Barang dan Jasa dan Fungsi Kelogistikan Lainnya

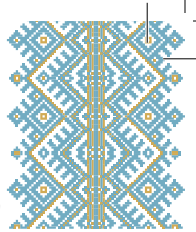
Tujuan penataan organisasi fungsi pengadaan barang dan jasa dan fungsi kelogistikan, antara lain:

1. Menciptakan proses dan manajemen kelogistikan yang berkualitas tinggi dengan tetap menjaga prinsip *governance*.
2. Meningkatkan kualitas pengadaan barang dan jasa
3. Meningkatkan penatausahaan aset OJK maupun aset lainnya yang dipakai oleh OJK secara optimal.

C. Pembentukan Grup Penelitian, Pengaturan dan Pengembangan Pengawasan Terintegrasi

Penataan organisasi ini merupakan tindak lanjut dari Keputusan Rapat Dewan Komisiner (KRDK) Nomor 27/KRDK/2016 mengenai pembentukan Satuan Kerja Pengawasan Terintegrasi menggunakan prinsip pengembangan secara bertahap sebagai berikut:

1. Pada tahap awal, struktur organisasi terdiri dari fungsi pengawasan, kelompok spesialis, serta fungsi yang mengelola informasi, administrasi, dan *database* Pengawasan Terintegrasi.
2. Pada tahap kedua, fungsi penelitian, pengaturan, pengembangan, dan pengendalian kualitas pengawasan terintegrasi akan dialihkan ke Deputi Komisiner Pengawasan Terintegrasi.



4.8.3 Pengembangan Kebijakan Sumber Daya Manusia

Sepanjang triwulan I-2017 diterbitkan 24 kebijakan SDM OJK, baik dalam bentuk Peraturan Dewan Komisioner (PDK), Surat Edaran Dewan Komisioner (SEDK), dan Keputusan Dewan Komisioner (KDK), yang mengatur antara lain mengenai:

1. Tunjangan Fasilitas dan Tunjangan Operasional Pegawai dan ADK, yang meliputi:
 - a. Tunjangan Perumahan Hari Tua (TPHT), OJK memberikan TPHT kepada ADK/Pegawai sesuai dengan masa jabatan/level jabatan dan masa dinas di OJK. TPHT dapat diberikan pada saat ADK/Pegawai masih aktif bekerja dengan tujuan agar ADK/Pegawai beserta keluarganya dapat memiliki rumah setelah ADK berhenti bekerja dari OJK.
 - b. Tunjangan Kesehatan Hari Tua (TKHT), OJK memberikan Tunjangan Kesehatan Hari Tua (TKHT) dalam bentuk fasilitas kesehatan.
2. Sistem Penilaian Kinerja, Distribusi Penilaian Kinerja dan Faktor Pengali Imbalan Prestasi Individu bagi Pegawai
Implementasi distribusi penilaian kinerja berdasarkan capaian kinerja Satuan Kerja (Satker) di mana posisi Satker dalam kelompok *tier* capaian kinerja dapat mempengaruhi penilaian kinerja individu
3. Sistem Remunerasi ADK dan Pegawai
OJK melakukan penyesuaian struktur penghasilan dari yang semula menggunakan sistem *step based salary* yang pergerakannya dipengaruhi oleh masa dinas pegawai, menjadi *pay band* yang pergerakannya dipengaruhi oleh kinerja individu pegawai (*merit increase*).

4.9 OJK INSTITUTE

Pada 2016, OJK *Institute* mengalami perluasan fungsi organisasi. OJK *Institute* memiliki fungsi

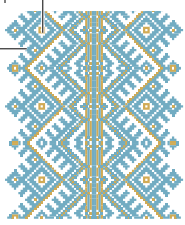
perencanaan dan pengembangan OJK *Institute* yang meliputi *Research Centre*, *Assessment Center*, *Financial Library* dan Museum OJK, serta pengelolaan *Learning Center*. OJK *Institute*. Pada 2017 OJK direncanakan akan mendirikan perpustakaan dan galeri sebagai pusat informasi, pendidikan dan pembelajaran industri keuangan Indonesia. Program pengembangan SDM difokuskan pada penguatan/pembentukan karakter dan disusun dalam mencapai sasaran program transformasi OJK 2014 – 2017, dengan tetap mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan anggaran dalam pelaksanaannya. Adapun program pengembangan SDM yang akan dilaksanakan meliputi:

- (1) Program Pengembangan Kepemimpinan;
- (2) Program Pengembangan Kompetensi;
- (3) Program Pendidikan Formal;
- (4) Program Pengenalan untuk Calon Pegawai;
- (5) Program Internalisasi Kultur;
- (6) Program Bimbingan; dan
- (7) Program Penugasan Pegawai.

Selain itu, OJK *Institute* juga melaksanakan kegiatan asesmen kepemimpinan, manfaat balik (*recycling program*) dalam bentuk *capacity building*, serta kaji ulang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia untuk sektor jasa keuangan. OJK *Institute* juga telah membuka kesempatan kepada masyarakat dalam hal ini pelajar dan mahasiswa, untuk belajar bekerja di OJK melalui Praktek Kerja Lapangan dan memberikan kesempatan kepada mahasiswa S1, S2 dan S3 untuk melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi, tesis dan disertasi. Selama triwulan I-2017, kegiatan yang dilaksanakan OJK *Institute* sebagai berikut:

4.9.1 Program Pengembangan Kompetensi

Program Pengembangan Kompetensi (PPK) pegawai bertujuan meningkatkan kompetensi teknis dan perilaku SDM untuk menunjang pelaksanaan tugas pada jabatannya dan/ atau mengembangkan karir. Berdasarkan kebutuhannya PPK dapat dibagi menjadi empat



kategori, yaitu; Program Sertifikasi Pengawas Sektor Jasa Keuangan, PPK *In-House* Dalam Negeri, PPK Non *In-House* Dalam Negeri, dan PPK Non *In-House* Luar Negeri.

Program Pengembangan Kompetensi pegawai baik untuk kompetensi teknis (*hard skill*) maupun perilaku (*soft skill*), berdasarkan kebutuhannya dapat dikategorikan sebagai berikut:

1) Program Sertifikasi Pengawas Sektor Jasa Keuangan (SJK)

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pegawai OJK khususnya di bidang pengawasan Sektor Jasa Keuangan (SJK). Program Sertifikasi Pengawas SJK dibagi dalam tiga level, yaitu Level I, Level II, dan Level III. Selama triwulan I-2017, telah diselenggarakan Program Sertifikasi Pengawas SJK untuk level I sebanyak dua tahap dengan total peserta 73 orang.

2) PPK Non *In-House* Luar Negeri

PPK Non *In-House* Luar Negeri dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, dengan mempertimbangkan prinsip efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan terkait biaya, kualitas materi dan kualitas penyelenggara pelatihan. Sepanjang triwulan I-2017 tercatat 14 pegawai melaksanakan pengembangan di luar negeri, dengan rincian 12 pegawai untuk pengembangan kompetensi teknis (*hard skill*) dan dua pegawai mengikuti pengembangan kompetensi kepemimpinan (*leadership*).

Topik pengembangan kompetensi teknis yang diikuti antara lain *Regional Seminar on Liquidity Risk Management* dan *The Future of Digital Banking: Asia Pacific 2017*, yang diselenggarakan oleh Financial Services Agency (FSA) Government of Japan, serta Asian Development Bank (ADB) dan Hong Kong Monetary Authority (HKMA)

3) PPK Non *In House* Dalam Negeri

PPK Non *In House* Dalam Negeri diikuti 70 pegawai yang terdiri dari 54 pegawai melaksanakan program pengembangan kompetensi teknis, dan 16 pegawai untuk

program pengembangan kompetensi perilaku. Adapun beberapa topik pelatihan yang diikuti antara lain APEC FRTI : *Regional Seminar on Crisis Management*, dan PSAK Terkini Sesuai Program Konvergensi IFRS, *Training Disruption – Reformulating Strategy in the Era of Disruption*, yang diselenggarakan Asian Development Bank (ADB) dan IAI.

4) PPK *In-House* Dalam Negeri

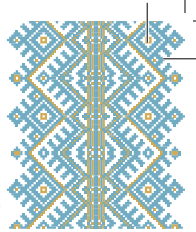
PPK *In-House* Dalam Negeri difokuskan pada peningkatan kompetensi teknis. OJK *Institute* telah melaksanakan empat IHT dengan jumlah peserta secara keseluruhan mencapai 129 pegawai.

4.9.2 Program Pendidikan Formal

Program Pendidikan Formal merupakan bentuk pengembangan SDM pada jenjang pendidikan formal yang diberikan kepada pegawai OJK potensial yang telah memenuhi kriteria, baik untuk jenjang pendidikan Strata-2 maupun Strata-3. Pada triwulan I-2017 tercatat dua orang pegawai untuk skim-2 (beasiswa dari pihak lain dengan *top up* fasilitas dari OJK), yaitu atas beasiswa *Australia Awards Scholarship* (AAS) dan beasiswa *KDI School of Public Policy and Management*, dua orang pegawai untuk skim-1 (beasiswa penuh dari OJK) pada Program Magister Hukum, Universitas Indonesia.

4.9.3 Program Program Pengenalan Calon Pegawai

Dalam rangka membangun kader dan cikal bakal pemimpin di masa depan, secara berkala OJK merekrut calon pegawai baru. Para calon pegawai mendapatkan pendidikan pembekalan melalui program pendidikan yang didesain khusus untuk membentuk kader pimpinan OJK yang kompeten dengan kemampuan teknis (*hard skill*) yang memadai serta karakter (*soft skill*) yang terpuji sesuai nilai-nilai strategis OJK. Program Pendidikan Calon Pejabat Otoritas Jasa Keuangan (PCP-OJK) Angkatan III untuk level setingkat Kepala SubBagian yang dilaksanakan sejak 2016 dengan durasi enam bulan dan jumlah peserta sebanyak 154 orang



4.9.4 Program Penugasan

Program penugasan merupakan program pengembangan SDM yang bertujuan memberikan kesempatan peningkatan pengalaman, kompetensi teknis dan kompetensi perilaku pada pegawai melalui pemberian tanggung jawab pelaksanaan tugas tertentu atau penempatan posisi tertentu pada internal OJK dan institusi lain baik dalam maupun luar negeri termasuk menjadi pembicara/narasumber dalam seminar/pelatihan/*workshop* yang diselenggarakan oleh institusi lain. Untuk pelaksanaan program penugasan selama triwulan I-2017, OJK *Institute* menugaskan satu pegawai untuk mengikuti program *Secondment/Attachment* di APRA serta menugaskan satu pegawai menjadi narasumber pada pelatihan Pengawasan Makroprudensial, SP dan Pasar Uang Level Lanjut di BI *Institute*.

4.9.5 Program Pelatihan Persiapan Masa Purnabakti

PPK persiapan masa purnabakti diberikan untuk meningkatkan kemandirian Pegawai dalam menghadapi masa purnabakti. Pelaksanaan Pelatihan Persiapan Masa Purnabakti telah dilaksanakan dan diikuti oleh 34 orang peserta.

4.9.6 Program Peningkatan Kompetensi SDM Sektor Jasa Keuangan

Program ini bertujuan meningkatkan kompetensi dari pelaku Industri SJK sehingga SDM SJK semakin profesional dan memberikan pemahaman kepada SJK mengenai tugas dan fungsi OJK sebagai salah satu bentuk Program Manfaat Balik yang diberikan OJK. Program dikemas dalam bentuk pelatihan, *workshop*, sertifikasi dan *Training of Trainers*. Dalam rangka persiapan pelaksanaan program ini, OJK *Institute* melakukan pembahasan dalam rangka penyusunan kurikulum dan silabus Program Pengembangan SDM-SJK 2017. Selama triwulan I-2017, telah dilaksanakan empat *workshop* dengan tema "*Good Corporate Governance* bagi

Lembaga Pembiayaan dan Modal Ventura", "Pendalaman Aspek Syariah pada Penerbitan Sukuk dan Reksadana Syariah", "Kegiatan Regulator Mengajar", serta "Manajemen Permodalan dan Likuiditas bagi Konglomerasi Keuangan" dengan jumlah peserta sebanyak 389 peserta.

4.9.7 Program Asesmen

OJK melakukan asesmen untuk membangun profil pegawai yang akurat mengenai kompetensi dan potensi pegawai yang hasilnya dapat digunakan untuk kepentingan pemetaan dan pengembangan pegawai. Pada triwulan I-2017 telah dilakukan asesmen kepemimpinan pejabat OJK untuk setingkat Direktur sebanyak 33 pejabat dan pejabat setingkat Deputi Direktur sebanyak 30 pejabat.

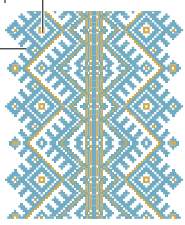
4.9.8 Program Kaji Ulang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)

OJK sebagai instansi teknis di bidang sektor jasa keuangan perlu melakukan kaji ulang dan penyusunan SKKNI agar dapat memelihara validitas dan reliabilitas SKKNI yang telah diterapkan sesuai dengan perkembangan kebutuhan, persyaratan pekerjaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku yang terkait dengan sektor jasa keuangan.

Pada triwulan I-2017, program kaji ulang SKKNI Sektor Perbankan yang telah selesai dilaksanakan hingga Konvensi Nasional adalah Bidang Audit Intern Bank.

4.9.9 Praktek Kerja Lapangan dan Penelitian di OJK

Sebagai salah satu bentuk manfaat balik kepada masyarakat/pelajar/mahasiswa dalam rangka memberikan kesempatan magang/penelitian di OJK, selama triwulan I-2017, OJK *Institute* memberikan kesempatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) kepada 114 pelajar/mahasiswa



dan telah membantu mahasiswa yang melakukan penelitian di Satuan Kerja terkait untuk 61 penelitian skripsi/tesis/disertasi.

4.10 MANAJEMEN PERUBAHAN

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi OJK serta *Destination Statement* 2017, OJK menyelesaikan sejumlah program dan melaksanakan kegiatan terkait manajemen perubahan dan budaya organisasi selama 2017. Sesuai *Roadmap* dan *Action Plan* Program Transformasi Manajemen Perubahan 2014-2017, seluruh kegiatan difokuskan dalam rangka memenuhi tema "Bangga menjadi Insan OJK", yaitu menjadikan Insan OJK sebagai *Brand Ambassador* OJK.

4.10.1 Program Budaya

Pada periode pelaporan, OJK menyelenggarakan beberapa kegiatan lintas sektoral dalam rangka mempercepat proses internalisasi kultur sebagai identitas baru yang dirumuskan ke dalam Nilai-Nilai Strategis OJK yaitu, Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Inklusif dan Visioner atau disingkat INPRESIV. Pelaksanaan kegiatan tersebut merupakan bagian integral yang membantu organisasi fokus pada pencapaian strategi melalui perubahan sistem, pola pikir dan perilaku pegawai yang mengacu pada nilai-nilai strategis OJK. Secara garis besar, pengelolaan budaya kerja OJK mencakup tiga kategori yaitu Program, *Monitoring* dan Media Kampanye.

OJK menetapkan tiga program budaya kerja yaitu Program OJK Melayani, Program OJK Peduli, dan Program OJK Inovatif. Program budaya tersebut dirancang untuk mendukung *roadmap* OJKway 2017 yaitu menjadikan insan OJK sebagai *brand ambassador* yang bangga terhadap institusinya. Tujuan program OJK Melayani adalah membangun perilaku cepat tanggap dan menerapkan pelayanan prima kepada *stakeholders*. Program OJK Peduli dicanangkan untuk meningkatkan kepedulian insan OJK terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar melalui kegiatan sosial sehingga menumbuhkan rasa bangga

terhadap institusi melalui berbagi. Program OJK Inovatif mendorong insan OJK untuk membuat terobosan baru, perbaikan proses kerja dan mutu produk satker sehingga menumbuhkan rasa bangga karena dapat memberikan pelayanan prima kepada *stakeholder* dan berkontribusi lebih dengan cara menciptakan inovasi baru. Kegiatan program budaya dan perubahan yang telah berhasil dijalankan selama triwulan I-2017 adalah:

1. *Change Partner Forum* 2017

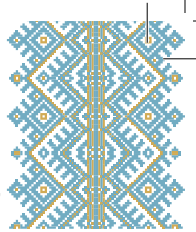
Kegiatan *Change Partner Forum (CPF)* merupakan forum komunikasi transformasi yang melibatkan para *Change Partners* dari seluruh satuan kerja OJK. CPF bertujuan mensosialisasikan program budaya kerja 2017 yaitu OJK Melayani, OJK Peduli dan OJK Inovatif. Pada kegiatan ini, para *Change Partner* dibekali pemahaman mengenai pelayanan, kepedulian dan inovasi dari narasumber yang telah menerapkan hal tersebut sehingga nantinya dapat menjalankan program budaya kerja di satuan kerja masing-masing dengan baik.

2. *Change Agent Forum* 2017

Kegiatan dimaksud merupakan wadah *sharing knowledge* dan kegiatan pembekalan bagi para *Change Agent* dalam merancang program, *monitoring* pelaksanaan program dan mengkampanyekan program budaya kerja 2017, yaitu OJK Melayani, OJK Peduli dan OJK Inovatif, secara efektif ke seluruh Insan OJK di Satuan Kerja. Kegiatan tersebut diikuti oleh 68 perwakilan *Change Agent* dari seluruh satuan kerja pusat dan daerah.

3. *Change Leader Forum* 2017

OJK juga menyelenggarakan *Change Leader Forum* yang diikuti oleh seluruh *Change Leader* dari Kantor Pusat maupun Kantor Regional dan KOJK. Forum tersebut ditujukan untuk memberikan pembekalan strategis bagi para Direktur sebagai pimpinan unit kerja dalam memimpin pelaksanaan dan *monitoring* pencapaian program-program transformasi dan internalisasi nilai-nilai strategis OJK.



4. **Benchmarking Program Perubahan**

OJK melakukan *benchmarking* ke institusi yang memiliki kesamaan latar belakang guna menggali pengalaman dan pengetahuan terkait faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan pencapaian implementasi program perubahan. Selama triwulan I-2017, dilakukan *benchmarking* program perubahan kepada BUMN bidang Perbankan dan Asuransi.

5. **Indonesia Change Management Forum 2017**

Indonesia Change Management Forum (ICMF) adalah forum komunikasi antar-fungsi *change management* berbagai institusi di Indonesia yang diprakarsai oleh OJK pada 2016. Sampai dengan triwulan I-2017 telah dikukuhkan kepengurusan ICMF dan dilanjutkan dengan forum bertajuk "*Sustainability in a Disruptive Environment*" yang membahas mengenai era digital yang semakin cepat mendisrupsi dan mengubah *playing field* sehingga diperlukan organisasi yang dapat mengabsorpsi perubahan untuk menjamin relevansi organisasi untuk selalu mengikuti perkembangan.

4.10.2 **Monitoring Program Budaya**

OJK secara rutin mengukur tingkat keberhasilan dan memantau *progress* implementasi program-program perubahan dan budaya yang telah dilaksanakan, diantaranya yaitu:

1. **Monitoring Program Budaya 2017**

OJK memberikan kesempatan kepada masing-masing Satuan Kerja untuk melakukan penilaian pelaksanaan program budaya melalui metode *self-assessment*. Penilaian dan pengumpulan bukti-bukti tersebut dilakukan secara *online* melalui aplikasi *dashboard monitoring system* (*ojkway.com*) dan dapat diakses oleh seluruh Satuan Kerja. Melalui aplikasi ini, setiap *Change Partner* melaporkan hasil implementasi dan kegiatan program budaya yang telah dilakukan sepanjang triwulan

tersebut dengan melampirkan bukti-bukti pendukungnya.

2. **Penilaian Indeks Kinerja Utama Budaya OJK**

Indeks Kinerja Utama Budaya (IKU) merupakan nilai implementasi program budaya yang dilakukan oleh masing-masing satuan kerja. Pada 2017, target IKU Budaya yang harus dicapai oleh masing-masing satuan kerja adalah 4,75 dari skala 6. Berdasarkan hasil monitoring program budaya yang telah dilakukan konsultan eksternal, nilai rata-rata IKU Budaya OJK-wide pada triwulan I 2017 sudah mencapai 5,6 melampaui target IKU Budaya yang telah ditetapkan.

3. **On-Site Monitoring, Cross monitoring, dan Konsultasi**

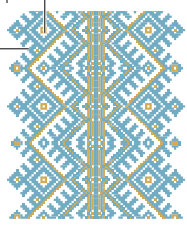
Bekerja sama dengan lembaga eksternal, OJK melakukan kunjungan langsung (*on-site monitoring*) ke seluruh Satuan Kerja. Pelaksanaan *on-site monitoring* ini merupakan bagian yang paling krusial untuk mengetahui validitas data laporan *self assessment* yang disampaikan Satuan Kerja terkait pelaksanaan program budaya. Pada 2017 *on-site monitoring* selain memvalidasi pelaksanaan program budaya, satuan kerja *strategic support* juga dilibatkan untuk memberikan *update* mengenai kinerja satker terkait, serta melihat kebutuhan dan isu-isu strategis yang dihadapi oleh satker Kantor Pusat maupun di daerah.

4.10.3 **Media Komunikasi Budaya dan Perubahan**

Selama periode laporan, pengembangan dan penyempurnaan media kampanye yang telah dilakukan antara lain:

1. **Penerbitan Majalah Integrasi**

Majalah Integrasi merupakan media komunikasi internal OJK yang diterbitkan untuk mengkomunikasikan kegiatan-kegiatan terkait program perubahan dan budaya serta pencapaian-pencapaian yang telah diraih OJK dalam periode penerbitan. Selama triwulan I-2017, OJK telah



menerbitkan tiga edisi Majalah Integrasi dengan tema “Bangga menjadi Insan OJK”, “OJK yang Melayani”, dan “OJK yang Peduli”.

2. *Minisite dan Aplikasi Mobile OJKWay*

Website OJKWay (<http://ojkway.ojk.go.id>) dikembangkan dengan tujuan memberikan *platform* kepada Insan OJK untuk berinteraksi dengan sesama pegawai, berkomunikasi dengan Dewan Komisioner, bertransaksi jual-beli dengan pegawai, sharing kegiatan budaya, dan membaca berita dan majalah Integrasi secara digital. *Website* OJKWay telah memiliki 1167 pengguna per Maret 2017. Aplikasi OJKWay berbasis *mobile* dengan *platform* Android telah selesai dikembangkan dan sudah dapat diunduh melalui *Google Play* dengan total unduh kurang lebih 600, sementara untuk yang *platform* iOS sudah dapat diunduh dengan total unduh kurang lebih 200.

3. Pesan Ketua DK dan Pesan ADK

OJK melakukan penyebaran Pesan Ketua Dewan Komisioner dan Pesan ADK melalui *e-mail blast* ke seluruh Insan OJK. Pada 2017,

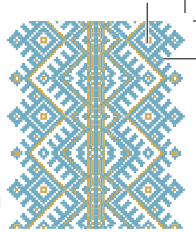
telah dilakukan dua kali penyebaran Pesan Ketua Dewan Komisioner dengan tema “Menjaga Momentum, Meraih Prestasi” pada bulan Januari, dan “Merasa Bangga Menjadi Insan OJK” pada bulan Februari.

4. Video OJKway 2016

Pada triwulan I-2017, OJK merilis video OJKway yang berisikan Program budaya 2017 dan Video Kaleidoskop program budaya OJKWay 2014-2017. Video tersebut di ke masing-masing Satuan Kerja membangun *awareness* mengenai program budaya yang baru di 2017 sebagai bagian dari media kampanye budaya.

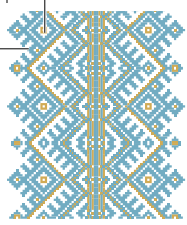
5. Pengembangan Sosial Media OJK

Pada triwulan I-2017 OJK terus menggunakan media sosial untuk mengkampanyekan nilai-nilai strategis OJK dan menyampaikan program transformasi budaya yang tengah dilaksanakan di OJK. Sampai akhir periode laporan, pengikut media sosial *Instagram* OJKWay sudah mencapai 2500 *followers*.

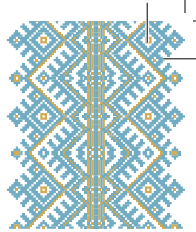


Akronim

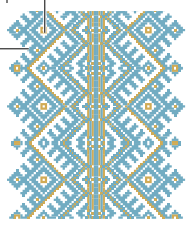
AAJI	: Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia
AAS	: Australia Awards Scholarship
AASI	: Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia
AAUI	: Asosiasi Asuransi Umum Indonesia
ABIF	: ASEAN Banking Integration Framework
ACIA	: ASEAN Comprehensive Investment Agreement
ACKS	: Aku Cinta Keuangan Syariah
ADK	: Anggota Dewan Komisioner
AFAS	: ASEAN Framework Agreement on Services
AHM	: Anugerah Media Humas
AIMRPK	: Audit Internal, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Kualitas
AML	: Anti Money Laundering
APERD	: Agen Penjual Efek Reksa Dana
APRA	: Australia Prudential Regulatory Authority
ASBANDA	: Asosiasi Bank Pembangunan Daerah
ASEAN	: Association of Southeast Asian Nations
ASIC	: Australia Securities and Investment Commission
ATIGA	: ASEAN Trade in Goods Agreement
ATISA	: ASEAN Trade In Services Agreement
ATM	: Automatic Teller Machine
ATMR	: Aset Tertimbang Menurut Risiko
AUTP	: Asuransi Usaha Tani Padi
BAE	: Biro Administrasi Efek
BAMPPPI	: Badan Arbitrase dan Mediasi Perusahaan Penjaminan Indonesia
BAPMI	: Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia
BAVI	: Badan Arbitrase Ventura Indonesia
BEI	: Bursa Efek Indonesia
BI	: Bank Indonesia
BIN	: Badan Intelijen Negara
BMAI	: Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia
BMDP	: Badan Mediasi Dana Pensiun
BMPP	: Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan
BMPPI	: Badan Mediasi Pembiayaan dan Pegadaian Indonesia
BMT	: Baitul Mal Wat Tamwil
BNP2TKI	: Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
BNSP	: Badan Nasional Sertifikasi Profesi
BOPO	: Beban Operasional Pendapatan Operasional
BPD	: Bank Pembangunan Daerah
BPKP	: Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
BPK-RI	: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
BPR	: Bank Perkreditan Rakyat
BRC	: BPD Regional Champion
BS	: Board Seminar
BSA	: Basic Saving Account
BUK	: Bank Umum Konvensional



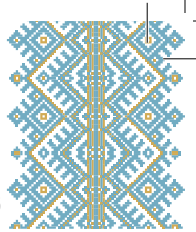
BUMD	: Badan Usaha Milik Daerah
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
BUS	: Bank Umum Syariah
CA	: Combined Assurance
CBRC	: China Banking Regulatory Commission
CDD	: Customer Due Diligence
CFT	: Combating the Financing of Terrorism
CKPN	: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai
CR	: Cash Ratio
CRM	: Customer Relationship Management
CTKI	: Calon Tenaga Kerja Indonesia
DCC	: Data Center Collocation
DES	: Daftar Efek Syariah
DFSA	: Dubai Financial Service Authority
DJPU	: Direktorat Jendral Pengelola Utang
DPD	: Dewan Perwakilan Daerah
DPK	: Dana Pihak Ketiga
DPLK	: Dana Pensiun Lembaga Keuangan
DPPK PPIP	: Dana Pensiun Pemberi Kerja Program Pensiun Iuran Pasti
DPPK PPMP	: Dana Pensiun Pemberi Kerja Program Pensiun Manfaat Pasti
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DRC	: Disaster Recovery Center
EBA-SP	: Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi
EDC	: Electronic Data Capture
Eduwan	: Edukasi Wartawan
ETP	: Electronic Trading Platform
FAPM	: Forum Akuntan Pasar Modal
FGD	: Focus Group Discussion
FKMM	: Forum Koordinasi Makroprudensial-Mikroprudensial
FKSSK	: Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan
FREKS	: Forum Riset Ekonomi dan Keuangan Syariah
FSA	: Financial Services Agency
FSAP	: Financial Sector Assessment Program
FSC	: Financial Service Commission
FSS	: Financial Supervisory Service
FTA	: Free Trade Agreement
GCG	: Good Corporate Governance
GeNTa PM	: Gerakan Nasional Cinta Pasar Modal
GIZ	: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
GMRA	: Global Master Repurchase Agreement
GRC	: Governance Risk and Compliance
HKHPM	: Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal
HMETD	: Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
ICMA	: International Capital Market Association
IDB	: Islamic Development Bank
IFAC	: International Federation of Accountant
IFAR	: Investasi Terhadap Total Aset
IFC	: International Finance Corporation



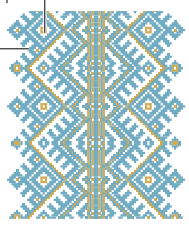
IFCC	: Integrated Financial Customer Care
IFN	: International Finance News
IFSB	: Islamic Financial Services Board
IGBF	: Indonesia Government Bond Futures
IHSG	: Indeks Harga Saham Gabungan
IJEPA	: Indonesia-Jepang Economic Partnership Agreement
IJK	: Industri Jasa Keuangan
IKI	: Indikator Kinerja Individual
IKNB/NBFI	: Industri Keuangan Non Bank/Non Bank Financial Industry
IKU/KPI	: Indikator Kerja Utama/Key Performance Indicators
ILM	: Iklan Layanan Masyarakat
IMF	: International Monetary Fund
INDOBeX	: Indonesia Bond Indexes
IOSCO	: International Organization of Securities Commission
IRR	: Integrated Risk Rating
IS	: Inisiatif Strategis
JARING	: Jangkau, Sinergi, dan Guideline
JII	: Jakarta Islamic Index
JPSK	: Jaring Pengaman Sistem Keuangan
KDK	: Keputusan Dewan Komisiner
Kemenaker	: Kementerian Ketenagakerjaan
Kemendagri	: Kementerian Dalam Negeri
Kemendesa	: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
KI	: Kredit Investasi
KIK	: Kontrak Investasi Kolektif
KK	: Kredit Konsumsi
KKB	: Kredit Kendaraan Bermotor
KKP	: Kementerian Kelautan dan Perikanan
KLHK	: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
KMK	: Kredit Modal Kerja
KOINKU	: Kompetisi Inklusi Keuangan
KOJK	: Kantor OJK
KPD	: Kontrak Pengelolaan Dana
KPJKS	: Komite Pengembangan Jasa Keuangan Syariah
KPMM/CAR	: Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum/Capital Adequacy Ratio
KPMR	: Kualitas Penerapan Manajemen Risiko
KPPU	: Komisi Pengawasan Persaingan Usaha
KPR	: Kredit Pemilikan Rumah
KR	: Kantro Regional
KSEI	: Kustodian Sentral Efek Indonesia
KUB	: Kelompok Usaha Bersama
KYC	: Know Your Customer
KYFC	: Know Your Financial Conglomerates
LAPS	: Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa
LAPSPI	: LAPS Perbankan
LAPSPI	: Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia
LDR	: Loan to Deposit Ratio
LJK	: Lembaga Jasa Keuangan



LJKNB	: Lembaga Jasa Keuangan Non Bank
LKM	: Lembaga Keuangan Mikro
LoI	: Letter of Intent
LoU	: Letter of Understanding
LPEI	: Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
LPHE	: Lembaga Penilaian Harga Efek
LPS	: Lembaga Penjamin Simpanan
LTV	: Loan to Value
MCRA	: Market Conduct Risk Assessment
MEA/AEC	: Masyarakat Ekonomi Asean/Asean Economic Community
MI	: Manajer Investasi
MIA	: Manajer IKU dan Anggaran
MoU	: Memorandum Of Understanding/Nota Kesepahaman
MPSJKI	: Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia
MSAK	: Manajemen Strategi, Anggaran dan Kinerja
NAB	: Nilai Aktiva Bersih
NIM	: Net Interest Margin
NPF	: Non Performing Finance
NPL	: Non-Performing Loan
OECD	: Organisation for Economic Co-operation and Development
OJK	: Otoritas Jasa Keuangan
ORP	: Outreach Program
OSINT	: Open Source Intelligence
PCE	: Pendidikan Calon Staf Edukasi dan Perlindungan Konsumen
PCP	: Pendidikan Calon Pejabat
PCS	: Pendidikan Calon Staf
PCT	: Pendidikan Calon Pegawai Tata Usaha
PDB	: Produk Domestik Bruto
PDK	: Peraturan Dewan Komisiner
PDN	: Posisi Devisa Neto
PE	: Perusahaan Efek
PELAKU	: Pusat Edukasi, Layanan Konsumen dan Akses Keuangan UMKM
PESTEL	: Politic, Economy, Social, Technology, Environment, and Law
PI	: Penasihat Investasi
PKR	: Pasar Keuangan Rakyat
PM	: Pasar Modal
PMK	: Protokol Manajemen Krisis
POJK	: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
POKTAN	: Kelompok Tani
PPF	: Program Pendidikan Formal
PPG	: Program Pengendalian Gratifikasi
PPK	: Program Pengembangan Kompetensi
PPKB	: Program Pengembangan Kepemimpinan Berjenjang
PPKD	: Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah
PPL	: Program Pendidikan Lanjutan
PPP	: Program Penugasan Pegawai
PSP	: Pemegang Saham Pengendali
PUB	: Penawaran Umum Berkelanjutan



PUJK	: Pelaku Usaha Jasa Keuangan
Rakerstra	: Rapat Kerja Strategis
RBS	: Risk Based Supervisory
RCEP	: Regional Comprehensive Economic Partnership
RDK	: Rapat Dewan Komisioner
REPO	: Repurchase Agreement
RGS	: Risk and Governance Summit
RKA	: Rencana Kerja Anggaran
ROA	: Return on Assets
ROE	: Return on Equity
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RSS	: Rumah Sehat Sejahtera
Satgas	: Satuan Tugas
SBN	: Surat Berharga Negara
SBSN	: Surat Berharga Syariah Negara
SDM	: Sumber Daya Manusia
SEDK	: Surat Edaran Dewan Komisioner
SEOJK	: Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan
SIAI	: Sistem Informasi Audit Internal
SID/DIS	: Sistem Informasi Debitur/Debtor Information System
SIELOG	: Sistem Informasi Ekspedisi Logistik
SIMARIO	: Sistem Informasi Manajemen Risiko
SIMFOSIA	: Sistem Informasi Sumber Daya Manusia
SiMOLEK	: Mobil Literasi Keuangan
SimPel	: Simpanan Pelajar
SIMPEL	: Sistem Pengelolaan Kinerja
SIPMI	: Sistem Informasi Pelaporan Market Intelijen
SIPP	: Sistem Informasi Perusahaan Pembiayaan
SISKA	: Sistem Aplikasi Keuangan OJK
SISPANDI	: Sistem Informasi Pengelolaan Kendaraan Dinas
SISPUAS	: Sistem Informasi Penatausahaan Aset
SJK	: Sektor Jasa Keuangan
SKM	: Sahat Keuangan Maritim
SKP	: Satuan Kredit Profesi
SKPD	: Satuan Kerja Perangkat Daerah
SLA	: Service Level Agreement
SMES	: Sederhana, Mudah, Ekonomis, dan Segera
SNKI	: Strategis Nasional Keuangan Inklusif
SNLKI	: Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia
SPE	: Sistem Pelaporan Emiten
SPP/WBS OJK	: Sistem Pelaporan Pelanggaran OJK/Whistle Blowing System OJK
SRO	: Self Regulatory Organization
STP	: Straight Through Processing
STTD	: Surat Tanda Terdaftar
SUN	: Surat Utang Negara
SWOT	: Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats
TKHT	: Tunjangan Kesehatan Hari Tua
TKI	: Tenaga Kerja Indonesia



TOT	: Training of Trainers
TPHT	: Tunjangan Perumahan Hari Tua
TPI	: Tempat Pelelangan Ikan
UMKM/MSME	: Usaha Mikro, Kecil dan Menengah/Micro, Small, and Medium Enterprises
UU	: Undang-Undang
UU LKM	: Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro
UU OJK	: Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan
UUS	: Unit Usaha Syariah
WAPERD	: Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana
WBS	: Whistle Blowing System
WCFSL	: Working Committee on Financial Services Liberalisation
WMI	: Wakil Manajer Investasi
WPEE	: Wakil Penjamin Emisi Efek
WPPE	: Wakil Perantara Pedagang Efek
XBRL	: Extensible Business Reporting Language
YKP OJK	: Yayasan Kesejahteraan Pekerja
yoy	: year over year
ytd	: year to date
ZMET	: Zaltman Metaphor Elicitation Technique